

Milik Depdikbud
Tidak diperdagangkan

TOKOH-TOKOH PEMIKIR PAHAM KEBANGSAAN

Tim Penulis :

Tashadi
Suratmin
Darto Harnoko
Suhatno

Penyunting :

Anhar Gonggong

Koreksi Naskah :

Soejanto

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
JAKARTA
1993

Tokoh-tokoh Pemikir Paham Kebangsaan

Tim Penulis : Tashadi
Suratmin
Darto Harnoko
Suhatno

Penyunting : Anhar Gonggong

Koreksi Naskah : Soejanto

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang

Diterbitkan oleh: Proyek Inventarisasi dan Nokumentasi Sejarah
Nasional

Jakarta 1993

Edisi 1993

Dicetak oleh CV. MANGGALA BHAKTI Jakarta - Indonesia.

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

Karya-karya sejarah dengan pelbagai aspek yang dikaji dan ditulis melalui Projek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (IDSN) dimaksudkan untuk disebarluaskan ke tengah-tengah masyarakat. Adapun tujuannya ialah untuk memberikan bahan informasi kesejarahan kepada masyarakat. Dengan demikian diharapkan masyarakat akan memperoleh serta dapat menambah pengetahuannya tentang sejarah, baik yang menyangkut akumulasi fakta maupun proses terjadinya peristiwa. Di samping itu para pembaca juga akan memperoleh nilai-nilai yang terungkap dari rangkaian peristiwa yang digambarkan dalam karya-karya sejarah itu.

Kami menyadari bahwa buku karya-karya Projek IDSN ini tentu tidak luput dari pelbagai kelemahan bahkan mungkin kesalahan-kesalahan. Namun demikian kami ingin meyakinkan kepada pembaca bahwa kelemahan atau kesalahan itu pastilah tidak disengaja.

Berdasarkan keterangan di atas, kami sangat berterima kasih kepada pembaca jika sekiranya bersedia untuk memberikan kritik-kritik terhadap karya-karya Projek IDSN ini. Kritik-kritik itu pasti akan sangat berguna bagi perbaikan dari karya-karya projek ini di kemudian hari.

Kepada penulis yang telah menyelesaikan tugasnya dan kepada semua pihak yang ikut serta, baik langsung maupun tidak langsung, dalam mewujudkan karya-karya Proyek IDSN ini sebagaimana adanya di tangan pembaca, kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, Agustus 1993
Direktur Jenderal Kebudayaan



Prof. Dr. Edi Sedyawati
NIP. 130 202 962

PENGANTAR

Buku *Tokoh-tokoh Pemikir Paham Kebangsaan* merupakan salah satu hasil pelaksanaan kegiatan penelitian Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1992/1993.

Buku ini memuat uraian tentang pemikiran tiga orang tokoh (Moh Hatta, HOS. Tjokroaminoto, dan IJ. Kasimo) tentang paham kebangsaan di Indonesia. Dalam menguraikan hasil pemikiran tokoh-tokoh tersebut diuraikan pula latar kehidupannya serta pengaruh dan tantangan-tantangan yang mereka hadapi.

Penelitian dan penulisan Tokoh-tokoh Pemikiran Paham Kebangsaan dimaksudkan untuk menginventarisasi konsepsi-konsepsi pahaman kebangsaan dari berbagai pemikir Indonesia sekaligus memasyarakatkannya. Penelitian ini akan dilanjutkan secara bertahap oleh Proyek IDSN.

Dengan diterbitkannya buku ini diharapkan dapat memperkaya dan memperkuat wawasan kebangsaan, memberi informasi yang memadai bagi masyarakat peminatnya serta memberi petunjuk bagi kajian selanjutnya.

Jakarta, Juli 1993

Pemimpin Proyek Inventarisasi dan
Dokumentasi Sejarah Nasional



Sri Sutjiatiningsih
NIP. 130 422 397

DAFTAR ISI

	Halaman
Sambutan Direktur Jenderal Kebudayaan	iii
Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Bab I Pendahuluan	1
Bab II Mohammad Hatta dan Pemikirannya.	6
2.1 Faktor yang berpengaruh	6
2.2 Moh. Hatta dan Pemikirannya	13
2.3 Pengaruh dan Tantangan	57
Bab III HOS. Tjokroaminoto dan Pemikirannya	65
3.1 Latar Sejarah Kehidupannya	65
3.2 HOS. Tjokroaminoto dan Pemikirannya	73
3.3 Pengaruh dan Tantangan	138
Bab IV IJ. Kasimo dan Pemikirannya	156
4.1 Latar Sejarah Kehidupannya	156
4.2 IJ. Kasimo dan Pemikirannya	180
4.3 Pengaruh dan Tantangan	219
Bab V Penutup.	225
Daftar Pustaka	231

BAB I PENDAHULUAN

Kehadiran dan berdirinya berbagai jenis sekolah baik swasta maupun pemerintah di masa Hindia Belanda mempunyai dampak positif yaitu munculnya tenaga-tenaga terdidik ataupun tenaga setengah terdidik dalam lapisan sosial masyarakat Indonesia. Kehadiran mereka itu sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Kolonial Belanda akan tenaga terdidik baik di pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan maupun dalam pemerintahan, namun ternyata mereka itu kemudian lebih dikenal sebagai golongan elit yang pada gilirannya menjadi penggerak organisasi modern yang tumbuh dan berkembang dalam era pergerakan nasional, atau dengan kata lain sebagai salah satu perwujudan dari era kebangkitan nasional.

Pada mulanya sebagian dari elit terpelajar ini memasuki instansi-instansi kolonial yang tersedia, namun dalam perkembangan kemudian menunjukkan bahwa sebagian dari mereka memilih berada di luar instansi. Dalam konsep sejarah politik mereka disebut non-kooperasi. Terlepas dari pilihan profesi/pekerjaan (dalam instansi kolonial atau di luarnya), yang pasti beberapa dari mereka muncul ke permukaan, baik karena terikat kedudukannya pada suatu organisasi (*top leader*) maupun karena konsepsi-konsepsi kebangsaan.

Paham kebangsaan memang bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Sejumlah ahli telah menjabarkan konsepsi-konsepsi

mereka. Para pembicara dalam rapat-rapat Badan Penyelidik dan PPKI banyak mengutip dan menyampaikan konsepsi dari tokoh-tokoh paham kebangsaan. Ernest Renan berpendapat bahwa paham kebangsaan adalah keinginan untuk bersatu, sedangkan Soekarno mendasarkannya pada teori Renan tersebut, dan menyatakan bahwa, "bangsa tidak ditentukan oleh ras atau bahasa atau agama ataupun pembatasan wilayah. Ia adalah jiwa suatu pandangan yang fundamental, yang lahir dari kesamaan sejarah dan dari suatu kemauan, suatu keinginan hidup menjadi satu".¹ Rupert Emerson menyebutkan dua aspek kebangsaan, yaitu perjalanan latar sejarah yang sama dan tujuan yang sama. Kamus Besar Bahasa Indonesia,² menjelaskan bahwa kebangsaan mempunyai makna (1) ciri-ciri yang menandai golongan bangsa, (2) mengenai yang bertalian dengan bangsa, (3) kedudukan (sifat-sifat) sebagai orang mulia (bangsawan), dan 4) kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara.

Sementara itu sejumlah tokoh Pergerakan Indonesia juga memiliki konsep pemikiran tertentu mengenai paham kebangsaan. Tokoh-tokoh ini ada yang terpengaruh dengan ideologi atau aliran tertentu, atau terpengaruh oleh adanya perbedaan tingkat kedudukan mereka. Misalnya ada yang menjadi tokoh partai politik atau organisasi sosial/keagamaan tertentu seperti Ir. Soekarno, HOS. Tjokroaminoto, IJ. Kasimo dan ada pula yang sebagian kemudian menjadi pejabat negara seperti Drs. Moh Hatta, Sutan Syahrir, atau ada pula yang tetap menjadi tokoh lokal seperti Daud Beureuh, Drs. GSSJ. Ratulangi, KH. Abdul Kahar Mudzakkir.

Khususnya penelitian kali ini (tahun 1992/1993) baru meliputi tiga aspek yaitu tokoh proklamator diwakili Drs. Moh Hatta, tokoh pemikiran politik diwakili HOS. Tjokroaminoto, dan tokoh pemikiran agama diwakili IJ. Kasimo.

Materi-materi yang diungkapkan dalam penelitian ini dapat dimasukkan dalam kategori sejarah intelektual. Sejarah intelektual mempunyai pengertian data apa saja yang ditinggalkan oleh aktivitas pikiran-pikiran manusia. Arthur O Lovejoy

dalam tulisannya yang berjudul *The Greet Chain of Being: A Study of The History of Idea*, mengatakan bahwa sejarah intelektual tidak lain adalah *cluster of idea* atau pengelompokan ide-ide. Sejarah intelektual bukan merupakan ringkasan atau sintesis dari data, tetapi sebenarnya mencoba mencari kembali dan mengerti persebaran ide-ide mereka pada masyarakat tertentu, dengan demikian perlu dilihat elemen-elemen yang terpilih dari beberapa kelompok ide atau paham yang mengarah ke paham kebangsaan.

Di Indonesia, penelitian sejarah intelektual ini sebenarnya masih merupakan *terra in coqnita*, maksudnya masih belum banyak dikaji oleh para sejarahwan, karena itu dalam rangka pengembangan khasanah Sejarah Inonesia, penelitian ini sangat penting terutama menyangkut tokoh-tokoh atau pemikiran-pemikiran Indonesia yang mengarah ke paham kbangsaan yang dapat memberikan dampak positif bagi persatuan dan kesatuan bangsa.

Adapun ruang lingkup materi penelitian ini meliputi lima bab. Bab I Pendahuluan, berisi uraian tentang dasar pemikiran dan garis besar isi. Bab II Drs. Moh Hatta dan Pemikirannya, berisi uraian mengenai (a) Latar Sejarah Kehidupan, memuat uraian sekilas sejarah kehidupan Muhammad Hatta baik tentang keadaan keluarganya maupun kehidupannya di masa kanak-kanak, masa sekolah dan masa dewasa, (b) Muhammad Hatta dan Pemikirnya memuat uraian tentang awal perkembangan pemikiran dan proses perkembangan pemikiran Mohammad Hatta, dan (c) Pengaruh dan Tantangan, memuat uraian tentang pengaruh-pengaruh pemikiran Mohammad Hatta dan tantangan yang timbul terhadap adanya pemikiran Mohammad Hatta tersebut. Bab III HOS. Tjokroaminoto dan Pemikirannya, berisi uraian mengenai (a) Latar Sejarah Kehidupan, memuat uraian tentang sekilas sejarah kehidupan HOS. Tjokroaminoto baik tentang lingkungan keluarganya maupun kehidupannya di masa kanak-kana, masa sekolah dan masa dewasa, (b) HOS. Tjokroaminoto dan pemikirannya, memuat uraian tentang awal perkembangan pemikiran dan proses perkembangan pemikiran HOS. Tjokroaminoto, (c) Pengaruh dan Tantangan, memuat uraian tentang

pengaruh-pengaruh pemikiran HOS. Tjokroaminoto dan tantangan-tantangan yang timbul terhadap adanya pemikiran HOS. Tjokroaminoto tersebut. Bab IV IJ. Kasimo dan Pemikirannya, berisi uraian mengenai (a) Latar Sejarah Kehidupan, memuat uraian tentang sekilas sejarah kehidupan IJ. Kasimo baik tentang lingkungan keluarganya maupun kehidupannya di masa kanak-kanak, masa sekolah dan masa dewasa, (b) IJ. Kasimo dan pemikirannya, berisi uraian tentang awal perkembangan pemikiran dan proses perkembangan pemikiran IJ. Kasimo, dan (c) Pengaruh dan tantangan, berisi uraian tentang pengaruh-pengaruh pemikiran IJ. Kasimo dan tantangan-tantangan yang timbul terhadap adanya pemikiran IJ. Kasimo tersebut. Bab V Penutup, merupakan kesimpulan-kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini.

CATATAN

1. John D. Legger, *Soekarno Sebuah Biografi Politik*, Penerbit Sinar Harapan, Cetakan I. Jakarta, 1985, hal 98–99, lihat juga, Nasionlisme, Islam dan Marxisme Dan Di Bawah Bendera Revolusi.
2. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, 1988, halaman 76–77.

BAB II

DRS. MOHAMMAD HATTA DAN PEMIKIRANNYA

2.1 *Faktor Yang Berpengaruh*

Dalam dunia politik, perbedaan pandangan merupakan hal yang biasa, tetapi peranan kebangsaan memang harus terkait dengan tanah airnya yang bersatu dan yang menginginkan kemerdekaan. Telah banyak waktu yang dicurahkan untuk memajukan kesatuan, tetapi masih banyak pula di antara kita yang menyebut dirinya nasionalis Indonesia, ternyata dalam pergaulan sosial dan semangatnya masih sangat terikat pada daerah dan tempat kelahiran mereka.

Ketika Mohammad Hatta dilahirkan pada 12 Agustus 1902 di Bukittinggi, Sumatera Barat, Indonesia belum muncul sebagai suatu kesatuan politik. Wilayah tersebut telah mengalami lebih dari setengah abad berada di bawah kekuasaan Belanda, bahkan pada permulaan abad ke-20. Bukittinggi yang pernah menjadi benteng kaum Paderi menjadi pusat pemerintahan Belanda dan benteng militernya disebut *Fort de Kock*.¹ Walaupun demikian Bukittinggi tetap merupakan fokus kehidupan Minangkabau, sekalipun kehadiran Belanda cukup kuat di kota itu. Pengaruh suku dan Islam yang kuat mengena pada *kaum muda* sangat menguntungkan bagi penanaman jiwa nasionalisme di daerah tersebut.

Masalah pendidikan yang dihadapi oleh keluarga Hatta, apakah Hatta harus disekolahkan ke surau tradisional atau dalam pendidikan modern Belanda mencerminkan dilema yang

dihadapi oleh banyak orang tua di Minangkabau dalam peralihan abad ke-20. Dalam kasus Hatta, persoalannya cukup menyulitkan. Di satu sisi ia diharapkan untuk menjalankan tradisi keagamaan keluarga ayahnya, karena kakek Hatta telah mendirikan sebuah surau di Batu Hampar, sebuah desa kira-kira 24 km dari Kota Bukittinggi. Surau Batu Hampar sendiri merupakan sebuah komunikasi keagamaan, suatu tarekat sufi yang tujuan awalnya ialah untuk menuntun pengikutnya menurut jalur agar lebih dekat dengan Tuhan, tetapi sebenarnya surau tersebut juga berfungsi sebagai mengimbangi pengaruh barat dan mencegah lembaga pendidikan dan sosial yang didukung oleh Belanda yang sedang menggerogoti kedudukan Islam di daerah tersebut.

Dalam memoarnya yang berjudul *Potrail of a Patriot*, Hatta mengatakan ketika ia masih kanak-kanak ada kepercayaan di kalangan rakyat Minangkabau, jika seorang anak lelaki menyerupai ayahnya, salah seorang di antaranya akan kalah dan meninggal cepat.² Tak diragukan lagi, sebagai anak lelaki seorang ulama dan cucu seorang pemimpin tarekat yang terkenal, hal itu tetap berpengaruh mendalam dalam kehidupan Hatta, bahwa dalam dirinya ada semacam perasaan wajib untuk memegang teguh tradisi keagamaan keluarga.

Kematian ayahnya menarik Hatta untuk menjauh dari pengaruh komunitas tarekat dan masuk ke dalam lingkungan perkotaan modern Bukittinggi, tempat keluarga ibunya menetap dan bekerja. Ibunya menikah lagi dengan Haji Ning, seorang kenalan dagang kakek Hatta dari pihak ibu. Akhirnya Hatta tumbuh di lingkungan keluarga bisnis, persoalan komersial merupakan perhatian utama. Nenek Hatta memainkan peranan penting dalam mengasuhnya. Nenek Hatta adalah seorang wanita yang memiliki kemauan luar biasa. Semasa muda ia mendukung gerakan Padri. Ia selalu memakai baju hitam dan kerudung putih sebagai baju muslimatnya. Keberanian dan ketegasannya merupakan legenda masyarakat di daerah tersebut.³

Di kalangan keluarganya diakui bahwa Hatta lebih dekat memenuhi model kesempurnaan ibunya karena sang ibu mungkin di dalam diri Hatta merupakan cermin dari kekuatan dan

ketegasannya sendiri. Dalam memoarnya, Hatta tidak memuji neneknya walaupun sifat-sifat sang nenek sangat mirip dengan sifat Hatta. Hatta berusaha keras untuk mengurangi sikap perfeksionismenya dengan menganut prinsip-prinsip demokratik. Sifat ini diperoleh Hatta melalui kakek dari garis ibu. Dalam memoarnya Hatta mengatakan bahwa ia memperlakukan semua buruhnya dan bahkan budaknya secara sederajat.⁴ Mungkin demokrasi yang diangkat oleh penghulu Minangkabau merupakan reaksi terhadap cara-cara otokratis dari kaum wanita mereka.

Sejak usia tujuh tahun, Hatta melewatkan waktu-waktu singkat di Surau Batu Ampar. Pada waktu itu pamannya yang bernama Seh Arsad menjabat sebagai pemimpin setelah kakeknya meninggal. Seh Arsad mendesak ibu Hatta, agar Hatta disekolahkan agama di Mekkah. Ibu dan adiknya sepenuhnya menolak, sedangkan guru agama Hatta di Bukittinggi, Seh M. Jamil Jembek, mempunyai perspektif yang berbeda tentang pendidikan barat dibanding Seh Arsad. Sebagai kaum modernis,⁵ ia mendorong kaum muslimin supaya belajar dari Barat agar mampu melawan tantangan dominasi Eropa terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendekatan segar yang merasangsang dari kaum modernis mengirimkan para pemuda muslim di daerah tersebut, tetapi bagi Hatta pribadi, ada unsur konflik di dalam sudut pandang modernis. Kaum modernis curiga bahwa tuntutan yang diberikan oleh tarekat sufi bertentangan dengan hukum Islam bahwa seseorang harus mempunyai hubungan langsung dengan Allah, tetapi Hatta sebagai anggota keluarga terpandang karena bimbingan spritualnya bagi komunitas surat tidak dapat dengan mudah mengecam pimpinan tarekat. Dilema keagamaan ini mungkin berpengaruh terhadap keputusannya untuk terlibat dalam persaudaraan nasionalis lebih besar ketimbang dalam persaudaraan Islam dan mungkin menjelaskannya untuk mengidentifikasi diri sepenuhnya dengan partai-partai politik Islam modernis di masa depan, dan sebagian hidupnya dalam hal agama tetap netral dalam politik.

Dalam memoarnya, ia mengatakan kaum tradisional yang terpelajar akan lebih memahami kebutuhan rakyat dibanding kaum modernis kota. Lebih lanjut ia mengatakan dengan penuh keyakinan bahwa sosialisme merupakan prinsip dasar dalam Islam.⁶ Hatta mungkin berusaha meyakinkan rekannya sesama muslim bahwa sosialismenya tidak hanya berkembang dari Marx.

Sekalipun ia menghormati dan memberikan perhatian terhadap Seh Arsad dan komunitas Batu Ampar, ternyata Hatta terlalu kuat terpengaruh oleh lingkungan kota modern. Walaupun demikian masuknya ia ke sekolah dasar Belanda dihadapkan dengan konflik rasial. Pada pidato pembelaannya tahun 1929, Hatta ingat bahwa sejak usia sekolah dasar ia menyadari pertentangan yang tajam antara kaum kulit putih dan coklat, antara yang kuasa dan yang dikuasai.⁷

Selanjutnya Hatta menyatakan kepada pengadilan betapa hinanya dirasakan oleh seorang Indonesia ketika ia dianggap sebagai kelas dua dan yang paling menyakitkan hati adalah dalam kurikulum sekolah Belanda bahwa anak-anak pribumi diharuskan untuk mengecam para pejuang kemerdekaan. Hatta dengan keras mempertahankan para pemimpin rakyat.⁸

Kebencian anti Belanda meluap menjadi penentangan terbuka di Minangkabau pada tahun 1908 di sebuah desa kecil di Kemang dekat Bukittinggi yang diwarnai protes atas pajak yang tidak sah yang bertentangan dengan **Plakat Panjang**. Waktu itu Hatta baru berumur enam tahun. Pemberontakan Kemang tersebut menggoreskan kesan tentang tirani Belanda di dalam ingatannya, karena memakan korban ratusan rakyat Minangkabau.

Hatta menyelesaikan pendidikan dasarnya di sekolah Eropa di Padang yang hanya sedikit menerima murid Minangkabau. Dalam memoarnya ia mengatakan, mencari pekerjaan dan diterima sebagai asisten pos atau melanjutkan studi. Akhirnya atas bujukan ibunya ia bersekolah di MULO selama tiga

tahun.⁹ Suatu keputusan yang cukup bijaksana karena di sekolah MULO terbukti merupakan saat-saat tumbuhnya minat dan kebangkitan nasional. Hatta dapat berperanserta dalam kegiatan ekstra kurikuler. Tahun 1916 merupakan tahun momentum dalam perkembangan gerakan nasional di Hindia Belanda. Sarekat Islam timbul secara besar. Dorongan semangat nasionalis di Hindia pada saat itu merangsang pembentukan kelompok-kelompok pemuda yang aktif secara politis. Hatta mengikuti kampanye siswa di Padang pada bulan Desember 1917. Nazir Pamuntjak, seorang pelajar SMA Minangkabau, memperkenalkan organisasi pemuda yang bernama *Jong Sumatranen Bond* yang baru terbentuk di Batavia. Baik Hatta maupun Bahder diperkenalkan masing-masing sebagai bendahara dan sekretaris, sekaligus aktifis terkemuka di cabang Padang. *Jong Sumatranen Bond* menerima dukungan moral dan keuangan yang cukup besar dari masyarakat setempat, terutama dari seorang ulama muda bernama Haji Abdullah Ahmad dan Engku Taher Marah Sutan.

Dalam perkembangannya Hatta sebagai seorang anggota eksekutif *Jong Sumatranen Bond*. Ia memperoleh kesan bahwa pelajar aktifis seperti dirinya dianggap sebagai harapan bangsa¹⁰ Pada bulan November 1918 persis ketika perang di Eropa menjelang berakhir, Gubernur Jenderal Koloni JP Van Limburg Stirum menyampaikan pengumuman yang mengejutkan bahwa *Volksraad* akan menyanggah kekuasaan yang dijalankan oleh menteri jajahan dan Pemerintah Belanda dalam kaitannya dengan Hindia. Dengan kata lain *Volksraad* akan menjadi parlemen yang sesungguhnya.

Orang Indonesia waktu itu cukup gembira, tetapi kegembiraan itu hanya sebentar, karena kudeta yang dilakukan oleh sayap kiri di Belanda itu gagal. Kekuasaan dengan cepat diserahkan ke tangan Partai Anti Revolusioner, sebuah kelompok ekstrim sayap kanan yang pemimpinya waktu itu bernama Dr. H. Colyn, seorang anggota parlemen Belanda yang dengan keras menentang pembentukan *Volksraad*. Colyn berpendapat bahwa kaum pribumi secara ekonomis terlalu lemah untuk memiliki tanggung jawab politik. Tidak ada pengakuan bahwa

kelemahan perekonomian pribumi merupakan akibat langsung dari kebijakan kolonial.

Hatta merasa kecewa. Kekecewaan itu juga dirasakan oleh orang Indonesia dalam kebangunan penarikan kembali "Janji November" gubernur jenderal, bahwa *Volksraad* akan menyanggah kekuasaan eksekutif. Sejak saat itu kaum nasional yang lebih radikal mulai memisahkan diri dari *Volksraad*, karena dewan tersebut tidak menghasilkan apa-apa dalam usaha berpemerintahan sendiri.

Dalam bulan Mei 1919 Hatta lulus dari sekolah *Meer Uitgebroid Lager Onderwijs* (MULO). Usianya waktu itu hampir 17 tahun, suatu usia yang di alam Minangkabau akan meninggalkan kenyamanan rumahnya untuk pergi ke rantau, Hatta memutuskan untuk melamar masuk ke *Prins Hendrikschool*, sebuah SMA yang mengkhususkan pada mata pelajaran dagang. Dalam memoarnya, ia mengatakan bahwa pilihan itu dilakukan bukan demi kepentingan dagang pribadi, tetapi untuk menambah sentimen kebangsaan. Hatta memiliki bakat alamiah dalam persoalan keuangan. Hal itu diakui oleh rekan-rekannya, karena setibanya di Jawa, ia diberi tugas sebagai bendahara *Jong Sumatranen Bond* cabang pusat di Batavia. Organisasi tersebut berhasil mengumpulkan uang sampai 1.000 gulden yang kemudian dipakai untuk menerbitkan majalan *Jong Sumatra*.¹¹

Hatta membangun reputasi sebagai seorang organisator yang efisien. Reputasi ini mendapat perhatian langsung dari para pemimpin Serekat Islam yang orang Minangkabau yaitu Abdul Muis dan Haji Agus Salim. Hatta memang sudah lama menjadi pengagum Haji Agus Salim walaupun kemudian dalam banyak hal Hatta tidak setuju dengannya. Dalam memoarnya, pertemuan Hatta dan Haji Agus Salim pertama kali pada bulan Februari 1920 yang diawali dengan diskusi tentang persoalan-persoalan bangsa dan tujuan-tujuan politiknya. Pemikiran-pemikiran tentang kebangsaan menjadi semakin luas pada diri Hatta.¹²

Pengkotakan di kalangan pemuda nasionalis Hindia ke dalam kelompok-kelompok suku seperti *Jong Java*, *Jong*

Minahasa, Jong Ambon, Jong Sumatranen Bond semakin tampak di Batavia, memperingatkan Hatta dan Bahder Djohan akan perpecahan kedaerahan. Mereka berusaha mencari cara untuk membuka pengkotaan suku yang ketat ini, memutuskan untuk menerbitkan sebuah majalah bagi seluruh kepulauan dalam bahasa Melayu. Bahasa ini lebih demokratis dari bahasa Jawa karena di dalamnya tidak terbentuk jenjang sosial. Ide ini akhirnya tetap menjadi impian, karena kedua pemuda itu terlalu sibuk belajar.

Walaupun tinggal di penginapan, di Batavia Hatta di bawah asuhan pamannya yang bernama Ayub Rais. Ayub Rais juga seorang anti kolonialis yang bersemangat dan mencurahkan tenaganya ke dunia bisnis. Pada waktu Batavia didominasi oleh pengusaha Eropa dan Cina, Rais ingin membuktikan bahwa pengusaha pribumi dapat bersaing dengan orang asing. Suatu semangat tentang ekonomi yang segera menyita perhatian Hatta dan menumbuhkan kekagumannya. Rais mendorong Hatta supaya berpikir secara serius melanjutkan kuliah dagang di *Rotterdamse Handelhogeschool*. Ia juga mendorong Hatta untuk mempelajari sejarah sosialisme. Hatta mulai membaca buku karya HP. Quack berjudul *De Socialism*. Buku ini membuka mata Hatta terhadap fakta bahwa suatu tipe sosialisme yang telah ada berabad-abad, bahwa sebelum Masehi dan meskipun pandangan tentang sosialisme di zaman kuno berbeda dengan pandangan yang diajukan pada abad ke-18, pada dasarnya banyak yang sama terutama mengenai persoalan yang kaya dan miskin, *the haves dan the have not* di masyarakat.¹³

Ketika lulus dari *Prins Hendrikschool*, ia tidak mempunyai pikiran masuk ke *Rotterdam Handelhogeschool* karena pamannya bangkrut. Keinginan pamannya untuk tidak mengubah rencananya ditolak Hatta. Karena nilai rapornya bagus, maka Hatta mendapat biasiswa dari swasta untuk melanjutkan studinya ke Eropa.

2.2 *Moh Hatta dan Pemikirannya*

2.2.1 *Perkembangan Pemikiran Kebangsaan Hatta*

Pada 3 Agustus 1921, sembilan hari menjelang ulang tahunnya yang ke sembilanbelas, Hatta berlayar dari Emmahaven, pelabuhan Padang. Ia diantar oleh keluarga dan rombongan dari *Jong Sumatranen Bond*. Tekadnya untuk melanjutkan studi ke Eropa terlihat dalam guratan mukanya yang penuh semangat. Tujuan utamanya adalah Universitas Leiden.¹⁵

Untuk daerah perantauan, Hatta tidak pernah menyesali fakta bahwa ia lebih memilih Eropa dari pada Timur Tengah. Persekutuan yang lebih bebas antara ras, menurut Hatta mempunyai kerugian psikologis bagi pelajar yang berjuang untuk mengusir kekuasaan kolonial. Suasana penjajahan tidak sepenuhnya hilang dari lingkungan Hatta. Ia pindah ke sebuah penginapan yang didirikan di Den Haag. Tempat tersebut memang diserahkan oleh kementerian jajahan untuk menampung mahasiswa asing. Ternyata tempat tersebut dipakai untuk pemantauan mahasiswa yang sekolah di negeri tersebut. Hatta tidak mau hidup di bawah bayang-bayang orang Belanda/pemerintah Belanda. Kemudian ia pindah ke penginapan yang dekat dengan *Rotterdamse Handelshogeschool*. Dari sini nampak Hatta terkait erat dengan kelompok-kelompok Marxis sekalipun didorong oleh tujuan-tujuan nasionalis.

Salah seorang kawan dari Minangkabau, Nazir Pamuntjak, mendesak Hatta agar bergabung dengan perhimpunan mahasiswa asing, yaitu *Indische Vereeniging* (Perhimpunan Indonesia Hindia).¹⁶ Perhimpunan ini merupakan perluasan dari kelompok pemuda kedaerahan, tetapi tanpa pemisahan latar etnis mereka. Nazir Pamutjak memperingatkan Hatta agar tidak menggunakan istilah *inlander* yang bersifat merendahkan.

Nama Indonesia berkembang dari kelas indologi yang ditawarkan Universitas Leiden untuk memupuk keperluan Hindia sebagai suatu istilah yang digunakan untuk melukiskan kepulauan Asia Tenggara. Konsep "negara bangsa" (*nations state*) dengan perbatasan yang ditetapkan oleh perjanjian inter-

nasional sebagaimana komentar Hatta, "Perjanjian Versailles hanya dapat membawa perasaan baru tentang kebangsaan". Rasa kebangsaan Hatta sendiri dirangsang saat ia tinggal di Eropa. Akhirnya ia terpaksa menyampingkan pekerjaan akademik demi kegiatan nasional, tetapi ia berjuang untuk sekurangnya memperoleh gelar *doctorandus*.

Dalam iklim yang ada di Eropa pada tahun 1921 kebanyakan mahasiswa terpaksa berpaling pada istilah-istilah marxisme, heninisme, terutama kalau mereka secara serius merenungkan perubahan sosial dan politik. Keyakinan Marx bahwa suatu masyarakat yang tertindas secara ekonomi, mengemban Hatta karena sentimen-sentimen ini sesuai dengan cita-citanya. Ia juga menggunakan ungkapan Marx, bahwa buruh menghasilkan barang-barang yang mewah-mewah bagi kaum kaya, tetapi bagi buruh menghasilkan kemelaratan.¹⁷

Hatta mengomentari rendahnya upah yang dibayarkan oleh perusahaan Belanda bagi pegawai pribumi. Harga tenaga kerja merupakan bagian terbesar yang disalahgunakan oleh kaum penindas Eropa. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa perjuangan kolonial adalah eksploitasi kaum kulit putih terhadap rakyat kulit berwarna. Sistem sel Lenin dan metode umum untuk menggerogoti kemapanan menjelang revolusi juga berkesan di hati Hatta. Metode ini merupakan format yang dapat dipakai demi tujuan-tujuan politik sepanjang hidupnya. Bacaan Hatta yaitu buku Quarch, *De Socialists*, telah memberi landasan luas untuk menilai kecenderungan-kecenderungan sosialis di sekitar serta menelusuri asal-usulnya. Tentu saja konsep-konsep Marx harus diadaptasi supaya sesuai untuk melihat masyarakat petani seperti di Hindia. Struktur kelas juga tidak identik di seluruh kelompok etnik Indonesia. Di Jawa ada kesenjangan sosial yang besar antara kaum elit dengan kelas yang lebih rendah dan tampak suatu sistem yang feodal. Bagi Hatta tatanan feodal menjadi semakin tidak fleksibel dan kurang bertanggung-jawab karena ditopang oleh kekuatan militer Belanda.

Tahun 1922 perhimpunan mahasiswa berubah nama menjadi *Indonesische Vereeniging* yang mencerminkan persepsi

mahasiswa atas kepulauan tersebut. Perhimpunan ini memainkan peranan penting dalam mengimbangi pengaruh pro-Eropa dan menjadi realitas yang ada di tanah air mereka yang dijajah, supaya tetap hidup di benak mahasiswa. Perhimpunan mahasiswa penting bagi Hatta pribadi karena sebagai tempat melatih pikiran-pikiran Hatta agar tidak terisolasi.

Flat Subardjo yang lapang di Leiden merupakan tempat pertemuan yang disukai mahasiswa. Di dinding flat itu tergantung bendera merah-putih dengan gambar banteng di tengah-tengahnya. Subardjo menyarankan warna merah dan putih karena keterkaitan historis dengan kerajaan kuno Majapahit dengan warna merah yang melambangkan keberanian dan warna putih melambangkan kesucian.¹⁸ Kepala banteng dianggap sebagai lambang kesabaran, ketegasan, dan keberanian rakyat Indonesia, sementara itu keramahan dan kepatuhan sang banteng menyimpan kekuatan tersembunyi.

Hatta menjadi pendukung giat *konsep kooperasi*. Suatu kebijakan yang dianut oleh gerakan kemerdekaan di beberapa negeri lain, termasuk Turki dan India. Dalam pidato pembelaannya, Hatta mengatakan bahwa kooperasi hanya mungkin terjadi antara dua kelompok yang memiliki hak-hak dan kewajiban yang sama dan lebih jauh lagi kepentingan yang sama.¹⁹ Jika kondisi ini tidak dipenuhi, kooperasi hanya berarti bahwa pihak yang kuat mengganggu pihak lemah, dengan menggunakan yang tersebut kemudian sebagai alat untuk mendukung kepentingan-kepentingan sendiri non-kooperasi membantu memerlemah ikatan yang diciptakan oleh persekutuan. Ia mempertajam antitesis kolonial, menandai pemisahan antara penguasa dan yang dikuasai.

Ketika komitmen pribadi Hatta terhadap sentimen kebangsaan semakin mendalam, tulisan-tulisannya menjadi semakin tajam dan menentang. Ia sendiri telah berubah semakin mendekati seorang revolusioner sejati. Sikapnya yang puritan bertindak selaku pendorong memberi dukungan moral bagi asketisme revolusionernya. Tindakan ugal-ugalan yang biasa

dilakukan orang Minangkabau di rantau berubah menjadi akar-akar revolusioner.

Tidak begitu mengherankan kalau kehidupan Hatta harus mengambil arah ini. Sejak masa kanak-kanak ia telah bergerak dalam lingkaran-lingkaran antara patriotisme dan agama berjalan bersisian. Gelora perpaduan yang bersatu dalam mengecam ketidakadilan dan penghinaan diikuti masuknya Belanda ke jantung tanah Minangkabau, yang benar-benar menggerogoti demokrasi tradisional. Sewaktu menjadi anggota *Jong Sumatranen Bond*, Hatta merasakan pengharapan bahwa kaum muda aktifis seperti dirinya sendiri, harus bersiap-siap menyingkirkan ambisi pribadi demi perjuangan kebangsaan.

Subardjo ingat bahwa kepribadian Hatta ditandai dengan sifat rewel dan disiplin dari yang kuat mengalir dari pandangan Islamnya yang puritan.²⁰ Hatta tidak mudah menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap tingkah laku bohemian. Banyak anggota Perhimpunan Indonesia yang mengabaikan kewajiban-kewajiban patriotik dan studi mereka. Umumnya pembicaraan dipusatkan pada topik-topik sosial, dansa, obrolan biasa di kalangan anak muda, tetapi kalau Hatta memasuki ruangan, arah pembicaraan langsung berubah, senda-gurau menjadi diskusi yang mendalam dan lebih bersifat akademik.

Di Negeri Belanda Hatta banyak bergaul bertukar pikiran dengan Semaun, Darsono, Tan Malaka. Sementara itu Tan Malaka mendukung sistem satu partai. Bidang kesepakatan Hatta dan Tan Malaka menurut memoar Hatta ialah pada ketidaksukaan mereka terhadap Stalin dan menolak kepadanya. Peristiwa penting bagi Hatta pada musim panas tahun 1922, yaitu ketika Turki di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal Pasha telah mengalahkan tentara Yunani. Di jantung hati setiap orang Asing, Ankara dianggap sebagai Mekkah nasionalisme baru yang mengajarkan prinsip dasar percaya pada kemampuan diri sendiri.²¹ Hatta terkesan tentang kedaulatan rakyat. Satu prinsip yang diyakini Hatta sesuai dengan ideal demokratik Minangkabau dan yang kemudian selalu dianjurkan bagi Indonesia sepanjang sisa hayatnya.

Pada tahun 1923 Hatta nampak menjadi propaganda terkemuka bagi Liga Mahasiswa Indonesia yang nampak berubah menjadi Perhimpunan Indonesia. Ia mulai dikenal karena tulisan-tulisannya yang tajam. Hatta mengatakan bahwa petani Jawa telah dikhianati oleh keinginan kelas penguasa mereka untuk bekerjasama dengan Belanda demi kekayaan pribadi. Ia menunjukkan satu contoh tentang penyalahgunaan kaum kuli Jawa di perkebunan Sumatera Timur.

Hatta mengulang kembali tema ini dalam pidato pembelaannya, "Rakyat dihukum setiap hari, dipukuli dengan rotan, dicabut kemerdekaannya".²² Hatta sangat muak dengan jenis peradaban Belanda. Pada waktu itu surat kabar *Indonesia Merdeka* dipakai sebagai medium protes. Tahun 1925 Perhimpunan Indonesia juga menerbitkan *Gedenkboek* yang para penulisnya memberikan tekanan pada prinsip non-kooperasi dan mengganti nama kesatuan politik **Hindia Timur Belanda** dengan Indonesia. Paham kebangsaan Hatta terlihat dalam tulisan yang berjudul *Indonesia di Tengah Revolusi Asia*, dan *Indonesia di Masyarakat Dunia*. Ia dengan tegas menyatakan bahwa penularan kebangkitan Asia itu didorong oleh keberhasilan Jepang dan Turki serta tumbuhnya gerakan nasionalis India di bawah kepemimpinan Gandhi. Terbitnya *Gedenkboek* ini menimbulkan badai protes baik di Belanda maupun dari pemerintah kolonial. Kementerian jajahan mengeluarkan peringatan kepada mahasiswa, apabila berperan aktif dalam kegiatan politik atau Serikat Buruh, akan dihukum dengan sanksi penolakan untuk bisa diterima sebagai pegawai negeri Hindia serta pembatalan biasiswa pemerintah. Hatta menerima sepucuk surat yang memberitakan bahwa perubahan dalam arah Perhimpunan Indonesia tidak sesuai dengan aturan *Order der Dienaren Van Indie* berarti Hatta harus berhenti dari Perhimpunan Indonesia atau meninggalkan orde tersebut. Bagi Hatta bukan pilihan yang sulit, keterlibatannya yang semakin meningkat dalam kegiatan PI menjauhkan Hatta dari persekutuan dengan Belanda. Bagi Hatta menjadi pengabdian Hindia berarti berusaha memenuhi kebutuhan rakyat pribumi. Ini berarti pengusiran kekuasaan kolonial.

Tahun 1925 Hatta menjadi Ketua Perhimpunan Indonesia. Pidato pelantikanya sebagai ketua berbentuk analisis atas akar-akar ekonomi kolonialisme diberi judul *Struktur Dunia Ekonomi dan Konflik Kekuasaan*. Hatta mengutip teori Hegel yang diangkat Marx bahwa keberadaan konflik merupakan syarat pertama untuk perkembangan.^{2 3} Lebih lanjut ia mengatakan bahwa penyebab utama konflik di masyarakat Indonesia adalah situasi sosial kolonial, antitesis antara penguasa dan yang dikuasai, antara ras kulit putih dan kulit berwarna. Ia memberi semangat kepada gerakan nasional dengan menyatakan tidak akan ada kemerdekaan tanpa kekerasan, karena kepentingan penguasa jajahan telah bertahan dengan segala macam cara.^{2 4} Pada saat diadili, pernyataan ini dituduhkan kepadanya. Ia terpaksa harus mempertahankan diri dari tuduhan memerintahkan perjuangan bersenjata.

Hatta mempertahankan dengan menolak berbagai teori barat. Kolonialisme bukanlah hubungan yang paling sepele dengan konsep pokok mengenai hak. Kolonialisme tak lain adalah perampasan kekuasaan yang dengan tersamar disebut hak yang dipraktekkan oleh bangsa yang telah mendapatkan kekuasaan dan keinginan atasnya. Karena perjanjian Eropa mendukung hegemoni atas ras berwarna, maka dengan tenaga sendiri negeri jajahan harus membangun hak atas keberadaan nasional.^{2 5} Kebijakan non-kooperasi akan diterapkan dengan pembentukan suatu negara di lembaga-lembaga mereka sendiri. Gerakan Serikat Buruh harus diperkuat untuk menangkal eksploitasi kolonial, karena pemasokan tenaga buruh yang murah merupakan suatu yang vital bagi penjajah. Masyarakat koperasi harus dibangun untuk menyaingi perusahaan asing. Pengalaman ini ia peroleh ketika berkeliling Swedia, Norwegia, Denmark, dan ternyata koperasi sebagai sarana untuk membangun petani yang lemah dan pedagang kecil menjadi kekuatan ekonomi yang cukup kuat untuk menahan dominasi perusahaan besar. Hal ini diperkuat oleh Tan Malaka yang pada tahun 1920 telah menulis mengenai kecocokan koperasi sebagai sarana untuk melawan keuntungan berlebihan yang dipetik para pe-

dagang perantara. Dari sinilah nampak pidato Hatta lebih me-
ngecam ekonomi dan kelembagaan Belanda.

Tahun 1926 merupakan tahun memuncaknya ketergantungan gerakan nasionalis. Kondisi PKI terpecah dan memerlukan lembaga kuat. Pada masa itu timbul perdebatan antara Hatta dan kelompok studi banding yang intinya dalam rangka pembentukan blok nasional perlu ada kerjasama dengan komunis. Kelompok studi banding merupakan kelompok yang bersemangat dan resposinf sekalipun menolak bekerjasama dengan PKI. Mereka mendapat dukungan dua pemimpin radikal masa awal *Indische Partij* yaitu Dr. Tjipto Mangunkusumo dan Douwes Dekker. Hatta mengusulkan supaya partai baru tersebut diberi nama Sarekat Nasional Indonesia.

Hatta sebagai ketua Perhimpunan Indonesia tidak secara otomatis menyandang peran pemimpin dan persoalan kebangsaan di koloni, bahkan di dalam kelompok studi banding yang secara erat terkait dengan PI. Anggota dominan kelompok studi tersebut tampaknya seorang arsitek Jawa dari *Tehnische Hoogeschool* Bandung bernama Soekarno. Ada perbedaan antara dua tokoh ini. Hatta memiliki persentuhan yang lama dengan nasionalisme radikal dan berperan serta dalam *Jong Java* ketika masih sekolah. Soekarno menyelesaikan pendidikannya di sekolah Belanda tetapi tidak memiliki kesempatan belajar di luar negeri. Ia mengagumi tulisan-tulisan Hatta dan pengalaman-pengalamannya.²⁶

Dalam kontes Perhimpunan Islam bulan Oktober 1927, Soekarno menjelaskan perlunya membentuk sebuah federasi dari seluruh kelompok yang berusaha memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Indonesia yang persuatif berhasil baik dan sebuah front nasional terbentuk pada 17 Desember 1927. Soekarno menggunakan konsep yang diajukan Hatta dalam programnya bahwa masyarakat pedesaan harus berada pada pusat pemerintahan Indonesia. Ia memberi nama front baru tersebut sebagai Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) yang menyatakan konsep dasar tentang

"mufakat" akan tercapai setelah musyawarah. Hatta kemudian mengeritik Soekarno karena terlalu menekan sentimen tradisional dalam mendesak pembuatan keputusan yang lebih menekankan konsensus dari pada suara mayoritas. Hatta mengatakan bahwa keputusan harus diambil atas dasar suara mayoritas. Isu inilah yang menjadi sumber pertentangan antara dirinya dengan Soekarno.

Perbedaan sudut pandang antara Soekarno dan Hatta pada masa itu banyak menyinggung pada konsep mereka mengenai demokrasi pedesaan. Demokrasi desa Jawa terutama terbatas pada persoalan-persoalan sosial dan pertanian yang bukan merupakan suatu unit politik yang independen dan berpemerintahan sendiri, melainkan lebih tunduk pada aristokrasi yang berkuasa.

Di sela-sela perbedaan pendapat ini, sentimen-sentimen Pemerintah Kolonial Belanda terhadap tokoh-tokoh Perhimpunan Indonesia semakin runcing dan pada 8 Maret 1928 diadakan pengadilan mahasiswa. Suatu pengadilan politik terhadap partai radikal yang bertanggung jawab atas artikel-artikel di majalah *Indonesia Merdeka*. Jaksa menuntut umum menyatakan bahwa PI berhubungan dengan Komintern dan terlibat dengan pemberontakan di Hindia. Ia menuntut agar empat terdakwa bertanggung jawab atas tindakan-tindakan PI. Hatta, Nazir Pamutjak, Ali Sastroamidjojo, Abdul Madjid Djodjoningrat harus dipenjara. Duys sebagai pembela menaruh perhatian umum karena lebih dikenal sebagai seorang anggota parlemen yang sosialis. Duys mengatakan bahwa persoalan tersebut bukanlah kriminal melainkan politik. Ia menyebut retorika revolusioner mahasiswa sebagai semangat kaum muda yang frustrasi terhadap situasi kolonial karena itu merupakan suatu perbuatan yang tidak bijaksana dan tidak membenarkan apabila mereka ditahan lebih dari lima bulan.

Selanjutnya dalam pandangan pidato Hatta nampak pemikiran kebangsaannya semakin kokoh. Tema ketidakadilan terutama eksploitasi atas Indonesia dan rakyatnya merembes di dalam pidato tersebut. Hatta tidak takut menyerang Belanda, dengan menggambarkan mereka sebagai picik dan berjuis;

berpikiran sempit dan licik.²⁷ Ia memberikan contoh mengenai penyalahgunaan dan kekejaman yang dikenakan terhadap rakyatnya. Kemudian Hatta mengumbar perasaan keadilan para hakim itu sendiri.

"Kepada hakim muda sebagai pelayan hukum dan keadilan, saya mengajukan pertanyaan tentang apakah anda ingin menjatuhkan hukuman sebagai tindakan ilegal Pemerintah Belanda terhadap para mahasiswa Indonesia yang lemah di Perhimpunan Indonesia. Kami telah disiksa bertahun-tahun di negeri ini dengan segala macam cara. Kami berpikir bahwa kami akan menikmati di tanah Grotius, di mana orang membual tentang hak azasi dari warga negara yang bebas, hak-hak dasar yang sama."²⁸ Duys meminta agar supaya para mahasiswa dibebaskan. Akhirnya berhasil bebas. Dalam penilaian pengadilan diakui bahwa bahasa yang keras dan pembicaraan tentang kekerasan merupakan bagian dari tulisan-tulisan yang dituduhkan tidak ada bukti bahwa mereka secara aktif terlibat dalam upaya untuk menggulingkan negara. Undang-undang hukum pidana Belanda hanya berlaku bagi kekerasan melawan Negara Belanda di Eropa bukan di Hindia.

Pembebasan itu dilihat oleh PI dan kelompok-kelompok nasional Hindia sebagai kemenangan bagi gerakan kemerdekaan Indonesia. Pidato pembelaan Hatta menjadi bacaan standar bagi kelompok-kelompok pemuda dan kelompok studi di Hindia. Penilaian pengadilan amat berkesan pada diri Hatta. Kelompok penekanan Eropa yang tergabung dalam kementerian yang paling berpengaruh tidak berhasil menghadapi segelintir mahasiswa Indonesia yang tidak penting, memang merupakan suatu yang mencengangkan. Dari sudut pandang orang Belanda hukuman tersebut juga merupakan kemenangan kaum sosialis melawan kaum konservasi yang berkuasa.

Sekalipun pembebasan pengadilan atas keempat mahasiswa itu meningkatkan semangat kaum nasionalis Indonesia, tetapi pembela hukum mereka juga memperingatkan para mahasiswa atas pernyataan yang dibuat oleh menteri jajahan yang memperingati bahwa jika mereka berperanserta dalam kegiatan ilegal sekembalinya mereka ke Hindia, mereka akan ditangkap

atau diasingkan ke pengasingan Boven Digul Irian Barat (Irian Jaya sekarang). Di tahun 1928 inilah gelora semangat kebangsaan di India semakin jelas. Pemuda setempat menyadari kebutuhan akan persatuan dan solidaritas terutama karena prakarsa perhimpunan pelajar-pelajar di Indonesia (PPPI) dengan dukungan PNI, apa lagi setelah kongres pemuda yang ke-2 bulan Oktober 1928, rasa kebangsaan menjadi semakin nampak di kalangan rakyat.

Di dalam jurnal PNI bulan April 1929, kembali Hatta menunjukkan kemahiran dalam menulis dengan artikelnya berjudul *Buah Pikiran Politik*. Ia mengakui bahwa pandangannya adalah pandangan penganut dari kejauhan, bukan partisipasi langsung dalam kegiatan PNI. Ia mengomentari bahwa partai baru itu tetap berada dalam tahap demokrasi. Ketergantungan PNI kepada popularitas Soekarno mencemarkan Hatta. Ia menyatakan, "Tidak cukup kalau hanya ada satu Soekarno tetapi sebaiknya ada ribuan dan kemudian jutaan Soekarno." Dengan cara ini, ia menekankan akan adanya kekuatan baru dan partai baru yang besar.

Di dalam partai, perbedaan pendapat memang selalu muncul dan merupakan hal yang biasa. Ketika popularitas Soekarno, ia semakin berani dalam pernyataan politiknya, sehingga menimbulkan peringatan bahwa kalau ia tidak melunakkan pidatonya, pemerintahan kolonial terpaksa akan mengambil hukuman terhadapnya, bahkan pada bulan Februari 1929 Hatta menulis surat kepada Soekarno yang intinya menyarankan Soekarno menarik diri dari baris depan kepemimpinan karena dihambat oleh pemerintahan kolonial atau pergi ke Eropa yang dananya akan ditanggung oleh dana nasional PI.²⁹ Soekarno tidak menanggapi undangan Hatta. Ia memperoleh kepuasan pribadi dengan meneriakkan protes secara lantang di depan khalayak umum. Sifat teater Soekarno menuntut panggung, bukan sekedar sayap panggung.

Menjelang akhir 1929 Hatta tidak bersedia lagi duduk sebagai ketua PI. Sebagai penggantinya Sutan Syahrir yang aktif dalam sayap pemuda PNI. Dalam diri Syahrirlah Hatta memperoleh

pandangan politik yang mirip dengan pandangannya. Suatu pengabdian sepenuhnya untuk memerdekakan Indonesia dari jebakan feodalisme dan memulihkan demokrasi. Ia terkesan oleh pemikiran Syahrir yang cerdas dan kemampuannya menangkap serta menganalisis realitas politik. Syahrir bahkan lebih indepen dibanding Hatta. Ia juga tak sabar melihat elitisme yang ada dalam partai nasional baru.

Kepergian Syahrir ke Hindia agak terlambat karena Gubernur Jenderal de Great mengeluarkan tekanan untuk mengambil tindakan Soekarno. Pada 19 Desember 1929 Soekarno dan ketiga pemimpin PNI lainnya ditangkap. Mereka itu ialah Gatot Mangkupraja, Maskun, Supriadinata. Perbedaan pendapat dalam partai memang suatu hal yang biasa tetapi memperkuat rasa kebangsaan seolah-olah antara Soekarno dan Hatta sudah menunjukkan dwitunggal.

Hatta menggoreskan penanya untuk membela Soekarno dalam artikel yang dimuat *De Socialist*. Ia mengeritik lemahnya bukti yang dijadikan dasar penahanan tersebut dengan mempertanyakan, "Apakah mereka sungguh-sungguh berharap untuk menggantung PNI dengan cara seperti itu? Ia mendesak kaum nasionalis supaya mempertahankan semangat mereka. Hanya ada satu jalan untuk memuaskan hati para pemimpin yang telah berkorban bagi gerakan yaitu melihat teman-teman mereka melanjutkan gerakan."³⁰

Dengan tertangkapnya Soekarno sampai akhir tahun 1930, Hatta mengalami frustasi karena ketidakmampuan PNI maupun PPKI untuk memberikan pimpinan yang kuat bagi perjuangan kemerdekaan. Ia menulis sebuah artikel dalam *Indonesia Merdeka* berjudul "krisis PPPKI" yang intinya mengingatkan bahwa PPPKI bukan sebuah organisasi satu partai tetapi inti dari parlemen. Komentar Hatta yang pedas mengguncangkan gerakan nasionalis dari kelesuan. Sukiman dan Partai Sarekat Islam mendukung kritik Hatta terhadap PPPKI yang mengatakan Hatta cemas akan pengaruh berbahaya dari kaum kooperator. Ia yakin bahwa kemerdekaan hanya dapat dicapai dengan cara menarik diri dari Belanda, sejalan dengan pertumbuhan lembaga-lembaga Indonesia.

Dalam perkembangan pengurus PI, pada 9 November 1931 memutuskan Hatta dan Syahrir dikeluarkan dari PI dengan tuduhan bahwa mereka memecahbelah gerakan nasionalis dengan mendukung golongan merdeka yang memisahkan diri. Keputusan itu melukiskan pengarahan Komintern untuk membalikkan Perjanjian Hatta-Semaun dengan jalan menempatkan PI di bawah kontrol ketat kaum komunis. Kelompok mahasiswa tersebut tetap kuat bersekutu dengan Moskow selama sisa periode pra perang. Syahrir menerima keputusan PI dengan sikap tidak peduli, bahkan Hatta dan Syahrir bersepakat tidak mau brrhubungan dalam hal apa pun dengan sebuah organisasi memperbaiki rusaknya reputasi Hatta. Ia mengingatkan sesama kaum nasionalis. Syahrir menyatakan bahwa kandungan Indonesia Merdeka telah berfungsi sebagai pembawa obor bagi PNI. Ia mempertahankan tindakan Hatta dalam menarik PI dari liga melawan kolonialisme, dengan melukiskan kebijakan pengurus PI yang sekarang sebagai kebijakan yang bodoh dan tindakan mereka terhadap Hatta adalah tindakan reaksioner. Memang begitulah kehidupan dalam partai. Seorang tokoh yang kemudian terasing dari kawan-kawan karena perbedaan pendapat. Suatu tugas yang sulit bagi Hatta sudah menghadang di depan yaitu demokratisasi; maksudnya, pemerintah demokratik bukanlah sebuah unsur asing yang semata-mata merupakan impor dari barat, melainkan memiliki akar-akar pribumi di kepulauan Indonesia.

Hatta menyadari bahwa hari-harinya di Belanda dapat dihitng dengan jari. Ia tidak ingin pulang tanpa membawa gelar kesarjanaannya, karena ia harus menunggu sampai akhir tahun akademik Juni 1932. Hatta meminta bantuan Syahrir karena punya pengikut di Bandung ketkika ia menjabat sebagai ketua Pemuda Indonesia. Sekembalinya ke Jawa, Syahrir berusaha menghindari konfrontasi langsung dengan Soekarno karena ia menghindari persekutuan PNI baru dengan Partindo, tetapi waktu itu Soekarno belum bisa menarik hati Partindo. Sebenarnya dari PPPKI ia memperoleh dukungan terkuat sejak dibebaskan dari penjara dan ia bersiap-siap untuk memulihkan kredibilitasnya sebagai suatu front nasinalis. Namun demikian pada waktu yang sama, ia mengabaikan petunjuk yang disarankan

Syahrir untuk membatasi front tersebut hanya bagi kaum non-kooperator, sehingga menyebabkan kritik langsung dari Hatta. Meskipun sedang belajar keras untuk menyelesaikan studinya, Hatta mengoreksi dengan tajam kepada Soekarno melalui artikelnya yang berjudul, "*Persatoean Ditjari Persatoean Jang Ada*". Hatta menuduh bahwa gerakan nasionalis mabuk persatuan, pada hal apa yang dianggap sebagai persatuan sesungguhnya adalah sate daging lembu, kerbau dan kambing dapat ditusuk biasanya, tetapi pandangan rakyat mengenai konsep tentang aristokrasi tidak dapat dipersatukan. Menyatukan seluruh kelompok ini hanya berarti masing-masing mengorbankan prinsip-prinsipnya, karena itu kelompok *Daulat Rakyat* tidak dapat menjadi satu dengan kaum nasionalis kebudayaan tanpa saling mengorbankan prinsip-prinsipnya.³¹ Dengan menggunakan istilah nasionalis kebudayaan, Hatta terlihat mengecam sesama rekan nasionalis menindas rakyat yang menyebabkan Belanda memperoleh keuntungan seperti itu dari rakyat. Hatta juga melihat perjuangan nasional dalam pengertian Marxisme yang lebih murni, yang tidak hanya melihatnya dalam pengertian konflik rasial, ia menegaskan bahwa rakyat tidak boleh lagi dianggap sebagai kuda beban dan mengajukan pandangan bahwa PPPKI dalam bentuknya sekarang hanya meningkatkan standar kaum kooperator, rakyat hanya dimanfaatkan sebagai tangga kaum bojuis untuk meningkatkan ke puncak.³² Begitulah kritik Hatta terhadap Soekarno dan PPPKI pada hari-hari terakhir sebelum pulang ke negeri asal (Hindia).

Kedatangan Hatta, Juli 1932, disambut hangat dari keluarga dan teman-temannya ketika tiba di Tanjung Priok. Sebagian besar anggota rombongan PNI Baru yang menyambutnya untuk pertama kali melihat orang yang kebijaksanaannya mereka pilih. Teman-teman mantan PI secara mencolok tidak hadir. Pertamanya dengan Soekarno kurang begitu berguna karena tidak mengangkat persoalan Partai Indonesia dan PNI Baru.

Soekarno di dalam otobiografinya, tidak mencatat pertemuan pertamanya dengan Hatta, tetapi ia melukiskan kesannya tentang Hatta setelah pembicaraan antara Partindo dan PNI

Baru. Catatan Soekarno kurang bersahabat. Soekarno mengatakan bahwa Hatta secara mental masih berjalan-jalan dengan buku-buku di ketiaknya berusaha untuk menerapkan rumus-rumus ilmiah yang tidak cocok dengan revolusi.

Selanjutnya Hatta bereaksi dengan cepat menyangkal tuduhan itu yang menyatakan bahwa konfrontasi Partindo dengan PNI Baru hanyalah pertikaian pribadi antara dirinya dengan Soekarno. Rintangan politiklah yang memisahkan antara PNI Baru dengan Partindo. Kalau Partindo menolak dasar kedaulatan rakyat yang merupakan darah daging anggota PNI maka tidak ada kesamaan.

Dalam suasana persaingan partai itu, Hatta, mempersiapkan sebuah manifesto politik bagi PNI Baru yang diberi judul *Ke Arah Indonesia Merdeka*, yang sejak saat itu berlaku sebagai pegangan partai untuk pelantihan kader. Begitu juga Soekarno menerbitkan manifesto Partindo yang diberi judul *Mencapai Indonesia Merdeka*. Hatta dalam manifestonya menyatakan bahwa ada tiga alternatif yang terbuka bagi Indonesia untuk memilih bentuk pemerintahannya di masa depan; pemerintahan oleh aristokrat, pemerintahan oleh kaum terpelajar, dan pemerintahan oleh rakyat. Lebih lanjut ia mengingatkan bahwa aristokrasi Indonesia secara terang-terangan mendukung Belanda dan berusaha mempertahankan posisi keutamaan mereka, kaum terpelajar menganggap bahwa keahliannya memberi mereka hak untuk memerintah Indonesia Merdeka. PNI Baru bertujuan ke arah rakyat dan kedaulatan rakyat. Kemudian ia menjelaskan bahwa demokrasi politik berkaitan dengan demokrasi ekonomi. Di Indonesia rakyat secara tradisional bekerja kolektif sehingga memiliki landasan yang baik untuk mencapai demokrasi sosial dan ekonomi. Untuk mencapai Indonesia Merdeka harus memajukan semangat kerja sama ini. Hatta memulai kampanye untuk mempermosikan gerakan koperasi yang berusaha membangun perusahaan komersial Indonesia sampai ke tingkat yang dapat bersaing dengan perusahaan internasional.

Persaingan antara Hatta dengan Soekarno cukup menarik dan keduanya memang mempunyai argumentasi yang kuat,

tetapi persatuan di antara kedua tokoh itu sebenarnya cukup nampak dalam tujuannya mencapai Indonesia Merdeka. Pengasingan Soekarno oleh pemerintah kolonial Belanda ke Flores memberikan arti tersendiri bagi Hatta. Di sanalah rasa kebangsaan Hatta cukup terlihat. Ia berusaha menenangkan kepanikan yang melanda gerakan nasionalis dengan mendesak supaya orang Indonesia tidak menyerah dan mengingatkan mereka bahwa mereka bukanlah satu-satunya rakyat yang menderita oleh rezim penindas. Ia juga menekankan bahwa gerakan yang hanya merupakan gerakan pemimpin dan anggota biasa tidak ikut menanggung beban sehingga gerakan itu tidak akan mencapai tujuan. Kritik-kritik Hatta yang tajam terhadap pemerintah kolonial Belanda membuat Hatta masuk dalam penahanan pada 25 Februari 1934, hanya beberapa minggu setelah pembuangan Soekarno.

Penahanan Hatta di penjara Glodok kemudian diikuti penahanan Syahrir di Cipinang beserta empat pengurus PNI yaitu Burhanuddin, Maskun, Suto Sumitro, Marwoto ditahan di Bandung. Tidak nampak tuduhan resmi kepada mereka bahkan pada bulan September 1934 *Daulat Rakyat* ditutup dan redaktornya dimasukkan dalam penjara. Hatta mengungkapkan dengan kata-kata yang cukup pedas, Hindia Belanda adalah sebuah negara kepolisian yang hukumnya dilakukan di bawah mahkamah luar biasa dari gubernur jenderal. Di dalam penjara ini ia sempat menyelesaikan sebuah buku yang tebal ditulis sebelum penahanan yang berjudul "*Krisis Ekonomi dan Kapitalisme*."

Pada 16 November 1934 tujuh pengurus PNI Baru dibuang ke Digul termasuk Hatta. Di tengah-tengah ganasnya alam, Hatta menyelenggarakan program pengajaran di pemukiman tersebut. Protes yang gancar terhadap pemerintah kolonial Belanda menimbulkan Hatta dan Syahrir dipindahkan ke Bandanaire. Di sinilah kedua tokoh tersebut hidupnya agak bebas walaupun dibuang. Ia dan Syahrir meluangkan waktunya untuk membuka sekolah kecil, sekolah nasionalis, tetapi hal ini selalu dipantau oleh Pemerintah Belanda. Hatta dan Syahrir dari Bandanaire mengamati dengan frustasi, kaum nasionalis

yang melakukan sikap non-kooperasi lambat-laun mulai menyerah di bahwa rezim kolonial yang keras.

Dalam bulan Desember 1941 terdengar berita mengenai Jepang menghancurkan Pearl Harbour yang mengguncangkan keyakinan pemerintah kolonial. Bandanaire segera dimobilisasi ke dalam berbagai kegiatan pertahanan sipil. Hatta menuangkan pemikirannya yang dimuat dalam *Harian Pemandangan*, walaupun terjadi perang Pasifik diharapkan orang Indonesia harus dapat memperoleh hak untuk menentukan nasib sendiri. Demokrasi barat tidak akan dapat memenuhi tujuan Indonesia. Fasisme harus dihancurkan, karena demokrasi akan menjadi sangat konservatif. Selanjutnya pada 1 Februari 1942 Hatta dan Syahrir dipindahkan dari Bandanaire ke Jawa. Hatta selalu menyadarkan rakyat karena perang Asia Timur adalah konflik antara tentara Jepang dan pasukan Belanda. Di mata kedua tokoh tersebut pasukan Belanda sama ganasnya seperti pasukan Jepang. Mereka sama-sama imperialisme.

Pada 9 Maret 1942 Pemerintah Hindia Belanda menyerah kepada tentara Jepang yang berarti penetrasi Belanda di kepulauan Indonesia berakhir. Tidak ada pertempuran yang berlangsung lama akan habis-habisan yang menandai peristiwa tersebut. Secara teknis, Hatta dan Syahrir adalah orang-orang yang merdeka. Pengasingan mereka telah selesai.

2.2.2 Pemikiran Kebangsaan Masa Pendudukan Jepang Sampai Proklamasi Kemerdekaan

Kemenangan Jepang tahun 1942 membuat Pemerintah Belanda sadar bahwa betapa tepatnya penggambaran Hatta dan kaum nasionalis atas sikap rakyat Indonesia secara umum terhadap Belanda. Bagi Hatta, tidak perlu menyambut kemenangan Jepang dengan terlalu gembira. Ia lebih menerima kenyataan bahwa Indonesia kembali mengalami kekuasaan asing karena pada bulan Maret 1942 Jepang mengeluarkan dekrit pembubaran seluruh partai politik dan serikat buruh serta melarang pengibaran bendera Indonesia.

Pertemuan pertama Hatta dengan para perwira Jepang berlangsung pada suatu malam 19 Maret 1942, sesaat menjelang pengumuman pelarangan kegiatan nasionalis. Hatta diperintahkan supaya melapor ke markas besar pusat Jepang untuk menjaga keselamatan rakyat dan menangkis serangan Sekutu.³³ Dalam memoarnya, Hatta tidak secara otomatis menyetujui permintaan tersebut. Ia tidak meninggalkan sikap non-kooperasi demi keselamatan pribadi dan keuntungan material yang ditawarkan oleh Jepang. Ia memastikan untuk tidak terbujuk lebih jauh dari sekedar kerjasama secara minimum. Hal ini dijelaskan dalam pertemuan pertamanya dengan Jenderal Harada. Ketika ditanya apakah anda siap bekerjasama dengan pemerintah militer Jepang? Kemudian Hatta menjawab dengan pertanyaan kembali. Apakah Jepang ingin menjajah Indonesia? Jenderal Harada menyangkal dengan simpatik dengan mengatakan kemenangan Jepang ialah membebaskan dari kolonialisme seluruh bangsa Asia yang terjajah. Hatta mengetahui bahwa ia sekurang-kurangnya memiliki semacam posisi tawar-menawar. Ia meminta kantor sendiri dan kebebasan untuk mengangkat stafnya sendiri yang terdiri atas orang-orang PI dan PNI Baru untuk melanjutkan perjuangan dan berkomunikasi dengan tokoh-tokoh gerakan di bawah tanah. Hatta sangat hati-hati mendisiplinkan lidah dan penanya. Ia selalu sadar bahwa reaksi Jepang terhadap subversi jauh lebih membahayakan dari pada Belanda.

Sekembalinya Soekarno dari Sumatera ke Jawa, membuat Hatta semakin sadar bahwa Soekarno memiliki kekuatan menggerakkan rakyat yang luar biasa melalui retorika pidatonya. Suatu keahlian yang tidak dimiliki Hatta. Soekarno pandai menerjemahkan berbagai gagasan dan perintah ke dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh rakyat Jawa, tetapi kurang dipahami oleh musuh asing. Gerakan nasionalis mengharapkan persekutuan Soekarno-Hatta. Tanggapan Hatta terhadap kedatangan Soekarno pada 9 Juli 1942 disambut hangat dan ramah. Ia mengundang Soekarno dan keluarganya untuk menginap semalam di rumahnya. Hal ini jelas menunjukkan bahwa isu yang telah memisahkan mereka di masa lampau disampingkan. Hatta memperingatkan Soekarno mengenai semakin me-

tingkatnya tekanan Jepang terhadap gerakan nasionalis radikal dengan menyarankan supaya Soekarno menghindari gerakan Tiga A. Gerakan Tiga A pada umumnya dibenci oleh rakyat, yang lebih menolak dari pada mendudukkannya. Soekarno menyatakan bahwa pertemuannya dengan Hatta merupakan awal dari periode kemitraan politik mereka yang membuat mereka digelar Dwi Tunggal. Lebih lanjut Soekarno mengatakan saat berjabat tangan dengan Hatta, "Ini merupakan simbol dwi tunggal kami. Kami bersumpah suci untuk bekerja bersama-sama, tidak akan terpisahkan sampai negeri kami benar-benar merdeka".³⁴

Rasa persatuan dan rasa kebangsaan semakin mantap saat penampilan pertama tokoh dwi tunggal Soekarno-Hatta di depan umum di sebuah rumah tua bergaya kolonial. Dalam pidato mereka baik Soekarno maupun Hatta menekankan bahwa telah tiba saatnya bagi rakyat Indonesia untuk bersatu memperjuangkan kemerdekaan. Gerakan nasionalis tidak akan disapu oleh invasi Jepang. Pernyataan yang cukup berani ini juga terlihat pada 9 Maret 1943 di lapangan Ikada, Hatta kembali menunjuk pada perkembangan masyarakat baru dengan meyakinkan masyarakat, bahwa Pusat Tenaga Rakyat Putera merupakan gerakan orang Indonesia. Kooperasi antara Rakyat dan pemerintah diperkuat dengan dibentuknya gerakan Pusat Tenaga Rakyat yang akan membuat pemerintah mencapai kemengangan akhir dalam Perang Asia Timur Raya.³⁵ Dengan jelas Hatta menggunakan kata pemerintah, bukan tentara Jepang, seolah-olah menunjukkan bahwa pengurus pusat Putera adalah inti dari pemerintahan Indonesia yang bertindak bersama rakyat. Ia menjelaskan bahwa Putera terbuka bagi seluruh orang Indonesia dan bukan merupakan organisasi biasa dengan keanggotaan terbatas dan membayar iuran. Setiap orang boleh menyumbangkan semangat dan tenaganya, tetapi sayang Putera hanya berjalan kurang dari setahun. Penguasa Jepang memutuskan untuk mencegah Putera mengembangkan kegiatan politiknya. Pelarangan ini justru membuat kegigihan tokoh-tokoh

kita untuk memperjuangkan haknya sebagai sebuah negara. Hal ini terlihat ketika bulan Mei 1943 Menteri Asia Timur Raya Aoki mengunjungi Jawa. Pada waktu itu Soekarno tidak ada di Jakarta, Hatta bertindak sebagai juru bicara yang menyatakan bahwa mengapa Perdana Menteri Tojo menjanjikan kemerdekaan bagi Burma dan Filipina tetapi mengabaikan Indonesia. Hatta memperingatkan bahwa akan sulit untuk menjamin dukungan terus-menerus kepada pihak Jepang, kecuali ada jaminan bahwa Indonesia akan berpemerintahan sendiri. Ia meminta supaya diperbolehkan mengibarkan bendera nasional dan menyanyikan lagu kebangsaan. Walaupun ada penekanan dari *kempetai*, tetapi pada 16 Juni 1943, Perdana Menteri Tojo menjanjikan partisipasi politik kepada Malaya, Sumatera, Borneo, dan Celebes. Pengumuman tersebut tidak memasukkan wilayah bagian timur kepulauan dan tidak ada rumusan yang jelas tentang sifat partisipasi politik. Janji-janji Jepang dalam perkembangannya semakin tidak jelas.

Dalam bulan Oktober 1949 Laksamana Muda Maeda mendirikan sebuah asrama baru di Jakarta di bawah pengawasan Soebardjo. Bersamaan dengan itu Perdana Menteri Koiso mengeluarkan deklarasi yang terkenal dengan nama Deklarasi Koiso. Deklarasi itu berbunyi, "**dalam memandang upaya Hindia Timur menjalankan perang Asia Timur Raya, kami nyatakan di sini bahwa kami ingin mengakui kemerdekaan mereka di masa datang**". Sejak saat itu deklarasi Koiso makin agak jelas.

Menjelang awal tahun 1945 merupakan badai bagi Jepang. Bagi Soekarno dan Hatta hal ini juga merupakan saat yang cukup bahaya, tambahan lagi Jepang tetap menekankan untuk memperluas latihan pertahanan sehingga orang Indonesia dapat lebih efektif menahan kembalinya kekuasaan Belanda. Jepang sendiri menghadapi dilema. Mereka terpaksa menggunakan Indonesia untuk mempertahankan kepulauan ini melawan Sekutu. Mereka juga merasa ragu mengenai sampai seberapa jauh orang Indonesia akan mendukung mereka. Pembunuhan yang terjadi di unit Peta Blitar Jawa Timur pada 14 Februari 1945 memberi peringatan kepada Jepang bahwa kekecewaan

orang Indonesia terhadap mereka sudah memuncak. Menjelang tahun 1945 dapat dikatakan sebagai gelombang kebencian terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan Jepang, bahkan kritik-kritik tajam dilontarkan kepada para pemimpin yang terkait erat dengan Jepang terutama Soekarno-Hatta. Kelompok Syahrir menuduh bahwa keduanya gagal mengatasi penderitaan buruh kerja paksa, *romusha*, dengan membentuk sebuah kelompok Badan Pembantu Prajurit Pekerja yang bertujuan untuk memberikan bantuan pembebasan bagi mereka. Akhirnya pada 21 Februari 1945 Hatta mengecam terhadap penguasa Jepang tentang penyiksaan yang dilakukan oleh tentara Jepang terhadap para buruh muda.

Kritik-kritik yang dilontarkan itu membuat kaum nasionalis menjadi lebih berani untuk menuntut kemerdekaan Indonesia, karena itu pada 28 Mei 1945 dibentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dokter Radjiman Wedyodiningrat ditunjuk sebagai ketua badan tersebut. Tampaknya Jepang berusaha mengurangi pengaruh kaum nasionalis radikal dan lebih menyukai elit Jawa yang konservatif untuk mengimbangi pemberian kebebasan politik yang lebih besar.

Di tengah-tengah arus politik yang semakin mendidih, kritik tajam juga dilontarkan kepada Soekarno-Hatta yang dianggap sebagai kolaborator Jepang, bahkan Syahrir sangat meragukan kapasitas orang Jawa yang dominan dalam mengatur kaum elit yang bekerja di bawah pengawasan rezim otoriter Jepang untuk membentuk sebuah bangsa yang demokratis. Ia takut bahwa massa akan terjebak ke dalam suatu sistem yang bersifat feodalistik. Firasat dan kritiknya dituangkan ke dalam sebuah *booklet* kecil berjudul *Perjuangan Kita*.³⁷ Karya ini memiliki dampak yang mendalam terhadap pemikiran dan tindakan politik, yang membuat Hatta menjadi penengah untuk menjaga keseimbangan antara Syahrir dan kelompok pemudanya di satu pihak dengan Soekarno di pihak lain.

Dalam rapat pertama BPUPKI 29 Mei -- 1 Januari 1945 di gedung *Volksraad* muncul perdebatan, apakah Indonesia harus menjadi negara Islam atau tidak. Hatta mengusulkan

dibentuknya sebuah negara yang harus memisahkan urusan pemerintahan dan urusan keagamaan. Hatta ingat bahwa mayoritas anggota masih ragu-ragu menjawab secara langsung pertanyaan yang diajukan dalam pidato pembukaan ketua, **"Apakah dasar negara yang akan kita bentuk ? Kalau Islam tidak secara langsung ditetapkan sebagai dasar, apakah alternatifnya ?**

Pada hari keempat dan terakhir dari persidangan, Hatta tidak hadir. Soekarno menyampaikan pidatonya yang terkenal, mengusulkan bahwa bangsa baru tersebut harus didasarkan atas Pancasila yang merupakan landasan filosofis.³⁸ Kelima sila yang diusulkan ialah kebangsaan, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial dan ketuhanan. Semua itu oleh Soekarno dapat diringkas menjadi satu istilah Gotong Royong. Soekarno mengakui bahwa Pancasilaannya berdasarkan cita-cita umum dari gerakan sosialis internasional, nasionalisme, demokrasi dan sosialisme yang mendekati "Tiga Prinsip Rakyat"-nya Sun Yat Sen, simbol dari negara sosialis, meskipun dalam kasus Indonesia dalam melihat sila kelima juga merupakan simbol ketuhanan.³⁹

Ketika membahas pemikiran komite tersebut Hatta menyatakan bahwa ia selalu menyetujui Pancasila sejauh Ketuhanan Yang Mahaesa dituliskan ke dalam prinsip dasar kenegaraan, ajaran Islam bahwa Tuhan harus menjadi pusat kegiatan setiap muslim dijamin. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa percaya kepada Tuhan bukan hanya merupakan cara untuk menghargai keyakinan setiap orang, seperti yang pertama kali dinyatakan oleh Bung Karno melainkan prinsip dasar yang menuju ke arah kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran dan persaudaraan.⁴⁰ Konsep yang luas tentang percaya kepada Tuhan juga memungkinkan alur menghindarkan diri bagi Hatta dari kewajiban apa pun sebagai seorang putra ulama untuk mendukung negara Islam.

Dalam perkembangannya, untuk menghormati ketidakpuasan orang Islam terhadap Pancasila, Soekarno dan Hatta memimpin Panitia Sembilan dengan tugas untuk mempelajari kelima sila tersebut. Akhirnya tercapailah pemecahan yang

kompromistis. Ketuhanan Yang Mahaesa ditempatkan di atas empat sila lainnya dengan tambahan anak kalimat sebagai berikut "dengan kewajiban untuk menjalani syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya".⁴¹ Keputusan ini dimasukkan ke dalam dokumen khusus yang disebut sebagai **Piagam Djakarta** yang berfungsi sebagai Preamble bagi Rancangan Undang-Undang Dasar. Dalam menghadapi Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, Hatta melukiskan dilema yang dihadapi tentang sistem demokrasi Kabinet Parlementer atau Kabinet Presidensial. Hal ini menumbuhkan keresahan di kalangan gerakan nasionalis, bahwa Hatta mungkin tidak siap untuk memutuskan masalah penting ini, karena dapat menyebabkan perpecahan dwi tunggal. Begitu besarnya kecemasan bahwa Hatta akan bersiteguh dengan sudut pandangannya sendiri, sehingga pada malam menjelang masalah tersebut dijadwalkan akan disiarkan BPUPKI, Hatta dibangunkan dari tidurnya untuk menjumpai sekelompok pemuda yang mendesaknya untuk melakukan wawancara. Tujuan mereka ialah supaya Bung Hatta tidak merintangai Negara Indonesia yang merdeka diatur lebih sebagai satu kesatuan dari pada sebagai perluasan dari negara-negara kecil. Mereka sadar, Bung Karno bertahan mati-matian dengan negara kesatuan. Akhirnya Hatta berjanji bahwa pertentangan yang berbahaya antara dirinya dengan Soekarno tidak terjadi.

Pada 16 Juli 1945 BPUPKI menyelesaikan pembahasannya untuk menerima Rancangan Undang-Undang. Pada hari yang sama diterima berita dari Tokyo bahwa Jepang akan mengakui kemerdekaan Hindia Timur secepat mungkin dengan pengakuan bahwa ketiga zona perang harus berhubungan lebih erat dalam soal kemerdekaan. Selanjutnya diputuskan untuk membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang memungkinkan wakil-wakil daerah menyuarakan pandangan mereka atas isu-isu kemerdekaan. Keputusan ini diterima hangat oleh Hatta yang sadar akan kurangnya wakil-wakil pandangan dari luar Jawa dalam sidang BPUPKI, bahkan sebelumnya Hatta diberi kesempatan untuk ke Banjarmasin Kalimantan Selatan. Dalam suatu rapat di Balai kota, ia meng-

hadapi banyak pertanyaan mengenai bagaimana Indonesia yang merdeka akan diperintah, dan apakah yang akan menjadi perbatasan teritorialnya. Hatta menjawab bahwa perbatasan bangsa baru tersebut akan sejalan dengan bekas Hindia Belanda. Pidato Hatta itu memperoleh dukungan besar dari kaum elit lokal, karena dalam pidato itu juga mengatakan bahwa Jepang akan kalah perang.

Pidato Hatta ternyata menjadi kenyataan. Pada 6 Agustus 1945 Hiroshima dijatuhi bom atom oleh tentara Sekutu. Pada 9 Agustus 1945 Soekarno, Hatta, dan dr. Radjiman Wedyodiningrat secara mendesak dipanggil ke Saigon untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi, panglima wilayah selatan. Dalam pertemuan singkat itu tidak disebutkan bahwa Jepang menjelang kalah perang tetapi pembicaraan terpusat pada persiapan-persiapan bagi kemerdekaan.

Sekembalinya dari Saigon, Hatta disambut dengan tidak sabar oleh Syahrir dan kelompok pemuda yang baru saja mendengar berita dari radio bahwa Jepang akan mengajukan syarat perdamaian kepada pihak Sekutu. Syahrir mendesak Hatta agar menghubungi Soekarno secepatnya dan membujuknya untuk memproklamasikan kemerdekaan. Ini merupakan tantangan Hatta sampai seberapa jauh ia dapat mempertahankan dwi tunggalnya. Peristiwa-peristiwa di sekitar proklamasi ini diungkapkan oleh Hatta dengan mengatakan kegusarannya terhadap Syahrir dan para pemuda. Mereka kurang peka terhadap bahaya sebagai akibat dari tindakannya yang tergesa-gesa. Hatta telah menapak anak tangga menuju sikap seorang negarawan yang matang dan ia beranggapan sikap yang diambil oleh Syahrir serta para pemimpin pemuda merupakan sikap yang tidak realistis.

Hatta nampak jauh lebih tenang ketimbang Syahrir dalam mempertimbangkan dari sikap kompromi antara para pemimpin Jepang dan Indonesia. Desas-desus menyerahnya Jepang meningkatkan ketegangan di kalangan pemuda.

Sikap dwi tunggal semakin nampak ketika ia didesak dua pemuda yang meminta jaminan bahwa proklamasi ke-

merdekaan tidak akan dilakukan di bawah pengawasan PPKI, yang selamanya akan memberikan cap sebagai buatan Jepang. Hatta dalam memoarnya mengatakan bahwa ia dan Soekarno menganut sikap yang peka dan rasional. Ia dituduh tidak lagi seorang revolusioner. Hatta membalas dengan marah dan menyatakan bahwa tindakan yang diusulkan oleh para pemuda itu bukanlah revolusi, melainkan lebih menyerupai "putch" Hitler di Munich tahun 1923 yang gagal. Sikap dwi tunggal juga ditunjukkan oleh Soekarno. Soekarno didesak pemuda dan dikatakan sebagai pemimpin yang gagal. Para pemuda Menteng mengancam jika ia tidak mau menyatakan proklamasi, esok harinya akan ada pembunuhan. Kesabaran Soekarno habis di bawah tekanan dan perdebatan seperti itu. Dengan lantang ia berteriak mengejutkan para pemuda dengan mengucapkan, "Ini leherku jangan tunggu sampai esok".⁴²

Akhirnya para pemuda menyadari bahwa mereka tidak memiliki prestise untuk menyatakan deklarasi kemerdekaan. Selanjutnya mereka merancang suatu penculikan terhadap Soekarno dan Hatta ke barak Peta Rengasdengklok sebuah kota kecil di timur laut Jakarta. Hilangnya dwi tunggal cukup mengejutkan. Syahrir tidak mendukung penculikan itu, meskipun ia mendukung rencana pemuda untuk memproklamasikan kemerdekaan di lapangan Ikada. Subardjo dan Marsekal Muda Maeda mula-mula curiga terhadap tentara Jepang, tetapi pihak *Gunseikan* tidak bertanggungjawab terhadap penahanan Soekarno-Hatta. *Kempeitei* diperintahkan untuk mencari mereka. Melalui Wikana, Soebardjo berusaha mencari tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Akhirnya ia berhasil membujuk para pemuda. Hatta gembira mendengar bahwa tidak terjadi pemberontakan pemuda, sedangkan PPKI pun dilaksanakan walaupun secara mendesak. Rintangan baru muncul, Soekarno-Hatta diberitahu bahwa di bawah syarat penyerahan, Jepang diperintahkan supaya memelihara *status quo* di seluruh wilayah pendudukan sejak saat menerima ultimatum Sekutu. Mereka juga diperingatkan supaya tidak menyelenggarakan rapat PPKI di rumah Laksamana Maeda, namun Maeda berhasil menjamin dengan catatan, asalkan proklamasi kemerdekaan

dilakukan dengan diam-diam dan pemuda tetap tenang dan terkontrol, dengan diam-diam dan pemuda tetap tenang dan terkontrol, penguasa militer akan tetap diam.⁴³ Wakil-wakil pemuda dikirim ke rumah Maeda, sehingga bukan anggota PPKI saja, tetapi juga para pemuda ikut bergabung menyusun kalimat proklamasi kemerdekaan.

Soekarno–Hatta menolak teks Syahrir, karena merasa nadanya terlalu provokatif. Syahrir tetap anti Jepang dan menolak memasuki rumah Maeda. Akhirnya mereka memutuskan untuk menggunakan kalimat dari Preambule Rancangan Undang-Undang Dasar yang berbunyi, **"Kami rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia"**, dengan menambah kalimat pendek, **"Hal-hal yang berkaitan dengan pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan dilakukan dengan cara yang seksama dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya"**.⁴⁴ Pemimpin Pemuda memprotes bahwa kalimat tersebut terlalu lemah dan menolak menandatangani.

Dari perdebatan itu, disepakati hanya nama Soekarno – Hatta yang akan dicantumkan dalam teks Proklamasi. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 didengungkan pukul 10.00 tidak dengan perayaan besar-besaran. Soekarno atas nama bangsa Indonesia membacakan Proklamasi secara singkat, kemudian bendera Merah Putih dikibarkan dan lagu kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan. Bagi Hatta, hal ini bukanlah tanda terakhir kemerdekaan, melainkan baru permulaan paling tidak memiliki dasar kebangsaan untuk membangun. Begitulah proklamasi berhasil didengungkan Soekarno dan Hatta yang ternyata dapat bekerjasama sebagai tim yang terjalin sangat erat.

2.2.3 Pemikiran Kebangsaan Dalam Mempertahankan Kemerdekaan

Setelah proklamasi kemerdekaan, tokoh Dwi Tunggal kembali diuji sampai seberapa jauh mereka mampu mengatasi gejala dari dalam maupun dari luar. Soekarno dan Hatta secara bulat terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Secara

otomatis kedua pemimpin itu harus memelihara front kesatuan, walaupun Soekarno mencerminkan muslim abangan, Hatta muslim yang lebih orthodox. Soekarno akan memproyeksikan kecemerlangan dan sensualitas penguasa Jawa, sementara Hatta akan mengimbangnya dengan puritanisme dan ketegaran. Soekarno mewakili penguasa Jawa dengan ciri otokratis yang sentralistis, sementara Hatta akan mencerminkan kedaulatan rakyat yang disusun atas model dataran tinggi agama. Mereka bersama-sama akan merupakan simbol persatuan nasional, terutama mikrokosmos Jawa dan luar Jawa. Suatu konsep yang begitu vital pada periode saat krisis tertentu.

Pada awal proklamasi ini yakni 29 Agustus 1945, Hatta mulai menyiarkan imbauan supaya ada koordinasi. Pemuda tidak boleh bertindak sendiri-sendiri. Hatta juga memperhatikan kebutuhan akan pasukan pertahanan. Dalam memoarnya, dikatakan bahwa ia memainkan peranan penting dalam pembentukan tentara nasional dengan mengangkat Urip Soemohardjo sebagai kepala staf Angkatan Perang Republik Indonesia.

Hatta dan Soekarno sama-sama memainkan peranan dalam pengangkatan Kabinet Presidensial yang pertama. Hal ini mendapat tantangan keras dari Syahrir. Dalam tangkisannya Hatta menjelaskan bahwa mereka dapat membentuk sebuah lengan administrasi pemerintahan sejajar dengan administrasi kabinet banyak dan mantan teman Hatta di Perhimpunan Indonesia. termasuk Soebardjo sebagai menteri luar negeri. Iwa Kusuma Sumantri sebagai menteri kesejahteraan sosial, Amir Syarifuddin sebagai menteri penerangan. Tan Malaka dan Syahrir sama-sama menolak duduk dalam kabinet. Konflik dengan Syahrir mulai tampak dalam manifesto politiknya, Perjuangan Kita. Syahrir dengan pedas mengecam bahwa kabinet terdiri atas orang-orang tanpa karakter sesungguhnya.⁴⁵

Akhirnya Hatta mengakui bahwa situasi mulai berubah, kedaulatan rakyat berbeda dari kehendaknya. Massa semakin bertindak independen dari pemerintah yang baru diangkat. Tan Malaka menyambut suasana revolusioner yang radikal di tengah-

tengah massa, dan mulai bergerak di kalangan pemuda. Ia didukung oleh kaum nasionalis.

Pada 15 September 1945 mulai nampak pasukan Sekutu masuk perairan Indonesia dan mendarat di Tanjung Priok. Jenderal Christison, panglima Sekutu, menginstruksikan agar RI melanjutkan administrasi atas seluruh wilayah di Jawa dan Sumatera, kecuali berbagai pangkalan di daerah pantai. Bagi Soekarno-Hatta, pernyataan Christison sama dengan penanggungan hukuman mati, meskipun mereka mengakui bahwa Belanda bisa saja tidak menyetujuinya. Pemuda mengadakan reaksi dengan sponsor Tan Malaka menyelenggarakan rapat umum di lapangan Ikada saat pihak Sekutu melakukan pembicaraan dengan tentara Jepang. Pemuda berada dalam keadaan yang sangat mudah meledak, tetapi Soekarno kembali membuktikan sebagai singa podium berhasil menyejukkan massa dan mengemban kepercayaan diri mereka. Pidato imbauan yang dengan segera membangkitkan pengakuan yang bersemangat mengenai kesetiaan mereka. Dengan tenang Soekarno memerintahkan "marilah kita pulang sekarang dengan tenang, tenteram, tetapi tetap waspada".⁴⁰

Keutuhan dwi tunggal nampak terus diuji baik dari luar maupun dari dalam. Dari dalam terlihat ketika Syahrir didekati Tan Malaka pada bulan Oktober 1945. Syahrir didesak supaya menentukan kekuatannya untuk mengalahkan Soekarno, walaupun akhirnya disodok oleh Syahrir dengan beranggapan bahwa hal tersebut akan menghancurkan persatuan nasional.⁴⁷ Begitu juga Soekarno, pada 31 Oktober 1945 mengusulkan kepada Hatta agar ia mendukung gerakan untuk menyingkirkan dirinya dari jabatan kepresidenan dan menggantikannya dengan Tan Malaka. Hatta dengan tegas menyatakan tidak setuju.⁴⁸ Dari pihak lain, Van Mook menginginkan kompromi dengan mengumumkan kepada media massa pada 14 Oktober 1945, bahwa ia ingin dan bersedia bertemu dengan wakil-wakil kelompok Indonesia, termasuk Soekarno. Pemerintah Belanda bersedia untuk memberikan status dominion kepada Indonesia. Hal ini ditolak oleh Hatta dengan mempertanyakan, "Mengapa Indonesia harus dipaksa menjadi mitra persemakmuran, se-

hingga ekor Belanda akan mengibas anjing Indonesia ?". Pihak Republik Indonesia menekankan bahwa hubungan apa pun yang terbentuk antara Belanda dan Indonesia harus berdasarkan atas prinsip dua bangsa yang merdeka, dengan prasarat awal bahwa Belanda mengusulkan pengakuan Indonesia kepada PBB. Van Mook sebagai gubernur jenderal Hindia Belanda tidak bisa menjawab komentar Hatta, sehingga pembicaraan terpaksa dihentikan.

Berbagai insiden konfrontasi semakin meningkat saat jumlah pasukan Belanda yang masuk semakin banyak. Pada 1 November, Hatta mengeluarkan sebuah manifesto politik yang mengeritik sikap Belanda terhadap republik baru. Kaum nasionalis yang berkolaborasi tidak pernah mengabaikan cita-cita nasionalistik yang selama bertahun-tahun menjadi tuntutan mereka. Ia memperingatkan bahwa kegagalan untuk menerima kemerdekaan Indonesia tak lain adalah pelanggaran terang-terangan terhadap Piagam Atlantik dan Piagam PBB serta akan berakibat pertumpahan darah dan jatuh korban terus-menerus, karena hanya dengan kekerasan, Belanda baru dapat menghancurkan pemerintahan yang telah kami bentuk.⁴⁰

Berbagai *statement* Hatta kepada Belanda banyak ditentang oleh Tan Malaka dan kawan-kawan yang mengakibatkan berakhirnya Kabinet Presidensiil. Dekrit yang dikeluarkan Hatta pada 14 November 1945 mengubah Republik Indonesia ke dalam suatu sistem demokrasi parlementer. Syahrir diangkat menjadi perdana menteri. Dekrit terakhir ini tetap menjadi sumber ketidaksenangan Hatta, sebagai salah satu isu yang dihadapinya dengan sikap paling ambivalen dalam karier politiknya. Kesulitan dalam mengendalikan kelompok-kelompok pemuda merupakan suatu indikasi bahwa situasi perang menuntut kontrol pusat yang kuat.

Di tengah-tengah pergolakan yang menakutkan terhadap ancaman dari luar dan untuk politik internasional, muncul pertempuran 10 November 1945 yang mengakibatkan ribuan orang Indonesia meninggal. Situasi politik semakin panas. Selama tahun 1946 pemerintah Syahrir diserang karena me-

lemahkan suasana revolusioner melalui upayanya untuk membatasi semangat anarkis yang ada di kepulauan ini. Kelompok Tan Malaka menuduh pemerintah Syahrir mengejar kebijakan yang terlalu menguntungkan Belanda, sehingga bertentangan dengan komitmen ideologinya pada revolusi sosial. Dalam sebuah pamflet berjudul *Moestihat*, kelompok Tan Malaka menyatakan bahwa perjuangan bersenjata yang harus di-anut oleh pemerintah Syahrir, bukannya diplomasi. Pada waktu itu program Tan Malaka memperoleh dukungan luas. Pada 10 Februari 1946 Syahrir mengumumkan kepada KNIP bahwa Van Mook mendesak pembentukan Uni Republik Indonesia Serikat di bawah Kerajaan Belanda, dengan Republik Indonesia hanya mewakili Jawa. Ia diterima dengan penuh permusuhan. Akhirnya Syahrir menyerahkan surat pengunduran diri kepada Soekarno. Kembali dwi tunggal diuji kemampuannya untuk memecahkan problem tersebut. Soekarno – Hatta dengan tegas tidak dapat menerima program Persatuan Perjuangan sebagai kebijakan kabinet. Menyingkirkan para pemimpin Persatuan Perjuangan memang melicinkan kelangsungan perundingan dengan pihak Belanda. Pada 2 Oktober 1946, dwi tunggal menyerahkan kembali kekuasaan legislatif kepada Syahrir dengan membentuk kabinet ketiga. Kabinet ini merupakan badan yang mewakili berbagai kalangan luas partai dan kelompok nasionalis. Pada 15 Oktober 1946 diadakan perundingan antara Belanda dan Indonesia yang kemudian dikenal dengan nama Perjanjian Linggajati. Dalam pelaksanaannya, perjanjian tersebut menghadapi berbagai persoalan. Pada 27 Mei 1947 Belanda mengeluarkan tantangan berikut bagi Syahrir. Mereka menuntut supaya pihak Indonesia mengakui kedaulatan *de jure* Belanda dan segera dibentuk pemerintahan sementara untuk mengelola seluruh wilayah kepulauan sampai Negara Serikat Indonesia diresmikan pada 1 Januari 1949. Dalam pemerintahan sementara itu, wakil Kerajaan Belanda akan mengaku sebagai kekuasaan tertinggi. Pada saat yang sama pasukan Belanda telah mendesak ke pedalaman Jawa, sehingga menimbulkan spekulasi di kalangan kaum Republik bahwa perjuangan pada akhirnya akan berlangsung dalam pertempuran.

Pada 14 Agustus 1947 di Lake Success, New York, Syahrir menjadi orang Indonesia pertama yang menyampaikan pidato di depan Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan menghibau kepada Dewan Keamanan PBB supaya mendukung permintaan Indonesia akan kemerdekaan. Dalam tanggapannya, Dewan Keamanan menunjuk Komite Jasa Baik. Pihak Belanda dan Indonesia diperbolehkan memilih masing-masing satu delegasi. Belanda memilih wakil Belgia dan Indonesia memilih Australia. Bagi Hatta, hubungan pribadinya yang dekat dengan para anggota Komisi Jasa Baik, terutama wakil-wakil Australia, akan memainkan peranan penting dan pencapaian akhir perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tahun 1947 merupakan tantangan Hatta untuk menanamkan kemerdekaan. Dalam kumpulan pidatonya tahun 1947 - 1948, Hatta mengatakan bahwa, "Perjuangan menuntut pengorbanan, penderitaan, kesabaran dan keyakinan. Kita harus siap untuk bertempur dalam jangka waktu yang sangat lama dan kita harus menjaga supaya landasan perjuangan kita tetap suci, karena kesucian tujuan kita adalah kekuatan kita. Kebebasan kita tergantung dua hal. Pertama kekuatan pribadi kita sendiri, dan kedua simpati dunia internasional kepada kita".⁵⁰

Selanjutnya pada tahun 1948, Hatta juga menghadapi masalah yang cukup serius yaitu pengakuan Perdana Menteri Amir Syarifuddin terhadap Perjanjian Renville, karena dalam perjanjian itu Republik dikurangi perannya hanya sebagai negara bagian. Adapun wilayahnya hanya terdiri atas Jawa Tengah dan daerah-daerah yang kurang sumber daya di Sumatera. Menghadapi ketidakpuasan yang meluas di kalangan masyarakat bahkan banyak kelompok nasionalis yang menuduh Amir Syarifuddin pro-Belanda, akhirnya Amir Syarifuddin mengundurkan diri. Perjanjian Renville adalah titik kekalahan dalam perjuangan.

Hatta kembali ditantang untuk membuat konsep di tengah-tengah politik di dalam negeri. Hatta berjuang keras membentuk kabinet yang kemudian dikenal dengan nama Kabinet Hatta

yang memiliki empat tujuan pokok yaitu (a) implementasi Perjanjian Renville dengan perundingan terus-menerus melalui Komite Jawa Baik, (b) akselerasi pembentukan Negara Indonesia Serikat yang berdaulat dan demokratis, (c) nasionalisasi tentara dan pegawai negeri Republik berdasarkan pertimbangan kurangnya sumber daya negara, dan (d) upaya untuk melakukan rekonstruksi nasional. Isu yang paling hangat diperdebatkan dalam program Hatta baik di Jawa maupun Sumatera ialah rasionalisasi pegawai negeri dan angkatan darat. Pemikiran Hatta sebagai ekonom nampak dipertahankan di depan BPKNIP 16 Februari 1948 dengan mengatakan, **"Penghasilan negara tidak bisa menutupi belanja tanpa alasan yang jelas, tetapi perbedaan tersebut dapat diperkecil melalui rasionalisasi yang bijaksana dengan mengalihkan tenaga kerja dari pekerjaan yang tidak produktif ke bidang kegiatan yang produktif. Hal ini memerlukan persiapan dan penanaman modal kerja"**.⁵¹

Hatta menerapkan prinsip-prinsip manajemen bisnis pada pemerintahannya, tetapi situasi revolusioner yang kacau bukanlah merupakan landasan yang ideal bagi perencanaan yang baik, bahkan besarnya jumlah pengungsi yang membanjir ke kantong Republik, pemerintahan Hatta menghadapi persoalan pengangguran besar-besaran. Usaha untuk membentuk koperasi pertanian waktu itu juga menerima tanggapan yang lemah, tetapi dalam melakukan usaha rasionalisasi Hatta memperoleh dukungan kuat dari Nasution. Ia berusaha menaikkan pangkat yang diturunkan oleh pemerintahan Amir Syarifuddin, tetapi Jenderal Sudirman dan Urip Soemohardjo beranggapan bahwa dalam situasi krisis pemangkasan seperti itu harus ditunda.

Ketidakpuasan di kalangan militer semakin tampak jelas di wilayah Surakarta. Hatta menjadi sasaran tuduhan tampak jelas menjadi penyebab langsung terjadinya pembentukan internal yang pecah pada akhir tahun 1948. Nasution dan TB. Simatupang membela Hatta dengan menyatakan bahwa terlepasnya dari penyingkiran unsur-unsur anti pemerintah di

dalam tubuh angkatan bersenjata motif Hatta dibenarkan berdasarkan pertimbangan ekonomi.⁵²

Di sela-sela kehidupan politik itu, dukungan kuat Soekarno terhadap Hatta membuat semangatnya tak diragukan lagi dalam menghadapi pihak Belanda yang ingin menguasai lagi perairan Indonesia. Sebagaimana yang terjadi pada Syahrir dan Amir, Hatta bukan hanya dihadapkan pada sikap keras Belanda, tetapi juga mengalami serangan yang semakin meningkat di garis belakang. Dalam bulan Mei 1948 Front Demokrasi Rakyat melancarkan ofensif terhadap pemerintahan Hatta, ditambah kembalinya pemimpin PKI Muso pada 3 Agustus 1948 membuat Hatta lebih waspada; karena itu pada 2 September 1948 Hatta menyampaikan pembelaan atas kebijakan pemerintah, sekaligus memperingatkan Republik mengenai ancaman komunis dengan mengatakan, "Kalau perjuangan kita semata-mata dilihat dari sudut pandang komunis, maka memang dapat dikatakan bahwa kita menganut kebijaksanaan Rusia. Bagi kaum komunis, Rusia merupakan landasan kerja untuk mewujudkan cita-citanya. Bagi kaum komunis, jatuh banggunya seiring dengan Uni Soviet dan karena itu pertentangan politik internasional". Lebih lanjut Hatta mengulangi imbauan Syahrir tentang perlunya kebijakan independen yang bebas dari dominasi kekuatan adidaya. Konfrontasi antara Hatta dengan PKI semakin nampak ketika Muso di Madiun menyampaikan pidato tantangannya dengan mengingatkan kaum komunis Indonesia karena membiarkan revolusi dipimpin oleh kaum borjuis, serta menyatakan bahwa elemen-elemen yang menentang arah revolusi harus disingkirkan.⁵³ Pada saat Hatta mengalami krisis pemikiran, tiba-tiba muncul Soekarno. Di sinilah dwi tunggal menunjukkan adanya persatuan. Soekarno menggunakan daya tarik untuk menarik rakyat. Pada 19 September 1948 ia mengimbau kepada rakyat untuk memilih Muso atau dwi tunggal. Muso menyampaikan jawaban melalui radio dengan mengajak rakyat supaya menggulingkan Soekarno-Hatta yang kemudian dikenal dengan nama Pemberontakan PKI di Madiun.

Hatta dengan penuh tanggung jawab menyelenggarakan sidang darurat BPKNIP, serta meminta izin untuk menggunakan wewenang mutlak bagi presiden serta pernyataan keadaan darurat. Sebagai menteri pertahanan, Hatta menugasi pasukan Divisi Siliwangi untuk menumpas pemberontakan. Pasukan Republik dengan cepat bisa memadamkan pemberontakan dan pada 30 Oktober 1948 Muso terbunuh dalam suatu kontak senjata. Secara keseluruhan penumpasan pemberontakan Madiun meningkatkan status pemerintahan Hatta. Berbagai pakar terkemuka pada waktu itu menyanjung Hatta. Coast menyatakan bahwa perasaan umum di Yogyakarta pada saat itu salah bahwa kaum komunis dua kali berkhianat kepada Hatta dan pemerintahannya, berkhianat kepada perjuangan nasionalis.⁵⁴ Roem mengatakan, hanya Hatta yang bisa mengatasi Madiun.

Kesempatan Hatta untuk beristirahat ternyata tidak lama. Setelah krisis Madiun, ia dihadapkan pada persoalan perundingan dengan delegasi Pemerintah Belanda. Dalam perundingan itu nampaknya Belanda ingin menguasai lagi Indonesia, karena Belanda berusaha mengasingkannya dari setiap orang republik. Ia mengirim sepucuk nota kepada Belanda yang berbunyi sebagai berikut.

"Kami benar-benar siap untuk mengakui bahwa Wakil Tinggi memiliki hak veto atau tindakan-tindakan berbagai organ pemerintahan sementara Federal. Kami siap untuk mengakui lebih jauh bahwa Wakil Tinggi diberi kekuasaan darurat untuk bertindak dalam keadaan perang, keadaan pertempuran atau keadaan tidak aman. Sebagai bagian dari perjanjian yang menyeluruh, kami harus siap untuk menetapkan bahwa Wakil Tinggi sendiri merupakan hakim tertinggi dari kebutuhan untuk menjalankan kekuasaan luar biasa di bawah keadaan seperti ini.⁵⁵

Dari bunyi nota tersebut, nampak Hatta mempertaruhkan lehernya karena Hatta dapat membaca suasana hati Belanda yaitu ingin memiliki kembali wilayah Indonesia. Hal ini terbukti dengan adanya serangan militer yang kemudian dikenal

dengan nama Agresi Militer Belanda II yang dilancarkan dengan ledakan bom di Maguwo 19 Desember 1948. Para pemimpin Republik ditangkap. Hatta sebelum ditangkap berhasil mendiktekan pidato singkat untuk diedarkan di wilayah Republik yang isinya menyerahkan kekuasaan sepenuhnya kepada Safruddin Prawironegoro untuk memimpin suatu pemerintahan darurat yang berkedudukan di Bukittinggi. Pembuangan pemimpin-pemimpin Republik dilakukan 28 Desember 1948 antara lain Soekarno, Haji Agus Salim, dan Syahrir di tempat peristirahatan Prapat, sedangkan Hatta, Assaat, dan A. Gaffar Pringgodigdo ditahan di villa kecil di Pulau Bangka. Kemudian dalam bulan Februari 1949 Soekarno dan Haji Agus Salim dipindah ke Bangka. Suatu taktik Belanda agar supaya dapat diajak berunding. Hal ini tidak menggoyahkan dwi tunggal dan tetap menolak berunding selama masih dalam tahanan.

Tekanan pihak Belanda semakin meningkat dengan mengusulkan supaya diadakan Konferensi Meja Bundar di Den Haag. Dalam konferensi itu seluruh Negara Indonesia termasuk Republik diundang untuk membicarakan syarat-syarat dan cara-cara yang memungkinkan pengalihan kedaulatan dalam waktu sesegera mungkin dapat dilakukan.⁵⁶

Suatu langkah strategi yang dilakukan oleh Republik ialah mengundang negara-negara BFO untuk menghadiri Konferensi Antarindonesia yang diselenggarakan pada pertengahan bulan Juli di Yogyakarta sebelum saat pembukaan Konferensi Meja Bundar di Belanda yang dijadwalkan bulan Agustus 1949. Di dalam konferensi itu tidak ada kebulatan suara di kalangan para pemimpin BFO mengenai pengalihan kedaulatan secara mutlak kepada Negara Indonesia Serikat. Anak Agung Gde Agung memimpin satu kelompok yang sangat mendukung dwi tunggal dengan gagasan kemerdekaan sepenuhnya, sementara Sultan Hamid dari Kalimantan Barat memimpin kelompok lain yang lebih meyakini ikatan yang lebih kuat dengan Belanda. Dalam konferensi *Inter Indonesia* itu Hatta mengucapkan pidato pembukaan yang menekankan perlunya persatuan. Sebagai perdana menteri, Hatta akan memimpin delegasi RI ke KMB di Den Haag dan mengangkat Roem sebagai wakil-

nya. Pembukaan resmi KMB berlangsung di Gedung Ksatrian Den Haag 23 Agustus 1949. Dalam sidang itu nampak kejajaman pidato Hatta sebagai seorang nasionalis. Ia mengatakan bahwa Belanda telah gagal menghargai betapa besarnya perubahan yang dialami rakyat Indonesia selama berada di bawah kekuasaan Jepang yang memperkuat keinginan untuk merdeka.⁵⁷ Konflik Indonesia – Belanda terutama merupakan persoalan psikologis tanpa mengungkapkan bahwa kini tiba gilirannya untuk mempraktekkan muslihat psikologis terhadap Belanda. Hatta menjamin bahwa modal dan kepentingan ekonomi Belanda di Indonesia tidak akan diganggu. Suatu janji yang kemudian akan terbukti sulit dipenuhi. Hatta selanjutnya mengimbau adanya suatu pengertian yang baru antara rakyatnya dengan Belanda sebagai berikut.

"Selama empat tahun kedua rakyat kita telah hidup saling bermusuhan dan dengan perasaan dendam di dalam hati mereka. Selama empat tahun kita saling berperang dan membunuh satu sama lain, dengan pengorbanan barang dan darah secara sia-sia. Sekarang mulai kita rayakan era baru berdasarkan perdamaian dan kerjasama"⁵⁸

Sisi lain yang hampir membuat konferensi menemui jalan buntu adalah penolakan Belanda untuk membebaskan Irian Barat, tetapi masalah Irian Barat akhirnya terpecahkan pada pukul 05.00, 1 November 1949, dengan kompromi bahwa pemindahan kedaulatan Irian Barat akan diselesaikan dalam waktu setahun sejak konferensi itu. Dalam pidato penutupan konferensi, Hatta mengatakan bahwa, **"pekerjaan kami agak sulit karena adanya kenyataan bahwa tidak seluruh persoalan dan Konferensi Meja Bundar ini dapat diselesaikan"**. Ia juga berusaha menjelaskan bahwa isi yang baru berbeda dengan kebijaksanaan persekutuan pada masa lampau yaitu dalam hal orang Indonesia tidak lagi menjadi adik, sebagaimana pada masa lalu melainkan berdasarkan keinginan bebas, persamaan, dan hak yang samalah mereka melanjutkan persekutuannya dengan Belanda.⁵⁰

Sekembalinya Hatta dari konferensi tersebut timbul pro dan kontra. Bagi Hatta, barangkali aspek yang menyakitkan hati ialah suara yang menentang perjanjian tersebut dari kalangan PSI, sedangkan yang lain termasuk dari tentara yaitu Nasution mendukungnya. Akhirnya pada 27 Desember 1949, dalam suatu upacara yang mengesankan di istana kerajaan di Amsterdam, Hatta menerima kedaulatan negerinya. Ia mengucapkan pidato singkat yang berisi harapan mengenai masa depan Indonesia. Secara politis Indonesia telah bebas, ia memimpin perundingan terakhir untuk memperoleh kemerdekaan itu. Dalam memoarnya, ia mengatakan bahwa itulah puncak karier politiknya terutama sebagai dwi tunggal. Tahun-tahun berikutnya mengabur tanpa arti atau terlalu menyakitkan untuk dicatat. Kemitraannya dengan Soekarno menyatu di dalam suatu periode perjuangan melawan dominasi kekuasaan asing. Ketika tujuan kemerdekaan telah tercapai, konflik laten mengenai bagaimana Indonesia harus diatur antara kedua orang ini muncul dalam provinsi lebih besar. Perpecahan antara kedua tokoh itu diperbesar oleh eksploitasi partai-partai politik yang memanfaatkan dwi tunggal demi kepentingan mereka sendiri. Dukungan yang paling konsisten bagi Hatta berasal dari partai Islam besar Masyumi yang sangat anti komunis. Penentangannya bukan saja berasal dari PKI, tetapi juga dari sayap kiri PNI dan Partai Murba yang diilhami ideologi Tan Malaka.

Walaupun Hatta dihadapkan pada situasi internal, namun ia sempat menyusun program dengan tujuan sasaran utama yaitu antara lain memperbaiki perekonomian yang terguncang, pembentukan pasukan pertahanan yang baru yang menjamin perlindungan hak-hak azasi manusia, dan melakukan langkah persiapan bagi penyelenggaraan pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat di parlemen serta memilih majelis tinggi yang akan menyusun kerangka Undang-Undang Dasar yang permanen. Di samping itu juga memperbaiki bidang pendidikan.⁶⁰

Lebih lanjut Hatta menekankan dua persoalan internasional yang harus diatasi ialah bagaimana mengendalikan arus tengah antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, dan bagaimana membujuk Belanda supaya melepaskan Irian Barat. Namun demikian

tantangan Hatta tahun 1950an ini banyak menghadapi persoalan domestik dari pada luar negeri. Persoalan domestik itu antara lain munculnya pergolakan di tingkat lokal, bahkan keresahan semakin meningkat di tahun 1952 terutama di kalangan Angkatan Darat. Hatta akrab dengan kelompok perwira yang lebih profesional, Soekarno membangun kelompok pendukung di kalangan para perwira militer yang dirugikan oleh program modernisasi. Ia menjadi tumpuan pimpinan berbagai golongan terutama para perwira eks Peta yang kebanyakan menentang Nasution dan Simatupang. Para pendukung golongan pro-Soekarno di parlemen semakin meningkatkan kritik terhadap kebijaksanaan pertahanan Wilopo dan memaksa Menteri Pertahanan Sultan Yogyakarta untuk menyerahkan jabatan. Nasution tidak puas oleh campur tangan pemerintah dalam urusan militer. Ia kemudian melancarkan demonstrasi yang menuntut diselenggarakannya pemilihan umum untuk memilih pemerintahan yang baru. Kudeta kecil ini dilancarkan pada 17 Oktober 1952. Penentangan militer dan menurunnya perekonomian membuat jatuh-bangunnya kabinet. Kelemahan kabinet yang berganti-ganti mengarahkan perhatian publik kembali pada dwi tunggal, tetapi kedudukan Bung Hatta semakin sulit, bahkan sekembalinya Soekarno dari perjalanan luar negeri, pada 28 Oktober 1956, ia mengimbuu teman-teman seperjuangannya untuk mengubur semua partai dengan menunjukkan bahwa ia memiliki konsep baru tentang demokrasi yang disebut Demokrasi Terpimpin.⁶¹ Dengan pernyataan itu Bung Hatta semakin sulit untuk menyatakan dirinya sebagai dwi tunggal. Dalam pidatonya di Universitas Gadjah Mada, 27 November 1956, saat menerima gelar doktor kehormatan, Hatta mengatakan bahwa perjuangan nasionalis bukan hanya melawan Belanda saja, tetapi juga membaktikan diri untuk membebaskan rakyat Indonesia dari penindasan dan ketidakadilan sosial dan berusaha menerapkan deklarasi universitas tentang hak-hak azasi manusia. Ia menyarankan agar cita-cita Indonesia ialah demokrasi sosial yang diilhami oleh pemikiran sosialis barat, Islam, dan demokrasi pedesaan Indonesia.

Dengan mempertahankan Pancasila sebagai falsafah negara, Hatta mencatat bahwa falsafah ini menyatukan unsur-unsur keadilan sosial dan agama. Hatta mengecam partai politik yang tidak bertanggungjawab dan berjuang demi keuntungan sehingga menimbulkan kekacauan yang begitu mendalam di kalangan masyarakat umum. Hatta mengungkapkan pandangannya bahwa sejak tahun 1950 tipe pemerintahan yang dijalankan ialah demokrasi parlementer tanpa demokrasi dan tanpa parlemen, sehingga mengakibatkan anarki politik. Kekuasaan pemerintah semakin runtuh karena partai politik memperkenalkan dan mempertahankan kebiasaan yang aneh. Bahwa kekuasaan pada kenyataannya tidak terletak pada pemerintahan yang bertanggungjawab, melainkan pada dewan partai yang tidak bertanggungjawab^{6 2}. Bagi Hatta, akar-akar demokrasi harus diasuh, bukan dipatahkan sebelum dapat tegak dan berkembang menjadi matang. Para pemimpin sipil dan rakyat memerlukan waktu untuk memperoleh pengalaman menjadi bagaimana seharusnya suatu sistem yang demokratis harus dijalankan. Ia sepakat bahwa sistem tersebut memerlukan modifikasi dalam periode transisi tetapi bukan penghapusan. Jika Soekarno memutuskan untuk menghancurkan demokrasi, ia yakin bahwa tidak ada jalan lain selain mengundurkan diri dari jabatannya, bahkan ia menuduh Soekarno gagal menganalisis konsepsi mengenai demokrasi dengan kepemimpinan, dan sebagai akibatnya Soekarno hanya sampai pada jembatan yang harus diseberangi tetapi apa bentuk dan isinya belum tergambarkan.

Hatta membela demokrasi parlementer dari tuduhan Soekarno yang mengatakan bahwa sistem ini menunjukkan demokrasi pertarungan bebas. Ia menyatakan bahwa pelaksanaan yang sesuai dari sistem seperti itu tergantung pada kepemimpinan yang bertanggungjawab. Dalam demokrasi terpimpin pun harus seperti itu. Salah satu lembaga ekonomi yang menyentuh hati Hatta pada demokrasi terpimpin ialah lembaga koperasi, karena pada masa itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hatta menganjurkan dasar suka rela berkoperasi harus dipegang terus, karena ada kecenderungan yang tidak

sehat di Indonesia pada waktu itu yang mencap cita-cita Hatta sebagai cita-cita liberal. Hal ini menandakan mata mentalitet yang tidak sehat. Hatta mengamati bahwa ada kecenderungan untuk memfeodalisasi gerakan koperasi. Ada usaha mengganti warung Cina yang bertebaran di mana-mana dengan nama koperasi. Di samping itu orang komunis melihat koperasi sebagai penghalang baginya dalam mencapai cita-citanya.

Hatta melihat bahwa bantuan yang diberikan negara-negara maju pada negara-negara berkembang terlalu diletakkan pada rasio ekonomi. Tekanan lebih terletak pada bantuan modal dan keterampilan, pada hal faktor-faktor psikologis sangat perlu diperhatikan. Faktor ini berkaitan dengan bagaimana membangun semangat dan energi penduduk dalam berkoperasi. Rasa rendah diri yang terbina sebelumnya karena kolonialisme hendaklah dihapus. Koperasi, kata Hatta dapat melakukan ini karena menyangkut orang-orang kecil yang jumlahnya banyak, dengan demikian lembaga koperasi mempunyai dua arah tujuan, yakni ekonomi dan moralitas. Kemudian pembinaan demokrasi dengan cara bermusyawarah dan mengambil keputusan, pelayanan sosial karena pengurus yang bekerja tidak ditentukan berdasarkan upah, transaksi secara tunai sehingga orang tidak hidup secara lebih besar pasak dari pada tiang. Orang koperasi harus jujur. Dengan koperasi, juga dapat melatih anggota hidup hemat. Begitu kekecewaan Hatta, tidak seorang pun mereka mampu mempersatukan. Dwi tunggal hanya akan merupakan bayang-bayang yang tidak memenuhi fungsinya. Dalam keadaan seperti itu, di tahun 1959 Soekarno mengeluarkan manifesto politik yang disebut Manipol Usdek. Kalangan akademik dan rakyat wajib patuh terhadap prinsip-prinsipnya.

Bersamaan dengan itu Hatta meningkatkan peranannya sebagai pendidik politik dengan memusatkan perhatian pada mahasiswa dan perwira-perwira militer yang sedang mengalami pelatihan-pelatihan. Hatta menyerang standar tingkah-laku yang ada dan mengorbankan kepada khalayak supaya tidak bertindak sebagai kambing-kambing, tetapi lebih memilih menjadi penggembala dengan menyingkirkan ambisi untuk mem-

perkaya diri sendiri. Dalam karangannya yang berjudul *Demokrasi Kita*, Hatta menyampaikan kritik pribadi secara terbuka kepada Soekarno dengan menunjuk pada tindakannya yang jelas-jelas mengabaikan UUD itu dengan mengecam tindakan membubarkan MPR dan parlemen terpilih. Hatta mengajukan pandangan bahwa demokrasi telah digantikan oleh suatu kediktatoran. Walaupun terdapat perbedaan di antara kedua tokoh ini, tetapi ternyata Hatta selalu berdiri di sisi Soekarno dalam hal mempertahankan Pancasila. Pada ulang tahun proklamasi ke-18. Hatta meminta para pemuda supaya tidak menggunakan Pancasila hanya demi *lip service* saja, dengan mengatakan, "Ketuhanan Yang Mahaesa bukan hanya berarti saling menghormati agama masing-masing, tetapi merupakan landasan menuju ke arah kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran dan persaudaraan. Dengan ladsan ini pemerintah bangsa tidak boleh menyimpang dari jalan lurus ke arah kesejahteraan rakyat dan keselamatan masyarakat, perdamaian dan persaudaraan nasional. Diharapkan tujuan-tujuan ini akan hidup di dalam semangat pemuda hari ini dan di masa depan sehingga mereka dapat benar-benar menjalankan tugas sejarah mereka bagi kepulauan dan bangsa ini."⁶³

Dalam perkembangannya hingga tahun 1965, suasana Indonesia nampak mengalami krisis yang tidak hanya semata-mata berkaitan dengan kampanye Soekarno untuk mengganyang Malaisia, tetapi juga PKI karena PKI telah berhasil masuk ke dalam kabinet *Nasakom* yang dibentuk Soekarno yang kemudian mendapat reaksi keras di kalangan Angkatan Darat, bahkan bagi mereka yang tidak setuju dengan Nasakom dikatakan sebagai pemimpin reaksioner. Pada 31 Mei 1965 Soekarno meminta keempat pimpinan angkatan untuk membantu mendirikan milisi, suatu *Angkatan Kelima*. Dari keempat angkatan ini, hanya Omar Dhani yang menawarkan untuk menyelenggarakan pelatihan rakyat. Hatta menyarankan Yani supaya memperhatikan secara cermat atas apa yang terjadi. Ia berkomentar dengan tegas. "Saya lihat bahwa Angkatan Darat adalah satu-satunya kekuatan yang mampu menghadapi satu-satunya kekuatan yang mampu menghadapi PKI".⁶⁴ Dari

sinilah ternyata wawasan Hatta cukup luas dan tampak mudah membuat pilihan dengan mengatakan jika totaliterisme tidak dapat dihindari, ia lebih menyukai tentara Indonesia untuk duduk di puncak kekuasaan.

Akhirnya menjadi kenyataan bahwa pada 30 September 1965 terjadi pemberontakan PKI dengan tentara. Sebuah peristiwa yang kemudian dikenal dengan nama Gerakan Tiga Puluh September. Kudeta tersebut bertujuan untuk menyingkirkan para perwira Angkatan Darat yang paling menentang program nasakomisasi Soekarno. Seberapa jauh Soekarno terlibat Gestapu, tidak pernah jelas dan belum ada argumentasi yang kuat. Yang jelas, menjelang akhir tahun 1965, sungai-sungai di Indonesia secara harafiah banjir darah, suatu bentrokan antara saudara melawan sesama saudara. Suatu tindakan anti PKI menjadi katup pelepas bagi kekecewaan yang menumpuk selama bertahun-tahun yang akhirnya meletus tindakan revolusioner.

Dari suasana krisis yang tak teratasi, dalam bulan Maret 1967 Soekarno diganti Soeharto. Orde Baru memiliki sosok penyelamat yang penting bagi Hatta. Soeharto telah bertekad untuk melakukan tindakan penyelamatan kekacauan ekonomi yang diwarisi pada masa lalunya, dan sekaligus mencanangkan pembangunan sebagai slogan bagi masa mendatang. Setiap pengabdian untuk memperbaiki ekonomi dan pembangunan bangsa terdengar manis di telinga Hatta.

Keikutsertaan Hatta pada masa Orde Baru, nampak menjelang 1970, ketika beberapa surat kabar di antaranya *Indonesia Raya* menyiarkan tentang adanya beberapa pejabat yang semakin memperkaya diri. Hatta ditunjuk oleh pemerintah sebagai penasihat bagi komisi khusus yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelidiki korupsi, diketuai oleh mantan Perdana Menteri Wilopo. Pada waktu itu ditemukan dokumen yang isinya menunjuk adanya indikasi manipulasi dana secara besar-besaran di Pertamina.

Dalam perjalanan sejarahnya, Orde Baru banyak menghadapi tantangan kritik-kritik yang membangun banyak di-

lontarkan oleh Hatta. Ia prihatin dengan strategi rejim militer untuk menjaga supaya tidak muncul oposisi yang kuat terhadap bagian pemerintah yang telah dibatasi, yang dijadwalkan pada Pemilihan Umum 1971. Golongan Karya yang dibentuk pada tahun 1964 di bawah prakarsa Angkatan Darat untuk mengimbangi pengembangan organisasi PKI pada tahun 1969, telah menjadi alat untuk melemahkan partai-partai politik yang ada. Hatta menghimbau kepada khalayak supaya memilih pemimpin yang bertanggungjawab dengan menggunakan masa lampau sebagai pelajaran untuk memelopori jalan baru.⁶⁵ Hatta kembali menyarankan supaya memilih menoleh ke Inggris sebagai model pemerintahan yang demokratis. Tahun 1971 merupakan tahun kekecewaan bagi Hatta karena laporan komisi korupsi memang menghasilkan Undang-undang Anti Korupsi yang disetujui parlemen, tetapi hal ini dinetralkan oleh penolakan pemerintah untuk mengadili mereka yang paling bersalah sekalipun.⁶⁶

Protes-protes terhadap pemerintah Orde Baru semakin nampak pada bulan Januari 1974 Suatu demonstrasi mahasiswa yang bertepatan dengan kunjungan Perdana Menteri Jepang Tanaka, dikenal sebagai sebutan Malari yang menunjukkan malapetaka 15 Januari. Sebulan sebelum Malari, dalam sebuah artikel berjudul "Modal Asing" yang ditulis oleh surat kabar mahasiswa, *mahasiswa Indonesia*, Hatta telah menyatakan bahwa Pasal 33 UUD 1945 mengenai perekonomian yang diatur menurut koperasi, berdasarkan situasi di negara-negara Skandinavia telah diabaikan. Ia menyatakan bahwa para ekonom pemerintah lulusan Amerika telah mengalihkan kebijakan ekonomi Indonesia dari perkeonomian terpimpin sesuai dengan UUD 1945 ke arah perekonomian yang berlangsung ke arah liberalisme ekonomi. Pengusaha Indonesia belum siap menghadapi periode liberalisme ekonomi. Hatta menunjuk kerusakan yang disebabkan oleh eksploitasi asing dan ketidakmampuan pengusaha Indonesia untuk bersaing dengan Cina, dengan mengatakan bahwa warga negara baru keturunan Cinalah yang paling memperoleh keuntungan dari pinjaman asing. Sekalipun

oleh para ahli ekonomi Orde Baru diejek, tetapi Hatta menolak untuk mengubah penekanannya kepada koperasi dengan mengatakan inilah yang terbaik bagi kesejahteraan kelompok-kelompok ekonomi yang paling lemah.

Dalam mendukung ideologi negara, Hatta mengutarakan pemikirannya saat menerima doktor kehormatan yang ketiga kalinya dalam Hukum Konstitusi yang diberikan oleh Universitas Indonesia. Pidato itu berjudul *Ke Arah Negara yang Berdasarkan Hukum*, suatu judul yang merupakan indikasi bahwa ia tidak menganggap pemerintah yang sekarang berlaku sebagai pemerintah yang sesuai dengan UUD. Kalau diperhatikan ternyata pidato itu menyerupai sebuah manifesto baru yang berlangsung sejajar dengan "Ke Arah Indonesia Merdeka" yaitu pernyataan politik Hatta yang direncanakan bagi PNI Baru pada tahun 1932. Kedua pemikiran tersebut menetapkan tujuan-tujuan yang harus dicapai sebelum Indonesia bisa disebut "merdeka". Pidato yang kedua itu (masa Orde Baru) mengatakan arus pemerintahan militer otokratik di Indonesia sama berbahaya. Di samping itu ia juga menunjuk pada cara-cara pemerintah yang belum menjalankan perannya sesuai dengan ideologi negara. Salah satu kesulitan yang dihadapi oleh komisi anti korupsi ialah kurangnya akunting secara terinci dari kantor pemerintah. Ia mengungkapkan tidak sependapat dengan metode seperti itu dan mengatakan masih ada kekuasaan yang tidak sesuai dengan UUD 1945 yang disebut *belanja nonbudgeter*. Kebiasaan seperti ini harap diperhatikan^{6 7}

Persoalan lain yang cukup rumit antara lain mengenai pengambilalihan Indonesia atas Timor-Timur. Hatta tidak memutuskan untuk mendukung pihak yang mana. Ia curiga dengan unsur komunis dalam Fretilin dengan menuduh bahwa ada pengaruh asing, karena rakyat yang menyebut dirinya sebagai Wakil Timor-Timur ternyata terdapat orang-orang dari Afrika dan negara lain.

Suatu hal yang cukup mengesankan dalam pemerintahan Orde Baru ini adalah dibentuknya **Panitia Lima** untuk memberi penafsiran tunggal tentang Pancasila karena pengazastunggalan

memang memerlukan kesatuan penafsiran. Karena Hatta termasuk salah seorang pendiri RI, maka sudah barang tentu dalam rangka penafsiran itu, ia tidak dapat ditinggalkan, karena itu ketika Panitia Pancasila didirikan atas anjuran Presiden Soeharto pada awal tahun 1975, anggota-anggotanya terdiri atas Moh. Hatta, Ahmad Soebardjo Djojoadisurjo, Alex Andries Maramis, Sunaryo, dan Abdul Gafar Pringgodigdo. Panitia ini dikenal dengan nama Panitia Lima.⁶⁸ Kebetulan kelima tokoh ini sama-sama berasal dari pergerakan "Perhimpunan Indonesia" tahun 1920an di Negeri Belanda. Di dalam rapat-rapatnya, panitia tersebut bukan sekedar membicarakan arti dan tafsiran Pancasila, tetapi juga hal-hal yang berkenaan dengan UUD, seperti hak-hak azasi manusia, keadilan sosial, serta soal pembentukan UUD itu sendiri. Pembicaraan lain yang cukup mengesankan adalah sentilan terhadap perkembangan keadaan, termasuk program pembangunan yang disusun dan dilaksanakan pemerintah. Selanjutnya mengenai hak-hak azasi manusia didukung oleh Panitia Lima dan dapat dituangkan dalam bentuk undang-undang.⁶⁹ Semangat Panitia Lima tampaknya ditanggapi negatif oleh para teknokrat terutama kalau pembicaraan menyangkut pembangunan ekonomi.⁷⁰ Hatta keluar dengan konsepnya yang terkenal tentang Pasal 33 UUD, dan menurutnya supaya dipegang oleh pemerintah. Tentang Pancasila ini pada dasarnya Panitia Lima sepenuhnya mengikuti jalan pikiran Hatta yang berpendapat bahwa dasar Ketuhanan Yang Mahaesa menjadi dasar yang memimpin cita-cita kenegaraan kita, yang memberikan jiwa kepada usaha menyelenggarakan segala yang benar dan baik,⁷¹ dengan demikian politik negara mendapat dasar moral yang kuat.

Pancasila, menurut Panitia Lima juga berlaku sebagai dasar politik luar negeri, politik bebas aktif adalah cermin dari padanya. Di samping itu tentang Demokrasi Pancasila, Hatta sangat setuju. Baginya, ini sama dengan demokrasi sosial yaitu demokrasi politik dan ekonomi. Lebih lanjut Hatta mengatakan Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang diridhai oleh Tuhan Yang Mahaesa, dijalankan dengan jiwa yang murni yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawarah/perwakilan

untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perjuangan untuk melaksanakan dan menghidupkan demokrasi Pancasila harus dikemudikan oleh sikap cinta akan kebenaran dan keadilan, kebaikan serta dengan rasa persaudaraan dan toleransi.

2.3 *Pengaruh dan Tantangan*

Berbicara tentang Bung Hatta memang penuh ragam, warna dan gaya bagaikan tiada habis-habisnya. Hatta yang mewakili anak zamannya dapat dikatakan sebagai seorang nasionalis sejati, demokrat tulen, dan sosialis manusiawi. Nasionalisme Bung Hatta adalah nasionalisme yang berkedaulatan rakyat yang berperspektif demokrasi politik, demokrasi ekonomi, dan demokrasi sosial yang berakar dalam demokrasi asli bangsanya dan derajad dengan nilai-nilai agamanya serta nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Dalam perantauan mentalnya ia bertemu dengan nilai-nilai demokrasi barat, berpapasan dengan pemikiran Marx dan tokoh-tokoh sosialis lainnya, berjumpa dengan fasisme dan totaliterisme.

Ia menemukan kontradiksi antara fasisme dan kolektivisme-komunisme di satu pihak dengan nasionalismenya yang berkedaulatan rakyat dipihak lain. Elemen keagamaan yang sangat berakar pada diri Hatta menimbulkan dia menentang habis-habisan terhadap fasisme dan kolektivisme-komunisme. Ia menemukan beberapa segi positif dari demokrasi Barat yang secara kritis dan reflektif dipahaminya untuk mengembangkan konsep kedaulatan rakyat yang berakar dari demokrasi asli bangsanya yang terdapat dalam sistem kehidupan masyarakat pedesaan kita. Melalui itu semua Bung Hatta bukan saja berhasil melakukan dan mengembangkan pemikiran-pemikiran politik, ekonomi dan sosialnya yang orisinal, berbobot, tetapi juga mengaitkannya ke dalam konsep nasionalisme yang berkedaulatan rakyat. Ia dengan gigih memperjuangkan konsep hasil pemikiran itu sampai akhir hayatnya. Meskipun dalam memperjuangkan cita-citanya menemui tantangan-tantangan yang menimbulkan kekecewaan pada dirinya seperti halnya dalam menghadapi kapitalisme, tetapi ia berusaha menolak dengan meng-

adakan gerakan koperasi. Gerakan koperasi ini tidak hanya mengarah pada bidang ekonomi tetapi juga dalam bidang politik. Koperasi dengan sifat-sifatnya akan menimbulkan sifat-sifat yang diharapkan dapat menambah tegaknya demokrasi di Indonesia, namun berhubung dengan perkembangan BUUD/KUD (Koperasi Unit Desa) dalam masa Orde Baru yang juga menyebarkan koperasi di segenap daerah desa tepi bermula dari instruksi dari atas, ia pesimis bahwa cita-cita koperasi dan cita-cita masyarakat berkoperasi yang sesungguhnya dan yang bisa menunjang berkembangnya demokrasi menempatkan awal kemauan bersama pada tingkat bawah, koperasi juga tidak sesuai bila dimulai dari atas.

Pemahaman Hatta tentang Islam maupun tentang sosialisme dan demokrasi, setelah Indonesia merdeka apa lagi pada masa Orde Baru, selalu menekankan untuk mengaitkannya dengan Pancasila. Begitulah pikiran kebangsaannya, walaupun disadari tantangan-tantangan yang dihadapi cukup berat, sebab ia merasa cukup dengan dasar ini sebagai dasar untuk membina dan membangun negara. Sila pertama baginya memberikan dasar moral yang kuat untuk tempat merujuk sila-sila lain yang dianggapnya sebagai dasar penumbuhan ekonomi, sosial dan politik. Pancasila dapat dikatakan sebagai kontak rakyat Indonesia seluruhnya untuk dikatakan sebagai kontak rakyat Indonesia seluruhnya untuk menjaga persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa.

Hubungan Hatta dengan Soekarno merupakan drama utama dalam kegiatan politiknya, yang mempengaruhi hubungan akrab dengan sahabatnya, Syahrir. Pengunduran dirinya dari jabatan wakil presiden tahun 1956, memadukan unsur-unsur kemarahan dan pembebasan. Hatta mempunyai kecenderungan bersikap ambivalen dalam pernyataan-pernyataan mengenai Soekarno. Kadang-kadang ia bersifat protektif dan penuh pengertian, tetapi di lain waktu mengatakan kekecewaannya dan kecaman terhadap Soekarno. Hatta sangat tidak senang dengan Soekarno yang sejalan dengan kaum komunis sebagai pihak yang bertanggungjawab atas rintangan kemajuan tujuan-tujuan sosial dan ekonominya.

Dampak politik semakin melemah ketika Hatta mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden. Pengertian Dwi Tunggal hanya sebuah nama yang tidak ada artinya. Soekarno gandrung pada persatuan, sedemikian rupa sehingga ia menempatkannya di atas segala-galanya. Hatta mementingkan tujuan, sedangkan persatuan lebih dipandang sebagai alat, karena itu ia tidak menyukai Permusyawaratan Perkumpulan-perkumpulan Politik Kebangsaan Indonesia pada akhir 1920an yang terdiri atas bermacam-macam paham dan perbedaan itu lebih menyebabkan kegagalan bukan keberhasilan dalam mencapai tujuan. Di samping soal dasar yang tidak dipersatukan, Hatta juga melihat ketidakgunaan Nasakom. Prof. Kahin dari Universitas Cornell menyatakan bahwa, **"Hatta pasti kecewa karena harapannya tidak terwujud, tetapi ia telah meletakkan dasar-dasar yang diharapkan berkembang dengan sehat yaitu sistem kepartaian, sistem perwakilan, otonomi daerah serta ekonomi. Sistem tersebut tidak dilanjutkan secara konsisten sehingga korupsi politik dan ekonomi kian menjadi. Itulah tantangan Hatta yang menjadikan beban bagi dirinya."**

Jalan pikiran Hatta memang bertolak belakang dengan pertumbuhan peranan modal besar/modal asing di negeri ini. Pemasukan modal asing harus selektif. Ia tidak ingin Indonesia dikuasai oleh modal besar swasta, atau terenggam pada beberapa orang. Ia selalu mengingatkan bahwa perjuangan kemerdekaan yang berhasil hendaklah diiringi dengan penegakan nilai-nilai yang diharapkan tumbuh subur di negeri ini; nilai-nilai adil makmur yang merata, tetapi dengan kedudukan menentukan pada rakyat sendiri, bukan saja secara resmi, tetapi lebih-lebih secara kenyataan. Modal swasta, asing atau domestik dapat berperan sebagai pelengkap bukan sebagai kekuasaan tersendiri yang turut menentukan. Baginya nilai-nilai yang diperjuangkan ini merupakan penjabaran nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sekaligus sesuai dengan tuntutan agama.

Gagasan-gagasan itulah yang membuat Hatta dikatakan oleh banyak pakar sebagai pejuang besar, orang kedua Indonesia sesudah merdeka, ia juga penuh cita-cita, yang baik dan mulia namun ia tinggalkan segalanya tanpa hasil yang ia dambakan,

sekurang-kurangnya tidak seperti yang ia harapkan. Bagi dirinya sendiri ia dapat berkata bahwa ia telah berusaha. Pada akhir hayatnya ia bisa berkata bahwa ia telah memberi peringatan. Pada 14 Maret 1980 Bung Hatta wafat. Salah satu julukan yang cukup berkesan sebagai penghormatan dilontarkan oleh harian *Kompas* 15 Maret 1980, "Penjaga Nurani Bangsa". Presiden Soeharto memberi komentar yang penuh dengan teka-teki yaitu "Untuk kita yang ditinggalkan, penghagaan terbesar yang dapat kita berikan ialah berjuang mewujudkan mimpi-mimpi Bung Hatta". Komentar Presiden Soeharto itu memberi makna yang dalam bagi bangsa Indonesia tentang pemikiran-pemikiran kebangsaan Bung Hatta.

CATATAN

1. Elizabeth E. Graves. *The Minangkabau Response to Dutch Colonial Rule in the Ninetunth Century*. I Schaca : Cornell Modern Indonesia Project, 1981, halaman 10–73
2. Hatta, *memori*, halaman 14
3. Julinar, Idris Koestanto, "Bung Hatta : Pembimbing Rakyat dan Keluarga Kami" dalam Meutia F. Edy Swasono, (ed) *Bung Hatta : Pribadinya Dalam Kenangan*. Jakarta UI, halaman 11
4. Hatta *Memori op. cit.* halaman 8.
5. Deliar Noer. *The Modernst Muslim Movement ini Indonesia 1900–1942*, eden 2. Kuala Lumpur. Oxford University Press, 1978. halaman 32–39
6. Hatta, *memori, op. cit.* halaman 20 – 27
7. Moh. Hatta, *Indonesia Free*" dalam *Portrait of a Patriot*. halaman 209
8. *Ibid*
9. Hatta, *memori, op. cit.* halaman 31
10. *Ibid.* halaman 50
11. *Ibid.* halaman 80
12. *Ibid.* halaman 84–85
13. *Ibid.* halaman 70

14. Ibid. halaman 55
15. Hatta, *memori*, halaman 101–4
16. Ibid halaman 104
17. Hatta "Indonesia Free" dalam *Portrait of a Patriot*, halaman 210–212
18. Ibid, halaman 453
19. Ahmad Soebardjo Djojodisurjo, *Kesadaran Nasional*, Jakarta : Gunung Agung, 1978, halaman 116
20. Moh. Hatta, "Non Cooperation" – Op. cit, halaman 341
21. Hatta "Objectives and Policy of the National Movement in Indonesia" halaman 113
22. Hatta, "Drainage", halaman 31
23. Moh. Hatta, "The Economic World Struktire and the Conflict of Power", dalam *Portrait of a Patriot*, halaman 30–39
24. Ibid, halaman 39
25. Ibid halaman 40–44
26. Catatan Rapat Pengurus PI 1925–1926
27. PM. Noor, *Bung Hatta Mengabdikan Pada Tjita-tjita Perjuangan Bangsa*, halaman 300–303
28. Hatta, *Indonesia Free*, halaman 212
29. Ibid, halaman 292
30. John Ingleson, *Road to Esei*, halaman 85–86
31. Hatta, "PNI Mendapat Pertjobaan", dalam *Persatuan Indonesia* 10 April 1930
32. Hatta, *Daulat Rakyat* 10 Juli 1933
33. Ibid, 10 September 1933
34. Hatta memoar, halaman 391
35. Cindy Adam, *Sukarno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia* (Jakarta : Gunung Agung, 1966), halaman 173

36. Hatta, "Organisasi Kita" dalam *Kumpulan Pidato*, halaman 29
37. George, S. Manahale, *The Japanese Ocuration of Indone-sia : Prelude to Independence*, disertasi Ph. D. Univer-sitas Cornell, 1967, halaman 92
38. Syahrir, *Perjuangan Kita*
39. Hatta, *Pengertian Pancasila*. Jakarta : Yayasan Idayu, 1981 halaman 7-50
42. *Ibid*
43. BROG, Anderson. Some aspects of Indonesian Politics under the Japanese Occupation. (Ithaca : Councell University, 1961). halaman 69
44. Anderson, *Java in a Time Revolution*, halaman 79
45. Hatta, *memoar*, Op. Cit, halaman 454
46. Hatta, "Isi Proklamasi", halaman 2, dikutip oleh BROG Anderson, *Java in a time Revolution*, halaman 112
47. Syahrir, *Our Stunggle*, halaman 20
48. Anderson, Op. Cit., halaman 123
49. George Mc. T. Kahin, *Nationalism and Revolution in Indonesia*, (Ithaca : Cornell University Press, 1952), halaman 149
50. Hatta, *memoar*, Op. Cit, halaman 479
51. Manifesto Politik, November 1945, Juga dikutip oleh Herberth Feet dan Lence Castle, *Indonesian Political Thruking 1945-1965*, halaman 52
52. Hatta, "Pidato Perpisahan Tahun 1947-1948", dalam *Kumpulan Pidato*, halaman 135
53. George Mc. Hahinm Op. Cit, halaman 261
54. Wawancara Nasution, November 1992

55. Kohin, *Op. Cit*, halaman 281
56. Coast, *Recont to Revolution*, halaman 195
57. United Nations, S/1129, 19 Desember 1948, lihat juga Kohin, *Op. cit*, halaman 334–335
58. Kohin, *Ibid*, halaman 406
59. Hatta, "On the Road ti Transfer of Sovercesity" dalam *Potrait of a Patriot*, halaman 513
60. *Ibid*, halaman 513–514
61. *Ibid*, halaman 513–514
61. Hatta, "Pidato Ketua Delegasi Republik Indonesia pada sidang KMB", dalam *Kumpulan Pidato*, halaman 318
62. Mavis Rose, *Indonesia Free : A Political Biography of Mohammad Hatta*, terjemahan Hermawan Sulisty, Jakarta : Gramedia, 1991, halaman 290
63. Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia* (Ittca: Cornell University Press, 1962), halaman 1
64. Hatta, *Past and Future*, Pidato gelar Doctor Horis Causa dari UGM 27 November 1956, Ithaca : Cornell Modern Indonesia Project, 1960, halaman 1
65. *Duta Masyarakat*, 26 Agustus 1963
66. Hatta, *Bung Hatta Menjawab*, (Jakarta : Gunung Agung, 1978), halaman 30–40
67. Brian May. *The Indonesian Tragedy*. London : Routledge and Kegan Paul, 1978, halaman 265–266
68. Hatta. *Menuju Negara Hukum*. (Jakarta : Yayasan Idayu, 1975), halaman 12
69. Hatta (Panitia Lima), *Uraian Pancasila*, (Jakarta : Mutiara, 1977)
70. *Ibid*
71. *Ibid*

BAB III

HOS. TJOKROAMINOTO DAN PEMIKIRANNYA

3.1 Latar Sejarah Kehidupannya

Untuk mengetahui latar kehidupan HOS. Tjokroaminoto kiranya tidak terlepas dari pengaruh kehidupan keluarga maupun dari lingkungan sekitar serta tempat awal sekolahnya.

Dilihat dari garis ayah, HOS. Tjokroaminoto adalah keturunan seorang kiai yang terkenal alim dan masyhur serta taat membina pondok pesantren sehingga banyak mendapat perhatian masyarakat. Kemasjuran pondok pesantren itu meliputi seluruh wilayah kerajaan Jawa waktu itu. Dari garis ibu, ia adalah keturunan bangsawan Keraton Surakarta. Unsur-unsur alim dan kultur keraton terdapat pada diri HOS. Tjokroaminoto. Semenjak kecil ia sudah diberi pendidikan agama Islam dari keluarganya. Kakeknya, Raden Mas Adipati Tjokronegoro, adalah bupati Ponorogo, sedangkan ayahnya Raden Mas Tjokroamiseno, adalah wedana Kleca Madiun, karena itu jika dirunut dari lingkungan keluarganya, jiwa kepemimpinan HOS. Tjokroaminoto dilandasi dengan agama Islam yang kuat.

Kelahirannya bertepatan dengan meletusnya Gunung Krakatau. Peristiwa ini sering dikiaskan oleh orang Jawa bahwa gunung meletus itu akan banyak menimbulkan perubahan terhadap alam sekelilingnya. Peristiwa ini pula yang kelak dikaitkan dengan meledaknya tuntutan HOS. Tjokroaminoto

terhadap pemerintah kolonial Belanda ketika ia menjadi pimpinan Sarekat Islam. Perjuangan HOS. Tjokroaminoto telah membangkitkan bangsa Indonesia dari tidurnya untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan.

Tabiatnya waktu kecil tampak ganjil dan disegani oleh teman-teman sebayanya. Kesenangannya bermain kuda-kudaan yang dimasukkan ke dalam kurungan ayam, sekolah-olah menjadi kiasan kepedihan kehidupan masyarakat yang ketika diperkuda dan dikurung dalam belenggu penjajahan Belanda.

Sejak memasuki dunia pendidikan, ketajaman pikirannya telah tampak. Ia tidak senang melihat hal-hal yang tidak sesuai dengan jalan pikirannya. Sikapnya yang demikian justru membuat dirinya digolongkan sebagai anak nakal, karena itu tidak mengherankan apabila ia berkali-kali keluar-masuk dan pindah sekolah.

Salah satu bukti ketajaman pikirannya ialah keterampilannya di bidang karang-mengarang. Bakat karang-mengarangnya semakin berkembang ketika berbagai surat kabar mulai memuat karyanya itu, bahkan ia kemudian diminta untuk membantu sebuah surat kabar di Kota Surabaya. Sejak itu buah pikirannya banyak dilontarkan melalui persuratkabaran. Perhatiannya pada soal-soal masyarakat dan kerakyatan semakin besar. Tjokroaminoto seorang yang aktif, kreatif, dan dinamis. Perhatiannya terhadap kawan-kawan sangat besar demi menuju kepada perbaikan nasib. Pemikiran lain tampak dalam usahanya membongkar kerusakan-kerusakan masyarakat untuk diperbaikinya.

HOS. Tjokroaminoto mempunyai kesamaan sifat dengan kakeknya, Kiai Bagoes Kasan Besari. Sejak usia muda ia tidak suka akan kehormatan lahir seperti sebutan "ningrat" pada dirinya. Walaupun ia keturunan bangsawan, tetapi titel ke ningratan itu tidak dipakainya. Tjokroaminoto merasa bahwa ia manusia biasa tak bedanya dengan rakyat pada umumnya.

Pemikiran Soeharsikin, istrinya, tampak mewarnai tindakan Tjokroaminoto pula. Patih Mangoensoemo, wakil bupati Ponorogo, orang tua Soeharsikin, memiliki jiwa mendidik dan ber-

jiwa besar. Ketika itu wilayahnya banyak diganggu oleh para perusuh serta perampok. Para pengganggu keamanan di wilayahnya itu setelah ditawan, kemudian dididik dan dimerdekan. Tindakan bijak Mangoensoemo itu membuat semua pencuri yang pernah ditawan, seumur hidupnya tidak lagi mau mencuri atau merampok lagi.

Soeharsikin dikenal sebagai seorang wanita yang sangat halus budi pekerti dan besar sifat pengampunnya. Sifat-sifat ini pula yang sering mempengaruhi ayahnya yang acapkali memerdekakan pencuri dan perampok yang melakukan kejahatan. Soeharsikin gemar pada pengajian dan pengajaran agama.

Berbeda dengan sifat Tjokroaminoto yang "brangasan", suka berkelahi, dan suka berkelana. Setelah mereka menikah, hati dan jiwa Soeharsikin itu ternyata dapat melembutkan hati Tjokroaminoto, suaminya. Perubahan dan kebangkitan jiwa Tjokroaminoto untuk memerdekakan bangsanya, timbul karena adanya pergeseran antara mertua dengan dirinya. Ia melihat mertuanya fanatik dengan agamanya. Darah revolusioner menantunya itu menggaduhkan mertuanya. Ketidaksamaan jiwa dan semangatnya dengan sang mertua menyebabkan ia pergi meninggalkan rumah sekaligus istrinya yang sedang mengandung anak pertamanya, namun kemarahan orangtuanya, itu dapat dilembutkan oleh kecintaan dan ketaatan Soeharsikin, isterinya. Dalam hal ini Soeharsikin berpendapat, bahwa perkawinannya adalah atas kehendak orang tuanya, karena itu apabila Mangoensoemo ingin menceraikan dirinya dengan suaminya berarti bertentangan dengan kemauan pertama orang tuanya. Pendapat ini menyebabkan hati kedua orang tuanya luluh.

Suasana kalut yang menyelimuti pikiran membawa Tjokroaminoto merantau mencari guru agama untuk menenangkan jiwanya sampai di dekat Magelang. Di sana ia menyendiri beriktikaf dalam sebuah gua, hingga tiba saatnya ia kembali guna mengambil isterinya. Kesetiaan Soeharsikin ini memberi kekuatan batin dan pemikiran Tjokroaminoto pada awal per-

juangannya, karena itu waktu HOS. Tjokroaminoto menceburkan diri sepenuh-penuhnya dalam pergerakan rakyat, Soeharsikin menyadari sepenuhnya bahwa letak kekuatan Tjokroaminoto sebagian besar harus digalang di rumah. Kesadaran inilah yang kemudian membangkitkan semangat yang menyala-nyala dalam dada Soeharsikin. Semangat untuk berani memikul tanggung jawab penuh terhadap keselamatan rumah tangganya.

Semenjak itulah, ia tidak lagi menggantungkan nafkah rumah tangga kepada suaminya. Ia membanting tulang sendiri dengan membuka *internaat* sekaligus sebagai induk semang. Sebagai induk semang, tidak sedikit anak-anak keluaran "internaat Soeharsikin" menjadi pemimpin besar. Setidak-tidaknya mereka yang diasuh mempunyai kedudukan yang tinggi dalam masyarakat dan bangsanya. Misalnya Soekarno, Moeso, Kartowisastro, Abikoesno, dan banyak lagi yang lain.

Soeharsikin memberi kesempatan penuh kepada sang suami untuk mengejar cita-cita bagi kemerdekaan nusa dan bangsa serta agamanya. Di samping itu Raden Ayu Tjokroaminoto memberikan bantuan moral, bantuan batin yang sangat besar artinya bagi sang suami. Sudah menjadi kebiasaan Soeharsikin jika suaminya bepergian untuk kepentingan perjuangan, isteri yang sederhana dan prihatin ini mengiringi suaminya dengan sembahyang tahajud, berpuasa sehingga semua orang yang mengenal almarhumah mengakui bahwa ketinggian berajad yang diperoleh Tjokroaminoto adalah sebagian terbesar berkat bantuan isterinya. Sebagaimana dikemukakan di muka bahwa HOS. Tjokroaminoto memiliki jiwa yang berlainan dengan kebanyakan kehidupan keningratan yang bersifat feodal ketika itu. Sifat ini dihindari dan ditekannya kuat-kuat. Tindakan semacam itu dalam lingkungan keluarganya tidak mendapatkan simpati. Walaupun demikian ia berjalan terus dengan cita-cita hidupnya itu.

Pertentangan antara Tjokroaminoto dengan mertuanya itu demikian hebatnya, sehingga ia pergi meninggalkan rumah tangga dan beberapa waktu mengembara menjadi kuli di pelabuhan kapal di Semarang. Waktu itu isterinya sedang mengandung

anaknyanya yang pertama. Hingga anaknyanya lahir ia masih di perantaraan menjadi kuli.

Soeharsikin, isterinya, yang waktu kecil terbiasa hidup dalam lingkungan keningratan, tetapi setelah menjadi pendamping rumah tangga semakin bertambah mendalam keinsyafan akan cita-cita hidup suaminya. Isteri yang setia itu pun kemudian dapat menyesuaikan dengan pemikiran Tjokroaminoto.

Dalam kehidupan rumah tangga, isterinya bertindak sebagai kompas bagi suaminya. Soeharsikin menyadari bahwa suaminya adalah seorang pemimpin yang waktu, tenaga, dan pikirannya dibutuhkan sekali dalam perjuangan. Kesadaran isteri tercinta inilah yang membuat HOS. Tjokroaminoto merasa, tidak ada suatu ganjalan dan tidak ada lagi kabut yang menggelapi perjuangannya.¹

Selama berumah tangga di Surabaya, Tjokroaminoto menyediakan rumahnya untuk pondokan anak-anak sekolah, baik keluarga sendiri maupun orang luar. Mengingat pondokan itu satu rumah, antara keduanya senantiasa pengaruh-mempengaruhi. Di samping asuhan yang diberikan kepada anak-anak yang mondok, mereka juga memperhatikan kehidupan rumah tangganya. Ia menyadari kewajibannya sebagai pengemudi rumah tangga dan juga sebagai pemimpin rakyat.

Pengaruhnya terhadap para pelajar yang mondok di rumahnya itu tidak hanya sebentar, tetapi bertahun-tahun lamanya. Ir. Soekarno misalnya, berada di rumah Tjokroaminoto sejak di HBS sampai ia tamat.

Suasana rumah tangga Tjokroaminoto dirasakan makin mendalam bagi pemuda pelajar serta merupakan "Markas Sarekat Islam". Rumah beliau tidak henti-hentinya dikunjungi tamu bermacam-macam bangsa, corak dan haluannya, dari kaum ningrat sampai jembel.

Rumah tangga itu merupakan kancha mengadu keuletan ideologi antara Tjokroaminoto dengan Alimin, Semaoen dan Darsono. Rumah tangga itu pula merupakan sumber yang

hendak ditanami racun kolonialisme oleh Dr. Rinkers, Ir. Bears, Sneevliet dan lain-lain, supaya terbunuh benih-benih kemerdekaan bangsa yang hendak diletupkan Tjokroaminoto itu. Rumah tangga Tjokroaminoto ibarat sebuah kancah yang terus-menerus menggembelng dan membangunkan ideologi kerakyatan, demokrasi, sosialisme dan anti-imperialisme.

Siapa yang masuk menjadi warga rumah tangga itu ibarat dituangi ideologi kerakyatan, demokrasi, dan sosialisme, serta digembelng dengan paham-paham anti kapitalisme dan anti imperialisme. Tentu saja hal ini bertentangan dengan jiwa saudara-saudaranya yang menjadi pejabat BB yang ingin menegakkan tiang-tiang kolonialisme.

Pada saat HOS. Tjokroaminoto sedang meniti ke atas perjuangannya melalui Sarekat Islam, pada tahun 1921 ia ditinggal untuk selama-lamanya oleh isterinya yang setia. Rupanya Allah SWT menghendaki isterinya lebih dahulu menghadap kehadirat-Nya. Hal ini merupakan batu ujian dalam usahanya memikul perjuangan.

Pemikiran HOS. Tjokroaminoto semakin hari diperkaya wawasannya karena sering diadakan tukar pikiran dengan para pemuda yang mondok di rumahnya. Tukar pikiran ini dijadikan acara sehari-hari dengan pemuda-pemuda untuk berdebat menyatakan keyakinan hidupnya dan haluan perjuangannya, karena itu gerakan Sarekat Islam yang dipimpin semakin mendapat perhatian rakyat dan menjadi sasaran baik kawan maupun lawan. Dalam kesempatan Tjokroaminoto pergi mempropagandakan Sarekat Islam, biasanya seorang atau dua di antara mereka dibawa serta. Pada kesempatan ini yang sering mendapat giliran Ir. Soekarno dan adik beliau sendiri yaitu Abikoesno Tjokrosujoso.

Hasil gembelngan Tjokroaminoto itu tidak hanya dipetik dan dilanjutkan oleh kedua orang yang menyertai melainkan juga rakyat Indonesia seluruhnya sedikit banyak ikut mengecap nikmatnya, terutama kaum partainya.

Orang-orang semakin meresapi gembelngan almarhum karena cara memperjuangkan cita-citanya tidaklah semata-

mata dijadikan teori yang mati di atas meja belaka, tetapi benar-benar dijadikan pedoman yang berjiwa, tuntunan yang hidup yang disebarkan di kalangan rakyat banyak. Cita-citanya bukanlah semata-mata menjadi cita-cita pribadi, tetapi menjadi cita-cita rakyat seluruhnya yang senantiasa dihidupkan dengan pengorbanan lahir dan batin. Tjokroaminoto berhasil melahirkan pengertian, bahwa suatu cita-cita hidup menuju kemerdekaan itu harus disertai pengorbanan lahir batin.

Pemikiran Tjokroaminoto telah dilanjutkan oleh Ir. Soekarno dan kawan-kawan sepondokannya. Ide dan pemikiran ke arah kemajuan bangsanya itu telah dilontarkan berpuluh tahun di rumah almarhum di Surabaya.

Hal yang menarik bagi generasi penerus ialah bahwa almarhum Tjokroaminoto bukanlah seorang oportunis, hanya ikut angin baik belaka tanpa jelas haluannya. Perjuangan beliau memaknai dasar yang luas, tegas, dan nyata.² Dalam perjuangannya beliau menampilkan diri sebagai patriot muslim.

Menilai seorang pemimpin tidak terlepas dari peranannya dalam kehidupan rumah tangga baik sebagai seorang suami maupun sebagai seorang bapak di mata anak-anaknya. Dalam hal ini tak terkecuali Tjokroaminoto. Hidup sebagai seorang pemimpin dalam arti yang sebenarnya pada dasarnya haruslah disesuaikan dengan hidup sebagai pemimpin di rumah tangga sendiri. Seorang pemimpin yang keras di rumah tangganya sendiri, biasanya keras pula menghadapi masyarakat ramai. Sebaliknya pemimpin yang lemah di rumah tangganya sendiri, biasanya lemah pula menghadapi masyarakat ramai.³

Tjokroaminoto dalam kehidupan rumah tangganya dikenal orang yang keras, tetapi bukanlah suami yang selalu bermuram kepada isterinya dan marah-marah kepada anak-anaknya dengan tiada sebab, tetapi keras di sini disiplin dalam dirinya, juga kepada isteri dan anak-anaknya agar tidak ternoda karena kelakuannya sendiri. Beliau tidak menginginkan hal-hal yang berlebihan terhadap kesenangan, tetapi sebagai seorang pemimpin rakyat yang diliputi suasana keislaman semata-mata.⁴ Sejak kecil semua anaknya itu diharuskan belajar mengaji dengan mendatangkan guru mengaji ke rumahnya.

Melihat usahanya itu ternyata menurut pemikiran beliau di samping memperjuangkan cita-citanya untuk kepentingan masyarakat, maka pendidikan anak-anaknya tidak dilupakan pula. Pendidikan keagamaan itu terus-menerus ditanamkan kepada anak-anaknya untuk mengantisipasi pendidikan yang diterima anak-anaknya dari sekolah Belanda waktu itu. Ungkapan yang sering terlontar di tengah masyarakat bahwa seorang pemimpin rakyat yang aktif berjuang, maka rumah tangganya hancur. Untuk beliau hal itu dijaga, dipelihara dengan sebaik-baiknya. Kepincangan seperti itu tidak dijalani oleh almarhum. Bagaimana pun besarnya pengorbanan dalam perjuangan di tengah-tengah masyarakat, terutama uang, waktu dan lain-lain, tetapi beliau senantiasa keras juga menjaga keamanan rumah tangganya supaya tidak tergoncang.

Dalam hal tingkah-laku sehari-hari, terutama yang langsung menjadi perhatian isterinya dan anak-anaknya, beliau selalu berusaha supaya dapat menjadi contoh yang utama. Tindakan almarhum dalam segala hal sampai yang sekecil-kecilnya mengandung buah pelajaran. Kerapian berpakaian, menyisir rambut, waktu bersantap, bercakap-cakap menyambut tamu, dan lain-lain diarahkan untuk pendidikan yang baik dan diharapkan dapat ditetapkan sehari-hari oleh keluarga. Menurut almarhum, suasana rumah tangga sebagai dasar ukuran untuk melangkah lebih jauh menata kehidupan rakyat dan sebagai landasan perjuangannya, karena itu kekuatan semangat perjuangan HOS. Tjokroaminoto dipengaruhi oleh suasana tenang, tenteram dan saling pengertian antara suami dan isteri. Keberhasilan perjuangan HOS. Tjokroaminoto tidak terlepas dari dukungan dan dorongan lahir-batin dari isterinya. Ketidakesesuaian dari pihak saudara-saudaranya yang lain yang tidak sepaham dengan tujuan dan cita-cita almarhum beserta cara-cara yang dilakukan dijadikan cambuk yang lebih kuat untuk memupuk semangatnya agar apa yang diangan-angankan dalam pikirannya tercapai cita-cita mulia tidaklah mulus, tetapi kadang-kadang menghadapi batu ujian yang ditemuinya.

3.2 HOS. Tjokroaminoto dan Pemikirannya

3.2.1 Awal Perkembangan Pemikiran HOS. Tjokroaminoto

3.2.1.1 Semangat Nasionalisme dan Kondisi Umat Islam

Untuk menuntut awal perkembangan pemikiran HOS. Tjokroaminoto dalam gelanggang perjuangan kiranya tidak terlepas dengan timbulnya semangat nasionalisme bangsa Indonesia yang berjuang melepaskan diri dari belenggu penjajahan menuju tercapainya kemerdekaan. Di samping itu keberadaan umat Islam pada zamannya juga melatarbelakangi semangat berbuat dan beramal untuk bangsa dan negaranya, dan khususnya guna membawa keberadaan Islam kepada citra yang sesuai dengan ajaran sucinya.

Sebagaimana kita ketahui bahwa pada 20 Mei 1908 berdirilah Boedi Oetomo, suatu organisasi perjuangan yang lebih baru dari pada sebelumnya. Menurut Soetomo dan kawan-kawan yang mengawali dan merintis berdirinya Boedi Oetomo, perjuangan bangsa Indonesia melawan pemerintah jajahan harus dilakukan dengan cara baru yaitu melalui suatu organisasi yang rapi sebagai wadah menampung dan menyalurkan aspirasi perjuangannya. Sistem perjuangan bangsa Indonesia lama harus diperbaharui karena cara perjuangan yang bersifat kedaerahan satu-persatu mudah dipatahkan oleh pihak pemerintah kolonial. Persatuan dan kesatuan yang menghimpun semua potensi untuk kekuatan secara nasional merupakan sarana yang ampuh untuk melawan perlakuan semena-mena dari penguasa, karena itu lahirnya Boedi Oetomo kemudian menggugah jiwa HOS. Tjokroaminoto untuk bergabung dan berjuang bersama teman-teman lainnya. Sejak saat itu pulalah HOS. Tjokroaminoto masuk menjadi anggota aktif dalam Boedi Oetomo, bahkan pada waktu di Surabaya ia menjadi ketua Boedi Oetomo di kota tersebut. Semenjak menjadi populer Boedi Oetomo di Surabaya itulah namanya mencuat dan populer di mana-mana, baik di kota-kota besar maupun di kampung-kampung. Untuk menggerakkan suatu organisasi perjuangan diperlukan waktu, tenaga dan pemikiran yang tinggi. Semangat dan cita-cita untuk membawa bangsanya terlepas dari belenggu penjajahan semakin lama semakin mantap.

Keberadaan umat Islam yang waktu itu sedang mengalami kemunduran di segala aspek kehidupan, baik dalam hal-hal yang berurusan dengan masalah dunia maupun keagamaan juga menggugah hati dan pemikiran HOS. Tjokroaminoto. Perlu dikemukakan di sini bahwa keberadaan umat Islam yang turut mengusik hati dan pemikirannya ialah adanya suara-suara santer yang diungkapkan para ulama bahwa umat Islam waktu itu lemah dan mundur. Akibat kemunduran itu menyebabkan umat Islam menjadi cercaan, cemoohan, dan hinaan di mana-mana, lebih-lebih di muka mereka yang memusuhi Islam. Keberadaan umat Islam yang demikian itu dihembus-hembuskan serta dibesar-besarkan beritanya. Cara-cara ini dipergunakan oleh lawan Islam termasuk pemerintah kolonial Belanda. Pemerintah kolonial selalu berusaha untuk memperlemah agar semangat Islam itu tidak semakin meluap dan berkembang, karena hal ini sangat membahayakan kedudukan pemerintah kolonial Belanda. Di dalam Islam termuat ajaran akidah yang kuat untuk melawan segala bentuk kebatilan dan kezaliman dari mana pun datangnya. Usaha melumpuhkan semangat umat Islam itu dilakukan pemerintah kolonial Belanda dengan menekan setiap perlawanan yang umumnya dipimpin oleh tokoh-tokoh umat Islam dan juga menangkap cara pemimpin-pemimpinnya itu.

Sebagaimana kita ketahui bahwa para pahlawan di berbagai daerah Indonesia adalah pejuang pejuang muslim yang tak mundur karena tekanan musuh. Hasanuddin di Makasar, Sultan Agung Hanyokrokusumo dan Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta, Imam Bonjol di Sumatera Barat, Teuku Umar dan lain-lain merupakan bukti sejarah bahwa perlawanannya yang begitu hebat itu karena di dalam dirinya tertanam secara kuat akidah keislaman, karena itu hinaan terhadap umat Islam yang dijadikan bulan-bulanan menyebabkan hati HOS. Tjokroaminoto bangkit. Hal demikian yang tidak mengherankan, karena di samping HOS. Tjokroaminoto dikenal sebagai pejuang nasionalis, ia juga seorang muslim yang membela Islam secara konsekuen. Mengapa umat Islam yang sebagian besar bangsa Indonesia itu

menjadi mundur dan hina kiranya dapat diketahui sebagian uraian berikut.

Berbagai hal yang menyebabkan kemunduran umat Islam antara lain disebut-sebut bahwa umat Islam adalah bodoh, kurang pengetahuan berpura pura pandai/canggung, kerusakan budi pekerti, kebejatan moral para pemimpin, ulama yang membeo pada pemimpin yang zalim, dan sifat penakut/pengecut.⁴

Penyebab terbesar kemunduran umat Islam karena bodoh atau kebodohan. Mereka suka menerima perkataan kosong dan bohong. Dalam hal ini mereka tidak tahu bagaimana harus menghindarinya. Penyebab lain kemunduran umat Islam ialah karena kurang mengetahui. Kerusakan budi pekerti pun menyebabkan hilangnya perangai yang hal ini selalu diperintahkan oleh *Al Qur'an*.

Kebejatan moral juga akan menjadi faktor penting dalam membuat hancurnya umat Islam. Pemimpin yang demikian itu akan bertindak sewenang-wenang kepada umatnya. Pemimpin yang bejat moralnya mempunyai anggapan bahwa umat itu harus patuh atas perintahnya. Kritik dan koreksi terhadap kezaliman umumnya ditanggapi dengan sikap kejam. Kemunduran umat Islam juga dapat disebabkan ulama-ulamanya tenggelam pada pimpinan yang zalim. Apabila ulama-ulama bersikap demikian itu bertentangan dengan ajaran Islam. Islam memerintahkan agar ulama-ulama menjadi pelurus hal-hal yang bengkok dan zalim. Penyebab kehancuran Islam yang lain ialah sifat penakut itu pengecut. Perasaan demikian mestinya tidak boleh ada di dalam hati umat manusia.

Adapun menurut Lothrop Stoddard, seorang sarjana terkenal dari Amerika dalam bukunya *Dunia Baru Islam*, faktor penyebab kehancuran Islam itu adalah persoalan kambuhnya permusuhan yang lama terpendam yaitu perang saudara, hilangnya pemimpin yang kuat hilangnya kekuatan spirit, gurun tandus yang segar dan karena kesamaan politik yang tak dapat dipertahankan. Golongan-golongan yang bersaing masing-masing memperebutkan kepemimpinan Islam. Tidak jarang pula

pertentangan menjadi peristiwa berdarah. Peristiwa ini bermula dari penipuan dan pembunuhan. Pada tempat perlawanan-perlawanan pertama Abu Bakar dan Umar, tegaklah pemimpin-pemimpin duniawi dengan jabatan khalifah, yang menganggap kedudukan mereka itu sebagai alat untuk mendapatkan kekuasaan mutlak dan kemegahan.⁵

Masih banyak lagi gambaran bagaimana kemunduran umat Islam yang terdapat di seantero dunia, sedangkan umat Islam di Indonesia pun mengalami nasib yang serupa. Gambaran demikian diungkapkan Solichin dalam bukunya *Haji Agus Salim Pahlawan, Nasional* yang disebutkan bahwa keadaan masyarakat Islam di Indonesia pada masa hidup Haji Agus Salim terutama di masa penjajahan yang sangat menyedihkan, karena itu umat Islam ditimpa berbagai krisis. Agama Islam telah banyak bercampur dengan berbagai ajaran dan paham yang bukan berasal dari *Al Qur'an* dan *Hadits*. Akibat dari membanjirnya tafsir yang lapuk menyebabkan Islam hidup dalam alam kebekuan dan kemunduran. Di mana mana merajalela perbuatan di luar tuntunan agama sehingga umat Islam hidup di dalam alam dan suasana yang penuh diliputi oleh konservatisme, formalisme dan tradisionalisme lebih-lebih dengan berkembangnya ajaran mistik yang tidak sesuai dengan tuntunan dan ajaran agama, sisa-sisa pengaruh dari ajaran dan kepercayaan pra-Islam masih subur. Alam feodalisme dan aristokratisme di kalangan masyarakat pun masih mendapatkan ladangnya yang subur. Belum lagi adanya tekanan dan tipu muslihat yang dilakukan oleh pihak kolonial Belanda untuk mengadudomba sesama umat Islam.

Juga adanya kolonialisme dan imperialisme yang telah berhasil membelenggu bangsa dan rakyat Indonesia yang mayoritas dari mereka memeluk agama Islam. Keadaan inilah menyebabkan kehidupan agama Islam di Indonesia tidak luput pula dari tekanan dan menjadi korban tindakan imperialisme dan kolonialisme tersebut. Dalam sejarah Indonesia telah terbukti bahwa pemerintah kolonial Belanda dengan siasatnya yang licik berhasil merusak kehidupan dan kemunduran agama Islam dari dalam yaitu dengan menggunakan orang-orang

seperti Van der Plas, Snock Hurgronje, yang sebelumnya telah dibekali pengetahuan tentang agama Islam. Islamolog mereka itu bekerja tidak untuk kepentingan politik kolonial Belanda.⁶

Pemerintah kolonial Belanda berusaha sedikit demi sedikit menarik bangsa dan rakyat Indonesia yang beragama Islam, untuk meninggalkan agamanya. Kepada kaum intelek didikan mereka dimasukkan benih-benih kebencian terhadap agama Islam. Bagi kolonial Belanda, agama Islam itu dianggap identik dengan konservatisme, tradisionalisme. Inilah sebabnya kaum intelek kita membenci kepada Islam. Pemerintah kolonial Belanda melalui sarjana-sarjana dan guru-guru besarnya mengajarkan kepada kaum intelek kita bahwa Islam itu kolot, tidak sesuai dengan kehidupan zaman, tidak *up to date*. Melalui cara-cara semacam itulah penjajah berhasil menggunakan siasat busuknya.

Akibat penindasan dan tekanan kepada umat dan agama Islam membawa kehidupan umat Islam mundur. Mereka membuat desa-desa dan kampung-kampung yang mereka tempati sebagai kubu-kubu pertahanan. Di sana mereka mendirikan mesjid-mesjid, langgar-langgar, surau-surau, dan pondok-pondok pesantren. Umat Islam pindah dari perkotaan ke desa-desa. Sikap isolasi ini membawa kerugian umat Islam sendiri karena dengan sikap ini pemerintah kolonial Belanda dengan leluasa menanamkan pengaruhnya di kota-kota besar. Akibatnya umat Islam menjadi terkungkung hidupnya bagaikan katak di bawah tempurung. Dunia mereka menjadi sempit, sehingga mereka tidak mengetahui perkembangan dan kemajuan dunia yang pesat dan jauh tertinggal di belakang. Inilah yang menyebabkan umat Islam beku dan kolot sehingga mengalami kemunduran dan kekalahan. Dengan keadaan umat Islam yang mundur dan terpenjar serta terisolasi dari kampung-kampung itu penjajah semakin leluasa dan senang. Pengertian yang keliru ditanamkan kepada kaum intelek. Mereka memberikan kesan bahwa agama Islam itu identik dengan agama kampung, agama rakyat jelata, agama kuli, agama orang bodoh, dan bukan agamanya orang terpelajar, karena itu kaum intelek semestinya tidak mau disejajarkan dengan orang-orang yang bodoh. Peme-

rintah kolonial Belanda juga selalu menanamkan kepada kaum intelek bahwa Islam itu agama yang reaksioner, yang tidak mempunyai daya vitalitas untuk menjawab tantangan-tantangan di abad modern. Apabila kaum intelek mengaku terpelajar, orang yang modern, tidaklah patut menamakan dirinya orang Islam. Benih-benih yang berbisa yang berisikan kebencian terhadap agama Islam ini tiap hari dimasukkan ke dalam jiwa kaum inteleganesia kita. Pendek kata kehidupan agama Islam di Indonesia penuh diliputi oleh alam dan suasana kebekuan, ketololan, kekalahan, kesuraman, dan kemunduran. Keadaan masyarakat Islam yang demikian itu pernah dialami Haji Agus Salim.

Apa yang dirasakan dalam kehidupan Haji Agus Salim itu juga menyentuh hati dan pemikiran HOS. Tjokroaminoto di mana kedua tokoh Islam itu merupakan "dwi tunggal" dalam memperjuangkan Islam dan juga melawan sikap kebusukan yang selalu dihembus-hembuskan terhadap Islam, sehingga dengan hembusan yang berbisa dapat merusak citra Islam yang murni. Umat Islam sebagai digambarkan di muka dihadapi juga oleh HOS. Tjokroaminoto pada saat hidup dan berjuang. Semuanya itulah yang harus didahapi dalam perjuangan beliau. Sebagai orang muslim yang konsekuen HOS. Tjokroaminoto bangkit dan berjuang. Keadaan dan nasib yang menimpa umat Islam Indonesia dan telah membelenggu rakyat Indonesia itu memang-gil jiwanya. Apa yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda itu merupakan tindakan busuk, zalim, keji, dan tidak manusiawi, karena itu dengan resiko apa pun harus dilawannya.

Di samping HOS. Tjokroaminoto telah tampil juga pemuka-pemuka muslim yang secara sadar ingin berjuang untuk mengembalikan citra agama Islam dalam kehidupan masyarakat. Mereka itu telah mengadakan gerakan melalui berbagai media dan aspek baik dalam kegiatan sosial pendidikan, agama dan politik maupun melalui usaha perekonomian. Tarap hidup umat Islam harus ditingkatkan perekonomiannya, karena itu pada tahun 1909 telah muncul janin dari gerakan Islam di bidang politik dengan berdirinya Sarekat Dagang Islam di Bogor. Ini menarik perhatian di kota-kota lain, juga para peda-

gang di Solo ingin mendirikan perserikatan dagang semacam itu. Inisiatif ini diprakarsai oleh Haji Samanhudi. Dengan adanya hubungan yang kurang baik antara pedagang Islam dengan pedagang Tionghoa maka niat membentuk wadah berupa organisasi untuk menampung dan menyalurkan kemauan pedagang Islam yang terdiri atas pedagang pribumi semakin dipercepat. Dalam perkembangannya antara pedagang Islam pribumi dengan pedagang Tionghoa timbul perselisihan yang berlarut-larut. Pedagang Islam bangsa kita tidak senang melihat keangkuhan pedagang-pedagang Tionghoa dan fasilitas yang lebih banyak berasal dari pemerintah kolonial Belanda diberikan kepada mereka. Perkelahian di antara mereka terjadi di mana-mana dan bahkan menjalar dari kota satu ke kota lainnya. Dengan adanya peristiwa-peristiwa itu menyebabkan pemerintah kolonial mengeluarkan "larangan sementara" kepada Sarekat Dagang Islam. Pemerintah kolonial tidak segan-segan menekan gerakan Sarekat Dagang Islam itu.

Sarekat Dagang Islam kemudian berkembang juga sampai di Surabaya di mana HOS. Tjokroaminoto berdomisili. Beliau menaruh perhatian terhadap gerak langkah organisasi tersebut. Akibat pertemuannya dengan para pedagang dari Solo yang datang di Surabaya, HOS. Tjokroaminoto telah banyak menyampaikan buah pikirannya. Pemikirannya itu disampaikan dalam upaya memperkuat dan memelihara ukuwah di antara para anggota Sarekat Dagang Islam sehingga menjadi suatu organisasi yang sanggup menghadapi segala tantangan dari mana pun datangnya. Awal bulan Mei 1912 banyak berdatangan pedagang dari Solo ke rumah HOS. Tjokroaminoto di Surabaya. Dalam kunjungan mereka itulah dibicarakan kemungkinan-kemungkinan perkembangan yang lebih pesat dari Sarekat Dagang Islam. Pembicaraan di antara mereka berhasil "menggugah" HOS. Tjokroaminoto untuk menerjunkan diri ke dalam Sarekat Dagang Islam. HOS. Tjokroaminoto mendapat kepercayaan penuh dari mereka untuk memimpin agar Sarekat Dagang Islam dapat makin berkembang. Atas kepercayaan yang diterima itu HOS. Tjokroaminoto menyampaikan pemikirannya yang lebih luas lagi agar keanggotaan Sarekat Dagang Islam tidak hanya terbatas para pedagang saja, tetapi dapat

menjadi wadah dari kekuatan Islam. Bertolak dari pemikiran itulah Sarekat Dagang Islam berubah namanya menjadi Sarekat Islam. Perubahan nama ini mengandung arti bahwa gerak langkah Sarekat Islam lebih menjangkau horison yang lebih luas, semua golongan yang ada dalam masyarakat terwadahi.

Sejak perubahan nama itu, dalam kongresnya 26 Januari 1913, bertempat di Surabaya, merupakan peristiwa besar yang dilakukan oleh gerakan orang-orang pribumi. Kongres ini didatangi puluhan ribu manusia yang di dalam hatinya bergejolak perasaan "gembira" karena titik terang masa depannya telah tiba. Lahirnya Sarekat Islam berarti fajar kebebasan secara berangsur-angsur telah muncul secara jelas dan tegas. Dalam kongres ini pula nama HOS. Tjokroaminoto mulai disebut-sebut sebagai seorang politikus. Karier ini dilalui dengan penuh onak dan duri yang ditekuni sampai akhir hayatnya dengan sepenuh hati.

Sebagai orator, Tjokroaminoto berpidato di hadapan peserta kongres yang ribuan jumlahnya itu dengan suaranya yang lantang, tegas dan jelas serta memiliki gaya yang menarik tetapi tidak dibuat-buat. Dalam memimpin kongres Sarekat Islam itu dibuka secara panjang lebar buah pikiran HOS. Tjokroaminoto yang menggambarkan secara gamblang perjalanan panjang yang harus dilakukan untuk menuju tercapainya kemerdekaan bangsa Indonesia, karena itu kepada segenap peserta kongres maupun bagi mereka yang tidak hadir tetapi tinggal di desa-desa digugah hati dan pemikirannya bahwa kemerdekaan bangsa dan negara harus dilakukan dengan bekerja keras dan berjuang tanpa henti-hentinya. Pidato HOS. Tjokroaminoto itu untuk membakar semangat dan meningkatkan kesadaran. Ucapan yang disampaikan itu antara lain sebagai berikut. "Bahwa dengan kongres ini, itu adalah pertanda dari pada kebangkitan hati rakyat Indonesia yang dipandang orang sebagai seperempat manusia . . . bahwa apabila sesuatu rakyat telah bangun tidurnya, tak sesuatu pun yang dapat mengalami gerakannya bahwa kelahiran Sarekat Islam semata-mata karena kodrat-irodat Allah Ta'ala belaka bahkan umat Islam di Indonesia harus bersatu dalam ikatan agamanya".⁷

Bertolak dari uraian di muka bahwa keberadaan umat Islam yang mundur dan terbelenggu kehidupan rakyat dari segala aspeknya oleh kekuasaan pemerintah kolonial merupakan latar yang menjiwai pemikiran HOS. Tjokroaminoto untuk meniti lebih lanjut menuju ke arah kehidupan masa depan bangsa yang cerah dan menggembirakan.

Pidato HOS. Tjokroaminoto yang menggemparkan para pendukungnya itu telah menggoyahkan pemerintah kolonial Belanda. Gugatan terhadap anggapan bahwa bangsa Indonesia sebagai seperempat manusia telah dilontarkan dengan lantang, tegas, dan berani. Bangsa Indonesia adalah suatu bangsa yang duduk sama rendah berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa lain di dunia, karena itu melalui pidato itu HOS. Tjokroaminoto telah memberikan peringatan kepada penguasa kolonial. Peringatan agar gubernur jenderal melaksanakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya terhadap anak negeri terhadap bangsa Indonesia. Melalui mimbar kongres itu diperingatkan tanggungjawab pemerintah kepada penduduk bumiputra dari tindakan ataupun perbuatan sewenang-wenang dari siapa pun bahkan ditegaskan bahwa tugas terpenting gubernur jenderal adalah perlindungan.

Peringatan HOS. Tjokroaminoto itu disampaikan secara tajam, tepat, dan berani. Hal ini harus disampaikan karena adanya tindakan sewenang-wenang dari penguasa, dan ini merupakan pelanggaran dari kewajiban dan tugas gubernur jenderal, karena itu dalam menghadapi gerak-langkah Sarekat Islam yang dipimpin oleh HOS. Tjokroaminoto, pemerintah kolonial selalu menerapkan peraturan-peraturan berupa larangan yang diarahkan untuk menghambat perkembangan gerak-langkah Sarekat Islam.

Gerakan Sarekat Islam yang dilancarkan oleh HOS. Tjokroaminoto merupakan dilema yang lahir dari "azas demokrasi" yang memiliki unsur kebebasan bergerak. Azas demokrasi ini mengajarkan agar rakyat mempunyai perwakilan dalam suatu lembaga untuk menyalurkan kehendak mereka. Dalam kaitan ini Sarekat Islam yang dipimpinnya tidak menjalankan gerakan

atas prinsip-prinsip kebebasan sebagaimana yang terkandung di dalam azas demokrasi.

Walaupun salah satu keputusan kongres Sarekat Islam pertama disebutkan adanya pernyataan tetap setia kepada pemerintah, namun yang dimaksud bukanlah kesetiaan yang membeo dan menerima begitu saja kehendak dari pemerintah. Pengakuan tetap setia kepada pemerintah ini hanyalah sebagai "taktik perjuangan". Dengan taktik ini dapat dibantah adanya desas-desus bahwa Sarekat Islam mempersiapkan diri untuk memberontak. Perlu diketahui juga bahwa desas-desus demikian disebarluaskan oleh orang-orang Eropa yang tinggal di Indonesia. Penyebaran desas-desus pemberontakan merupakan suatu langkah yang dibuat orang-orang Belanda, karena mereka ketakutan terhadap gerakan Sarekat Islam yang kian hari menyebar dan merasuk di hati rakyat.

Berbagai langkah dan tindakan dilakukan oleh penguasa kolonial agar gerak Sarekat Islam terbatas, karena itu permintaan status badan hukum yang diajukan ditolak. Sarekat Islam diakui hanya dalam tingkat cabang saja. Pembatasan ini tidak menghalangi usaha HOS. Tjokroaminoto membentuk cabang-cabang baru. Guna menghadapi larangan dari pemerintah bagi adanya Sarekat Islam yang tunggal, dibentuklah **Sentral Sarekat Islam** di Surabaya pada tahun 1915. Sentral Sarekat Islam ini menaungi 50 cabang.

Terbentuknya cabang-cabang Sarekat Islam ini merupakan langkah awal dalam mengembangkan gerakan Sarekat Islam. Dalam menggerakkan organisasi ini diperlukan pemikiran-pemikiran yang cepat dan tangguh menghadapi larangan dan tantangan yang terjadi. Himpitan dari penguasa waktu itu dan umpatan yang datang dari berbagai pihak sudah dipikirkan secara masak oleh HOS. Tjokroaminoto. Ditinjau dari suasana, kondisi dan dukungan memerlukan ketekunan yang keras, namun semuanya itu tidaklah mengendorkan semangat beliau untuk memimpin bangsanya terlepas dari kungkungan penguasa kolonial.

Kesan Ki Hadjar Dewantara terhadap HOS. Tjokroaminoto dapat diikuti sebagai berikut. "Saja kenal almarhum Tjokroaminoto, tatkala ia asjik berusaha merubah bentuk organisasi "Sarekat Dagang Islam" (dipimpin Hadji Samanhudi di kota Solo), agar dapatlah organisasi bentukan baru itu nantinya menjadi pusat perumahan bagi sekalian mereka, jang sudah lama menanti-nanti timbulnya gerakan nasional, jang demokratis dan radikal "Budi Utomo" waktu itu sudah berumur tiga tahun dan sudah nampak terang corakwamanja yaitu nasional, kultural dan sosial".⁸

Menurut Ki Hadjar Dewantara, "kenasionalan Boedi Oetomo tak boleh disangkal, namun cita-citanya hanya sampai cinta tanah air", serta taat dan setia terhadap adat-istiadat kebangsaan. Anti thesa "penjajah-penjajah" dirasakan juga, namun orang segan untuk memikir-fikirkannya, karena konsekuensinya amat besar.

"Kultural" Boedi Oetomo sangat aktif, namun pusat usahanya hanya mendirikan sekolah-sekolah yang memperkuat dan mempertinggi kedudukan bangsa kita di mata bangsa-bangsa Eropa. Adapun corak ke-3 dari Boedi Oetomo ialah "sosial" yang menuju ke arah perbaikan hidup masyarakat. Sesudahnya ada ikatan batin antara para pemimpin Boedi Oetomo dan Belanda sekalipun ikatan itu ditekankan oleh pihak Pemerintah Hindia-Belanda.

Menurut Ki Hadjar Dewantara, hal-hal yang pokok sebagai digambarkan di muka dan terdapat dalam Boedi Oetomo itulah yang menyebabkan Oemar Said Tjokroaminoto maju ke muka untuk memanggil sekalian nasionalis yang berjiwa radikal untuk mengadakan gerakan baru, yang nasional, demokratis dan revolusioner, baik dalam arti kultural maupun sosial. Itulah sebabnya banyak pemimpin-pemimpin meninggalkan Boedi Oetomo, untuk menggabungkan diri dalam gerakan baru yang dipimpin oleh Tjokroaminoto.⁹

Ki Hadjar Dewantara mengakui bahwa dasar-dasar pikiran Tjokroaminoto dilandasi dengan dasar keislaman. Selanjutnya

dasar keislaman inilah sebagai dasar demokrasi yang sebenarnya. Demikian pula karena sebagian besar dari rakyat Indonesia beragama Islam. Sedang kedudukan HOS. Tjokroaminoto sebagai keturunan keluarga bangsawan hidupnya tidak berpisah dengan hidup rakyat, dan masih meluhurkan adat-istiadat asli yang terpelihara di lingkungan masyarakat di Jawa.

Kemampuan Tjokroaminoto sebagai seorang sastrawan dan kecintaannya kepada wayang (drama) serta karawitan dan lain-lain merupakan bentuk kebudayaan asli yang masih hidup di tengah-tengah masyarakat Jawa. Keadaan demikian menyebabkan rakyat makin menaruh kepercayaan yang besar terhadap Tjokroaminoto. Kondisi demikian itu pula yang menyebabkan dalam waktu setengah tahun sudah beranggotakan setengah juta orang.

Di dalam pergolakan mempersatukan jazirah Arab di bawah kekuasaan Ibnu Sa'ud terjadilah saling menyerang antara Ibnu Sa'ud dengan Syarif Hussain yang menguasai Hajaz yang berakhir Syarif Hussain terusir ke Cyprus. Selanjutnya Ibnu Sa'ud meminta pertimbangan dari seluruh dunia Islam tentang tanah Hejaz dengan menyampaikan undangan kepada seluruh pemimpin-pemimpin Islam untuk menghadiri Kongres Mukhtar Alam Islamy di Mekkah. Kongres ini dengan tujuan mencari kata sepakat dari seluruh dunia Islam tentang tanah Jejaz.

Undangan itu menarik perhatian umat Islam Indonesia. Pada bulan Februari 1926 di Bandung dilangsungkan Al-Islam Kongres kelima, di bawah pimpinan *Central Comite Chilafat* yang ada di Surabaya. Seruan Ibnu Sa'ud ini dihargai oleh kongres, hingga dipilihlah dua orang utusan untuk menghadiri kongres dengan permintaan agar diizinkan pula di dalam perjalanan beliau ke Mekkah sekaligus menunaikan rukun Islam yang kelima. Permintaan beliau diterima oleh kongres. Dalam pidato W. Wondoamiseno pada pembukaan Kongres Al-Islam di Surabaya (26 Februari – 1 Maret 1938), mengenai perjalanan Tjokroaminoto dan Mansoer semuanya berjumlah Rp 4.000,00 sebagian berasal dari usaha *Central Comite Chilafat* dan sebagian besar diterima dari Roebaja bin Thalib bekas bendahara gerakan Tentara Nabi Muhammad saw.

Niat Ibnu Sa'ud ini bersamaan juga dengan keinginan ualama-ulama azhar akan mengadakan kongres yang dihadiri oleh dunia Islam. Tujuan kongres ini ingin mengembalikan kejayaan Islam yang berkedudukan di Mesir pada zaman khalifah keturunan Bani Abbas.

Pada hari Selasa pagi 2 Maret 1926 Tjokroaminoto dan Mansoer bertolak dari Tanjung Perak (Surabaya) dengan kapal "Rondo" yang diantarkan beribu-ribu kaum muslimin. Bersamaan dengan kedua utusan itu, turut juga berangkat HM. Soedjak dari Muhammadiyah sebagai pemimpin HOH (Haji Organisasi Hindia). Dari Sumatera Barat berangkat pula H. Abdoellah Ahmad dan H. Abdoel Karim Amroellah sebagai utusan dari PGAI (Persatuan Guru-guru Agama Islam). Berbeda dengan Tjokroaminoto dan Mansoer yang menuju ke kongres Islamy di Hejaz, kedua utusan dari Sumatera Barat itu menuju ke Mesir. Pimpimpin-pimpimpin Islam di seluruh dunia sebenarnya lebih menumpahkan perhatiannya ke Hejaz. Dalam kongres itu Tjokroaminoto dan Mansoer telah memperhubungkan umat Islam Indonesia dengan saudara-saudaranya umat Islam seluruh dunia. Sebelum A Kahar Moezakkir (waktu itu *student* di Kairo) memperkenalkan perjuangan dan pergerakan umat Islam Indonesia dalam Kongres Islam Palestina, Tjokroaminoto dan Mansoer dalam Kongres Alam Islamy telah menyampaikan kepada kongres, bahwa kepulauan yang terletak di antara Lautan Teduh dengan Lautan Hindia yaitu Indonesia ada kaum muslimin yang sudah bangun dan sedang bergerak maju.

Kedatangan HOS. Tjokroaminoto dan KHM. Mansoer dari kunjungannya ke Kongres Alam Islamy waktu itu disambut oleh kaum muslimin Indonesia, dengan mengadakan kongres alat Islam keenam di Surabaya pada September 1926. Setelah kedua utusan itu menyampaikan laporan dan kesan-kesan dari perjalanan, diambilah putusan oleh kongres untuk merubah *Centraal Comite Chilafat*, manjadi "Muktamar Alam Islamy Far'ul Hindis Sjaqyah" (MAIHS) sebagai cabang dari Muktamar Alam Islamy di Mekkah. Pimpinan MAIHS terdiri atas HOS. Tjokroaminoto selaku ketua, W. Wondoamiseno wakil ketua

dan H. Agus Salim wakil-wakil semua organisasi Islam. Kantor MAIHS di Surabaya, berada di bawah pimpinan Haji Agus Salim.

3.2.1.2 Pemikiran HOS. Tjokroaminoto Tentang Parlemen

Berbicara tentang perlunya Sarekat Islam duduk dalam Parlemen diungkapkan HOS. Tjoeroaminoto di depan Kongres Sarekat Islam pada tanggal 17-24 Juni 1916 di Bandung. Kongres itu cukup bersemarak karena dikunjungi cabang-cabang Sarekat Islam yang jumlahnya 80 mewakili 360.000 anggota. Kongres Sarekat Islam Nasional pertama ini langsung dipimpin oleh HOS. Tjokroaminoto.

Lontaran pemikiran yang disampaikan kepada para peserta sebagaimana dikatakan oleh beliau bahwa pergerakan Islam penting untuk memperkuat, menyusun dengan teratur dan sebaik-baiknya alat perjuangan tersebut. Menurut beliau dikatakan bahwa persatuan amatlah penting untuk seluruh Nusantara. Persatuan ini merupakan hal yang penting dalam upaya mewujudkan suatu bangsa.

Walaupun secara lambat pergerakan Indonesia bersama rakyat terus berjuang dengan jalan evolusi ingin mencapai pemerintahan sendiri. Sekurang-kurangnya memperjuangkan supaya bangsa Indonesia dapat ikut serta dalam urusan pemerintahan di tanah airnya. Suara-suara yang dikemukakan Tjokroaminoto itu ternyata mendapat persetujuan dan dukungan dari segenap cabang Sarekat Islam di mana pun berada. Untuk memimpin berhasilnya perjuangan sebagaimana yang dikehendaki, perencanaan yang mengenai kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat dari pusat sampai ke daerah diserahkan kepada Tjokroaminoto.

Untuk memenuhi kepercayaan yang dipukulkan di pundaknya, dikupas secara jelas kedudukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, provinsi, kota, desa menurut ajaran agama Islam. Di dalam uraian tentang Dewan Perwakilan Rakyat, juga dikemukakan tentang cara menyusun tata-tertib dewan dan lain-lain.

Rencana Sarekat Islam duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat ialah mendorong rakyat Indonesia untuk menuntut diadakannya pemerintahan sendiri. Tuntutan rakyat yang demikian itu berdasar situasinya sudah tidak dapat ditunda-tunda lagi. Pemikiran perlunya dibentuk suatu parlemen dalam pemerintahan yang merupakan tuntutan rakyat yang selanjutnya berkembang ke seluruh Jawa, Sumatera dan Kalimantan.

Yang menjadi keinginan Tjokroaminoto ialah Dewan Perwakilan Rakyat yang demokratis sebagaimana diajarkan oleh agama Islam, karena itu sebelum *Volksraad* berdiri telah disiapkan rencana yang konkret oleh suatu dewan yang demokratis tersebut. Rencana Sarekat Islam itu menjadi dorongan yang penting bagi rakyat Indonesia untuk menuntut Dewan Perwakilan Rakyat yang dikehendaki, karena itu desakan luar biasa dari rakyat kepada Pemerintah Hindia Belanda untuk menyelenggarakan suatu Dewan Perwakilan Rakyat yang tidak dapat ditunda-tunda lagi. Pengurus Sentral Sarekat Islam yang mendampingi Tjokroaminoto antara lain Abdoel Moeis, R. Sosrokardono. Tjokroaminoto dan Sasrokardono menandatangani suatu akte notaris tertanggal 8 September 1916. Di dalam akte itu dijelaskan bahwa Sentral Sarekat Islam akan berdaya upaya mencapai kemerdekaan politik untuk Indonesia.

Sebagaimana diketahui bahwa pada 16 Desember 1916 Parlemen Belanda telah menerima rancangan untuk *Volksraad* yang dikemukakan oleh Menteri Jajahan Pleyte, karena itu dalam kongres itu banyak dibicarakan mengenai pemerintahan dan badan-badannya lebih banyak dari pada kongres di Bandung. Kongres ini diselenggarakan di Jakarta. Ternyata dalam kongres itu banyak dibicarakan pemerintah sendiri dan aksi desentralisasi pemerintahan, hak memilih, soal kemerdekaan bergerak, pertanian, perusahaan uang dan belasting, urusan-urusan sosial dan pembelaan negeri. Sarekat Islam memutuskan akan duduk dalam *Volksraad*. Niat SI duduk dalam *Volksraad* itu selanjutnya untuk terus berjuang guna mengubah *Volksraad* menjadi parlemen sejati.

Kongres SI menyetujui masuknya ke dalam Komite Nasional yang bertujuan menyusun daftar nama-nama calon anggota *Volksraad* untuk dipilih oleh majlis-majlis daerah dan/atau diangkat oleh pemerintah. Semanu ketua SI Cabang Semarang tidak menyetujui masuknya SI ke dalam *Volksraad*. Mulai saat inilah rupa-rupanya permulaan perselisihan paham antara Tjokroaminoto-Moeis dengan Semauan dan kawan-kawan.

Ketika G.G. Mr. Graaf van Limburg Stirum membuka *Volksraad* yang pertama pada 18 Mei 1918, Tjokroaminoto kemudian diundang bersama-sama dengan Abdoel Moeis dan tokoh SI duduk sebagai pentolan di *Volksraad* antara lain dr. Radjiman, dr. Tjipto Mangoenkoesoemo dan Abdoel Moeis masuk ke dalam *Volksraad* terang-terangan dinyatakan oleh Sarekat Islam dengan tujuan politiknya "berangsur-angsur memperbesar kekuasaan *Volksraad* sampai menjadi Dewan Rakyat yang sebenar-benarnya, yang anggotanya terus dipilih oleh rakyat.

Dalam dewan tersebut Tjokroaminoto dan Abdoel Moeis menempatkan dirinya sebagai oposisi. Tjokroaminoto dengan beraninya bersama Abdoel Moeis melontarkan celaan-celaan terhadap pemerintahan kolonial. Lontaran tajam Tjokroaminoto dan kawan-kawan itu diakui oleh JE. Stokvis dalam majalahnya *De Taak* 29 Juli 1918. Lontaran Tjokroaminoto itu ialah tentang keberatan-keberatan yang dilahirkan oleh bumiputra dengan adanya jurang lebar yang berbahaya yang menjadi pembatas antara rakyat dengan pemerintah. Oposisi itu telah menggemparkan, karena mereka merupakan golongan yang bersatu padu, apa yang diungkapkan dikemukakan secara blak-blakan. Suara Tjokroaminoto dan kawan-kawan yang duduk di dalam *Volksraad* itu telah menggetarkan anggota dewan yang harus mengoreksi diri terhadap hal-hal yang menyebabkan ketimpangan dan menimbulkan reaksi rakyat.

Berkat ketajaman pikiran Tjokroaminoto yang berjuang di dalam *Volksraad* membuat orang-orang Belanda mempertanyakan jati diri pimpinan Tjokroaminoto yang berani itu, karena itu serangan Tjokroaminoto dan Abdoel Moeis di *Volksraad*

menyebabkan para peserta Kongres Nasional ketiga Sentral Sarekat Islam di Surabaya 29 September -- 6 Oktober 1918 dengan nada gemuruh menyampaikan tuntutan kepada pemerintah kolonial sebagai berikut :

- (a) pemerintahan sendiri, menuntut memilih pemimpinnya,
- (b) melakukan pemeriksaan dan hak minta keterangan kepada *Volksraad*,
- (c) susunan anggota *Volksraad* supaya sebanding dengan jiwa rakyat yang jumlahnya cukup besar,
- (d) menuntut peraturan sosial untuk kaum buruh supaya ada kejelasan gaji minimum dan maksimum mereka.

Suatu sikap dan keputusan penting dan berani dari kongres itu ialah menentang pemerintah terhadap tindakannya melindungi kapitalisme dan akan menggerakkan semua organisasi untuk menentang kapitalisme. Sarekat Islam hendak mengkoordinasikan kaum buruh, karena itu Tjokroaminoto secara lantang dan tegas, bila pemerintah tidak mengindahkan tuntutan itu di dalam waktu lima tahun, SI sendiri yang akan melaksanakan. Ucapan Tjokroaminoto itu mendapat sambutan meriah disertai tepuk tangan riuh.

Dengan perjuangan gigih Tjokroaminoto dan berkat kerja sama dengan Budi Utomo, *Insuline, Indische Sociale Democratie* (SDAP), pada 16 November 1918 yang kemudian bernama *Politike Concentracie* dengan tujuan menyusun parlemen kombinasi untuk menuntut terbentuknya parlemen sejati yang menentukan undang-undang dari rakyat dan untuk rakyat. Di samping parlemen sejati juga dibentuk pemerintahan yang bertanggungjawab kepada parlemen. Dua hari kemudian, di muka *Volksraad* dibacakan suatu keterangan dari pemerintah yang datang dari kawat pemerintah di negeri yang terkenal dengan *November Verklaring* atau dikenal dalam sejarah, *November Belofte*. Untuk selanjutnya pada 25 November 1918 di dalam *Volksraad* lahirlah **Mosi Tjokroaminoto** dan kawan-kawan. Mosi ini mengingatkan bahwa telah tiba saatnya meng-

adakan perubahan besar dalam susunan pemerintahan dan secepatnya supaya disusun parlemen yang dipilih di antara rakyat dan oleh rakyat dengan hak menentukan hukum sepenuhnya dan dibangun suatu pemerintahan yang bertanggungjawab pada parlemen tersebut. Selanjutnya berharap agar pemerintahan baru dinyatakan oleh *Volksraad* dapat dibentuk sebelum tahun 1921 dan minta supaya mosi itu diumumkan dengan kawat kepada seluruh pimpinan.

Mosi ini ditandatangani Tjokroaminoto, Sastrowidjono, Dwidjosewojo, Cramer, Tjipto Mangoenkoesoemo, Radjiman, Teeuwen, A. Moeis, dan Thajeb, suatu mosi yang mengandung nilai sejarah.

3.2.2 Proses Perkembangan Pemikiran HOS. Tjokroaminoto

3.2.2.1 Semangat Nasionalisme

Tjokroaminoto mempunyai watak pendiam. Pada wajahnya terlihat beberapa sifat istimewa. Sikapnya keras terhadap diri sendiri. Tjokroaminoto tidak pernah mundur dan merasa kalah karena gertakan pihak lawan. Sifat ini telah tampak waktu kecil karena suka berkelahi. Walaupun beliau keturunan bangsawan tetapi jiwanya merakyat. Hidupnya sehari-hari sangat dekat dengan hati rakyat lingkungannya.

Tjokroaminoto turun dari kalangan kenengratan tetapi harga dirinya tidak jatuh karenanya, sebab beliau muncul sebagai tokoh yang disegani dan dicintai rakyat dari bermacam-macam golongan. Beliau menjadi pemimpin yang tidak hanya di satu lapangan khusus dari golongan alim ulama saja, bukan golongan ningrat saja, bukan dari golongan marhaen saja, tetapi seorang pemimpin ningrat dari semuanya.

Waktu beliau mulai mengembangkan diri sebagai pemimpin rakyat, perbedaan dan pertentangan antara golongan Islam golongan nasionalis dan golongan komunis belum begitu tampak. Dewasa itu saat pembangunan kesadaran kebangsaan yang diutamakan dalam kalangan pejuang.

HOS. Tjokroaminoto berusaha mencapai persatuan rakyat sebulat-bulatnya atas dasar kebangsaan Indonesia dan tidak

menginginkan perpecahan atas dasar macam-macam isme. Dalam hal ini nyata-nyata beliau seorang muslim yang berpandangan luas yang mencita-citakan tercapainya kebulatan kebangsaan Indonesia, melenyapkan rasa dan fanatisme ke-daerahan (provinsionalisme). Paham provinsionalisme dan politik *divide et impera* itu yang terus disebarluaskan oleh penjajah Belanda harus dihadapi dengan mempersatukan seluruh kekuatan bangsa Indonesia dari segala golongan. HOS. Tjokroaminoto tidak menghendaki timbulnya perasaan ke-daerahan, kejawaan, kesumateraan, keborneoan, dan lain-lain. Menurut beliau, bangsa Indonesia harus berjuang dengan satu panji kebangsaan Indonesia saja. Kesadaran kebangsaan itu harus tumbuh di segenap lapisan masyarakat Indonesia dan meliputi semua golongan yang ada. Hal ini menurut pemikiran beliau didasarkan satu nasib dan sepenanggungan sebagai rakyat jajahan yang sengsara, melarat, menderita lahir batin.

Tjokroaminoto bukan hanya seorang pejuang yang mengem-bangkan kebulatan paham kebangsaan Indonesia yang tidak berpecah-belah, tetapi beliau menginginkan pula suatu dasar yang lebih kokoh dan lebih abadi sifatnya. Selain pejuang, beliau adalah seorang muslim yang taat dan konsekuen me-laksanakan ajaran Islam.

Sebagai seorang muslim, beliau menunjukkan pendiriannya sebagai seorang yang patuh kepada agama, ialah agama Islam. Sebagai seorang muslim beliau penuh keyakinan bahwa dirinya dan usaha beliau hanyalah kepunyaan Allah Yang Mahakuasa. Keyakinan agama Islam mengandung paham kebangsaan yang luas. Menurut beliau, usahanya bagi keselamatan perikemanusia-an tidaklah berhasil bilamana tidak diridhoi Allah, sedangkan syarat untuk mendapat ridho Ilahi itu hanyalah apabila seorang menjadi orang yang taat, berbakti kepada Tuhannya, dengan senantiasa mengharapakan taufik (petunjuk) dan hidayah-Nya.

Menilik sifat-sifat yang ada pada dirinya sehingga menye-babkan beliau dalam memperjuangkan cita-citanya itu, tidak mengherankan apabila lingkungan pergaulan beliau amat luas.

Rakyat dari segala lapisan memandang Tjokroaminoto sebagai pemimpinnya. Demikian besar dan kuatnya pengaruh beliau atas golongan-golongan rakyat itu, sehingga tidak mengherankan bahwa beliau difitnah hendak menjadi raja. Golongan rakyat yang hidup tertindas oleh peraturan pemerintah kolonial maupun golongan yang ikut melaksanakan peraturan-peraturan pemerintah kolonial yaitu golongan amtenar-amtenar BB memandang Tjokroaminoto sebagai pembelanya.

Walaupun Tjokroaminoto membaur dengan rakyat tanpa pandang derajat, pangkat, dan pekerjaan, namun di antara mereka juga ada perasaan bahwa beliau adalah pemimpinnya karena itu rasa hormat muncul secara spontan karena mereka merasa membutuhkan kepemimpinannya dan karena beliau memiliki sifat istimewa yang menunjukkan kebesaran jiwanya. Perasaan hormat itu secara tulus timbul dari hati sanubari mereka. Kaum priyayi BB pegawai negeri, kaum pedagang di kampung-kampung, dan alim ulama menempatkan Tjokroaminoto secara istimewa di antara mereka.

Pergaulannya dengan ningrat, menak atau feodal tidak kehilangan corak dan gaya, karena beliau berasal dari keluarga seperti itu. Demikian pula dalam bergaul dengan golongan amtenar-amtenar tinggi negeri yang dikenal sebagai golongan priyayi. Pendidikannya selama di OSVIA dan lingkungan pergaulannya memberi tempat untuk tidak malu dengan mereka. Pergaulannya dengan rakyat yang digolongkan miskin dan kiri, beliau pantang mundur. Di tengah-tengah rakyat terbawah itulah beliau membela mereka.

Bilamana rakyat tertindas dari penguasa kolonial, beliau tidak canggung memberikan pembelaannya. Demikian juga berhubungan dengan golongan nasionalis telah menjadi mitranya berjuang. Pergaulannya dengan orang komunis, beliau telah siap dengan senjatanya, yakni sosialis menurut ajaran Islam, begitu pula dengan golongan ulama yang dirasakan sebagai sedarah sedaging.

Bung Karno mempunyai kesan bahwa Tjokroaminoto waktu masih muda memberi bimbingan. Bung Karno, Tjipto Mangoen-

koesoemo, Ahmad Dahlan, EFE. Douwes Dekker (kemudian bernama Setia Budi), Sneevliet, dan lain-lain yang telah menanamkan pengaruh yang dalam pada jiwanya terutama sekali Tjokroaminoto, termasuk gurunya yang sangat dihormati. Kepribadiannya dan islamismenya menarik Bung Karno karena tidak sulit sehingga perpaduan para pemimpin itu memberi pengaruh pandangan-pandangannya. Bung Karno mengakui bahwa dirinya campuran dari keagamaan, nasionalisme, dan sosialisme.

Ia menyatakan hormat kepada Tjokroaminoto dan Ibu Tjokroaminoto yang luas hati dan luhur budi. Beliau meninggalkan kesan di hati Bung Karno. Pernyataan ini dikemukakan Bung Karno di Jakarta pada 2 Mei 1951.

Menurut Haji Agus Salim, Tjokroaminoto adalah pemimpin pergerakan rakyat yang tak ada bandingnya. Nama Tjokroaminoto tidak dapat dipisahkan dari tanah air Indonesia. Nama Tjokroaminoto tidak dapat dipisahkan dari Partai Sarekat Islam, suatu pergerakan yang mula-mula menyadarkan seluruh lapisan rakyat Indonesia, untuk hidup sendiri sebagai satu bangsa merdeka di antara lain-lain bangsa di muka bumi. Sarekat Islam diakui gerakan yang menuntut hak-haknya membela kepentingan rakyat dengan tidak membeda-bedakan antara rakyat yang beragama Islam dengan yang beragama lain. Sarekat Islam dikatakan bukan hanya pergerakan agama, melainkan bersemangat kerakyatan belaka, yang dibedakan dari kaum pertuanan (Eropa) dan kaum ningrat (bangsa priyayi) yang menjadi tulang punggung kekuasaan penjajahan. Sarekat Islam di bawah Tjokroaminoto menjadi benih yang asli dari pergerakan kemerdekaan Indonesia. Dalam gerakan Sarekat Islam yang asli itu Tjokroaminoto dengan tegas menjadi "pemangku" dan penganjurnya, yang diakui sebagai seorang pembangun yang lengkap. Beliau mendorong dengan penuh keyakinan bahwa perjuangannya akan menang, tidak takut mati, tetapi pantang menyerah. Tjokroaminoto di masa sedang jayanya, mampu menggerakkan rakyat sampai ke desa-desa, ke hulu sungai-hulu sungai, ke puncak-puncak bukit dan gunung. Di masa pergerakan Sarekat Islam Tjokroaminoto menggetarkan Indonesia dari ujung ke

ujung. Agus Salim berkeyakinan bahwa Tjokroaminoto adalah seorang pemimpin pergerakan rakyat yang tidak ada bandingnya (Jakarta, Maret 1951). Hal ini dikemukakan Haji Agus Salim di Jakarta pada bulan Maret 1951.

Dokter KRT. Radjiman Wedyodiningrat mengemukakan bahwa, pada tahun 1911 - 1914 Sarekat Islam dan Boedi Oetomo hendak mengadakan kongres pertanian, karena dua perkumpulan ini menganggap bahwa pertanian itu penting sekali untuk menunjang hidup dan penghidupan bangsa Indonesia seluruhnya. Di samping itu telah ditetapkan akan diselenggarakan rapat umum di Madiun dengan dipimpin oleh Tjokroaminoto. Pada acara tersebut HOS. Tjokroaminoto secara panjang-lebar menguraikan perlunya dan jalannya kongres pertanian itu. Dalam rapat itu yang penting sekali untuk mengadakan kongres ialah soal mencari modal uang untuk membiayainya. SI dan BO mengaku keduanya tidak dapat, sebab tidak mempunyai uang. Dalam rapat umum itu diputuskan agar minta bantuan kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pemerintah Kolonial Belanda menjawabnya bahwa tidak keberatan akan memberi bantuan berapa saja biaya yang akan dibutuhkan itu, tetapi dengan syarat kongres tak diperbolehkan merembuk soal "Siapakah yang mempunyai tanah di Indonesia?", karena SI dan BO memegang teguh bahwa soal ini yang perlu dan harus dibicarakan kongres itu. Tjokroaminoto adalah seorang yang pandai berpidato. Suaranya seperti geledek, terang dan uraiannya jelas. Jika beliau berpidato banyak orang datang untuk mendengarkannya (Jakarta, 26 Maret 1951).

Abdoel Moeis di Bandung pada bulan Agustus 1951 mengakui bahwa Tjokroaminoto adalah peletak batu sendi bangunan politik. Beliaulah pemimpin pergerakan kebangsaan yang menjadi perintis jalan menuju kemerdekaan. Boleh dikatakan bahwa Oemar Said Tjokroaminoto adalah pemimpin yang terkemuka. Sebagai pendiri pergerakan Sarekat Islam, beliaulah yang terdahulu memimpin rakyat, yang menentang dan melawan penjajahan. Sarekat Islam yang dipimpin oleh HOS. Tjokroaminoto dengan cepat meluas di seluruh Indonesia sampai

ke pegunungan. Pemerintah Kolonial Belanda memandang lajunya pergerakan SI bagaikan banjir yang mengancam, kemudian berusaha menahan banjir itu jangan sampai merusak.

Setiap tahun Tjokroaminoto memanggil cabang-cabang SI berkongres ke tanah Jawa. Dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku datang para utusan yang mewakili cabangnya membawa suara puluhan ribu anggotanya. Gerakan SI yang dipimpin Tjokroaminoto semula merupakan gerakan Islam tetapi kemudian mendapat sambutan dari umat di luar Islam, sehingga gerakannya bersifat nasional dan bernama Kongres Nasional. Tjokroaminoto dalam Kongres Nasional SI di hadapan utusan perwakilan menyatakan menentang pemerintah kolonial. Dalam sidang-sidang dikemukakan soal-soal pemerintahan, pengajaran, irigasi, pajak, kehakiman, penyewaan tanah kepada kapital asing, *Poenale Sanksi*, perbedaan kriteria perbuatan sewenang-wenang dari pihak berkuasa, ketiadaan hak "inlander". Batu sendi bangunan politik diletakkan pertama kali oleh HOS. Tjokroaminoto (Bandung, Agustus 1951). Jadi tawaran pemerintah kolonial ditolaknya, dan kongres tak jadi diadakannya.

Sebelum Perang Dunia I meletus, perkumpulan BO mengadakan rapat umum dengan mengundang pula SI yang pada waktu itu di bawah pimpinan HOS. Tjokroaminoto untuk membicarakan, "bagaimana sikap kita bangsa Indonesia, bila mana negeri dan bangsa Belanda terlibat dalam Perang Dunia I itu?". Dalam rapat BO di Semarang salah satu pembicaraannya adalah HOS. Tjokroaminoto yang menguraikan bahwa tidak ada gunanya membantu Belanda karena sampai pada waktu itu belum kelihatan buahnya yang baik selama diperintah oleh Hindia Belanda. Uraian Tjokroaminoto ini banyak disetujui orang.

Pada tahun 1915 BO mengadakan rapat umum di Bandung dengan mengundang SI untuk membicarakan milisi yang dianggap BO penting bagi Indonesia. Dalam undangan di Bandung itu HOS. Tjokroaminoto berpidato dan menyatakan pendiriannya tidak setuju tentang hal milisi. Hal ini sulit sekali karena

sebagian besar bangsa kita memeluk agama Islam yang kewajibannya dalam agama berbeda sekali dengan bangsa Belanda. Setelah rapat selesai, dr. KRT. Wedyodiningrat menemui Tjokroaminoto di mana beliau melahirkan pendiriannya dengan perkataan, "Apakah perlunya mencari beban lebih berat dan banyak ini."

Pada tahun 1918 ketika di Negeri Belanda ada gerakan SDAP yang hendak menjatuhkan pemerintahan Belanda di Indonesia mendapat pengaruh juga. Kemudian ada pertemuan antara bangsa kita yang tengah dalam perjuangan dan Belanda yang berpaham SDAP berkumpul merembuk "bagaimana sikap kita di Indonesia jika ada perubahan pemerintah di Negeri Belanda". Apakah kita harus tunduk kepada Nederland, atau apakah kita memisahkan diri dan mencari jalan lain. Di dalam sidang itu diputuskan bahwa kita harus minta perubahan keadaan. Yang ditunjuk untuk mengajukan ini kepada ketua Dewan Rakyat ialah Tjokroaminoto. Menurut KRT. Wedyodiningrat, Tjokroaminoto pandai berpidato, suaranya seperti geledeg, terang, dan jelas.

3.2.2.2 Menuntut Hak, Membela Keadilan, dan Melawan Penjajahan

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang sumbangan pemikiran HOS. Tjokroaminoto dalam hal menuntut hak, membela keadilan melawan penjajah dapatlah di sini dipetik kesaksian W. Wondoamiseno yang dinukilkan dari pengamatannya secara langsung kejadian di Surabaya, di mana Tjokroaminoto menjadi lebih hidup di dalam hati rakyat di kota itu adalah sebagai berikut. "Memang sesungguhnya sampai sekarang djuga belum ada di Indonesia seorang pemimpin yang pandai bitjara dan berkaliber besar seperti Ketua Tjokroaminoto. Kalau orang mengatakan Bung Karno (Ir. Soekarno) pandai bitjara betul djuga dan saja akui kepandaiannya berpidato. Ketua Tjokroaminoto, kalau bitjara tidak banjak agitasi. Bitjaranya lempeng, lurus, tegas dan djitu (tepat), ulasan-ulasannya mengandung dalil-dalil jang haq (benar), sehingga sukar dibantah. Ketjuali daripada itu bitjarannya mengandung semangat perbawa (sakti) yang menjala-

njala. Mereka jang mendengar selalu terbakar hatinya. Pihak musuh tunduk, karena tepat dan benar. Apalagi kalau marah, tak ada seorangpun jang kuat menahan tantangannya. Semua diam, tak ada berkutik (pumpuh), badan gemetar, hati takut. itulah jang saja katakan mengandung perbawa (kata-kata Djawa), jang artinja "sakti" Seorang pemimpin jang berkarakter, berbudi luhur . . . " 10

Selanjutnya W. Wondoamiseno yang pergaulannya amat rapat dengan HOS. Tjokroaminoto memiliki kesan juga bahwa beliau kalau berhadapan dengan pihak lawan, nampak mukanya seperti singa dengan mata kanannya tak berhentinya berkejapan (bendana, Jw); tegak dan tertib segala gerak-geriknya, orisional bukan bikin-bikin. Sebaliknya bila berhadapan dengan kaum Kromo dan kawan-kawan sendiri, bukan main manisnya segala kata-kata dan tingkah-lakunya yang ramah-tamah. Semua orang senang dan ingin mendapatkan fatwanya. Laki-laki perempuan, tua muda, cinta lahir-batin kepadanya sebagai orang tuanya sendiri.

Apa yang dikatakan W. Wondoamiseno itu bukanlah bikin-bikin, tetapi benar dan terbukti seperti satu contoh yang diceritakan sendiri bahwa pada suatu waktu di Kota Surabaya ada rapat umum yang diselenggarakan dokter-dokter Indonesia (dokter Jawa) untuk menuntut perbaikan nasibnya. Tuntutan perbaikan nasib ini karena adanya perbedaan mencolok antara gaji dokter Jawa dengan dokter kulit putih. Dokter-dokter Indonesia itu meminta HOS Tjokroaminoto untuk hadir dan diminta pula fatwanya. Untuk memenuhi permintaan itu HOS. Tjokroaminoto hadir juga dan duduk di tempat umum di mana W. Wondoamiseno sebagai pengawalnya.

Rapat terbuka penuh sesak bahkan banyak hadirin yang berdiri. Di atas panggung nampak pengurusnya para dokter bangsa kita. Kaum terpelajar banyak hadir. Polisi Belanda lengkap. Dari Pemerintah Belanda nampak antara lain dr. Tam (kepala Surabaya). Dalam rapat itu timbul perdebatan antara dokter Indonesia dengan dokter Belanda yang diwakili oleh Dokter Tam. Dalam Perdebatan itu dokter Belanda tidak dapat

menyetujui tuntutan dokter bangsa kita. Perdebatan panjang-lebar tidak ada putus-putusnya. Kemudian pemimpin rapat mempersiapkan Ketua Tjokroaminoto untuk memberikan fatwanya (amanatnya).

HOS. Tjokroaminoto dengan mengenakan pakaian Jawa tulen dengan sabar naik ke atas panggung, mata kanannya berkedip-kedip yang menandakan penuh buah pikiran dan isi dadanya akan dilahirkan. Sorak-sorai dan tepuk tangan riuh menyambut kedatangan beliau ke atas mimbar dengan penuh perhatian dan keinginan para pendengar, terutama para dokter kita. Orang menanti dengan berdebar-debar apa fatwa yang akan diucapkan pemimpin yang berjihad besar dan sakti itu. Dalam hati mereka ada yang membisikkan bahwa HOS. Tjokroaminoto akan meletuskan sebuah bom yang sukar dilawan oleh pihak musuh.

Dugaan itu menjadi kenyataan karena tidak lama kemudian beliau berpidato dengan suatu perkataan yang sangat menarik perhatian segala pihak antara lain sebagai berikut.

" . . . Djikalau tuntutan saudara-saudara dokter bangsa kita jang saja pandang adil dan sudah pada tempatnja itu tidak dikabulkan oleh pemerintah, maka saja menasehatkan kepada saudara-saudara dokter sekalian supaja serentak meletakkan jabatannja sebagai budak jang tidak berharga dan deradjatnja lebih rendah daripada verpleger kulit putih . . . dan terdjulah di kalangan masjarakat, pimpinlah rakyat di desa-desa dan terimalah mendjadi "dukun" rakjat dengan pembajaran setalengan tiap-tiap pasien dan . . . saja tanggung, bahwa rakjat terutama led SI jang berdjuta-djuta djumlahnja akan suka ichlas hati menerima kedatangan saudara-saudara di tengah-tengah masjarakat di desa-desa dan di gunung-gunung jang sangat membutuhkan bantuan saudara-saudara dokter atas kesehatannya . . . Terdjulah djadi dukunnja rakjat kaum tani di desa-desa dan . . . " ¹¹

Fatwa HOS. Tjokroaminoto di muka dokter-dokter Indonesia itu mendapat sambutan tepuk tangan tidak henti-hentinya,

dan mereka mengatakan bahwa yang difatwakan itu benar. Setelah Tjokroaminoto turun dari mimbar, suara sorak-sorai dan tepuk tangan tersebut berhenti sehingga situasi menjadi sunyi senyap, bahkan setelah ditanyakan siapa yang akan bicara lagi atau membantah, semua diam saja. Pengunjung matanya melotot melihat dokter Belanda dan polisi . . . Para dokter mengucapkan terima kasih kepada HOS. Tjokroaminoto dan mereka berjabat tangan. Pada malam harinya, HOS. Tjokroaminoto dijamu makan-minum oleh para dokter Indonesia bertempat di restoran Stam dan Weyns Simpang Surabaya.

Mengikuti sekilas uraian di muka W. Wondoamiseno mempunyai kenangan terhadap HOS. Tjokroaminoto dengan segala keaksiannya. Apabila beliau berbicara, dapat mematahkan semangat pihak lawan, sebaliknya dapat memuaskan pihak yang dibelanya, pihak yang lemah. Kejadian semacam itu telah berulang kali dan dikenal oleh semua golongan. Walaupun kritiknya tajam dan pedas, namun baik kawan maupun lawan tetap senang kepada beliau, sebab jiwanya lurus dan pendapatnya adil. Semua pihak ingin bertukar pikiran dengan beliau, baik secara perorangan maupun partai. Wondoamiseno sejak masuk menjadi anggota Sarekat Islam selalu aktif mengikuti kursus-kursus terutama ingin memetik buah pikiran HOS. Tjokroaminoto yang lurus, adil, dan luas wawasannya itu.

Dalam kesempatan berdialog antara HOS. Tjokroaminoto dengan para pemimpin Sarekat Islam dipertanyakan, mengapa setiap berpidato beliau mengatakan untuk menghancurkan imperialisme dan kapitalisme? Untuk memuaskan jawaban dialog ini beliau mengatakan bahwa Sarekat Islam tidak memusuhi manusianya yang mana pun, tetapi yang harus dibongkar sampai ke akar-akarnya ialah paham imperialisme dan paham kapitalisme. Paham-paham atau isme-isme itu harus dibasmi. Kaum imperialisme dan kaum kapitalisme itu adalah orang-orang yang menjalankan paham-paham yang jahat dan sebagai alat belaka.

Selanjutnya mengenai sikapnya terhadap imperialisme dan kapitalisme, beliau menegaskan bahwa bukan manusianya

harus dibunuh, tetapi kaum imperialis dan kapitalis itu harus disadarkan bahwa perbuatan-perbuatan mereka yang kejam dan tamak itu tidak baik bagi perikemanusiaan. Kaum penjajah harus disadarkan bahwa rakyat Hindia Timur juga mempunyai hak mengatur negeri dan merdeka. Demikian juga kaum modal harus diinsyafkan bahwa perbuatannya yang tamak, memeras keringat kaum buruh itu tidak baik. Nasib kaum buruh harus diperbaiki.

Dalam menghadapi kaum penjajah yang tidak mau melepaskan negeri Indonesia yang kaya-raja, kaum kapitalis, kaum pabrik-pabrik gula, dan lain-lain yang tidak suka mengurangi keuntungan buat memperbaiki nasib buruhnya itu menurut Tjokroaminoto yang menyebabkan terjadinya pergerakan Sarekat Islam. Dengan persatuan umat Islam yang berjuta-juta di dalam Sarekat Islam itu menyebabkan Sarekat Islam berani menuntut kepada Pemerintah Belanda supaya rakyat Indonesia sebagai rakyat jajahan diberi hak bergerak dalam lapangan politik, artinya berhak mencampuri urusan pemerintahan. Tidak cukup begitu saja, Sarekat Islam menuntut kemerdekaan, artinya kita diberi hak berdiri sendiri, mengatur dan memerintah negeri kita sendiri, mengatur pabrik. Kaum sekerja yang makan upah pada pemerintah, harus digerakkan, dipimpin, dan dipersatukan dalam perserikatan kaum buruh. Tuntutan tentang perbaikan nasib dan tambahan upah yang seimbang dengan pekerjaannya adalah hal yang wajar. Minta bagian dari keuntungan yang berjuta-juta setiap tahun buat kaum tani harus juga digerakkan. Tuntutan naiknya sewa tanah pada pabrik-pabrik gula dan sebagainya, sehingga perlu adanya perserikatan kaum tani. Perintah Tjokroaminoto, "Gerakkanlah dan pimpinlah saudara-saudaramu di pabrik-pabrik, di bengkel-bengkel dan dirikanlah gerakan kaum tani, supaya mereka itu sadar akan harga dirinya sebagai makhluk Tuhan yang tidak ada bedanya dengan bangsa Belanda yang menjajah rakyat Indonesia."

Demikianlah segenap anggota pemuka Sarekat Islam berbicara langsung dengan Tjokroaminoto.

W. Wondoamiseno mengakui bahwa mulai tahun 1914 ia menggerakkan dan memimpin *Vereniging Indlasch Personeel BOW* (VIPBOW) yang diketuai oleh RP. Suroso dan waktu itu ia wakil ketua (HB), sebab Wondoamiseno bekerja menjadi pegawai BOW. Ia juga menggerakkan kaum *chauffeur* (kaum sopir) sebagai ketua *Chauffeur Bond* seluruh Jawa. Kawan-kawan lain ada pula yang menyerbu dalam beberapa lapangan perburuhan antara lain ada yang mendirikan Perserikatan Buruh Gula yang ketua HB nya dipimpin oleh Duryopranoto.

Berkat latihan dan didikan Ketua Tjokroaminoto itu pula lambat-laun W. Wondoamiseno dan kawan-kawan warga Sarekat Islam berani dan dapat berbicara di dalam rapat tertutup dan umum. Kadang-kadang berdebat pun bisa bila dirasa perlu.

Tentang jurnalistik, HOS. Tjokroaminoto mengajarkan pula dengan diberi penjelasan ranjau-ranjau dalam *Strafwaboek* untuk keselamatan daripada perangkap *spreek* dan *persdelick* yang sangat berbahaya pada zaman penjajahan itu. Dalam harian "*Utusan Hindia*," Wondoamiseno setia menjadi pembantunya dengan nama samaran "Wondo-Dipo". Kemudian menerbitkan sendiri majalah mingguan *Suara Perdamaian* di Surabaya.

Satu wejangan Ketua Tjokroaminoto yang tak dapat dilupakan oleh W. Wondoamiseno antara lain sebagai berikut.

"... kalau kamu mau mendjadi pemimpin rakjat jang sungguh-sungguh, lebih dahulu kamu harus tjinta betul-betul kepada rakjat, korbarkanlah djiwa ragamu dan tenagamu untuk membela kepentingan rakjat, seperti membela dirimu sendiri, sebab kamu adalah satu bagian daripadanya. Dan tjintailah kepada kebenaran dalam segala usahamu, tentu Allah akan menolong kamu. Djangan sombong dan djangan bertjidra djandji. Djangan membeda-bedakan bulu, barangsiapa datang kepadamu terimalah dengan baik dan hormat, meski fakir dan miskin sekalipun. Kalau kebetulan kamu tidur, bangunlah dengan hati jang ichlas, djangan menjesal sekalipun jang datang itu tidak membawa redjeki bagimu. Pertjajalah Allah sifat murah dan kasih sajang pada hambaNja".¹²

Selanjutnya masih terkenang dalam ingatan W. Wondoamiseno kata-kata beliau lebih jauh, "Kalau kamu berhadapan dengan lawan baik siapa dan bangsa apa djuga, harus kamu tundukkan sikap sebagai satria jang gagah berani, djanganlah sekali-sekali suka merendahkan diri. Seorang pemimpin harus mempunyai rasa perasaan bahwa dirinya lebih tinggi dan lebih berharga deradjatnya dalam pandangan rakjat dan djuga pandangan Allah". "Pertjajalah!" Kata penutup beliau, bahwa Allah tidak akan sia-siakan segala hal usahamu sebagai pemimpin rakjat, asal hatimu djudjur dan ichlas, insja Allah pengaruh akan datang dengan sendirinja. Ilmu boleh kamu tjari, tetapi kepertjajaan adalah tergantung atas kedjudjuran dan keichlasan hatimu sendiri. Kalau kamu berdjandji, tepatilah! Djangan bertjidra!"¹³

Itulah wejangan Ketua Tjokroaminoto yang dapat ditirukan oleh W. Wondoamiseno tentang hal-hal yang penting-penting. Selanjutnya wejangan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemuda-pemuda dan kawan-kawan seperjuangan.

3.2.2.3 *Pemikiran Tentang Islam dan Sosialisme*

Pemikiran HOS Tjokroaminoto, "Apakah Sosialisme", telah ditulis dalam surat kabar Sarekat Islam dalam Kongres Al Islam di Garut tahun 1922. Di samping itu ditulis pula "Sosialisme berdasar Islam". Hal ini telah diberikan sebagai bahan pelajaran pada kursus-kursus anggota Sarekat Islam. Dalam kursus-kursus itu di samping Tjokroaminoto memberi pelajaran tentang "Sosialisme", Soryopranoto dan H. Fachrudin (sebagai pimpinan Muhammadiyah yang terkenal, waktu itu juga sebagai bendaharawan SI), juga memberi pelajaran. Soerjopranoto memberi pelajaran "Sosiologi", sedang H. Fachruddin mengajar tentang "Agama Islam".

Pada bulan November 1924 Tjokroaminoto menulis kitab *Islam dan Sosialisme* yaitu suatu kitab yang terkenal dan banyak dibutuhkan serta menjadi perhatian terutama oleh kaum muslimin Indonesia. Menurut beliau "Sosialisme" berasal dari bahasa Latin *-socius-* dalam bahasa Belanda *-makker-* dalam

bahasa Melayu --*teman*-- dalam bahasa Jawa --*konco*-- dan dalam bahasa Arab --*sahabat* atau *asyrat*--.

Di dalam paham "sosialisme" berakar angan-angan (pikiran) yang nikmat, yaitu angan-angan pertemanan, musahabah atau musyawarah, *kekancan*. Sosialisme mengutamakan paham "pertemanan" atau "persahabatan" itu sebagai anasir pengikat di dalam pergaulan hidup bersama. paham "Sosialisme" itu bertentangan sama sekali dengan paham "individualisme" yang hanya mengutamakan keperluan "individu" (seorang bagi dirinya sendiri).

Sosialisme menghendaki cara cara hidup "satu buat semua, dan semua buat satu", yaitu cara hidup yang hendak memper-tunjukkan bahwa kita memikul pertanggungjawaban di atas per-buatan satu sama lain. Individualisme mengutamakan paham "tiap-tiap orang buat dirinya sendiri".

Dalam menuangkan buah pikirannya tentang sosialisme, Tjokroaminoto banyak membaca tulisan pengarang-pengarang bangsa barat, terutama sekali karangan Prof. Quack (bangsa Belanda). Dari dalam kitab itu dikenal dengan kaum sosialis dari segala abad dan belajar mengenal dengan aturan-aturan (*stelsel*) yang dibuatnya. Berdasar penelaahan beliau tentang pengertian sosialisme ternyata besar perbedaannya antara satu dengan lainnya.

Suatu hal yang disepakati bersama antara kaum sosialis bahwa menurut paham itu hendak melindungi keperluan-keperluan, hak-hak dan kewajiban perikatan orang hidup ber-sama di atas hawa nafsunya seorang diri atau segolongan ma-nusia yang kecil.

Menurut Tjokroaminoto, meskipun pergerakan-pergerakan sosialisme dalam zaman dahulu itu pertama-tama sekali tim-bulnya dari peri keadaan busuk yang ada pada tiap-tiap zaman, benih pergerakan itu tidak mendapat makannya dari-pada cita-cita yang menuju barang hikmah, tetapi terutama sekali mendapat makannya juga dari perasaan-perasaan agama yang dalam.

Secara perlahan-lahan anasir saleh dan anasir agama yang ada lapisan-lapisan rakyat bahwa semakin lembek, sedang secara perlahan pula masyarakat sosialis, terutama sekali di negeri barat, makin lama makin bertambah kerasnya yang mendasarkan kepada barang kebendaan belaka. Dengan demikian maka ketetapan arti kata sosialisme, menjadi bertambah-tambah banyaknya bagaikan pasir yang terdapat di tepi laut, dan antara satu dengan lainnya berbeda. Sungguhpun begitu dari arti yang bermacam-macam itu tetap ada pikiran yang sama yaitu bahwa sosialisme itu suatu cita-cita mengatur hidup yang tidak bertentangan dengan aturan hidup secara individual. Aturan ini tidak membenarkan adanya aturan keleluasaan sebeb-bebasnya tanpa batas sehingga bebas di dalam mengeluarkan pendapat dan bebas dalam membagi hasil dan memiliki sesuatu.

Menurut Tjokroaminoto, sosialisme mempunyai maksud juga akan memperbaiki nasib golongan manusia yang termiskin dan terbanyak jumlahnya, agar mereka mendapat satu nasib yang sesuai dengan derajat manusia, yaitu dengan cara memerangi sebab-sebab yang menimbulkan kemiskinan. Teori sosialisme ini ada persamaan maksud dengan pencelaan terhadap pergaulan hidup yang semata mata urusan kebendaan, urusan pengadilan dan juga tentang urusan kepercayaan keagamaan yang ada waktu itu. Oleh karena itu menurut Tjokroaminoto untuk mengubah tatanan yang tidak baik itu harus diadakan perubahan secara revolusi, dalam pengertian bukan merupakan perkosaan. Sungguhpun bersamaan pendapatnya tentang sebab-sebabnya kebusukan dalam pergaulan hidup bersama, tetapi tentang perkataan-perkataan lainnya, dari teori tadi sangat berbeda antara yang satu dengan lainnya.

Dalam hal ini menurut Tjokroaminoto, orang harus membedakan antara paham "sosialisme" sebagai pelajaran tentang sesuatu pengaturan pergaulan hidup bersama dan paham "sosialisme" sebagai pergerakan akan mencapai maksud mendapat pengaturan pergaulan hidup bersama yang tertentu tadi.

Untuk memudahkan orang memahami dan membedakan antara "sosialisme" dan "komunisme" maka berdasar pendapat umum bahwa komunisme itu satu nama penghimpun (*verzamelnaam*), dan "sosialisme" itu nama macam (*soortnaam*).

Tjokroaminoto mengatakan bahwa "komunisme" itu ialah segala peraturan (*stelsel*) yang menyerang, sifatnya kepunyaan seseorang, dan buat mengganti dia hendaknya dilakukan semacam aturan *communio bonorum*, yaitu barang-barang itu hendak dimiliki bersama. Angan-angan atau pikiran *communio bonorum* adalah senantiasa bergandeng dengan perkataan *komunisme*, dan pengaturan *communio* (memiliki, mempunyai bersama), itulah yang menjadi ukuran bagi rupa-rupa bagiannya komunis.

Adapun sosialisme ialah satu bagian dari komunisme, Sosialisme atau kolektivisme menurut pengertian ini ialah tiap-tiap peraturan tentang urusan harta benda (*economisch stelsel*), yang di dalam programnya menetapkan dua penuntutan seperti berikut.

- (1) bahwa kepunyaan atas alat-alat dan mengeluarkan barang-barang itu, hendaknya diserahkan ke dalam tangannya perikatan orang hidup bersama (*gemeenschap*).
- (2) bahwa ketertiban tentang urusan harta benda itu hendaknya diatur oleh perikatan orang hidup bersama, lebih tegas perikatan orang hidup bersama hendaknya menetapkan apa dan bagaimanakah harus dikeluarkannya barang-barang dan berapakah barang-barang yang sudah dikeluarkan atau dibuat itu harus dibagi-bagi; hanyalah memakainya barang-barang yang sudah dibagi itu saja yang tinggal tetap menjadi perkaranya seorang masing-masing.

Untuk mendapat pengertian yang benar tentang ketepatan arti kata yang tersebut di atas ini, Tjokroaminoto memperingatkan adanya dua perkara yaitu sebagai berikut. Pertama, jikalau kita menyebutkan sosialisme itu satu peraturan tentang urusan harta benda (*economisch stelsel*), maka tidaklah kita maksudkan, bahwa sosialisme itu juga tidak

mempelajari ajaran-ajaran dan falsafah. Sebaliknya tiap-tiap macam sosialisme adalah berdasar kepada azas-azas falsafah atau azas-azas agama, sedang sosialisme yang wajib dituntut dan dilakukan oleh umat Islam itu bukannya sosialisme yang lain, melainkan sosialisme yang berdasar kepada azas-azas Islam belaka, yang di belakang hendak diuraikan lebih luas dan lebih jauh pula. Sosialisme yang kita tuju bermaksud mencari keselamatan dunia dan juga keselamatan akhirat.

Kedua, kalau kita mengatakan, bahwa sosialisme itu adalah tiap-tiap peraturan tentang urusan harta benda, yang menghendaki seperti tersebut di atas maka nyatalah kepada tiap-tiap orang, bahwa sosialisme itu ialah nama umumnya rupa-rupa peraturan, yang semuanya diberi nama sosialisme itu. Adalah empat peraturan terbesar yang memakai nama sosialisme. Semuanya menetapkan di dalam programnya dua perkara yang kita sebutkan di atas sebagai sifatnya sosialisme tadi. Di antara empat peraturan ini terutama sekali bedanya, ialah bahwasanya perikatan orang hidup bersama (*gemeenschap*) yang hendak dijadikan pemerintahannya, satu sama lain berbeda pemahannya.¹⁴

- (a) *social democratie* (sosialisme yang berdasar pengetahuan, *wetenschappelijke socialisme* atau marxisme, yaitu ajarannya Karl Marx) menghendaki *gemeenschap* itu ialah sekalian orang yang hidup bersama, dikepalai oleh satu pemerintahan yang dipilih oleh segala orang dengan cara demokratis. *Gemeenschap* itu bukannya satu demokrasi sosial, ketertiban politik (*politiek orde*), ialah pemerintahan sebagai yang kita kenal itu, akan lenyap dengan sendirinya, sebab semua akan bercampur di dalam ketertiban ekonomi, yang bakal ada, tidak lain satu *gemeenschap* dari perhubungan-perhubungan ekonomi, lebih tegas yaitu satu pekerjaan industri yang amat besar.
- (b) *anarchisme* menghendaki *gemeenschap* itu bukan segenap manusia yang hidup bersama (*maatschappij*), tetapi cuma golongan-golongannya kaum bekerja (*arbeiders*) belaka yang menjaga otonomi (memerintah diri sendiri), dan tidak

ada pertanggung jawab kepada pergaulan hidup bersama (*maatschapaj*). Golongan-golongan tadi boleh dibagi-bagi menurut batas-batasnya tempat ataupun dengan mengingat keperluan ekonomi (masing-masing pekerjaan sendiri-sendiri). Orang-orang yang mengikuti perhimpunan-perhimpunan *Vakvereeniging* yang revolusioner/adalah berdiri pada tempat pendirian anarkhisme. Mereka itu menuntut bahwa segala alat-alat membuat barang-barang itu hendaknya menjadi kepunyaannya perhimpunan-perhimpunan *Vakvereeniging* (kaum sekerja).

- (c) *staatsocialisme* menghendaki *gemeenschap* itu ialah *politieke staat*, yang hendak ditetapkan adanya sebagai *staat* yang kita kenal sekarang ini. Sesungguhnya *staatsocialisme* tidak boleh semuanya dimaksudkan golongannya sosialisme, sebab di dalam programnya (mengatur ketertiban ekonomi oleh *gemeenschap*) tetapi bab yang pertama tidak dituliskan.
- (d) *akkersocialisme*, sebagai *staatsocialisme*, menghendaki *gemeenschap* itu ialah politik pemerintahan yang teratur modern. Aturan ini pun bukannya sosialisme yang sebenarnya, sebab orang-orang yang mengikuti *akkerssocialisme*, yang hendak ditariknya kepada *gemeenschap*, hanyalah isinya belaka.

Sebagaimana telah disebut di muka, benih pergerakan-pergerakan sosialistis itu tidak saja mendapat makanannya dari cita-cita yang menuju barang hikmah, tetapi terutama sekali mendapat makanannya juga dari perasaan-perasaan agama yang dalam.

Begitu pun sosialisme yang berdasarkan pengetahuan (*watenschap*) ialah *watenschappelijk socialisme* ajaran Karl Marx (Marxisme), mempunyai juga dasar cita-cita yang menuju barang hikmah. Dasar ini disebut *historisch materialisme* yang merupakan bagian dari falsafah yang diajarkan Hegel yang menguraikan tentang peraturan-peraturan dan perkara-perkara kejadian dalam pergaulan hidup bersama.

Berdasarkan uraian di muka Tjokroaminoto mengungkapkan pikirannya tentang sosialisme yang berdasar dan bersandar kepada agama Islam dan yang wajib dilakukan sepanjang perintah Islam juga.

Dalam kata pendahuluannya Tjokroaminoto menerangkan bahwa cita-cita sosialisme di dalam Islam tidak kurang dari tiga belas abad umurnya dan tidak boleh dikatakan terbit dari pengaruh bangsa Eropa. Menurut Tjokroaminoto, azas-azas sosialisme itu telah terkenal dalam pergaulan hidup Islam bersama pada zamannya Nabi Muhammad saw. Azas-azas itu dilakukannya lebih banyak dan lebih gampang daripada di Eropa dalam zaman mana pun sesudah zaman Nabi kita itu. Di bawah ini diuraikan dua macam sosialisme yang terutama terkenal oleh keislaman, yaitu: (1) *staats socialisme*, baik bekerja dengan kekuatan satu pusat maupun bekerja dengan kekuatan *gemeente-gemeente* dan (2) *industrie socialisme*.

Menurut Tjokroaminoto, yang terpenting dari kedua macam sosialisme itu sebagaimana disebut pada bagian pertama. Jikalau satu negeri (*staat*) bersifat sosialistis, haruslah seluas-luasnya pekerjaan kerajinan diaturnya sosialistis juga. Maka di dalam negeri yang demikian itu tanah industri besar, itu pun kalau hendak dijalankan seluas-luasnya *landsocialisme* dan *staats-socialisme*. Maka macam sosialisme inilah yang terutama sekali dijalankan oleh Islam. Sejak Nabi Muhammad saw memegang kekuasaan negeri, maka negeri itu segeralah diaturnya sosialistis dan segala tanah dijadikannya kepunyaan negeri. Politik yang demikian itu dilanjutkan sampai Islam berkembang ke berbagai negeri luar. Politik sosialistis itu telah dijalankan oleh para raja Moghol besar di Hindia (Hindustan) yaitu tentang tanah. Selanjutnya turun-temurun mengikuti juga sampai begitu luas, sehingga bukan saja tambang-tambang dan petikan menjadi kepunyaan negeri. Demikian juga bila ada orang menemui sebuah benda yang berharga di dalam tanah, haruslah ia menyerahkan barang itu kepada negeri, ialah yang menguasai atau memiliki tanah dan segala sesuatu yang ada di dalamnya.

Sebagaimana dicontohkan oleh Tjokroaminoto tentang pemilikan tanah yang disewakan kepada rakyat yang tiada tertentu besarnya. Dengan sistem ini maka uang kekayaan negeri tergantung dari hasil tanah. Bertolak dari uraian ini dapat dikatakan bahwa hampir segenap negeri muslim kekayaannya bergantung dari tanah.

Di bawah hukum muslim tanah itu menjadi kepunyaan negeri, dan oleh karena itu negeri diaturinya secara sosialis, alat-alat yang terutama untuk mengeluarkan hasil diberikannya menjadi kepunyaan rakyat. Pengaturannya dilaksanakan secara sosialis haruslah rakyat sendiri mempunyai suara dengan langsung di dalam negeri. Apabila sampai dengan perkara ini, maka negeri muslim telah sampailah pada batas sosialisme yang tertinggi. Rakyat mengetahui bahwa dalam membuat peraturan tidak semata-mata di tangan menteri atau parlemen, dan tidak di dalam tangannya satu golongan partai yang mewakili suatu golongan atau satu kelas. Segala peraturan muslim bersumber dari Tuhan, datangnya dari pemberi aturan, yang berdiri di atas segala apa saja. Segenap prikemanusiaan sebagai satu persatuan adalah mempunyai satu hak bersama. Tiada seorang atau segolongan, baik yang memilih maupun yang terpilih boleh mengubah aturan-aturan itu untuk semua golongan, partai atau kelas. Permusyawaratan pembuat peraturan pada masa sekarang ialah permusyawaratan-permusyawaratan orang-orang wakil atau utusan. Pemerintahan perwakilan itu menjadi sebab timbulnya rasa tidak sosialis. Menurut Tjokroaminoto bahwa pembuatan peraturan dengan cara referendum (tanya secara langsung kepada orang banyak) itu lebih mendekati sosialisme daripada cara membuat peraturan dengan perwakilan, tetapi pertanyaan itu secara langsung ditujukan kepada segenap rakyat dengan tidak mengecualikan suatu kelas atau partai. Adapun menafsirkan atau menerangkan hukum Islam, memberi hak umum kepada semua orang laki-laki dan perempuan. Dalam hal memberikan keterangan hukum-hukum Islam tidak boleh memandang derajat orangnya.

Selanjutnya dalam hal menjalankan kemauan, pemerintahan itu diserahkan kepada orang-orang yang dianggap benar dan

bijaksana. Sungguhpun ini boleh dikatakan pemerintah dengan perwakilan, maksud untuk memudahkan jalannya hukum atau peraturan. Kepala-kepala pemerintah pun menjadi perantara guna menolong kesusahan dan mengindahkan penghargaan-penghargaan rakyat dan guna menjalankan hukum Tuhan menurut kemauannya segenap rakyat. Paham birokratisme (kekuasaan kantor) di dalam pemerintahan adalah suatu bahaya yang terbesar, tetapi kaum muslimin dapat menghindarkan dirinya dari bahaya itu. Pemerintahan mereka itu tiadalah bersifat birokratis di mana pun. Mereka itu tiada memakai aturan departemen, tidak pula memakai aturan pangkat menteri. Pimpinan muslimin tidak boleh bebas dari pikiran umum seperti kabinet dan menteri-menteri dalam pemerintahan demokrasi di negeri-negeri Barat. Dalam hal ini pimpinan muslimin diwajibkan mengindahkan harapan-harapan rakyat dalam perkara-perkara penghidupan sehari-hari, baik perkara yang mengenai pergaulan hidup bersama maupun perkara politik. Mereka itu tidak boleh melalaikan peraturan-peraturan rakyat dalam suatu perkara dan bersembunyi di belakang kekuatan suara teman-temannya yang terbanyak di dalam majelis parlemen seperti tingkah laku menteri-menteri dalam demokrasi seperti sekarang ini. Demokrasi yang sejati haruslah memberi segala kekuasaan pemerintahan dan pembuatan hukum kepada rakyat. Islam hendaklah mempunyai bala tentara dari rakyat (*volksleger*) yang berperang untuk menjaga kehormatan dan melindungi negerinya. Tentara sebagaimana terdapat di Tripoli dan Turki dikatakan oleh Tjokroaminoto bukanlah prajurit bayaran seperti tentara di Eropa. Para pembesar negeri merasa perlu ditolong dari tentara tersebut bagaikan kewajiban antara orang tua dengan anak. Tentara-tentara dan jenderal-jenderal mendapat balasan atas jasanya kepada negeri. Kalau mereka itu meninggalkan janda dan anak-anak yang miskin, maka janda-janda dan anak-anak itu diberi bantuan oleh negeri.

Pendeknya peraturan pemerintahan dan militer dalam negeri Islam dulu adalah bersifat sosialis, tetapi tidak dapat disamakan dengan industri-sosial. Pada waktu industri sosial

telah mengarah kepada kemajuan kebendaan, maka Nabi Muhammad saw. telah menaruh perhatian secara sungguh-sungguh terhadap perkara pekerjaan, industri dan kapital (modal), Islam mengharamkan riba. Islam bermusuhan secara keras dengan kapitalisme.

Menghisap keringatnya orang-orang bekerja, makan hasil pekerjaan orang, tidak memberikan bagian keuntungan yang mestinya (dengan seharusnya) menjadi bagiannya lain orang yang turut bekerja mengeluarkan keuntungan itu. Semua perbuatan serupa ini (oleh Karl Marx disebut makanan keuntungan *meerwarde*) dilarang sekeras-kerasnya oleh agama Islam, karena itu adalah "riba". Dengan begitu maka nyatalah bahwa agama Islam memerangi kapitalisme sampai pada "akar-akarnya". Membunuh kapitalisme mulai dari "benihnya", oleh karena itu pertama-tama sekali yang menjadi dasarnya kapitalisme yaitu "memakan keuntungan *meewarde*, sepanjang pahamnya Karl Marx dan "memakan riba", sepanjang pahamnya Islam.

Dengan hukum zakat maka Islam mewajibkan orang kaya mengeluarkan biaya untuk keperluannya orang miskin. Pada zamannya Nabi Muhammad saw. tanah itu memberi sebesar-besar dan seluas-luasnya pekerjaan kepada kaum pekerja, dan pada zaman pemerintahan Islam tanah itu menjadi kepunyaan negeri.

Tjokroaminoto menggambarkan keadaan industri kecil-kecil sebelum kedatangan Islam dikerjakan oleh orang-orang miskin atau oleh budak belian untuk keuntungan dan kesenangan tuan-tuannya semata-mata, yang kebanyakan bengis dan kejam tabiatnya. Sebelum kedatangan Islam orang-orang yang menjalankan sesuatu pekerjaan industri sangat direndahkan derajatnya oleh orang-orang bangsawan, sedang budak-budak belian yang menjadi kuli itu diperlakukan sebagai binatang oleh tuan-tuannya, kaum kapitalis. Nabi Muhammad saw. mulai mengangkat derajat pekerjaan dan perburuhan. Kehadiran kepemimpinan Nabi Muhammad saw. telah menjadi raja secara lahir dan batin di tanah Arab dan dunia Islam. Langkah terbesar yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. ialah

dengan pengangkatan beliau dari budak belian menjadi orang merdeka. Budak-budak belian diberinya hak-hak yang dulu tidak ada pada mereka. Budak-budak belian dijadikan taman sekerja, mereka itu dijadikan kepala balatentara atau kepala lain-lain pekerjaan, tetapi di lain hal mereka sebelum kehadiran agama Islam diperlakukan sebagai binatang. Dengan hal-hal yang demikian itu budak-budak belian dijadikan teman seikat sekerja turut merasakan kesenangan dan keuntungan tuannya. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw untuk memperbaiki peri-keadaan dan nasib kaum buruh dinilai oleh Tjokroaminoto suatu langkah yang besar dan tidak ada bandingnya di dalam dunia tentang urusan ekonomi. Kaum buruh atas kuli itulah dikatakan merupakan kekuatan pokok yang menimbulkan kemajuan dan kesejahteraan Eropa yang memusatkan perhatiannya pada materialistis yaitu mengutamakan kebendaan. Nabib budak belian pada daerah jajahan pada abad dua puluh diperlakukan lebih busuk bila dibandingkan nasib mereka setelah datangnya agama Islam. Oleh karena itu pengertian sosialisme dalam zaman Nabi Muhammad ternyata lebih tinggi dan lebih mulia. Kebaikan sosialisme pada zaman Nabi Muhammad ini baik dalam menanamkan pengertian itu pada pikiran rakyat dan pelaksanaan sosialisme dalam kehidupan sehari-hari yaitu lebih sederhana dan lebih mudah daripada cara yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin sosialis Barat.

Adapun yang menjadi dasar pengertian sosialismenya Nabi Muhammad saw yaitu kemajuan prikeutamaan dan kemajuan budi pekertinya rakyat. Sepanjang keyakinan Tjokroaminoto bahwa sosialisme yang sejati tiada akan tercapai selama-lamanya, kalau tidak dengan kemajuan-kemajuan rakyat yang demikian itu. Tiap-tiap haluan yang menuju maksud hanya memenuhi nafsu kasar (kesenangan harta benda), apa lagi haluan yang mengukir kepada Allah, selama-lamanya tiadalah akan dapat menimbulkan perdamaian dan sosialisme yang sejati. Sosialisme dan perdamaian menuntut perkeutamaan yang besar dan budi pekerti yang halus, yang pada umumnya ada pada bangsa Timur, terutama pada orang yang beragama Islam. Umat Islam

cakap sekali melakukan kehendak sosialisme yang sejati itu. Sungguhpun orang-orang Islam pada umumnya telah lama turun derajatnya di mata dunia sebagaimana bangsa-bangsa Timur, namun mereka itu masih mempunyai sifat dan tabiat yang diperlukan untuk kemajuan sosialisme.

Perkara-perkara besar yang terjadi di dalam dunia Islam, terutama yang ada di luar Hindia Belanda, bahwa rasa persaudaraan dan persatuan di dalam dunia Islam, dasar-dasar yang sesungguhnya bagi sosialisme tiadalah mati tetapi bertambah-tambah kuat di dalam hatinya umat Islam. Perasaan itu dalam maksud bersama dipersatukan di dalam perserikatan persaudaraan. Itulah kekuatan menuju sosialisme yang besar sekali artinya. Menurut Tjokroaminoto apabila kepercayaan umat Islam kepada Allah makin hari makin bertambah besar, dan apabila rasa persatuan Islam makin bertambah lama semakin tebal di dalam diri umat Islam yang tinggal di bagian dunia, maka sosialisme itu tidak boleh tidak mesti akan membuat kemajuan yang besar adanya. Beberapa bangsa barat mengira bahwa hukum Islam tidak dapat dijadikan peraturan negeri, namun barang siapa telah mengetahui bahwa rasa pikiran demokrasi dan sosialisme berakar kuat dalam Islam, niscaya heran benar akan kebutaan orang banyak tentang Islam itu. Tentang prikeutamaan dan kebijaksanaan dalam pergaulan hidup bersama, Islam sama sekali tidak ada kekhawatiran dapat dikalahkan oleh agama yang mana pun.

Tjokroaminoto mengingatkan adanya bahaya materialisme, yaitu nafsu yang hanya menghendaki kemajuan kasar, kemajuan prikebangsaan saja semata-mata. Kaum muslimin dan segenap dunia Islam wajiblah berbenteng kuat dalam menegakkan dan menolak bahaya itu, yaitu dengan lantaran memperkuat persatuan tadi dan persatuan kehalusan (spiritualisme). Selanjutnya diingatkan oleh Tjokroaminoto paham itu dapatlah dibinasakan, tetapi spiritualisme tidak. Menurut Tjokroaminoto diumpamakan sebagai badan manusia yang terdiri atas darah dan daging boleh disakiti, tetapi mengenai budi dan gerak hatinya rakyat tidak dapat dibinasakannya. Suatu cita-cita tidak dapat dibunuh dengan bayonet dan peluru atau bom. Kemajuan barang benda

yang bersandar kereta api dan telegraf, *dreadnought* dan kapal terbang bolehlah dibinasakan, tetapi perserikatan, persatuan dan susunan-susunan budi yang bersandar keutamaan dan kebajikan manusia tidaklah dapat dibinasakannya.

Islam tidak dapat dikalahkan oleh apa pun, begitu pula orang Islam yang mempunyai dzat Islam sejati. Islam itu adalah pesawat kemajuan yang terbesar yang terkenal oleh prike-manusiaan. Apabila orang Islam sampai dapat dikalahkan oleh materialisme, itu bukan salahnya Islam, tetapi salah mereka itu sendiri yang lalai akan keislamannya. Hanya Islam itu saja yang mencampurkan perkara lahir dengan perkara batin. Islam memberi aturan untuk pedoman bagi prikehidupan batin dan juga pedoman bagi pergaulan hidup bersama, bagi perkara-perkara politik, pemerintahan negeri, militer, kehakiman dan perdagangan adanya.¹⁵

Suatu peringatan yang perlu mendapat perhatian bagi umat Islam disampaikan oleh Tjokroaminoto ialah bahwa orang Islam tidak boleh dan tidak dapat menerima *wetenschappelijk socialisme* (sosialisme berdasarkan pengetahuan) yang disebut juga *Marxisme* atau pelajaran dari Karl Marx. Keterangan Tjokroaminoto ini untuk menunjukkan bahwa orang Islam tidak boleh dan dapat menerima segenap *wetenschappelijk socialisme* pelajaran Karl Marx itu.

Menurut Tjokroaminoto walaupun *wetenschappelijk socialisme* tampak dan mengakui peraturan tentang urusan harta benda (*economic stelsel*), tetapi sesungguhnya Marxisme ajaran Marx itu sama sekali berdiri di atas dasar cita-cita yang semata-mata beralasan perkara hikmah belaka. Sungguhpun Marx mengatakan bahwa dia punya *wijsgeering stelsel* itu sama sekali bersandar kepada perkara-perkara yang sungguh-sungguh benar terjadi dalam riwayat, terutama sekali dari penghidupan dalam urusan harta benda (*economisch leven*). Marx menurut Tjokroaminoto bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya. Ilmu akal (*philosophie*), yaitu *historisch materialisme*, sudah ada di dalam kitabnya yang dikeluarkan tahun 1847, yaitu *Misere de la philosophi* dan *Komunistisch Manifest*.

Untuk memberikan keyakinan kepada umat Islam Tjokroaminoto secara tajam mengemukakan ajaran yang terdapat dalam *historisch materialisme* ajaran Feuerbach dari Hegel. Materialisme menurut Feuerbach dikatakan bahwa segala sesuatu yang ada itu tidak lain adalah benda belaka. Tidak ada Tuhan yang telah menjadikan dan memerintahkan dunia, tidak ada barang yang tidak berwujud, yang disebut badan halus; tidak ada nyawa (ruh) yang tidak berwujud. Manusia itu tidak lebih dari binatang yang tinggi derajatnya. Segala angan-angan, ingatan, pikiran, semua tidak lain hasilnya pergerakan benda, yaitu pergerakan otak.

Tjokroaminoto meminta perhatian dan perlu diperingati perkataan Marx dan Enggels yang mengatakan bahwa dunia itu terdiri atas benda yang dapat ditangkap oleh panca indera, dan dunia yang demikian itulah yang ada, sedang perasaan, pikiran, walaupun tampaknya ada di atasnya panca-indera hanya hasil dari pemikiran otak tentang adanya benda.

Pelajaran dialektik Hegel yang tergolong bapaknya sosialis modern mengatakan bahwa barang yang ada berubah menjadi sebaliknya, tetapi dari perubahan itu dalam keadaan yang lebih tinggi wujudnya dan sempurna. Suatu yang ada adalah benda belaka.

Kenyataan-kenyataan yang terbentang di atas ini membuktikan bahwa *historich materialisme* pelajaran dari Karl Marx, nyata-nyata mengukir akan keadaan Tuhan, malaikat, roh dan beberapa perkara yang lain pula yang diajarkan oleh segala agama, terutama sekali oleh Islam. Menurut Hegel sebagaimana dikatakan Karl Marx bahwa, "agama itu ialah kebingungan otak, yang dibuat-buat oleh manusia akan meringankan hidup yang sukar ini . . . Agama itu dikatakan candunya rakyat".

Tjokroaminoto secara tegas mengatakan sebagai orang yang ber-Tuhan, yakin bahwa segala sesuatu itu **asalny**a dari Allah, oleh Allah dan kembali kepada Allah.

Historisch materialisme pun sebaliknya, mengerjakan, **segala sesuatu itu asalny**a dari benda, oleh benda dan kembali kepada benda.

Pelajaran *Historisch materialisme* tidak boleh dipungkiri lagi bahwa Marxisme itu ialah paham yang melahirkan benar-benar teorinya Darwin tentang prike-manusiaan dan riwayatnya. Menurut Darwin bahwa manusia itu dari binatang, berlainan dengan yang termuat dalam kitab-kitab agama. Dari binatang-binatang kecil lalu menjadi sempurna, kemudian menjadi manusia.

Tjokroaminoto secara tegas menyatakan bahwa *historisch materialisme* itu mungkir kepada Allah, dan ber-Tuhankan benda. Ber-Tuhankan benda ini tidak berarti hanya cinta atau senang kepada benda, tetapi memang mempunyai makna yang sebenarnya bahwa benda dijadikan Tuhan.

Dengan uraian di muka tidaklah berarti bahwa Tjokroaminoto memandang kecil jasa guru-guru sosialis Barat seperti Karl Marx dan Freederich Engels tentang perbaikan nasibnya kaum miskin di negeri-negeri Barat. Maksud uraian di muka untuk menunjukkan paham Marxisme terhadap kepercayaan agama, terutama sekali kepada kepercayaan agama Islam dengan maksud agar kaum muslimin tidak tersesat karenanya. Tjokroaminoto menyatakan dengan tegas bahwa bagi orang Islam tidak ada sosialisme yang lebih mulia kecuali sosialisme yang berdasarkan Islam saja.

Sementara itu Tjokroaminoto berharap dan memberi petunjuk jalan bagi kaum muslimin sebagai berikut. "Biar-pun Desposisme dan Autocratisme dalam seribu tiga ratus tahun jang achir-achir selalu bekerdja menipis-nipiskan dan melenjapkan rasa sosialistich dari hati sanubarinja berdjuta-djuta orang Islam, sedang masa jang terachir ini ada pula satu dua matjam "isme" baru berusaha hendak memadjukan kerusakan-kerusakan ini tetapi kita wadjib bersjukur kepada Tuhan Jang Maha Kuasa. Qur'an jang sutji itu masih ada, masih kekal buat selama-lamanja. Dari karena Qur'an masih djuga mengadjukan satu rupa Kemerdekaan, Persamaan dan Persaudaraan, dan masih djuga menanam satu rupa tjita-tjita Demokratisme dan Socialisme" ¹⁰

Menurut Tjokroaminoto banyak orang-orang Islam yang telah menjual akhirlatnya untuk keperluan dunianya, yang sudah mati perasaan Islamnya karena seolah-olah menjadi perkakas yang tidak bernyawa lagi untuk keperluan kapitalisme, imperialisme, despotisme dan autokratisme yang lahirnya nampak melaksanakan ibadat, tetapi batinnya melekat kepada harta benda yang haram, memakan riba, dan menindas sesama manusia. Selanjutnya beliau mengamati bahwa umumnya umat Islam di seluruh bumi senantiasa bergerak menuntut kemajuan, mengangkat derajat diri, derajat bangsa dan agamanya, dan pergerakan itu bertambah lama tambah maju, keras dan kuat. Tampak tanda-tandanya rasa Pan-Islamisme di mana-mana negeri. Pergerakan Pan-Islamisme itu makin lama makin maju, makin kuat dan bagus susunan organisasinya. Hal ini dicontohkan adanya satu pergerakan "Ahmadiyah Andjumani Ishaati-Islam" dengan rajin dan amat beraninya melakukan propaganda Islam di segala bagian dunia, sehingga telah menarik pejabat tinggi masuk Islam.

Dengan melihat kenyataan itu Tjokroaminoto berpendapat dan yakin bahwa orang Islam di seluruh dunia akan memegang pimpinan dan memasukkan keyakinan agamanya, politik dan sosial di dalam hati sanubarinya lain-lain golongan. Keyakinan itu pernah dialami umat Islam yaitu pernah menjadi suatu bangsa yang kuat dan menundukkan kepala negeri Barat dan negeri Timur. Tjokroaminoto yakin bahwa akan tiba saatnya umat Islam akan menjadi "pesawat penolong" persesuaian antara Barat dengan negeri Timur, Islam bakal cakap mendamaikan Timur yang sangat tinggi rasa agamanya dengan Barat yang kasar rasanya. Kesopanan Timur yang sudah turun derajatnya, akan diangkat dijunjung lagi oleh Islam, dan Islam akan mengubah keadaan Barat yang kasar dan loba sifatnya. Maka diharapkan kaum Muslimin dapat melakukan kewajiban suci dan akan dapat membongkar tabiat yang sifatnya kekolotan, dan akan menelanjangi negeri Barat dari "kekuatan dan kekuasaannya, yang olehnya dipergunakan sebagai hak".

Tjokroaminoto juga mengatakan kalau orang Islam mengerti benar-benar dan dengan sungguh-sungguh hati menjalankan

perintah-perintah Islam, pasti Islam akan menjadi demokrat dan menjadi sosialis yang sebenar-benarnya. Kalau orang Islam mengerti benar-benar dan dengan sungguh-sungguh hati menjalankan perintah-perintah Islam maka selama-lamanya mereka tidak akan dapat dihindari oleh nafsu egoisme, individualisme, Despatisme, kapitalisme dan lain-lain nafsu "isme" yang jahat. Kalau orang Islam masih menjadi egois, individualisme, despost kapitalisme atau lain-lain "isme" yang jahat, maka hilanglah sebagian kecil atau besar keislamannya atau keislamannya gugur sama sekali

Dengan melihat tanda-tanda zaman Tjokroaminoto berharap agar umat Islam harus bersyukur karena melihat kenyataan bahwa makin lama tambah mendekati tercapainya cita-cita Islam tentang urusan ibadat, ekonomi, sosial dan politik. Akhirnya disadarkan bahwa selama masih ada setan, tentu masih ada gerakan yang ingin melenyapkan agama Islam.

Kebesaran baik dari awalnya dan kelak di kemudian hari penuh dengan harapan-harapan, tetapi diingatkan oleh HOS. Tjokroaminoto supaya umat Islam tidak lalai sesaat pun, kebesaran Islam itu akan dapat terwujud kembali dengan usaha Pan-Islamisme belaka.

Selanjutnya beliau mengatakan walaupun di dunia Barat telah maju dengan Sarekat Sekerja, kemajuan kelengkapan perangnya bertambah besar tetapi semuanya itu untuk membunuh manusia dengan cara model baru. Oleh karena itu umat Islam harus senantiasa menjauhkan diri dari nafsu kasar, yang ditunjukkan berulang-ulang oleh negeri Barat yang hanya berakibat menimbulkan kecelakaan dan kesengsaraan kepada perikemanusiaan. Sebaliknya umat Islam haruslah senantiasa membesar-besarkan batin, yang cakap dan melindungi umat daripada kecelakaan kesengsaraan. Umat Islam haruslah senantiasa membesarkan perlengkapan kekuatan budinya, buat melakukan wajibnya apabila Tuhan Yang Mahakuasa menghabiskan permainan "Catur Dunia". Untuk mencapai kemajuan seperti zaman kejayaan yang lampau, umat Islam harus telah bersiap lengkap benar-benar baik dalam urusan

kepandaian akal, budi pekerti, maupun tentang urusan kesehatan dan kekuatan badan, agar di dalam permainan "Catur Dunia" yang bakal datang mereka akan memperoleh kemenangan yang lebih sempurna dan kekal daripada kemenangannya sedia kala.

Dalam hal mencapai kemenangan ini menurut Tjokroaminoto dapat dilakukan dengan perdamaian dan juga dengan melalui perang, tetapi umat yang sangat berbakti kepada Tuhan itulah yang nyata terpendang hidupnya, lebih baik sekali mendapat kemenangan yang kekal, meskipun dengan langkah yang perlahan ketimbang kemenangan yang terburu-buru tetapi tidak seberapa lamanya dan yang diperoleh dengan laku yang zalim dan kasar. Tjokroaminoto membandingkan hal ini sebagai contoh kemenangan yang dicapai oleh Alexander de Groate, Napoleon Bonaparte yang hanya bersifat sementara dengan kemenangan yang dicapai Nabi Muhammad saw. dan oleh nabi-nabi lainnya. kemenangan yang hanya bersifat sementara ini bukannya anasir yang kekal dalam pimpinan hidupnya pri kemanusiaan. Kemenangan yang kekal tidak ada lain melainkan kemenangan yang diperoleh dalam perang batin (budi) itu saja. Dan dalam memperoleh kemenangan yang demikian itu Nabi Muhammad saw. tiadalah bandingan besarnya dalam segala zaman. Begitulah akhirnya Islam akan mengatur dan menguasai zaman adanya.

Peringatan dan petunjuk umat Islam selanjutnya adalah sebagai berikut. "Hendaklah kamu bergerak terus-menerus dengan ta'berhentinja, berseikat jang kuat-kuat dengan tali-ikatan lahir dan tali ikatan batin, teruslah bergerak walaupun djalannja penuh dengan randjau dan duri-duri. Meski kiranja kamu tjakap dan berkuasa melengkapkan diri dengan kekuatan lahir, dengan kekuasaan alat perkakas jang manapun djuga, tetapi djanganlah sekali-kali kamu lupa mempergunakan kebatinan dan agamamu menjadi dasar jang teguh, kuat bagi keadaan jang kamu perbarukan dengan menurut perintah-perintah Islam itu. Sebesar-besarnya nafsumu hendaklah kamu pergunakan dan kamu pimpin buat

mentjapai persatuan jang sempurna diantaramu dan buat memperkuat sikapmu daridalam. Djanganlah suka berselisih dengan golongan-golongan rakjat jang lainnja ketjuali apabila njata ada sangat perlunya untuk keselamatan dan mendjaga diri dan kehormatan¹⁷

Selanjutnya dikatakan bahwa untuk meluaskan Islam dan keislaman, maka dengan jalan dan ikhtiar yang selamat dan damai. Hal ini dapat dilakukan dengan menyerbu ke negeri Cina, Jepang, Afrika, Amerika dan lain-lainnya sebagaimana caranya orang Islam dalam zaman dahulu masuk menyerbu di dalam negeri Cina dengan mengambil jalan yang utama dengan menyuruh orang masuk agama Islam.

Qur'an yang suci memerintahkan kepada sekalian kaum Muslimin agar menjalankan propaganda Islam ke seluruh dunia. Itulah tandanya Allah Ta'ala sudah menyediakan kaum muslimin menjadi "umat penolong" buat mempersatukan Barat dan Timur, Selatan dan Utara, dan menimbulkan suatu keadaban baru yang sehat dan menjadi contoh, yaitu keadaban yang mengandung di dalamnya segala apa saja yang bermanfaat di Barat dan segala apa saja yang baik di Timur.

Ada dua perkara yang mesti ada pada orang Islam sebagai daya upaya yang tentu guna mencapai kebahagiaan dan keselamatan di dunia ini dan di akhirat. Dua perkara ini ialah. agama (Islam) dan kepandaian ilmu. Hanya dua perkara ini saja yang cakap dan berkuasa menghindarkan diri Umat Islam dari kerencahan derajad dan kesengsaraan. Apabila ada orang Islam yang berpendapat bahwa dengan menjalankan agama yang lahir itu saja sudah menimbulkan kemenangan Islam atau asal saja orang Islam dengan buta tuli berani mengorbankan jiwanya, sudah cukup mengangkat umat Islam dari derajadnya yang rendah, hanya dengan memberikan pelajaran akal saja, tetapi di dalamnya anak-anak tidak ditanamkan benih kemerdekaan dan benih demokrasi, yang menjadi tanda kebesaran dan tanda perbedaannya umat Islam besar pada zaman dahulu dan di dalam hatinya anak-anak tidak pula ditanamkan benihnya keberanian yang luhur, keikhlasan hati, kesetiaan

dan kecintaan kepada barang yang benar, yang telah menjadi tabiatnya pergaulan hidup Islam bersama pada zaman dulu. Murid-murid tidak juga diberinya pengajaran yang mendidik kebatinan yang halus, keutamaan budi dan kebaikan perangai. Dengan perhatian yang baik ternyata telah mendidik orang Arab menjadi bangsa yang halus adat kelebagaannya dan menjadi tukang menanam keadaban dan kesopanan, dan di dalam hatinya murid tidak ditanam bijinya penghidupan yang saleh dan sederhana, sebagai yang dahulu telah membawa mashurnya nama umat Islam. Sekolah-sekolah yang hanya memberi penun-tun kepada paham materialisme, maka bagi umat Islam lebih baik tidak ada saja.

Bagi umat Islam hendaklah ilmu pengetahuan dunia ber-sama-sama ilmu agama dan ilmu agama bersama-sama ilmu pengetahuan dunia. Kemajuan akal hendaklah beserta kemajuan batin, (budi pekerti), kemajuan ilmu duniawiyah hendaklah beserta kemajuan ilmu agama dan sebaliknya. Kemajuan yang baik adalah yang ada sepanjang jalannya Islam saja.

Untuk meneguhkan kepercayaan dan keyakinan, membesarkan kekuatan batin dan budi serta menyucikan hati tiap-tiap anggota, sekalian anggota dengan kemauan sendiri berjanji dengan sumpah, bahwa mereka itu:

- (a) akan maju kepada perbuatan yang suci
- (b) maju akan mencari kepandaian
- (c) maju kepada perbuatan yang benar
- (d) maju kepada perbuatan untuk menyempurnakan

Untuk memajukan penghidupan maka perserikatan bermak-sudh memajukan keperluan penduduk bumiputera, tentang perusahaan tanah, perdagangan, kerajinan dan pekerjaan per-buruhan, tentang kesehatan badan, pendidikan dan tentang pengajaran.

Adapun tentang urusan politik, soal lakunya pemerintahan negeri dan untuk mencapai kemerdekaan negeri tumpah darah dan kemerdekaan rakyat, maka pergerakan Partai Sarekat

Islam telah menerima baik dan menunjang serta wajib selalu melakukan segala ikhtiar dengan segala kekuatannya akan mencapai cita-cita, yang berdasarkan kepada azas-azas partai.

3.2.2.4 *Pemikiran HOS. Tjokroaminoto Tentang Pendidikan Muslim Nasional*

HOS. Tjokroaminoto sebagai pemimpin pergerakan Indonesia yang mempunyai perhatian dalam berbagai bidang antara lain bidang politik, ekonomi, agama, perbaikan nasib buruh, wawasan kebangsaan secara nasional, pendidikan dan lain sebagainya lagi. Dalam tahun 1924 di Surabaya didirikan *Centraal Comite Chilafat*, dengan beranggotakan berpuluh-puluh organisasi Islam. Oleh Partai Sarekat Islam (PSI) ditunjuk Wondosoedirdjo (W. Wondoamiseno) untuk mewakili partai tersebut duduk sebagai utusan dalam rapat mendirikan *Centraal Comite Chilafat* itu. Rapat memilih W. Wondosoedirdjo sebagai ketua CC. Chilafat.

Perkembangan Sarekat Islam di Indonesia mempunyai jalinan yang erat dengan pergerakan-pergerakan di luar negeri antara lain dengan gerakan Mustafa Kemal Pasja di Turki juga dengan pergerakan Islam di Mesir dan lain sebagainya. Oleh karena itu pada waktu diadakan muktamar (kongres) Dunia Islam di Kairo, guna membicarakan khalifah, maka diadakan undangan ke seluruh penjuru dunia Islam, termasuk *Centraal Comite Chilafat* di Indonesia menerima undangan tersebut. Untuk menanggapi undangan Muktamar Dunia Islam itu, maka pada 24 sampai 26 Desember 1924 diselenggarakan Kongres Islam di Surabaya. Yang menjadi pokok bahasan dalam kongres Islam itu, ialah membicarakan soal undangan itu dan kemungkinan diadakan utusan-utusan umat Islam Indonesia ke kongres Islam sedunia. Calon-calon yang disebut-sebut di dalam kongres itu untuk berangkat ke Kairo ialah. Tjokroaminoto, Ajeeh Ahmad Soerkati, H. Fachroeddin, Soerjopranoto dan H. Abdul Wahab. Di dalam Kongres Islam

di Surabaya itu di samping Partai Sarekat Islam, maka Muhammadiyah pun merupakan tenaga yang kuat dan giat. Saat itu Muhammadiyah di bawah pimpinan H. Achmad Dahlan dan H. Fachruddin (yang juga duduk di dalam pimpinan Sarekat Islam), mengadakan kerjasama yang baik sekali.

Pada 21 sampai 27 Agustus 1925 Partai Sarekat Islam mengadakan kongresnya di Yogyakarta bersama-sama dengan Al-Islam Kongres keempat. Tokoh-tokoh Partai Sarekat Islam Indonesia pada waktu itu antara lain A.M. Sangadji, Soerjopranoto, HOS. Tjokroaminoto, HA. Salim, Said Moehammad bin Abdoel Rachman Al Jaman, H. Anwarroeddin, Wondosoedirdjo (W. Wondoamiseno).

Dalam kongres di Yogyakarta itu dibicarakan pendidikan (*onderwijs*) di dalam Islam dan diusahakan berdirinya *Centrale Moeslimsche Leiderbond* (pusat pertalian pemimpin-pemimpin Islam). Tjokroaminoto menerangkan di dalam kongres itu bahwa Agama Islam adalah suatu anasir kebudayaan. Anasir inilah yang akan memerdekakan rakyat Indonesia dari penindasan dan penghisapan yang diderita oleh rakyat Indonesia. Supaya dapat mencapai tujuan itu, kata Tjokroaminoto, PSI akan memperbanyak sekolah-sekolah. Tjokroaminoto mengemukakan juga bahwa dewasa ini perlunya suatu gerakan tandzim untuk penyusunan kehidupan rakyat dalam ekonomi, sosial dan kebudayaan menurut dasar-dasar Islam. Tjokroaminoto membicarakan soal *onderwijs* (pendidikan) panjang-lebar sebagaimana tertera dalam tulisan beliau dengan judul, "Moeslimin National Onderwijs" yang berisi cita-cita Tjokroaminoto sebagai berikut.

"Di mana azas-azas Islam itu adlah asas-asas jang menudju democratie dan socialisme (socialisme sedjati jang berdasar Islam), dan asas-asas itu juga maksud akan mentjapai tjita-tjita kemerdekaan ummat dan kemerdekaan negeri tumpah darah, maka kalau kita kaum muslimin mendirikan sekolah-sekolah kita sendiri, ta'boleh tidak pengadjaran jang diberikan di dalamnja haruslah pengadjaran muslim jang sedjati dan bersifat national dalam arti kata: menuju maksud akan mentjapai tjita-tjita kemerdekaan umat"¹⁸

Selanjutnya beliau mengatakan bahwa pengajaran yang diberikan di sekolah-sekolah, selain mengajarkan kepandian akal, harus juga:

- (1) Menanam benih kemerdekaan dan benih demokrasi, yang telah menjadi tanda kebesaran dan tanda perbedaan umat Islam besar pada zaman dulu.
- (2) Menanam benih keberanian yang jujur, benih keikhlasan hati, kesetiaan dan kecintaan kepada yang benar (haq), yang telah menjadi tabiat tiap-tiap orang dan tabiat masyarakat Islam pada zaman dulu.
- (3) Menanam benih prikebatinan yang halus, benih keutamaan budi dan kebaikan perangai, yang dulu telah menyebabkan orang Arab penduduk laut pasir itu menjadi bangsa tuan yang halus adat lembaganya dan menjadi penanam dan penyebar keadaban dan kesopanan.
- (4) Menanam benih kehidupan yang saleh dan sederhana, sebagai yang dulu telah menjadikan sebab mashur nama umat Islam.

Menurut Tjokroaminoto, benih-benih seperti yang tersebut di atas ini tidak bisa terdapat dengan lain daya upaya, melainkan dengan mengajarkan agama Islam yang sebenar-benarnya.

Tiap-tiap umat menurut Tjokroaminoto mempunyai cita-cita, adat dan riwayatna sendiri-sendiri, anak-anak kita terutama sekali haruslah terdidik akan menjadi muslim sejati. Peristiwa sekali mengingat kecelakaan-kecelakaan dan kesalahan-kesalahan yang telah timbul dan melengket pada dunia muslim kita, maka dalam pengajaran dan pendidikan kita tidak boleh dipisahkan perkara kebendaan (material) dan kebatinan (spiritual). Meskipun ada ahli agama dan duniawi, tidak boleh diberikan pendidikan perbedaan antara ulama dan golongan orang tidak alim. Tidak boleh ditinggalkan azas dan rukun-rukun Islam. Tjokroaminoto mengatakan juga bahwa tidak benar apabila

masih adanya kaum muslimin yang tidak mengerti seluk-beluk ilmu diniawi, teristimewa sekali urusan negeri dan kerajaan. Apabila demikian itu, maka bertambah lama tambah luas dan tajam perpisahan antara orang banyak yang tidak mengerti dan golongan ulama yang terlalu kecil sebagaimana terdapat pada umat lain di muka bumi. Tjokroaminoto menghendaki Islam sebagai yang diajarkan dan diamalkan pada zaman permulaannya, Islam tidak dengan tambahan baru, tetapi Islam dalam kesuciannya yang semula. Pengajaran kita menurut Tjokroaminoto tidak boleh menerima pencampuran dan menaruh dari luar yang tidak muslim. Pengajaran yang diinginkan adalah pengajaran yang tidak bekerja sama. Di samping apa yang diharapkan di muka maka yang dicita-citakan beliau agar maksud dan tujuan pengajaran kita mendapatkan pemuda muslimin dan pemuda putri Muslimat yang beradab. Beliau setuju dengan zaman baru (modern), tetapi tetap tinggal muslimin dan muslimat sejati, mengandung ruh Islam yang sungguh-sungguh, yang cukup pengetahuan tentang agamanya, sehingga masing-masing cakaplah bekerja sebagai mubaligh Islam, di dalam dan di luar kalangan sendiri. Jangan sampai ditinggalkan terus sebagaimana yang diamati oleh Tjokroaminoto pada zaman itu. Segala perkara keagamaan cuma diserahkan dan dipercayakan saja kepada ulama-ulama yang terlalu kecil sekali golongannya itu. Ini tidak baik dan merugikan kepada umat dan juga kepada Islam. Anak muslim disuruh oleh orang tuanya sendiri menuntut pengajaran di sekolah-sekolah, dalam mana juga diberi pengajaran dan pendidikan lain agama.

Berdasarkan pemikiran di muka maka berbagai langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan dimaksud yaitu, mula-mula sekali hendaklah didirikan suatu pusat yang udaranya penuh dengan ruh Islam sejati, sehingga anak-anak dan pemuda-pemuda yang ada di dalamnya tidak hanya diajar dan dididik menjadi orang yang terpelajar dan beradab, tetapi terlebih lagi menjadi muslim sejati yang terpelajar dan beradab.

Sekolah kita hendaklah menjadi perhubungan atau tempat percampuran agama kita dan ilmu pengetahuan modern

wetenschap, sebagai yang dikèhendaki oleh junjungan kita Nabi Muhammad saw. Ilmu pengetahuan hendaklah di tangan kanan kita dan ilmu falsafah di tangan kiri kita, dan kepala kita akan menjadi mahkota. Makin lama kita harus bertambah maju, tetapi juga bertambah-tambah menjadi Muslim sejati. Dasar yang dijalankan *leerplan* kita ialah memberi pengajaran untuk mengerti Qur'an secukupnya.

Langkah pertama Lager onderwijs adalah sebagai berikut: Lamanya pengajaran pada langkah ini 5, 6, dan 7 tahun hendaklah ditetapkan oleh suatu komisi yang ahli.

Selain pengajaran modern (duniawi) yang harus diberikan pada langkah pertama tentang keagamaan haruslah pertama sekali diberi pengajaran tentang *Qur'an* bukan saja dalam lafazh Arab tetapi juga maknanya dalam bahasa Indonesia (Melayu) ataupun bahasa umat tiap-tiap tempat atau negeri sendiri-sendiri.

Pengajaran bahasa Arab haruslah diberikan dengan cara yang lebih langsung dan lebih setuju dengan tabiat anak-anak murid, sekedar perlunya supaya lebih mudah dan lebih cepat akan mendapat pengertian yang pertama-tama tentang *Qur'an*. Apabila seorang anak sudah mengenal huruf Arab dan huruf Latin atau huruf bangsanya, haruslah diajarkan beberapa surat pendek-pendek yang terakhir dari *Qur'an*, bukan saja dalam bahasa Arab, tetapi juga maknanya dalam bahasa si anak. Dengan cara yang demikian hendaklah diajarkan juga doa-doa dan segala ucapan lain-lainnya dalam sembahyang, sehingga si anak yang masih muda umurnya sudah akan mengerti apa-apa yang diucapkannya dalam sembahyang itu.

Pengajaran pada langkah pertama-tama hendaklah diakhiri dengan umur anak 12 atau 13 tahun, dan diakhiri juga langkah pengajaran pertama-tama tentang *Qur'an* dalam bahasa Arab bersama dengan bahasa si anak itu.

Selama 13 tahun yang penghabisan dari langkah pertama-tama hendaklah pengajaran bahasa Arab dibuat sama lamanya seperti pengajaran bahasa Belanda. Boleh jadi sekali si anak tidak bernafsu belajar bahasa pada umur yang demikian itu, tetapi pengajaran kita harus bersifat mendidik perhatian dan kegembiraan.

Langkah kedua (*Middelbaar Onderwijs*) adalah sebagai berikut. Lamanya pengajaran pada langkah ini 4 atau 5 tahun, hendaklah ditetapkan oleh komisi yang ahli.

Selain pengajaran modern (duniawi) yang harus diberikan pada langkah kedua, hendaklah diberikan pengajaran lebih jauh dan dalam, tentang *Qur'an* beserta beberapa *Hadist* yang terpilih, sedapat-dapatnya dengan bahasa Arab saja.

Setelah si murid pada langkah pertama-tama sudah juga mendapat pengajaran praktis dalam upacara ibadat dan lagi pengajaran dengan les-les tentang iman dan rukun Islam berupa buku-buku dalam bahasa anak negeri, yang berisi pula pengajaran tentang Tarikh Islam, Tarikh Bangsa dan negeri sendiri dan sebagainya, maka pada langkah kedua (*Middelbaar Onderwijs*) bahasa Arab haruslah diajarkan sebagai bahasa yang hidup, artinya si murid dapat menulis (membuat karangan) dan berbicara dengan tinggi derajatnya sama dengan pengajaran bahasa Belanda, umpamanya mulai dari kelas yang tertinggi HIS atau *voorklas Mulo*.

Lain daripada itu dimulailah pengajaran ilmu-nahwi dan carfi dengan cara yang sebaik-baiknya, dengan mengingat bahwa terutama sekali yang dikehendaki ialah mendapat pengertian yang seharusnya tentang *Qur'an* dan bukannya bahasa Arab pada umumnya. Tetapi sungguhpun begitu, haruslah juga diajarkan beberapa ratus ayat *Qur'an*, yang terpilih, dengan maksud supaya si murid mendapat pengertian ilmu Sjiir Arab.

Lagi pula haruslah diajarkan aqid, fiqh, tentang ibadat, akhlak, perjalanan Nabi Muhammad saw. dan keempat Chulafa ur Rosjidin r.a. dan lain sebagainya, dengan cara yang mudah bagi si murid. Janganlah dengan cara membunuh akan pengertiannya, yaitu bahasa daerahnya melainkan dengan cara yang menyenangkan. Hal itu harus dilakukan demikian supaya apa yang diajarkan menimbulkan perasaan bagi si murid akan kepentingan dan keperluannya mempelajari semuanya itu. Kejadian-kejadian penting tentang perjalanan Nabi Muhammad saw. dan Chulafa ur Rasjidin r.a. serta tarikh Islam untuk menanam

pengertian kepada si murid bahwa Islam itu benar, kegunaan Islam dalam kehidupan sehari-hari, dan karena menjalankan dengan sungguh-sungguh menyebabkan tercapainya bagian besar bagi kaum muslim pada zaman dulu. Menurut HOS. Tjokroaminoto, apabila menghendaki kembalinya kemuliaan muslim yang telah lenyap itu, maka kehendak itu hanyalah akan tercapai karena berperang kuat-kuat kepada keyakinan-keyakinan Islam dan mengikuti contoh Rasulullah saw. dan Chulafa ur Rasjidin r.a.

Pada langkah kedua dan juga langkah penghabisan atau langkah *universiteit (Hooger Onderwijs)* maka aqaid, fiqh dan sirat harus diajarkan sebagai pengajaran yang teristimewa (Special vak) dalam bahasa Arab dengan cara yang semudah-mudahnya, tetapi mencukupi keperluannya.

Langkah *universiteit (Hooger Onderwijs)* adalah sebagai berikut. Pada langkah ini hendaklah diadakan satu sekolah untuk pengajaran dalam ilmu-ilmu Islam. Dengan demikian pemuda-pemuda muslim yang mendapat pendidikan Barat harus meneruskan pengajaran tafsir, *Hadist* dan *Fiqh* dengan segala sesuatu yang perlu berhubungan dengan masing-masing halnya itu. Diberikan pengajaran aqaid, kalam dan sirat serta tarikh Islam, sehingga pada penghabisan langkah ini, kurang-lebih pada umur 20 dan 21 tahun, pemuda-pemuda muslim tadi perlu diberi gelar guru agama atau kiai. Mereka untuk diakui mempunyai sebanyak keadaban dan kecerdasan akal dalam arti kata modern sebagaimana yang ada pada tiap tingkatan Universitei Barat.

Demikianlah cita-cita HOS. Tjokroaminoto yang akan menggabungkan pengajaran-pengajaran agama dengan pengajaran duniawi mulai dari pengajaran rendah (*Lager Onderwijs*) sampai pada pengajaran tinggi (*Hoooger Onderwijs*). Penggabungan ini diharapkan berguna bagi kedua-duanya.

3.2.2.5 Tjokroaminoto dan PPPKI.

Dalam upaya turut berperan serta menyumbangkan buah pikirannya maka Tjokroaminoto selalu aktif dalam kegiatan Partai Sarekat Islam maupun dalam kegiatan dunia Islam. Untuk itu pada bulan Agustus 1926 beliau ikut mengambil bagian penting dalam pendirian *Algemene Studie Club* dan *Indonesische Studie Club*. Pada tahun itu di Bandung berdiri Komite Persatuan Indonesia atas usaha *Algemene Studie Club* yang dipimpin oleh Ir. Soekarno, dan di Surabaya didirikan pula organisasi sejenis *Indonesische Studie Club* oleh Dokter Soetomo. Maksud kedua komite yang didirikan oleh kaum pergerakan itu ialah untuk mencari kerjasama yang sebaik-baiknya di antara pergerakan rakyat. Sebagai hasil dari kedua komite itu di mana orang-orang yang terkemuka dari *Algemene Studie Club* dan *Indonesische Studie Club* bersama-sama dengan pemuka-pemuka dari Partai Sarekat Islam, Muhammadiyah J. IB. (*Jong Islamieten Bond*), Pasundan, Persatuan Minahasa, Sarekat Ambon dan Sarekat Madura menumpahkan perhatian, tenaga serta pikiran mereka. Pada bulan September 1926 dibentuklah satu komite untuk mendirikan suatu federasi, dengan mengadakan pula cabang-cabangnya di Jakarta (Mr. Iskaq), Yogyakarta (Mr. Soejoedi) dan Bandung (Mr. Sartono).

Persoalan perkawinan dan mengurus semua mesjid yang dibicarakan dalam Al-Islam Kongres ke-27 di Bogor melibatkan juga peranan Partai Sarekat Islam di bawah kepemimpinan Tjokroaminoto. Sebagai wakil Partai Sarekat Islam ditunjuklah W. Wondoamiseno. Untuk itu Partai Sarekat Islam semakin memperhebat aksi. Selain dari Islam dan sosialisme maka nasionalisme Indonesia dipakai juga sebagai dasar aksi tersebut.

Pada awal tahun 1927 Muktamar Alam Islamy Far'ul Hadist Sjarqyah (MAIHS) mengirimkan pula utusannya ke Mekkah untuk menghadiri Muktamar Alam Islamy. Utusan itu adalah

Sekretaris Umum Haji Agus Salim. Namun demikian Haji Agus Salim kembali disertai hati kecewa karena muktamar itu ditunda karena kurangnya perhatian. Sekalipun demikian perjalanan HA. Salim tidaklah sia-sia, karena beliau telah mempergunakan kunjungannya itu untuk kepentingan-kepentingan umat Islam Indonesia, terutama dengan menemui Ibnu Sa'ud sendiri.

Pergerakan rakyat Indonesia dari waktu ke waktu semakin dewasa dan memperhebat perjuangannya. Hal ini ditandai dengan lahirnya Perserikatan Nasional Indonesia (PNI) di Bandung pada 4 Juli 1927 yang didirikan oleh orang-orang dari *Algemene Studie Club* yang dipimpin oleh Ir. Soekarno. Beliau waktu itu dengan tegas menyerukan kerjasama yang erat di antara pergerakan rakyat.

PNI yang dikendalikan oleh Ir. Soekarno, Mr. Sartono, Mr. Soejoedi, Mr. Iskaq, Dr. Samsi, Mr. Noedihardjo, Mr. Ali Sastroamidjojo dan lain-lain melanjutkan usaha komite yang telah dibentuk pada bulan September 1926. Ir. Soekarno yang dikenal murid HOS. Tjokroaminoto mengusulkan adanya suatu barisan persatuan nasional, suatu barisan yang kokoh dari semua pergerakan rakyat Indonesia. Usul Bung Karno disambut baik oleh HOS. Tjokroaminoto dan HA. Salim, sehingga kongres Partai Sarekat Islam di Pekalongan pada 28 September -- 2 Oktober 1928 menyetujui adanya federasi dari Ir. Soekarno dari PNI dan Dr. Soekiman dari PSI. Hasil perencanaan yang dibuat Ir. Soekarno dan Dr. Soekiman segera dikirimkan kepada semua pucuk pimpinan partai-partai hingga pada 17 Desember 1927 di Bandung lahirlah Permuafakatan Perhimpunan-perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) yang akan bergerak untuk :

- (a) menyatukan arah aksi kebangsaan, memperkuatnya dengan memperbaiki organisasi, dengan kerja bersama di antara anggotanya dan dalam pada itu,
- (b) menghindarkan perselisihan semua anggotanya yang hanya bisa melemahkan aksi kebangsaan saja.

Suatu kesepakatan yang diambil dari PPPKI itu bahwa keputusan yang disetujui secara bulat mengikat semua organisasi

yang tergabung dalam organisasi itu, sedang suatu-usulan yang tidak mendapat persetujuan keseluruhan organisasi yang tergabung di dalam PPPKI dapat dilaksanakan pula pada organisasi yang mendukungnya.

Dengan keterlibatan Partai Sarekat Islam dalam PPPKI berarti pula bahwa Tjokroaminoto sebagai pimpinan Partai Sarekat Islam telah banyak menyumbangkan buah pikirannya demi kuatnya persatuan dan kesatuan perjuangan bangsa Indonesia menghadapi pemerintah kolonial Belanda yang selalu meneter gerak langkah organisasi dan partai-partai dari bangsa Indonesia.

Di samping pemusatan perhatian dan pemikiran secara bersama-sama dalam PPPKI maka Partai Sarekat Islam di bawah kepemimpinan Tjokroaminoto tidak mandeg dalam usahanya menghadapi hambatan dan tantangan dalam memperjuangkan Islam baik melalui forum organisasi di dalam negeri juga dalam dunia Islam. Oleh karena itu sepulang HA. Salim dari Mekkah PSI membangun suatu Majelis Ulama.

Pada bulan November 1927 HOS. Tjokroaminoto bersama-sama dengan sahabatnya HA. Salim membangun NV. Drukkerij "Fajar Asia" yang menerbitkan harian *Fajar Asia* yang cukup terkenal di dalam riwayat pers dan jurnalistik. Sebagaimana kita ketahui bahwa HOS. Tjokroaminoto juga seorang wartawan terkenal. Semula dari memimpin harian *Fajar Asia*, dan sebelum itu beliau telah lebih dahulu menjadi direktur, *hoofd* redaktur harian "*Utusan Hindia*," sebagai sentral Sarekat Islam yang terbit dari tahun 1912 -1923 di Surabaya. Tjokroaminoto pada zaman ini diakui oleh kebanyakan orang beliau bukan hanya sebagai pemimpin Islam yang terkenal, tetapi juga merupakan bintang di lapangan jurnalistik bangsa kita.

Udara pergerakan rakyat semakin ramai dengan lahirnya PNI (4 Juli 1927) yang menunjukkan sikap *non-cooperatie* seperti juga halnya PSI dengan sikap tegas beliau tidak boleh ditawar-tawar oleh siapa pun, sikap konsekuen atas putusan partainya (Putusan Kongres di Madiun 7 --20 Februari 1923) yaitu menolak tawaran pemerintah untuk duduk di *Volksraad*.

Ketika pada tahun 1927 terbuka lowongan di *Volksraad*, Mr. AGD. de Groeff berharap agar Tjokroaminoto suka kembali menjadi anggota *Volksraad*, tetapi harapan itu ditolakny.

Bertepatan genap usia Partai Sarekat Islam 15 tahun yaitu pada 26 Januari 1928 gerakannya makin hambat dengan diadakan kongres pada 26--28 Januari 1928 di Yogyakarta. Dalam kongres itu dibentuklah Majelis Ulama atas usul HA. Salim dalam kongres yang lampau di Pekalongan. Di samping itu juga dibicarakan tentang tafsir *Al Qur'an* yang sedang dikerjakan oleh Tjokroaminoto.

Dalam kongres PPPKI yang pertama di Surabaya, 30 Agustus -- 2 September 1928 dr. Sutomo mengakui secara tegas peran pemimpin pergerakan Indonesia yang telah mengilhami usaha antara lain disebut-sebut Ki Hadjar Dewantara dan juga HOS. Tjokroaminoto.

Kongres PPPKI yang pertama itu telah mengambil suatu mosi "dari rakyat kepada rakyat", untuk memperkokoh barisan persatuan pergerakan rakyat Indonesia. Di dalam mosi itu diputuskan:

- (1) Dalam mengadakan propaganda untuk organisasi masing-masing anggota PPPKI tidak boleh menjalankan azas-azas atau tujuan anggota lainnya dan tidak boleh menggunakan kata-kata yang sekiranya merugikan anggota lain.
- (2) Segala perselisihan di antara sesama anggota PPPKI haruslah diselesaikan dengan cara perundingan.

Pada 23 September 1928 PPPKI bagian Jakarta mengadakan rapat umum yang mendapat kunjungan beribu-ribu orang di mana HOS. Tjokroaminoto (PSI) dan Mr. Soenario (PHI) mengupas secara luas soal *erfpacht* di Indonesia, suatu soal yang sangat berhubungan dengan kepentingan ekonomi rakyat.

3.2.2.6 *Pemikiran Tjokroaminoto Tentang Erfpacht di Indonesia.*

HOS. Tjokroaminoto memandang bahwa soal *erfpacht* merupakan suatu soal yang sangat penting untuk keperluan nasional dan keperluan ekonomi, karena itu hal ini mendapat pembahasan secara khusus dalam pidatonya di depan rakyat umum PPPKI di Jakarta pada 23 September 1928.

Suatu persoalan yang penting dalam kehidupan bangsa Indonesia adalah persoalan tanah. Tanah merupakan persoalan mati-hidup bangsa kita karena sebagian terbesar penduduk bekerja di bidang pertanian terutama sekali yang bekerja di sawah dan ladang, karena itu negara kita disebut negara agraris; artinya sebagian terbesar penduduknya tergantung hidupnya pada tanah pertanian. Dengan demikian kedudukan tanah sangatlah pentingnya bagi kelangsungan bangsa di negeri kita. Mengingat kedudukan tanah yang penting itu, maka selama penjajahan Belanda melalui pemerintah kolonialnya di Indonesia telah melakukan berbagai peraturan yang menyangkut kebijaksanaan di bidang pertanian itu. Salah satu kebijaksanaan yang sangat merugikan bangsa kita selama penjajahan ialah yang disebut tanah *erfpacht*. Kebijakan ini lahir setelah habisnya peraturan *Cultuurstelsel*. Kebijakan ini memberikan kemungkinan bagi orang-orang asing terutama bangsa Belanda untuk menyewa tanah selama batas waktu 72 tahun dengan penuh atas tanah itu selama masa persewaannya dan batas waktu ini dapat diperpanjang, atau seumur hidup manusia. Dengan adanya peraturan serupa itu, maka setelah matinya "perkebunan paksaan" untuk keperluan negeri itu dengan pengaruh dan desakan kapital-kapital besar, lahirlah pertanian besar merdeka bagi kapital besar kepunyaan orang-orang Barat.

Bentuk persewaan seperti ini ditentang oleh Tjokroaminoto selama perjuangannya. Untuk hal ini Tjokroaminoto telah melakukan oposisi terhadap kebijaksanaan pemerintah kolonial itu secara terbuka di muka rapat umum. Pada kesempatan berpidato di hadapan ribuan rakyat itu Tjokroaminoto sebagai

salah seorang pembicara mengemukakan sikap dan pendapatnya dalam persoalan yang menyangkut tanah *erfpacht*. Kesempatan itu dipergunakannya untuk menguraikan secara panjang lebar mengenai persoalan penting itu. Rakyat yang hadir memadati tempat rapat umum diberi penjelasan secara gamblang tentang riwayat lahirnya tanah *erfpacht*. Kesempatan itu dipergunakannya untuk menguraikan secara panjang lebar mengenai persoalan penting itu. Rakyat yang hadir memadati tempat rapat umum diberi penjelasan secara gamblang tentang lahirnya tanah *erfpacht* itu, dan kerugian-kerugian bangsa kita dengan adanya tanah *erfpacht*. Secara jelas Tjokroaminoto membentangkan pendapat dan sikapnya atas persoalan ini.

Dalam pidatonya Tjokroaminoto mengatakan bahwa orang mendapat *Erfpacht* dalam beberapa hal telah memperoleh hak yang berlebihan. Biasanya *erfpacht* itu dapat diberikan yang luasnya kurang-lebih 500 *bouw* tetapi dapat juga pada tanah-tanah yang luasnya sampai ribuan *bouw* dan inilah yang sering kejadian. Karena maksudnya akan menarik kapital asing, maka diadakan ketentuan bahwa selama 10 tahun yang pertama-tama *erfpacht* akan dibebaskan dari pajak *per-vonding*, dan juga selama 5 tahun yang pertama-tama dibebaskan dari pembayaran biaya *canon* sebesar f 1, sampai f 5 setiap tahun untuk satu *bouw*, dengan pengecualian ada juga yang lebih rendah dan lebih tinggi.

Apabila tanah telah diberikan dengan *erfpacht*, maka hilanglah hak orang-orang bumiputera itu, walaupun boleh juga diberikan pergantian kerugian lebih dulu kepada mereka itu. Kalau biaya *canon* tidak dibayar boleh dilakukan penuntutan pembayaran di muka hakim, dan hak *erfpacht*nya boleh dicabut, tetapi sepanjang kesempatan-kesempatan yang serupa ini tidak pernah dipergunakan meskipun biaya tunggakan *canon* yang belum dibayar masih saja sejumlah 2.000.000 sampai 3.000.000 rupiah.

Perlu dicatat dalam hal pemberian hak tanah itu tidak sekali-sekali boleh merusakkan hak-haknya orang-orang penduduk Bumiputera.

Alasan pemberian *erfpacht* adalah sebagai berikut. Kekuasaan mengaku mempunyai hak akan memberikan tanah *erfpacht* ialah dengan menyandarkan hak yang sedemikian itu ialah hak kepunyaan raja yang disebut *domein recht*. Kekuasaan Belanda merasa berada di atasnya yang kian waktu rakyat menyangkalnya. Ada suatu pendapat bahwa raja-raja Indonesia menganggap tanah itu menjadi kepunyaannya, dan desa-desa itu hanya mempunyai hak-hak yang tertentu akan memakai tanah-tanah itu saja, dan untuk hak itu mereka harus membayar uang bakti atau uang sewa *pacht*.

Apabila tanah telah diberikan dengan *erfpacht*, maka hilanglah hak orang-orang itu, baru kalau biaya *canon*nya tidak dibayar, boleh diadakan penuntutan dan *erfpacht*nya dapat dicabut. Adapun pengakuan raja berhak mempunyai segala tanah dan boleh berlaku dengan semau-maunya sendiri atas tanah itu, tidak dibenarkan oleh hukum adat rakyat, dan oleh Islam tidak dapat dibenarkan karena yang mempunyai hak *eigendom* atas segenap bumi dan langit hanyalah Allah swt. Menurut Islam manusia hanya berhak memakai, mengatur dan memelihara serta mengambil hasilnya belaka walaupun hak yang demikian itu turun-temurun dan tak dapat dirampas oleh lain orang.

Tanah yang boleh diberikan *erfpacht* adalah sebagai berikut. *Erfpacht* itu sebenarnya hanya boleh diberikan atas tanah *domein*, yaitu tanah-tanah kasar atau hutan, tanah-tanah yang tidak ada orang melakukan hak-hak di atasnya.

Adapun yang tidak boleh diberikan dengan *erfpacht* yaitu:

- (1) tanah-tanah yang lain orang ada mempunyai hak-hak di atasnya yang mereka tidak suka melepaskannya
- (2) tanah-tanah yang dianggap suci
- (3) tanah-tanah yang di atasnya ada pasar-pasar atau rumah-rumah untuk pekerjaan umum
- (4) hutan-hutan jati dan hutan-hutan kayu tahun yang sudah diurus oleh pemerintah

- (5) tanah-tanah yang kekuasaan tidak suka memberikan karena ada keperluan umum, keperluan negeri atau untuk keperluan orang-orang penduduk negeri.

Dengan mengingat keperluan orang-orang penduduk sebagai yang disebut itulah maka dianggapnya sangat perlu mengadakan persediaan-persediaan tanah penduduk untuk dipakainya di kemudian hari. Namun apa yang terjadi di daerah Palembang, Lampung dan di tempat lain tidaklah diindahkan maksud yang tersebut di atas itu.

Kenyataan dalam kehidupan rakyat yang berkaitan dengan masalah tanah antara rakyat dengan pemerintah kolonial ada pertentangan keperluan. Pemerintah kolonial ingin mendapat kekuatan untuk berbuat secara leluasa atas tanah dan kekayaan-kekayaan yang ada di muka dan di dalam buminya. Hal demikian itu merupakan tekanan dan menghambat kemajuan rakyat bumiputera. Di satu pihak kaum imperialis dan kapitalis ingin mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya, sedang tanah-tanah tersebut semakin berkurangnya kesempatan yang dapat diusahakan oleh rakyat bumiputera.

Sebagaimana telah disebut di muka bahwa tanah merupakan keperluan rakyat yang terpenting. Tjokroaminoto mengatakan bahwa waktu memberikan *erfpacht* hampir tidak dipikirkan mengadakan aturan yang tetap untuk persediaan tanah untuk rakyat bumiputera. Sebaliknya bagi orang asing telah tersedia tanah-tanah hutan yang cukup luas. Pada hal pertambahan penduduk bumiputera semakin bertambah-tambah jumlahnya. Oleh karena itu merupakan suatu kewajiban terbesar bagi pergerakan nasional Indonesia untuk berusaha supaya kelak dalam tahun 1949 tanah-tanah yang luas itu tidak lagi di~~erfpacht~~kan kepada kapital asing, tetapi diberikan kepada rakyat saja. Saat ini menurut Tjokroaminoto tidaklah sepatutnya diberikan hak *erfpacht* lagi kepada kapital asing. Hal ini perlu mendapat perhatian karena menurut pengamatan beliau tanah itu dapat dimanfaatkan rakyat untuk ditanami padi dan palawija, juga menanam tanaman yang hasilnya dapat dijual di luar negeri. Asal penduduk diberi pengertian dan pelajaran

yang seharusnya, maka perusahaan dapat memberikan kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan dalam pergaulan hidupnya. Oleh karena itu dengan mereka mendapat tanah-tanah *erfpacht* yang akan habis temponya itu berarti lebih dari suatu permasalahan makan, tetapi berarti dapat mengangkat derajat kaum tani dan mereka dapat mengatur kehidupan ekonominya.

Tjokroaminoto memperingatkan, sebenarnya *erfpacht* tidak terlepas dari masalah politik. Walaupun para penerima *erfpacht* merencanakan sehabis ketentuan waktu mereka akan memikirkan rakyat demi kemanusiaan, tetapi hal ini hanyalah maksud terselubung dari *erfpacht* itu. Oleh karena itu Tjokroaminoto mengingatkan kepada kaum pergerakan agar berhati-hati karena rencana mereka itu bercorak politik yang sangat penting artinya. Mereka bermaksud agar habisnya tempo *erfpacht* itu hanya terlaksana di negeri Belanda bukan di Indonesia.

Dengan ketajaman pemikiran Tjokroaminoto menyoroti hal-hal yang berkaitan dengan *erfpacht* itu seolah-olah rakyat telah kehilangan keperluan ekonominya. Hal ini hanyalah permainan belaka sebagai usaha spekulasi. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa apa yang direncanakan para penerima *erfpacht* itu hanya suatu politik tersembunyi yang berusaha menentang kemauan ekonomi rakyat Indonesia. Rakyat tidak berkesempatan mengolah tanah karena sebagian besar tanah telah di*erfpacht*-kan. Ini berarti kerugian bagi rakyat Indonesia dan merupakan suatu pelanggaran terhadap hak-hak mereka. Untuk itu dikatakan beliau bahwa kaum pergerakan terus berjuang agar keperluan rakyat Indonesia diletakkan di muka, karena betapa besar artinya urusan tanah itu untuk keperluan nasional suatu bangsa.

Dalam usaha menanggapi pidato Tjokroaminoto tentang *erfpacht* itu pada hari Minggu 23 September 1928 bertempat di gedung Sialto Bioskop Jakarta (*Weltevreden*) diadakan rapat gabungan berbagai perhimpunan yang tergabung dalam perserikatan PPPKI. Hadir dalam rapat terbuka yang dihadiri

kurang lebih 3.000 pengunjung itu ialah. Budi Utomo, Pasundan, Partai Nasional Indonesia (PNI), Pemuda Kaum Betawi, *Jong Sumatera Bond*. Sarekat Islam Hindia Timur dan sebagainya juga dari perhimpunan Arab dan Tionghoa.

Rapat terbuka itu sementara mengambil mosi yang dinyatakan sebagai berikut.

- (1) PPPKI diharapkan memikirkan sungguh-sungguh *erfpacht* yang persil-persilnya akan habis tahun 1949, tidak boleh ada perpanjangan lagi, dan tidak boleh memberikan *erfpacht* kepada kapital asing.
- (2) PPPKI diharapkan bila ada jalan agar menyelidiki lebih jauh kerugian, kerusakan dan pelanggaran terhadap hak-hak rakyat khususnya di dalam residensi Palembang, Lampung dan Menado.
- (3) Mengajak segenap bangsa Indonesia mengadakan penyesalan dalam hati terhadap nasib rakyat di Palembang, Lampung dan Menado yang telah dirusakkan haknya akibat pemberian *erfpacht* yang semata-mata hanya menambah kekuatan kapitalisme belaka.
- (4) Mosi yang telah diputuskan supaya diumumkan dalam segala media pers Indonesia.

Sumbangan pemikiran Tjokroaminoto tentang *erfpacht* ternyata berhasil dan mempunyai dampak yang luas dalam meningkatkan kehidupan rakyat bumiputera yang telah lama menderita. Perjuangan ini tidak hanya mandeg di tengah jalan tetapi terus dikembangkan menyampaikan penjelasan-penjelasan permasalahan serupa.

3.3 Pengaruh dan Tantangan

3.3.1 Kaum Komunis

Dalam usaha memperjuangkan cita-cita Sarekat Islam yang dipimpin Tjokroaminoto menghadapi berbagai tantangan baik dari dalam maupun yang datangnya dari pemerintah kolonial Belanda. Tantangan dari dalam di sini adalah masuknya komunis dalam tubuh Sarekat Islam. Mereka di muka tempat satu

badan perjuangan menghadapi pemerintah kolonial Belanda, tetapi mereka pada kesempatan yang baik menikam dari belakang. Sehingga berkat ulah kaum komunis, Sarekat Islam yang semula kuat merupakan satu kekuatan yang sangat disegani lawan namun akhirnya terpecah belah. Dalam hal ini karena paham komunis tidak dapat sejalan dengan Islam.

HOS. Tjokroaminoto dalam kongres sering melontarkan pemikiran yang mengarah kecaman kepada para penguasa yang tidak adil dan zalim. Akibat lontaran pidatonya dalam kongres yang dianggap membahayakan kedudukan pemerintah kolonial, maka tidaklah mengherankan apabila Tjokroaminoto berkali-kali berurusan dengan pengadilan dan bahkan ditangkap serta dipenjarakan.

Tantangan terhadap kepemimpinan HOS. Tjokroaminoto ini jelas dilakukan oleh Semaun dan kawan-kawan komunis lainnya. Hal ini dapat diketahui pada tahun 1913, di saat Sarekat Islam sedang mulai gerak langkahnya, yaitu sesudah berlangsungnya Kongres Sarekat Islam yang pertama di Surabaya, HJFH. Sneevliet (seorang Belanda) datang ke Jawa, sebagai sekretaris dari suatu perkumpulan kaum dagang. Sneevliet membawa paham sosialis. Propaganda yang pertama telah dapat dilaksanakannya di kalangan *Vereeniging van Spooren Tremvegpersoneel* (VSTP).

Segera pada bulan Mei 1914, Sneevliet dapat mendirikan *Indische Social Democratische Vereeniging* (ISDV) di Semarang dengan tujuan untuk menyiarkan paham Marxis. Sejak semula Sneevliet datang dengan paham sosialismenya. Ia senantiasa harus berhadapan dengan ajaran Tjokroaminoto, yaitu "Sosialisme-Islam" yang bukan saja lebih dahulu timbulnya tetapi juga lebih baik teori dan prakteknya dari pada sosialisme ciptaan Marx. Dengan gagah dan lantang Tjokroaminoto senantiasa berkata "*Wie goed Mohamadan is, is van zelf socialist*" en "*Wij zein Mohamedanen dus zejin wil socialisten*" ("Seorang Islam sejati dengan sendirinya menjadi sosialis", dan "Kita kaum muslimin, jadi kita kaum sosialisten").

HJFM. Sneevliet adalah seorang Belanda yang cerdas. Melihat gerak SI, ia segera pula mengusahakan adanya hubungan yang rapat dengan anggota-anggota SI, teristimewa dengan pemuka-pemukanya hingga Ir. Baars. Sneevliet mengurus soal-soal perburuhan dan pemerintahan, baik dalam bidang Sentral Sarekat Rakyat Islam maupun dalam sidang Sarekat Islam Lokal, sehingga banyak anggota-anggota SI yang tertarik terhadap kupasannya. Dalam kader kursus yang diselenggarakan oleh Sneevliet di Semarang, turut pula anggota-anggota SI.

Secara perlahan-lahan terasalah pergerakan SI itu telah merupakan **badan satu** dengan **ruh dua-ruh sejati** dari **ruh kemasukan**. Sneevliet dengan ISDVnya berusaha mendekati rakyat dengan jalan mempergunakan organisasi yang lain-lain. Pada tahun 1915 Semaoen menjadi anggota SI diikuti oleh Darsono, Tan Malaka, Alkimin Prawirodigdo dan lain-lain. Banyak orang Indonesia yang menjadi anggota ISDV, masuk pula menjadi anggota SI, sebaliknya dirinya dalam ISDV hingga ada kesan dewasa itu SI – ISDV sama-sama. Anggota-anggota ISDV seperti Semaoen, Darsono dan Alimin bekerja keras di dalam Sarekat Islam untuk memutar haluan pergerakan Islam itu ke arah paham mereka. Mereka selalu melakukan oposisi terhadap Sentral Sarekat Islam yang berada di bawah pimpinan Tjokroaminoto, HA. Salim, Abdoel Moeis, dan lain-lain.

Di dalam Kongres Sentral Sarekat Islam Nasional pertama di Bandung pada 17–24 Juni 1916, Semaoen secara terang-terangan menentang paham mendasarkan agama sebagai dasar pergerakan. Di Kongres Sentral Sarekat Islam kedua di Jakarta (20–27 Oktober 1917) oposisi dari pihak Semaoen makin bertambah hebat. Demikian juga di dalam Kongres Sentral Sarekat Islam di Surabaya (29 September – 6 Oktober 1918), di mana Semaoen telah berhasil dalam usahanya untuk diangkat menjadi Komisaris Sentral Sarekat Islam daerah Jawa Tengah, dengan tempat kedudukan di Semarang. Ketika pada akhir tahun 1918, HJFM. Sneevliet dikeluarkan dari Indonesia oleh Pemerintah Hindia Belanda, Semaoen menjadi ketua ISDV.

Di dalam kongres-kongres Sentral Sarekat Islam keempat di Surabaya (26 Oktober -- 2 November 1919) yang telah menghasilkan berdirinya Vak -- Sentral dengan PPKB (Persatuan Pergerakan Kaum Buruh), telah tergambar dengan jelas pertentangan-pertentangan di antara Tjokroaminoto dan kawan-kawan seperti Semaoen cs. Oleh Sarekat Islam dikehendaki nama di atas, sedang oleh golongan Semaoen mengajukan nama "*Revolusioner Socialistich Vak Centrale*". Sementara itu ISDV pada 23 Mei 1920 dilebur menjadi PKI dengan Semaoen sebagai ketuanya. Maka makin lama semakin nyata serangan Semaoen terhadap Sarekat Islam di bawah pimpinan HOS. Tjokroaminoto. Sikap menyerang berasal dari dalam karena mereka masih duduk dalam pimpinan Sarekat Islam. Mereka tetap bertahan dalam pergerakan itu dengan maksud tertentu, hendak menukar aliran batin organisasi Sarekat Islam kepada komunisme. Pemuka-pemuka SI diserang oleh orang-orang SI sendiri. Serangan itu bukan karena mereka melanggar azas-azas SI dan serangan yang bukan karena berdasar kepada SI melainkan berdasar azas dan sikap aliran lain. Azas dan sikap SI diserang dengan serangan yang berdasar kepada azas komunis, sedang yang menyerang itu juga anggota SI. Pergerakan SI dewasa itu ibarat badan satu dengan ruh dua -- sejati, yaitu ruh Sarekat Islam, dan ruh kemasukan yang ingin menukar haluan.

Pada tahun 1921 atas usaha Bratanata salah seorang pemuka SI di Cirebon dilangsungkan Al Islam Kongres yang pertama. Maksud kongres ini untuk mengurangi bahaya perselisihan tentang soal-soal furu dan khilafiyah serta mengusahakan terciptanya persatuan aliran dan kerjasama kedua pimpinan itu. Kongres berjalan lancar, sehingga waktu itu didirikan Sentral Komite Al Islam yang dipimpin oleh Soeroso seorang pemuka Sarekat Islam di Garut.

Kongres Al Islam itu dilanjutkan pada tahun 1922 untuk kedua kalinya di Garut guna mengesahkan peraturan-peraturan Sentral Komite Al Islam yang bertujuan merapatkan persatuan dan persaudaraan di antara pemuka-pemuka dan perhimpunan

Islam di Indonesia. Pimpinan kongres waktu itu Haji Agus Salim dan PB. Muhamadiah.

Inisiatif dari pemuka-pemuka Sarekat Islam di atas mendapat sambutan baik sekali. Kaum muslimin sadar perlunya persatuan yang kuat di kalangan muslimin Indonesia.

Di dalam pidato pembukaan Al Islam Kongres itu Tjokroaminoto telah menguraikan serba ringkas tentang "Sosialisme yang berdasar Islam". Tjokroaminoto antara lain mengatakan bahwa kongres bukannya membuat propaganda yang bersifat politik semata-mata, tetapi karena sebagian dari prike-manusiaan yang menanggung sengsara dalam pelbagai bagian dunia, memandang dapat melepaskan mereka dari kesengsaraan itu adalah sosialisme. Sosialisme itu mengupayakan keselamatanannya pergaulan hidup manusia bersama, sebagian yang dikehendaki oleh agama Islam dan oleh keislaman kita. Sosialisme itu dirasakan perlu :

- (1) Dengan sedapat-dapatnya akan membangun perasaannya umat Islam di negeri tumpah darah kita, agar supaya mereka dapat merasa dan mengerti masing-masing orang yang meluknya tetapi keselamatan segenap pergaulan hidup manusia bersama. Agama Islam itu adalah agama perdamaian atau agama keselamatan.
- (2) Untuk membantah perkataan setengah orang yang mengatakan agama Islam tidak cakap menuntut atau memajukan keperluan politik, sosial dan ekonomi.

Sementara itu Sarekat Islam terus pula memperkuat diri, terutama mengadakan pembersihan di dalam tubuh organisasi sebagaimana yang telah diputuskan oleh Kongres Sarekat Islam di Surakarta pada 6 sampai 10 Oktober 1921. Maka dilangsungkan pula kongres Sarekat Islam di Madiun pada 17 sampai 20 Februari 1923, yaitu suatu kongres yang cukup bersejarah yang oleh Wondoamiseno pernah diceritakan bahwa kongres Sarekat Islam 1923 masuk perangkap! Menurut Wondoamiseno yang dimaksud adalah penangkapan Tjokroaminoto. Beliau itu tabiatnya gampang kepada kawan

apa lagi sepaham dan separtai. Tidak curiga terkandung di dalam kalbunya sedikit pun. Beliau sangat percaya pada perlindungan Allah Yang Mahakuasa. Kepercayaanya teguh kepadanya dan penuh dengan iman dan tauhid dalam dadanya. Ini bukan pujian tetapi kenyataan adanya.

Suatu hal yang menimbulkan terkejut Wondoamiseno sebagai komisaris Sentral Sarekat Islam yaitu saat Tjokroaminoto, HA. Salim dan rombongan memasuki gedung calon tempat kongres ternyata seluruh gedung itu dihiasi dengan bendera "merah palu arit" ialah bendera komunis. Bahkan di atas meja pimpinan Sarekat Islam pun berkibar bendera besar yang melambai-lambai "palu arit berdasar merah".

Ketua Tjokroaminoto tersenyum, giginya mengkerut-kerut, matanya yang kanan berkejam-kejam. Ketua Salim pun ketawa sambil pegang janggutnya. Wondoamiseno dan H. Fachruddin nampak matanya sama-sama merah, tangannya menggepal-gepal seolah-olah akan berontak tetapi kepada siapa?

Ketua Tjokroaminoto berbisik kepada HA. Salim dan Fachruddin mengatakan bahwa orang-orang komunis sebagai Panitia kongres suka korban. Rombongan Tjokroaminoto kemudian pulang ke Surabaya untuk mengatur siasat.

Suatu hal yang menggemirakan karena pada malam hari acara resepsi Kongres Sentral Sarekat Islam dimulai, di gedung itu penuh dengan para undangan utusan lokal Sarekat Islam yang jumlahnya beratus-ratus. Setelah masuk ke gedung itu tercengang karena melihat di atas meja pimpinan telah berkibar bendera "Bintang Bulan Berdasar Hijau yang berlafal, "Laa ilaaha illalloh Muhammadur Rosululloh".

Pada sidang itu tidak nampak lagi bendera "palu arit berdasar merah" berkibar di waktu pagi harinya. H. Fachruddin pagi hari itu juga pulang ke Yogyakarta untuk mengambil bendera SI.

Suatu peristiwa yang terjadi di dalam kongres itu dengan mendadak tanpa diberi kesempatan oleh Ketua Panitia Djajadiharaja, seorang peserta naik ke podium dengan melontarkan

kata-kata agar peserta kongres tidak mengekor pemimpinnya, dan jangan hanya "rubuh-rubuh gedang" seperti halnya orang sembahyang makmum di belakang iman dengan tidak mengerti maksudnya. Tampilnya peserta kongres ke podium dengan melontarkan kata-kata meremehkan pimpinan Sarekat Islam itu merupakan suatu tantangan terhadap cita-cita Tjokroaminoto. Dengan kenyataan ini bahwa usaha Sarekat Islam yang dipimpin Tjokroaminoto jalannya tidak mulus, tetapi hanya menghadapi tantangan-tantangan khususnya sikap licik kaum komunis.

Pembicaraan orang tak dikenal dalam podium itu sempat menimbulkan keributan, karena tak lama kemudian peserta kongres berdiri dan meloncat ke muka menyetop pembicaraannya. Resepsi menjadi kacau-balau karena ulah pemuda yang tidak tahu diri itu. Insiden ini meluap sempat melibatkan bentrok antara Sarekat Islam dengan PKI. Ketua Tjokroaminoto minta agar supaya resepsi diskors dan peserta kongres diminta sabar dan kembali duduk di tempatnya masing-masing.

Atas permintaan HOS. Tjokroaminoto, resepsi tenang kembali. Suara gemuruh dan bisik-bisik masih terdengar dari mereka. Patih Madiun (saudara ipar Tjokroaminoto) ikut mengatur keamanan dengan ditambah penjagaan polisi.

Selanjutnya resepsi dibuka kembali oleh Ketua Tjokroaminoto sendiri. Sajuti Lubis utusan SI Kalimantan dipersilakan membaca ayat-ayat *Al-Qur'an*. Keputusan-keputusan kongres terpenting antara lain adalah :

- (1) menetapkan partai disiplin terhadap PKI
- (2) menetapkan sikap non-cooperation terhadap pemerintah Belanda
- (3) mengganti SI menjadi Partai Sarekat Islam Hindia Timur (yang kemudian diubah lagi menjadi PSII)
- (4) membaharui formulir Bai'at.

Keputusan kongres Sentral Sarekat Islam di Surabaya, 6-10 Oktober 1921 tentang disiplin partai, oleh pihak Semaoen dirasakan sebagai suatu pukulan hebat. Di dalam kongres

ISDV yang telah berganti nama PKI yang dilangsungkan di Semarang pada 24 sampai 25 Oktober 1921 di bawah pimpinan Tan Malaka (karena Semaoen dan Darsono sudah berangkat ke luar negeri pada bulan Oktober 1921), di mana mereka secara terus terang mengakui Lenin dan Trosky sebagai pahlawannya, telah diambil pula putusan untuk menyusun cabang-cabang Sarekat Islam yang ke luar dari Sentral Sarekat Islam ke dalam Sentral Sarekat Islam Merah, untuk menentang Sentral Sarekat Islam yang dipimpin oleh Tjokroaminoto dan Haji Agus Salim.

Usaha Semaoen untuk tetap tinggal dalam Sarekat Islam, dengan adanya putusan kongres Sarekat Islam di Madiun di atas, menjadi sia-sia belaka. Segera setelah Kongres Sarekat Islam di Madiun (17-20 Februari 1923), pada 4 Maret 1923, kaum komunis juga mengadakan kongresnya di Bandung, dengan dihadiri oleh 16 cabang PKI, 14 cabang Sarekat Islam Merah dan serikat-serikat sekerja yang bergabung di dalam *Revolusionnire Vakcentrale*. Putusan-putusan Sarekat Islam di Madiun mengenai partai disiplin, disambut! Serangan-serangan terhadap Sarekat Islam terlalu tajam, terutama dari pihak Semaoen sendiri, sehingga secara nyata terang bahwa kongres itu diadakan adalah sebagai reaksi terhadap Kongres Sarekat Islam di Madiun. Di tiap-tiap tempat, di mana berdiri cabang cabang Sarekat Islam oleh Darsono dianjurkan agar didirikan pula Sarekat Islam Merah yang akan dinamai dengan Sarekat Rakyat (di bawah pimpinan PKI), guna mengumpulkan pengikut-pengikut Sarekat Islam yang menyetujui komunis. Tentang partai disiplin ini, Wondoamiseno menulis sebagai berikut. "Di sini perlu ditegaskan, bahwa sedjak mulai SI Semarang diganti mendjadi SI Merah jang diikuti oleh beberapa tjabang jang mengganti kiblatnja ke Semarang atas pimpinannja Sdr. Semaoen, maka timbullah kegelisahan para anggota SI jang tetap berkiblat ke Surabaja atas pimpinan Ketua Tjokroaminoto. Matjam-matjam usaha dan daja upaja kaum merah untuk mendjatuhkan nama baiknya Ketua Tjokroaminoto dengan maksud supaja dengan mudahnja SI digulingkan mendjadi Komunis (Partai Komunis Indonesia = PKI) semua, jang pada

dewasa itu masih samar-samar memakai nama SI Merah atau SR (Sarekat Rakyat).¹⁹

Selanjutnya diungkapkan oleh W. Wondoamiseno bahwa pada saat itu Sarekat Islam menghadapi krisis yang hebat sekali ialah krisis pemimpin. Beribu pemimpin-pemimpin SI di cabang-cabang yang terbalik mengikuti pimpinan Semaoen, yang di belakangnya ada beberapa orang Belanda antara lain Sneevliet, Bergsma, dan lain-lain.

Tidak hanya cukup sekian saja. Di beberapa tempat timbul debat, baik tertutup maupun terbuka. Tidak saja debat mulut tetapi juga dengan tinju-meninju dan sebagainya.

Oleh karenanya, untuk mencegah terjadinya krisis yang demikian rupa, maka kongres di Madiun itu memutuskan partai disiplin terhadap komunis baik yang bernama SI Merah, Sarekat Rakyat dan PKI yang berlainan ideologinya (komunis), yang sudah terang bertentangan dengan ideologi Islam.

Berkat adanya partai disiplin itu, maka tak ada lagi permusuhan yang menghebat di antara kedua pihaknya. Kaum PSII selalu memperdalam pengetahuannya tentang sosialisme menurut ajaran Nabi Muhammad saw. dibandingkan sosialisme menurut ajaran Karl Marx dan Lenin; "*lakum dinukum waliyadin*".

Di sana ada kepentingan bersama PSII siap sedia bekerja bersama-sama dengan PKI. Oleh karena itu PSII tetap percaya akan kekuatan sendiri, artinya tidak boleh menyerahkan nasibnya kepada pihak lain yang mana pun. Demikian pula sikap PSII terhadap partai-partai politik lainnya. Ungkapan ini dikemukakan W. Wondoamiseno sebagai Sentral Sarekat Islam yang mengikuti Kongres Sarekat Islam di Madiun.

Pada waktu HOS. Tjokroaminoto mulai terjun dalam perjuangan memimpin Sarekat Islam kondisi masyarakat Indonesia masih belum maju. Umumnya rakyat belum mendapat kesempatan mengikuti pendidikan. Walaupun telah didirikan sekolah namun kesempatan memasuki sekolah tersebut bagi bangsa kita masih terbatas dan tidak leluasa. Sekolah-sekolah HIS umumnya

anak-anak Belanda dan juga sebagian kecil bangsa kita yang memiliki jabatan Pamong Praja. Rakyat di pedesaan diberi tempat di Sekolah Ongko Loro. Situasi yang demikian itu memang telah menjadi garis politik pemerintah kolonial Belanda agar rakyat Indonesia tetap terbelakang sehingga mudah diadu-domba antara satu dengan lainnya. Hanya orang-orang yang terpelajar sajalah yang telah memiliki kesadaran dan memiliki wawasan yang luas.

Sebagaimana kita ketahui dengan beratnya penderitaan bangsa Indonesia akibat Tanam Paksa sehingga di mana-mana timbul kelaparan dan kesengsaraan karena ulah serta politik pemerintah kolonial Belanda. Kiranya dapat dibayangkan bagaimana beratnya waktu itu. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila rakyat Indonesia tetap terbelakang. Sekolah-sekolah yang didirikan belum dapat menampung kesempatan bagi rakyat. Untuk menggerakkan suatu organisasi perjuangan kiranya faktor pendukung anggota yang telah mendapat pendidikan hal yang penting. Suatu pemikiran yang dilontarkan oleh Tjokroaminoto cepat ditangkap dan ditanggapi bagi mereka yang lebih menyadari artinya perjuangan untuk melawan kolonialisme. Oleh karena itu kondisi masyarakat yang masih demikian itu merupakan salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh beliau. Tjokroaminoto dan pengurus lainnya harus bekerja keras untuk menjelaskan maksud dari perjuangan Sarekat Islam.

Akibat penjajahan yang lama keadaan perekonomian bangsa kita dalam kondisi lemah. Dalam bidang pertanian, perdagangan dan usaha-usaha lain kurang mendapat kebebasan bergerak dan mengembangkan pemikiran sendiri. Mengingat kondisi yang demikian itu, maka modal rakyat bumiputera kurang dapat berkembang. Di samping semangat serta pengetahuan, maka kemampuan perekonomian merupakan faktor yang ikut menentukan keberhasilan perjuangan. Oleh karena keadaan perekonomian yang lemah itu juga menjadi tantangan yang harus dihadapi dengan penuh keuletan oleh Tjokroaminoto dan kawan-kawan seperjuangannya. Ini pun menjadi beban berat juga dalam upaya membawa ke arah kemajuan, lebih-lebih

untuk perjuangan.

3.3.2 *Dari Luar (Belanda)*

Dalam melaksanakan maksud penjajahannya dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan cara *asosiasi* yang lebih menunjukkan corak kolonial. Cara ini mengandung maksud bagaimana mengikat negeri jajahan dengan negeri penjajah. Dalam hal ini kebudayaan dianggap merupakan sarana yang sangat efektif. Manfaat kebudayaan negeri penjajah tanpa mengabaikan kebudayaan negeri yang dijajah. Sistem sosialisasi ini sebagai kebijaksanaan yang diperjuangkan ilmuwan Belanda Christian Snouck Horgronje. Snouck Horgronje menggariskan jalan bagaimana menghadapi soal Islam. Hal ini sudah dipahami karena Islam telah memperlihatkan semangat perjuangannya di Indonesia dalam bentuk pemberontakan dan perlawanan terhadap penetrasi pihak Belanda di berbagai wilayah negeri ini.

Menurut Snouk Horgronje walaupun Islam di Indonesia banyak tertutup oleh lapisan kepercayaan lain seperti animisme dan Hindu, tetapi orang-orang Islam di negeri ini menganggap agama mereka sebagai alat pengikat yang kuat yang membedakan mereka dari orang-orang yang bukan Islam yang dianggap sebagai "orang asing". Menurut pengamatan Snouck Horgronje dikatakan bahwa agama Islam memperhatikan persoalannya dikatakan sebagai agama yang sempit (seperti perkawinan, hubungan keluarga, peraturan yang berkenaan dengan waris), sedangkan aspek politik dan sosial dari agama Islam kurang mendapat perhatian.²⁰ Oleh sebab pemikiran pengkristenan banyak terdapat dalam kalangan mereka yang merumuskan dan merencanakan politik pemerintah Belanda, semangat perjuangan orang Islam itu mungkin saja muncul; politik pengkristenan akan menyebabkan orang Islam lebih terdorong untuk menyadari aspek politik dari ajaran agama mereka.²¹ Oleh sebab itu sokongan terhadap kegiatan misi di dalam wilayah-wilayah yang kuat Islamnya akan memungkinkan penduduk wilayah itu lebih merasa asing terhadap Belanda. Oleh sebab itu Snouck Horgronje menasihatkan Pemerintah Belanda supaya memberi perhatian yang besar kepada pendidikan dan

pengajaran kepada orang Islam Indonesia tanpa menghubungkannya dengan persoalan pengkristenan. Cara ini akan memajukan mereka dari sistem Islam dan akan dapat menerima kebudayaan Belanda, yaitu kebudayaan barat, dan menumbuhkan juga pengertian yang lebih baik di antara mereka terhadap orang-orang Belanda.

Politik asosiasi terhadap penduduk pribumi dengan kebudayaan Belanda terletak perpecahan persoalan Islam. Cara ini akan "menghapuskan perbedaan yang dijumpai dalam aspek politik dan sosial karena kepercayaan agama yang berbeda. Menurut Snock Horgronnje bahwa asosiasi itu akan menghilangkan cita-cita Pan-Islam dari segala kekuatannya. Secara tak langsung cara tersebut akan bermanfaat bagi penyebaran agama Kristen sendiri, sebab pelaksanaan politik asosiasi itu akhirnya akan memudahkan pekerjaan misi, oleh sebab misi ini akan "lebih menumbuhkan pengertian pada kalangan penduduk pribumi yang telah kena asosiasi itu terhadap mereka".

Suatu bukti tantangan yang harus dihadapi gerakan Islam di Indonesia, termasuk Sarekat Islam yang dipimpin Tjokroaminoto ialah adanya pernyataan kerajaan Belanda dalam tahun 1901 yang memperkenalkan politik Etis:

"Sebagai bangsa Kristen, Belanda mempunyai kewajiban untuk memperbaiki keadaan orang-orang Kristen pribumi di daerah kepulauan Nusantara, memberikan lebih banyak bantuan kepada misi Kristen, dan memberikan penerangan kepada segenap petugas bahwa Belanda mempunyai kewajiban moral terhadap penduduk wilayah itu."²²

Walaupun dalam pernyataan politiknya Pemerintah Belanda memisahkan diri dengan gereja, tetapi di balik itu bantuan mereka kepada pengkristenan di Indonesia dengan pemberian bantuan yang besar. Bantuan ini jumlahnya lebih besar dari pada yang diberikan kepada kalangan Islam. Hal ini menyebabkan banyak orang Islam Indonesia berpikir bahwa persatuan pemerintah tahun 1935 tidaklah mempunyai arti **nil** tentang pemisahan gereja dan negara. Subsidi dan sokongan dari pihak lain yang demikian besar merupakan duri dalam daging kalangan

Islam di Indonesia.

Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada hakekatnya memberi dukungan lancarnya kristenisasi di Indonesia dan juga tekanan terhadap gerakan langkah persebaran misi Kristen mendapat pengawasan dari politik dan diserahkan kepada kepala-kepala suku bumiputera, sedang persebaran agama Islam mendapat pengawasan secara ketat. Lebih-lebih gerakan partai politik sebagaimana dipimpin oleh Tjokroaminoto. Propaganda orang-orang Kristen sangat melukai Islam. Misalnya organisasi Bala Keselamatan dari Kristen memasuki mesjid di Sulawesi Utara dan mereka main musik di sana, dan propagandis Kristen memasuki mesjid di Solo dan Mangkunegaran dengan menyebarkan panflet dan selebaran yang bersifat propaganda kepada orang Islam. Demikian rupa penghinaan yang dirasakan oleh orang Islam, sehingga Wiwoho yang dianggap satu-satunya wakil orang Islam di dewan itu dalam bagian akhir tahun 1939 mengatakan sebagai berikut.

"Tidak dapat saya diam untuk mengemukakan catatan bahwa kelancaran para propagandis agama lain (selain Islam) dalam negeri Islam ini telah meluncur menjadi kekurangan atau keliaran; tidak ada kata yang lebih lunak yang saya cari untuk ini."²³

Bantuan yang nyata memihak kelancaran pengkristenan di Indonesia ialah dengan dikeluarkannya secara resmi oleh pemerintah agar para pejabat pemerintah hendaklah menjaga diri mereka untuk tidak mengikuti pesta-pesta resmi atau setengah resmi yang bersifat umum pada hari Minggu dan bahwa pada pesta-pesta yang bersifat umum pada hari besar lain dan hari-hari peringatan Kristen, perhatian harus diberikan untuk tidak mengadakan acara-acara kegembiraan pada waktu sembahyang di gereja, sekurang-kurangnya untuk tidak memberikan sifat resmi kepada pesta-pesta peringatan pada waktu sembahyang gereja. Dengan sirkuler yang dilangsir dari gubernur bahwa untuk tidak mengadakan pasar pada hari Minggu dan secepat mungkin meniadakan pasar pada hari Minggu dan supaya dihentikan menjadi bukti perlakuan yang

tidak adil terhadap orang Islam, dan memberi perlakuan istimewa kepada mereka pemeluk Kristen. Masih banyak lagi peraturan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda yang berarti menghambat gerak Islam. Walaupun mendapat tantangan yang begitu hebat dari pihak pemerintah tetapi Tjokroaminoto terus bergerak maju mengobarkan cita-cita Sarekat Islam untuk mewujudkan kemerdekaan bangsanya dari belenggu kolonial.

Pemerintah kolonial Belanda dengan daya upaya terus berusaha membendung arus Sarekat Islam, dengan melepaskan kaki tangannya ke dalam organisasi Sarekat Islam untuk mengadakan infiltrasi dengan berbagai cara antara lain usaha untuk memasukkan pemimpin-pemimpin Sarekat Islam ke dalam penjara. Berbagai macam pemberontakan rakyat terdapat di wilayah Hindia Belanda, misalnya di Mempawa, Kalimantan Barat, Jambi, Sekdau, Kudus, Demak, Toli-toli dan lain-lain dilemparkan semuanya ke pundak pemimpin Sarekat Islam, sekalipun tiada mempunyai bukti sedikit pun. Kepada pemuka-pemuka Sarekat Islam dilemparkan tuduhan yang amat berat.

Indonesia dalam tahun 1918 ditimpa bahaya kekurangan makanan. Berdasar perintah dari pemerintah, maka para pejabat waktu itu bersikap keras, memerintahkan bawahannya untuk membeli padi. Perintah itu dilaksanakan pula secara keras, hingga mendapat tantangan pula dari rakyat yang ingin mempertahankan hak miliknya. Tindakan kekerasan yang dilakukan pegawai pemerintah itu dianggap suatu tindakan kekerasan dan sewenang-wenang. Haji Hasan di Cisareme bersama-sama dengan anak isterinya dan kawan-kawannya didrel oleh pemerintah yang sewenang-wenang itu karena tidak mau membukakan pintu.

Pemerintah Belanda tidak senang melihat gerak langkah SI yang sedemikian maju, karena pergerakan rakyat itu dipandang oleh Pemerintah Hindia Belanda membahayakan dan selalu mengancam kedudukannya, terutama setelah Sarekat Islam mengemukakan programnya yang tergesa-gesa menentang kapitalisme. Banyak orang-orang Belanda merasa bahwa rakyat

hendak bangun memberontak, dan seakan-akan Sarekat Islam hendak menggerakkan revolusi. Mereka menyangka bahwa Sarekat Islam hendak menimbulkan kerusuhan dan pemberontakan. Tjokroaminoto dituduh akan memberontak pada tahun 1921. Oleh karena itu menurut keputusan pengadilan di Jakarta telah menjatuhkan hukuman penjara kepada beliau. Tjokroaminoto dipersalahkan sebagai saksi dalam salah satu perkara afdeling B, telah memberikan keterangan palsu dengan sumpah. Namun karena Tjokroaminoto tidak bersalah maka akhirnya beliau dibebaskan. Kekeliruan hakim dalam perkara penuntutan itu ditunjukkan dengan nyata.

Agen-agen Belanda dengan giat ikut serta dalam mendirikan perkumpulan-perkumpulan agama, politik dan lain-lain. Mereka itu secara licin menimbulkan infiltrasi dan provokasi. Mereka menimbulkan aksi persaingan terhadap pergerakan Sarekat Islam.

Persaingan itu lambat-laun berubah menjadi pertentangan dan akibatnya dengan mudah menjadi benih-benih perpecahan. Maka timbullah suasana fitnah memfitnah yang menyebabkan sendi-sendi persaudaraan dalam masyarakat menjadi goncang, teristimewa dalam organisasi-organisasi bangsa Indonesia. Persaingan dan pertentangan yang timbul akibat tipuan infiltrasi dari dalam itu, senantiasa dicarikan bahan pembakarnya oleh Pemerintah Hindia Belanda. Rapat-rapat umum yang diselenggarakan organisasi mana pun yang bermaksud memperolok-olok organisasi lainnya tentu saja mendapat sambutan yang baik dari pemerintah, bahkan kaum ambtenar BB giat sekali mempropagandakan rapat-rapat umum seperti itu kepada rakyat.

Di kalangan umat Islam sendiri sehubungan dengan itu satu dengan lainnya menjadi retak. Sarekat Islam dan Muhammadiyah yang semula mempunyai hubungan yang baik sekali, akhirnya menjadi retak. Pada hal baik Sarekat Islam maupun Muhammadiyah kedua-duanya berdasarkan Islam. Bila ditelusuri secara cermat pokok pangkal keretakan itu secara prinsipil tidak dapat ditemuinya, bahkan kadang-kadang hanyalah masalah

perseorangan atau rasa sentimen saja semata-mata. Hal ini makin menjadi-jadi karena kuatnya infiltrasi dan hamburan fitnah-memfitnah di antara satu dengan yang lain.

Sejak tahun 1919 Tjokroaminoto dalam tuduhan yang menyebabkan beliau dalam tahun 1920 ditahan selama 8 bulan dan akhirnya beliau dibebaskan juga. Jalan pemeriksaan sejak bermula ditujukan untuk menimpakan tuduhan yang berat kepada beliau, tuduhan telah menyusun dan mengatur pergerakan afdeling B untuk merobohkan kekuasaan pemerintah. Karena tuduhan itu akhirnya tidak terbukti kemudian Tjokroaminoto dipersalahkan sebagai pimpinan Sarekat Islam dengan sengaja dan membiarkan pembuatan huru-hara itu bekerja, sedang afdeling B itu dibangunkan dari pergerakan yang dipimpin oleh beliau. Dalam waktu 2 tahun itu Tjokroaminoto mendapat ujian berat karena sebanyak 20 kali beliau diperiksa oleh pokrol Jenderal Uhlenbeck. Akibat dari tuduhan yang dibuat buat itu berakibat beratus-ratus anggota SI dijatuhi hukuman sampai 8 atau 10 tahun, dan ratusan dari mereka mundur menyeberang dari anggota Sarekat Islam.

CATATAN

1. Amelz, HOS. Tjokroaminoto Hidup dan Perjuangannya, jilid I, Bulan Bintang, Jakarta, 1952, halaman 48
2. Ibid, halaman 58
3. Ibid, halaman 59
4. Annar Bonggong, HOS. Tjokroaminoto, Proyek Biografi Pahlawan Nasional, Depdikbud Jakarta, 1975, halaman 25
5. Ibid, halaman 27
6. Ibid, halaman 30
7. Ibid, halaman 37
8. Amelz. Op. cit., halaman 29
9. Ibid, halaman 30
10. Ibid, halaman 124
11. Ibid, halaman 125
12. Ibid, halaman 128
13. Ibid, loc. cit
14. Ibid, halaman 141
15. Ibid, halaman 149
16. Ibid, halaman 154
17. Ibid, halaman 158

18. **Ibid, halaman 166**
19. **Ibid, halaman 133-134**
20. **Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942, LP3ES, Oxford University Press, Jakarta 1973, halaman 183**
21. **Ibid, loc. cit**
22. **Ibid, halaman 184**
23. **Ibid, halaman 190**

BAB IV

IJ. KASIMO DAN PEMIKIRANNYA

4.1 Latar Sejarah Kehidupan

Pada 10 April 1900 lahirlah seorang bayi laki-laki di Kampung Mantrijeron Yogyakarta, sebuah kampung tempat tinggal prajurit Mantrijeron. Ayah bayi laki-laki tersebut adalah Ronosentiko, seorang abdi dalam prajurit Mantrijeron, sedangkan ibunya bernama Dalikem. Sebagai abdi dalem prajurit Mantrijeron, Ronosentiko cukup terpandang kedudukannya di dalam masyarakat. Jabatan sebagai prajurit ini memberi hak kepadanya untuk disebut priyayi.

Kota Yogyakarta pada waktu itu masih diselubungi kabut feodalisme, tetapi di dalam struktur feodal yang berlaku di Yogyakarta pada waktu itu, abdi dalem merupakan milik pribadi sultan. Ronosentiko sebagai abdi dalem prajurit Mantrijeron tidak menerima gaji. Sebagai imbalan atas jasa-jasanya, Ronosentiko memperoleh sebidang tanah seluas dua jung atau kurang-lebih delapan bahu (7096,50 m²). Setelah sistem *apanage* dihapuskan dan diganti dengan undang-undang tanah 1918 (*Agrarische Hervorming*), ia menerima ganti berupa uang sebesar 26 gelo.¹

Kasimo dilahirkan dalam zaman dan lingkungan feodal serta zaman di mana kolonialisme Belanda di Indonesia ketika itu sedang berjaya. Dibandingkan dengan awal abad ke-19 yang terkenal dengan sistem tanam paksa yang sangat merugikan rakyat, awal abad ke-20 memang mengalami ke-

majuan yang besar di bidang politik pemerintah kolonial.

Setelah usia sekolah tiba, pada usia delapan tahun, Kasimo oleh orang tuanya dimasukkan sekolah bumiputera yaitu Sekolah Kelas Dua atau *Sekolah Ongko Loro (Tweede Inlandsche-school)* di Kampung Gading yang letaknya hanya beberapa ratus meter dari rumahnya. Sekolah bumiputera Gading ini terkenal sebagai sekolah *setalenan* sebab uang sekolahnya pada waktu itu dua puluh lima sen atau *setali*. Kasimo selalu berjalan kaki ke sekolah. Seperti murid-murid lainnya, Kasimo juga mengenakan kain dan baju *sorjan* tanpa sepatu. Pakaian itu merupakan milik satu-satunya dan dicuci sekali dalam seminggu. Kasimo mulai mengenakan sepatu ketika usianya genap 20 tahun. Pada usia ini pula Kasimo untuk pertama kalinya mengenakan pantalon (celana panjang).

Meskipun Kasimo sudah berusia 8 tahun pada waktu masuk sekolah, namun ia tergolong salah satu siswa yang termuda. Kawan-kawan sekolahnya pada waktu itu banyak yang jauh lebih tua usianya, bahkan ada yang sudah berusia 15 tahun. Pertama kali masuk sekolah Kasimo senang sekali. Hal ini disebabkan Kasimo mempunyai banyak teman. Ternyata dalam pergaulan di sekolah, ia sangat disenangi oleh teman-temannya. Ia tidak membedakan dalam berkawan. Kasimo merasa bahwa dirinya dari keluarga sederhana sehingga mendorong untuk cepat-cepat menyelesaikan sekolahnya. Di sekolah Kasimo termasuk anak yang cerdas terutama dalam hal berhitung.

Pada tahun 1908 di Kota Yogyakarta hanya terdapat kurang-lebih sembilan buah sekolah. Jumlah murid pun belum begitu banyak dan belum tentu semuanya dapat menyelesaikan sekolahnya. Perlu diketahui bahwa pada waktu itu masih ada rasa curiga terhadap lembaga pendidikan oleh pemerintah. Para orang tua merasa khawatir jangan-jangan anak mereka menjadi Kristen jika masuk sekolah pemerintah. Kasimo beruntung mempunyai orang tua yang berpikiran maju dan mementingkan pendidikan sekolah anak-anak mereka, sehingga ia pun berhasil menyelesaikan *Sekolah Ongko Loro* sampai lulus.

Sekolah Ongko Loro merupakan sekolah bumiputera yang pertama kali diperkenalkan di Indonesia. Ini adalah sekolah yang paling umum bagi golongan pribumi pada waktu itu. Sekolah ini semacam sekolah rakyat yang bertujuan mendidik pegawai rendahan dengan lama pendidikan empat tahun. Pelajaran yang diberikan antara lain membaca, menulis, berhitung, bahasa Melayu, dan ilmu bumi tentang Pulau Jawa.²

Tugas pokok pemerintah kolonial di lapangan pendidikan pada permulaan abad ke-20 adalah memberi pengajaran rendah kepada bangsa Indonesia sesuai dengan kebutuhannya, tetapi hal ini tidak tercapai dengan susunan pelajaran yang ada, karena *Sekolah Ongko Loro* ini merupakan lembaga yang mahal dan memerlukan anggaran yang besar karena itu atas perintah Gubernur Jenderal Van Heutsz, pada tahun 1907 didirikanlah sekolah-sekolah desa. Sekolah tersebut tidak diselenggarakan oleh pemerintah (*gubernemen*) tetapi oleh desa. Guru-gurunya menjadi pegawai desa, bukan pegawai pemerintah, demikian juga semua biaya menjadi tanggungan desa. Sebetulnya sekolah ini hanya didirikan untuk memberantas buta huruf. Pendidikan dalam arti yang sesungguhnya tidak diberikan kecuali membaca, menulis, dan menghitung. Lama pendidikan sekolah ini hanya tiga tahun.

Pada tahun 1907 itu juga *Eerste Inlandsche School* atau Sekolah Bumiputera Kelas Satu diberi bahasa Belanda sebagai mata pelajaran dan diberikan sejak kelas tiga sampai kelas lima. Setelah lama belajar di sekolah ini dijadikan enam tahun, bahasa Belanda dijadikan bahasa pengantar di kelas enam. Sekolah Bumiputera Kelas Satu ini diperuntukkan anak-anak pribumi dari golongan masyarakat atas (bangsawan dan priyayi tinggi). Pada tahun 1911 masa belajar sekolah Bumiputera Kelas Satu ini menjadi tujuh tahun, dan merupakan pendahulu dari *Hollands Inlandsche School* (HIS). Pada tahun 1914 Sekolah Bumiputera Kelas Satu diubah menjadi HIS dan menjadi bagian pengajaran rendah Eropa.

Sekolah tersebut adalah kunci pertama bagi sistem pendidikan Belanda yang memberi kemungkinan lebih besar bagi

murid untuk melanjutkan pendidikan dan mempersiapkan diri memasuki sistem kolonial. Kecuali itu HIS memang dimaksudkan sebagai *standenschool*, yaitu sekolah yang berdasarkan pada status. Untuk menentukan status seseorang dalam masyarakat kolonial, Pemerintah Belanda berpegang pada standar penghasilan. Berdasarkan perhitungan tertentu, yang berpenghasilan di atas f. 1200 setahun dianggap sebagai golongan yang mempunyai status yang cukup tinggi. Dalam dunia kepegawaian, ini artinya berlaku bagi pangkat asisten wedana ke atas.

Berdasarkan ketentuan pemerintah (Stbld. 1914 Nomor 359) ada empat dasar penilaian yang memungkinkan orang tua memasukkan anak-anaknya ke HIS, yaitu keturunan bangsawan tradisional mempunyai hak untuk memasuki HIS, demikian juga seorang yang mempunyai jabatan dalam pemerintahan seperti wedana, demang, asisten wedana, dan lain-lain. Kecuali itu, pendidikan Barat yang pernah diterima si orang tua paling sedikit *Meer Uitgebroid Lager Onderwijs* (MULO) atau yang setingkat dan penghasilan rata-rata f. 100 sebulan mempunyai hak untuk memasukkan anaknya ke HIS.³

Politik pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu adalah mengelompokkan masyarakat ke dalam golongan-golongan dengan garis pemisah yang tajam. Tidak hanya antara masyarakat Eropa dan masyarakat pribumi saja melainkan pemerintah juga mendorong penggolongan-penggolongan di dalam masyarakat pribumi sendiri. Pada masa diskriminasi dan eksploitasi inilah Kasimo dilahirkan dan dibesarkan. Sebagai anak kecil yang baru berusia antara 11-12 tahun, Kasimo belum menyadari akibat-akibat buruk yang disebabkan oleh sistem feodalisme yang berlaku pada waktu itu, tetapi pengalaman pribadi yang dirasakannya dari keadaan feodal dan kolonial itu khususnya kombinasi dari keduanya sangat menentukan kepribadian dan perjuangan hidupnya di kemudian hari. Pengalaman masa kecil ini antara lain menumbuhkan jiwa kerakyatan pada dirinya, yang mendorongnya untuk selalu berjuang bagi kepentingan rakyat kecil.

Pada waktu Kasimo duduk di kelas empat Sekolah Bumi-putra Kelas Dua, sekolahnya kedatangan tamu seorang pastur dan kepala sekolah guru di Muntilan. Tamu tersebut bernama Romo Frans Van Lith SY. Kedatangan Romo Frans Van Lith SY di Sekolah Bumi-putra Kelas Dua Gading ini menawarkan kepada para siswa yang mau meneruskan sekolah di Sekolah Guru di Muntilan setelah lulus nanti. Pada waktu itu jumlah siswa masih sedikit, sehingga sering sekolah harus mencari siswa untuk mengisi kelas kelasnya Romo Frans Van Lith SY ini setiap tahun keliling ke sekolah-sekolah di Yogyakarta, Surakarta, Klaten, Magelang untuk mencari siswa bagi sekolahnya di Muntilan.

Kasimo tertarik tawaran Romo Frans Van Lith SY, sebab ia sendiri belum mempunyai rencana akan meneruskan ke sekolah mana setelah lulus nanti. Kasimo sadar bahwa ia tidak mempunyai masa depan jika terus tinggal di rumah orang tuanya. Kecuali itu Kasimo ingin maju, karena itu meskipun pada waktu itu baru berusia 12 tahun, ia berani mengambil keputusan untuk melanjutkan sekolahnya ke Muntilan.

Kasimo menyadari bahwa ia memasuki sekolah Katholik. Ia sejak semula sudah bertekad bahwa kedatangan di Muntilan untuk bersekolah, tidak untuk menjadi Katholik, tetapi belum genap setahun tinggal di Muntilan, ia sudah menghadap Romo Frans Van Lith SY untuk bermohon agar diizinkan untuk mengikuti pelajaran agama Katholik. Permohonan Kasimo tersebut diterima dengan senang hati oleh Romo Frans Van Lith SY. Sejak itu Kasimo belajar agama Katholik pada Romo Frans Van Lith SY. Beberapa bulan kemudian, tepatnya pada hari Paskah bulan April 1913, Kasimo dipermadikan menjadi Katholik dan memperoleh nama permandian Ignatius Yoseph, sehingga namanya menjadi Ignatius Yoseph Kasimo.

Kasimo tertarik pada agama Katholik karena tingkah-laku yang baik, sopan dan saleh dari siswa-siswa *Kweekschool* Muntilan. Meskipun mereka sudah berusia remaja (usia mereka rata-rata berada di atas 13 tahun), namun mereka tidak pernah mengeluarkan kata-kata kotor dan tidak senonoh. Hal ini

berbeda sekali dengan sikap teman-teman sekolahnya di Yogyakarta. Meskipun mereka masih duduk di sekolah rendah namun percakapan mereka sangat kotor dan tidak senonoh.

Setamat Kasimo dari Sekolah Bumiputra Kelas Dua, ia melanjutkan pendidikannya ke *Kweekschool* Muntilan. Sekolah guru yang dimasuki Kasimo adalah *Kweekschool* swasta yang pertama di Indonesia yang diakui oleh pemerintah. *Kweekschool* adalah Sekolah Guru rendah yang bertujuan mendidik guru-guru untuk HIS dengan lama pendidikan enam tahun. Karena lulusan sekolah ini diharapkan akan menjadi guru di sekolah Belanda, maka pelajaran bahasa Belanda sangat ditekankan dan diajarkan secara intensif, bahkan bahasa pengantar yang digunakan bahasa Belanda.⁴

Kasimo yang baru pertama kali meninggalkan rumah untuk hidup bersama di asrama mula mula merasa canggung dan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tetapi rasa canggung ini hanya sebentar sebab ia bertemu dengan beberapa bekas siswa Sekolah Bumiputra Kelas Dua Gading antara lain kakak beradik Mutahar dan Mutahir. Mereka inilah yang memberi bimbingan kepada Kasimo. Hidup di asrama penuh dengan peraturan-peraturan yang mendidik agar para siswa hidup berdisiplin. Setiap hari Kasimo bangun pukul 05.00, kemudian mandi bersama-sama di bawah pancuran terbuka dan diawasi oleh seorang pastur. Ia kemudian ke gereja yang pada saat itu masih berupa ruang tidur para siswa yang sangat luas. Pukul 06.45 makan pagi, pukul 07.30 masuk sekolah sampai pukul 13.00. Pukul 13.00-15.00 makan siang kemudian istirahat. Pukul 15.00-17.00 masuk kelas lagi. Pukul 17.00-18.30 istirahat lagi. Pukul 18.30-20.00 belajar sendiri di bawah pengawasan para calon imam. Pukul 20.00 makan malam dan pada pukul 21.00 tidur. Begitulah jadwal kehidupan sehari-hari yang harus dilakukan Kasimo selama belajar di Muntilan.

Kehidupan Kasimo di Muntilan ini ternyata lebih baik jika dibandingkan ketika berada di Yogyakarta. Pada waktu Kasimo tinggal di Yogyakarta hanya mempunyai satu surjan. Di Muntilan Kasimo setiap enam bulan sekali mendapat dua kain

dan satu jas tutup yang terbuat dari kain lurik tebal buatan Negeri Belanda. Seminggu sekali Kasimo menerima uang saku sebesar 20 sen selama duduk di klas satu dan 11.25 sen selama duduk di klas tiga dan empat serta 30 sen untuk klas lima dan enam.

Selama belajar di *Kweekschool* Muntilan, Kasimo banyak mempunyai teman. Dalam bergaul ia disenangi teman-temannya serta tidak membeda bedakan. Dengan siapa saja Kasimo mau bergaul. Di *Kweekschool* Muntilan ini pun Kasimo termasuk anak yang cerdas terutama dalam hal berhitung dan bahasa. Kecuali itu Kasimo juga mempunyai hobi membaca. Hobi membaca ini sebenarnya sudah nampak ketika Kasimo masih duduk di bangku Sekolah Bumiputra Klas Dua Gading. Pada waktu itu Kasimo sering meminjam buku-buku milik ayahnya. Buku yang paling disenangi adalah *Babad Ramayana*, sebuah buku yang berisi tentang epos kepahlawanan.

Pada waktu Kasimo belajar di *Kweekschool* Muntilan, hobi membaca tersebut makin berkembang apa lagi ketika Kasimo bertemu dengan Radius Sarjono yang banyak mempengaruhi sehingga ia senang membaca. Kesempatan untuk membaca pun jauh lebih banyak karena sudah menguasai bahasa Belanda. Ia selalu membaca majalah *Sworo Tomo* dan buku-buku yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan ekonomi dan sosial. Kecuali itu Kasimo juga sering membaca buku-buku sosiologi, agama dan sastra. Hobi membaca ini ternyata sangat berguna ketika Kasimo menjadi anggota klub diskusi di sekolahnya. Pada waktu itu setiap siswa kelas empat diharuskan mengikuti klub diskusi yang dipimpin oleh Suyud, guru bahasa Jawa. Setiap hari Minggu tertentu para anggota klub ini berkumpul dan salah seorang harus menyampaikan pidato atau pendapat yang mengomentari satu masalah yang dianggap paling menarik, sedangkan para anggota yang lain harus menyanggah.

Pada waktu berdiskusi inilah Kasimo kelihatan ketekunannya dalam membaca serta memberikan sumbangan yang besar terhadap kemampuannya untuk menyampaikan argumentasi.

Kasimo sukar dikalahkan dalam berdiskusi. Kekayaan pengetahuan umum serta bacaan yang luas sangat membantunya dalam mengutarakan pendapat maupun dalam menyanggah pendapat orang lain. Masih ditambah lagi dengan kepandaian-nya berbicara.

Teman-teman Kasimo selama belajar di Muntilan antara lain Sugiharjo. FS. Haryadi, RM. Yakob Sujadi, Jayus, Sugiyo, dan lain-lain. Sugiharjo kemudian menjadi bruder, sedangkan FS. Haryadi dan RM. Yakob Sujadi adalah teman-teman Kasimo yang pada tahun 1923 bersama sama mendirikan Partai Katholik dengan nama Pakempalan Politik Katholik Djawi, sedangkan Jayus dan Sugiyo merupakan teman-teman Kasimo yang kemudian menjadi Uskup Agung yang selanjutnya namanya menjadi Mgr. Joyoseputero SY dan Mgr. Sugijopranto Sy. Perkenalan dan persahabatan Kasimo dengan Jayus dan Sugiyo ini sangat penting artinya untuk proses emansipasi golongan Katholik di kemudian hari.

Pada tahun 1918 Kasimo meninggalkan *Kweekschool* Muntilan yang pada waktu itu baru duduk di kelas lima, jadi pada waktu itu Kasimo belum memperoleh ijazah. Hal ini disebabkan adanya peraturan bagi para siswa *Kweekschool* yang ingin melanjutkan sekolah dan tidak ingin menjadi guru di HIS boleh meninggalkan sekolah pada waktu duduk di kelas lima. Pelajaran di *Kweekschool* ini sebenarnya sudah dianggap lengkap pada akhir kelas lima dan kelas enam hanya mengajarkan praktek mengajar, ilmu mendidik serta bahasa Belanda saja. Pada saat itu dari *Kweekschool* para siswa dapat melanjutkan Sekolah Guru Tinggi atau *Hogere Inlandesche Kweekschool* (HIK) di Purworejo atau Sekolah Pertanian Menengah atau *Middelbare Landbouwschool* (MLS) di Bogor.⁵

Setelah meninggalkan *Kweekschool* Muntilan, Kasimo melanjutkan studinya ke MLS Bogor. MLS Bogor merupakan sekolah menengah kejuruan milik pemerintah. Lama pendidikan MLS ini tiga tahun dan para siswa setelah lulus dapat diangkat menjadi pegawai negeri pada perkebunan-perkebunan milik pemerintah. Pada saat itu pendidikan di MLS Bogor

dibagi menjadi dua yaitu jurusan pertanian dan jurusan kedokteran hewan. Kasimo memilih jurusan pertanian. Hal ini disebabkan Kasimo sejak kecil tertarik terhadap bidang pertanian. Kakeknya dari pihak ibu adalah seorang *bekel* yang mempunyai sawah luas, sehingga Kasimo tidak merasa asing lagi dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan pertanian.

Di Bogor Kasimo memusatkan pikirannya terhadap masalah pertanian, ekonomi, dan sosial. Kasimo di samping mengikuti pelajaran di MLS juga mengikuti kursus *Volkcreditwezen* (Perkreditan Rakyat), yang pada waktu itu berada di bawah *Binnenlands Bestuur* (Departemen Dalam Negeri). Kecuali itu Kasimo juga banyak belajar sendiri dengan meneliti pengetahuan dari buku-buku, majalah serta surat kabar. Pada pertengahan tahun 1921 Kasimo berhasil menyelesaikan studinya di MLS Bogor. Ia kemudian bekerja di Perkebunan Karet Merbuh Kabupaten Kendal sebagai *aspirant landbouw consulent* (mandor).

Sebagai mandor, Kasimo disenangi oleh buruh-buruhnya. Hubungan Kasimo dengan para buruh sangat akrab, tetapi justru karena keakraban inilah Kasimo tidak lama bekerja di perkebunan Merbuh. Pada suatu hari Kasimo menerima seorang buruh yang telah dipecat dari bagian lain. Ia tidak tahu tentang adanya instruksi yang melarang bagian tertentu menerima buruh yang telah dipecat oleh bagian lain. Seorang temannya bangsa Belanda memperingatkannya, tetapi tidak secara langsung, melainkan melalui seorang mandor Indonesia. Kasimo tidak dapat menerima perlakuan ini. Secara resmi, ia kedudukannya sama dengan *landbouw consulent* Belanda itu, mengapa orang tersebut tidak datang sendiri memberitahunya. Ia tetap mempekerjakan buruh yang bersangkutan.

Karena Kasimo mempekerjakan buruh tersebut, maka akibatnya Kasimo dikeluarkan dari perkebunan. Sekeluanya dari perkebunan karet, Kasimo menulis surat kepada kepala sekolah MLS Bogor menceritakan apa yang baru dialaminya. Kepala sekolah tersebut menyalahkan Kasimo, namun ia masih

diberi kesempatan jika mau yaitu menjadi guru sekolah pertanian di Tegalondo. Tawaran untuk menjadi guru diterima Kasimo dan kebetulan yang menjadi kepala sekolah di sekolah pertanian Tegalondo itu adalah Suwardi, temannya di MLS Bogor. Di sekolah pertanian rendah Tegalondo ini ia diserahkan jabatan sebagai wakil kepala sekolah dengan gaji f. 150 sebulan.⁶

Pada bulan Agustus 1923 beberapa bekas siswa *Kweek-school* Muntilan antara lain FS. Haryadi, Kasimo, RM. Yakob Sujadi mendirikan Pakempalan Politik Katholik Djawi (PPKD). Pengurusnya terdiri atas tiga orang, yaitu FS. Haryadi sebagai ketua, Kasimo sebagai sekretaris, dan RM. Yakob Sujadi sebagai bendahara. Pada tahun 1924 PPKD mengadakan rapat tahunan. Dalam rapat tahunan PPKD, Kasimo terpilih sebagai ketuanya. Sejak itu Kasimo dikenal sebagai ketua partai sampai tahun 1960.⁷

Tidak lama setelah Kasimo dan kawan-kawan mendirikan Pakempalan Politik Katholik Djawi (PPKD), ia mulai pacaran dengan Aloysia Mujirah. Hubungan Kasimo dengan Mujirah yang direstui oleh kedua orang tua mereka akhirnya ditingkatkan ke pernikahan. Pada hari Kamis 9 Juli 1925 kedua mudamudi itu melangsungkan pernikahan. Pasangan IY. Kasimo dan Aloysia Mujirah saling menerimakan sakramen di gereja Tambelan Yogyakarta dan pemberkatan nikah dilakukan oleh Pastur H. Van Driessche.

Sebagai orang Jawa, setelah menikah Kasimo mendapat nama tua, "Endrowahyono", tetapi ia lebih senang dipanggil Kasimo. Setelah menikah Kasimo memboyong isterinya ke Tegalondo sebab pada waktu itu Kasimo bekerja sebagai kepala Sekolah Pertanian Rendah Tegalondo menggantikan Suwardi. Kasimo di samping mencurahkan tenaganya di sekolah pertanian yang dipimpinnya itu, juga aktif di Pakempalan Politik Katholik Djawi (PPKD) yang didirikan bersama FS. Haryadi dan RM. Yakob Sujadi.

Pada Juli 1931 Kasimo diangkat sebagai anggota *Volksraad* (Dewan Rakyat). Sejak Kasimo diangkat menjadi anggota

Volksraad, keluarganya pindah ke Solo. Untuk sementara Kasimo masih mengajar di Sekolah Pertanian Rendah Tegalgondo, tetapi kemudian Kasimo bekerja di Jawatan Pertanian Surakarta. Sebagai anggota *Volksraad*, Kasimo harus hadir di Jakarta setiap kali sidang. Selama *Volksraad* bersidang, Kasimo pulang ke Solo setiap hari Sabtu, kemudian pada hari Senin kembali ke Jakarta. Selama di Jakarta Kasimo tinggal di Hotel Victoria, baru setelah hotel tersebut ditutup, ia pindah ke Hotel Nirmala. Kasimo sebagai anggota *Volksraad* memperoleh biaya penginapan sebesar f 10 sehari.⁸

Pada 8 Desember 1942 Jepang mengumumkan perang kepada Sekutu dengan ditandai penyerbuan Jepang atas Pelabuhan Angkatan Laut Amerika Serikat Pearl Harbour di Samudra Pasifik. Pada 8 Desember 1941 itu juga Gubernur Jenderal Hindia Belanda Mr. AWI Tjarda Van Starckenborq Stachouwer mengumumkan perang kepada Jepang. Hal ini disebabkan Hindia Belanda adalah jajahan Belanda dan Belanda sendiri merupakan anggota Sekutu. Ternyata dalam waktu yang singkat Jepang berhasil menguasai Indonesia. Pada 8 Maret 1942 Letnan Jenderal Ter Poorten bersama Gubernur Jenderal Tjarda Van Starckenborg Stachouwer menyerah tanpa syarat kepada Panglima Bala Tentara Jepang Letnan Jenderal Hitosyi Imamura di Kalijati. Sejak itu Indonesia dengan resmi dikuasai Jepang.

Berbeda dengan zaman Hindia Belanda di mana hanya terdapat satu pemerintahan sipil, zaman pendudukan pemerintahan militer Jepang terdapat tiga pemerintahan militer pendudukan yaitu:

- (1) Tentara Keenambelas memerintah Jawa dan Madura, berpusat di Batavia (kemudian dinamakan Jakarta),
- (2) Tentara Keduapuluh Lima, memerintah Sumatera, berpusat di Bukittinggi, dan
- (3) Armada Selatan Kedua memerintah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian Jaya, berpusat di Ujung Pandang.

Pemerintahan pada masing-masing wilayah itu dipimpin oleh kepala staf tentara/armada dengan sebutan *gunseikan* (kepala pemerintahan militer) dan kantornya disebut *gunseikanbu*. Karena kekurangan tenaga pemerintahan, maka Jepang terpaksa mengangkat orang-orang Indonesia pada jabatan-jabatan tinggi. Pada zaman Hindia Belanda belum pernah jabatan-jabatan tinggi itu dipercayakan kepada orang Indonesia.

Untuk dapat menarik rakyat, pihak Jepang menawarkan kerja sama pada tokoh-tokoh pergerakan nasional Indonesia. Untuk itu tokoh-tokoh Indonesia seperti Ir. Soekarno, Drs. Moh Hatta, Sutan Syahrir dan lain-lain dibebaskan dari penahanan Pemerintah Hindia Belanda. Para pemimpin itu memperhitungkan, bahwa kerja sama lebih menguntungkan perjuangan untuk kemerdekaan daripada perlawanan. Hal ini disebabkan pemerintahan Jepang di Indonesia pada waktu itu merupakan suatu pemerintahan militer pada zaman perang, apa lagi pihak Jepang dalam propagandanya tidak menentang cita-cita Indonesia merdeka.

Kerja sama itu dimulai pada akhir tahun 1942 dalam suatu komisi untuk menyelidiki adat-istiadat Indonesia. Komisi terdiri atas 13 orang Jepang beserta beberapa pemimpin nasional seperti Ir. Soekarno Drs. Moh Hatta, KH. Mas Mansyur, Ki Hadjar Dewantara, Sutarjo Kartohadikusumo, Abikusno Cokrosuyoso, Prof. Dr. Supomo, dan lain-lain. Empat orang nasionalis yang dianggap paling terkemuka yang dikenal dengan nama empat serangkai, yaitu Ir. Soekarno, Drs. Moh Hatta, KH. Mas Mansyur dan Ki Hadjar Dewantara mendapat kesempatan untuk membentuk PUTERA. Adapun tujuan Jepang membentuk Putera adalah untuk membujuk kaum nasionalis sekuler dan golongan intelektual agar menyerahkan tenaga dan pikirannya untuk mengabdikan kepada usaha perang Jepang. Putera dibentuk secara resmi pada 14 April 1943. Adapun yang memungkinkan kerja sama ini adalah kemenangan Jepang atas Belanda. Kemenangan ini menimbulkan keyakinan pada kaum nasionalis akan perlunya untuk

bekerjasama, dengan harapan bahwa mereka akan mendapatkan kesempatan untuk tetap memelihara pergerakan nasional.⁹

Pada zaman pendudukan Jepang ini Kasimo sebagai seorang tokoh Katholik Indonesia berada dalam keadaan yang tidak menguntungkan. Hal ini disebabkan pemerintahan militer Jepang beranggapan bahwa agama Kristen adalah agama "Barat", agama musuh, karena itu sikap mereka terhadap golongan Kristen sama sekali tidak menunjukkan toleransi. Selama pendudukan Jepang tidak hanya para misionaris Belanda saja yang diintenir. Ada juga imam-imam dan suster bangsa Indonesia yang ditahan. Seluruhnya ada 74 orang imam, 47 orang burder, dan 160 orang suster yang meninggal dunia pada masa pendudukan militer Jepang ini. Di antaranya terdapat seorang uskup dan 12 orang imam serta bruder yang ditembak mati di tempat. Kasimo sebagai orang yang pernah duduk sebagai anggota *Volksraad* sangat dicurigai sebagai musuh, sebab itu ketika seorang tahanan Jepang di dalam interogasinya menyebutkan namanya, Kasimo langsung ditahan oleh *kenpeitei*.

Kasimo ditahan oleh *kenpeitei* pada Jum'at pagi tahun 1942. Pada waktu itu Kasimo masih bekerja sebagai kepala Jawatan Pertanian di Surakarta. Seperti biasanya, setiap pagi Kasimo pergi ke gereja untuk menghadiri misa Kudus, tetapi berbeda dengan biasanya, pagi itu Kasimo mandi dulu, pada hal biasanya ia baru mandi setelah pulang dari gereja. Tidak lama setelah Kasimo berangkat ke gereja, pintu rumah Kasimo yang terletak di Jalan Kebalen No. 10 pintunya digedor orang. Ternyata yang menggedor pintu tersebut adalah enam orang *kenpeitei*. Kedatangan *kenpeitei* itu untuk mencari Kasimo. Karena Kasimo berada di gereja maka enam orang *keipeitei* tersebut dengan diantar Wartono (putra Kasimo) menyusul ke gereja. Selanjutnya Kasimo ditangkap dan dibawa naik mobil ke markas *keipeitei* di Timuran (sekarang Hotel Cakra). Di antara orang-orang yang ditangkap bersama Kasimo antara lain Sutadi, RM. Sarwoko Mangunkusumo serta beberapa pengusaha batik seperti Cokrosumarto, Wongsodinomo, Hamongseputro, dan Ong Siang Cun.

Di markas *keipeitei* Timuran Kasimo dan kawan-kawan ditahan sehari penuh tanpa mendapat makanan atau minum sedikit pun. Pada sore harinya, dengan tangan diborgol mereka dibawa ke penjara Gladag. Di penjara Gladag ini pun mereka juga tidak diberi makan. Mereka baru diberi ransum makanan pada pagi harinya. Makan mereka pada pagi hari jagung rebus dan air panas, sedangkan untuk makan siang dan malam berupa sedikit nasi dengan tempe dan sayur.

Meskipun status mereka sebenarnya tahanan politik, namun diperlakukan sebagai penjahat kriminal. Setiap kali mereka dipanggil ke markas *kenpeitei*, para tahanan harus berjalan kaki sepanjang Jalan Slamet Riyadi (dulu Jalan Purwosari) dengan tangan diborgol bersama-sama. Di samping itu selama berada di dalam tahanan mereka tidak diperbolehkan bertemu dengan keluarga atau teman-teman.

Kasimo ditangkap dan ditahan tanpa tuduhan yang jelas. Akhirnya Kasimo dibebaskan setelah ditahan selama 53 hari juga tanpa alasan yang jelas. Kasimo setelah dibebaskan dari tahanan bekerja lagi di kantor Jawatan Pertanian Surakarta. Perlu diketahui bahwa pada masa pendudukan militer Jepang, semua dinas gubernemen di Surakarta dialihkan menjadi dinas-dinas swapraja di bawah Sri Susuhunan Paku Buwono XI, dengan demikian Kasimo yang pada waktu itu menjabat sebagai *adjun landbouw consulent* termasuk pegawai tinggi Sri Susuhunan Paku Buwono XI. Sebagai pegawai tinggi, Kasimo berhak untuk memperoleh gelar tumenggung. Sebetulnya Sri Susuhunan Paku Buwono XI akan memberi gelar Tumenggung Anom kepada Kasimo, tetapi Pemerintah Militer Jepang melarangnya. Alasannya Kasimo merupakan orang yang menentang Jepang.

Tugas Kasimo sebagai *adjun landbouw consulent* antara lain memberikan bimbingan kepada para mantri tani atau demang tani. Pada waktu itu hampir semua mantri tani yang pernah sekolah di sekolah pertanian adalah bekas murid Kasimo di Tegalondo, bahkan di antara para kepala desa dan carik desa di daerah Surakarta banyak juga yang pernah menjadi

murid Kasimo, sebab itu pengaruh Kasimo di bidang pertanian di daerah Surakarta sangat besar pada waktu itu. Pada masa pendudukan militer Jepang ini Kasimo tidak aktif berpolitik tetapi mencurahkan seluruh tenaga dan waktunya untuk memajukan pertanian.¹⁰ Hal ini disebabkan pada zaman penjajahan Jepang ini semua organisasi politik kebangsaan dilarang berdiri dan kegiatan politik dihentikan sama sekali. Pelanggaran terhadap larangan Jepang berakibat siksaan dan hukuman berat lainnya sampai hukuman mati. Semua kegiatan bangsa Indonesia diarahkan untuk mendukung perang Jepang.

Memasuki tahun 1944 keadaan perang Jepang bertambah buruk, satu demi satu daerah pendudukan Jepang direbut oleh Sekutu, sehingga serangan mulai langsung diarahkan ke Negeri Jepang sendiri. Akhirnya pada 6 Agustus dan 9 Agustus 1945 Kota Hiroshima dan Nagasaki dibomatom oleh Amerika Serikat. Sebagai akibat dibomnya kedua kota itu, pada 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada Sekutu.

Meskipun menyerahnya Jepang kepada Sekutu itu dirahasiakan oleh Pemerintah Militer Jepang, gerakan rahasia kita mengetahui juga hal itu. Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu maka terjadilah kekosongan kekuasaan di Indonesia. Mengetahui hal ini, 17 Agustus 1945 pukul 10.00 di Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta, Ir. Soekarno dan Drs. Moh Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dengan adanya proklamasi kemerdekaan tersebut bangsa Indonesia bukan lagi sebagai bangsa yang dijajah tetapi sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat penuh baik ke dalam maupun ke luar.

Sehari sesudah Indonesia merdeka yaitu pada 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan sidang untuk pertama kalinya. Beberapa keputusan penting yang dihasilkan adalah:

- (1) Mensyahkan Undang-Undang Dasar yang telah dipersiapkan oleh *Dokuritzu Junbi Cosakai* (yang dikenal dengan nama Undang-Undang Dasar 1945),

- (2) Memilih Ir. Soekarno dan Drs. Moh Hatta masing-masing sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia, dan
- (3) Membentuk sebuah Komite Nasional untuk membantu presiden selama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum tersusun.

Pada 22 Agustus 1945 Presiden Soekarno mengumumkan dibentuknya tiga badan yaitu Komite Nasional Indonesia (KNI), Partai Nasional Indonesia (PNI), dan Badan Keamanan Rakyat (BKR). Komite Nasional Indonesia adalah badan yang akan berfungsi sebagai DPR sebelum diselenggarakan pemilihan umum. Komite Nasional Indonesia disusun dari tingkat pusat sampai ke daerah. Pada tingkat pusat disebut Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan pada tingkat daerah yang disusun sampai tingkat kewedanaan disebut Komite Nasional Daerah. Partai Nasional Indonesia yang dirancang sebagai partai negara yang tunggal tidak jadi dibentuk. Adapun BKR berfungsi sebagai penjaga keamanan umum pada masing-masing daerah.

Pada 2 September 1945 Presiden Soekarno telah melantik anggota kabinet yang dipimpin oleh presiden sendiri sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang Dasar.¹¹ Pada masa kemerdekaan ini Kasimo ditunjuk menjadi anggota KNIP. Pada saat itu ia masih tinggal di Surakarta dan menjabat kepala Jawatan Pertanian. Dengan diangkatnya Kasimo sebagai anggota KNIP, ia harus bolak-balik Surakarta - Jakarta apabila ada sidang.

Usaha Belanda untuk menjajah kembali Indonesia tidak pernah padam. Dengan segala macam cara dicarinya berbagai muslihat melemahkan Republik Indonesia untuk kemudian menjajahnya. Selanjutnya pada 14 -- 25 April 1946 dilaksanakan perundingan antara Pemerintah Belanda dengan Republik Indonesia yang bertempat di Hooge Veluwe. Ternyata perundingan ini tidak membawa hasil dan mengalami kemacetan, akibatnya hubungan Indonesia - Belanda untuk sementara terputus. Usaha untuk melanjutkan perundingan tidak membawa hasil. Baru pada 7 Oktober 1946 Lord Killearn berhasil

mempertemukan Indonesia -- Belanda kembali. Perundingan berlangsung di Jakarta, di rumah kediaman Konsul Jenderal Inggris. Utusan Indonesia dipimpin Perdana Menteri Sutan Syahrir dengan anggota delegasi terdiri atas Mr. Moh. Roem, Mr. Susanto Tirtoprojo dan Dr. AK. Gani, sedangkan Mr. Amir Syarifuddin, Dr. Sudarsono, dan Dr. J. Leimena diangkat sebagai anggota cadangan. Dalam perundingan ini Pemerintah Belanda diwakili oleh sebuah Komisi Jenderal yang dipimpin Prof. Dr. Ir. W. Schermerhorn dengan anggota Max Van Poll, F de Boerdan, Dr. H.J. Van Mook. Perundingan yang dilaksanakan di Jakarta ini menghasilkan persetujuan gencatan senjata.

Perundingan diteruskan di Linggajati pada 10 November 1946. Perundingan ini menghasilkan suatu persetujuan yang diparaf oleh kedua belah pihak pada 15 November 1946 yang selanjutnya ditandatangani pada 25 Maret 1947.¹² Meskipun Perjanjian Linggajati sudah ditandatangani, namun hubungan Indonesia -- Belanda tetap buruk. Hal ini disebabkan adanya salah tafsir mengenai beberapa pasal dari perundingan itu. Ancaman terjadinya perang menjadi makin nyata setelah Belanda secara terang-terangan melanggar gencatan senjata yang sebelumnya telah disetujui bersama. Pada waktu itulah Sutan Syahrir mengusulkan agar anggota delegasi Republik Indonesia diperkuat dengan Kasimo dari Partai Katholik Republik Indonesia (PKRI) dan Supeno dari Partai Sosialis. Adapun yang menjadi pertimbangannya sehingga dipilih yaitu di dalam delegasi Belanda duduk seorang anggota Partai Katholik Belanda (*Katholieke Volkspartij*).

Pada waktu itu *Katholieke Volkspartij* merupakan partai politik terbesar di Negeri Belanda dan sedang memegang pemerintahan di bawah Perdana Menteri Doktor LJM. Beel, sebab itu untuk memberi citra yang baik di luar negeri terutama di Negeri Belanda sendiri, Sutan Syahrir berpendapat bahwa di dalam delegasi RI perlu ada seorang Katholik.

Apa yang diusulkan Perdana Menteri Sutan Syahrir agar Kasimo diangkat sebagai anggota delegasi Republik Indonesia

diterima presiden. Pada bulan April 1947 secara resmi Kasimo menjadi anggota delegasi Republik Indonesia dalam perundingan dengan Pemerintah Belanda. Kasimo hanya tiga bulan menjadi anggota delegasi Republik Indonesia untuk perundingan dengan Pemerintah Belanda,¹³ tetapi pengangkatannya itu rupanya merupakan awal dari keterlibatannya secara langsung di dalam pemerintahan Republik Indonesia. Kecuali itu peristiwa tersebut merupakan awal dari fase integrasi golongan Katholik Indonesia ke dalam perjuangan dan struktur bangsa Indonesia. Sejak tahun 1947 sampai kabinet terakhir sebelum Demokrasi Terpimpin, Partai Katholik Republik Indonesia selalu mempunyai wakil di dalam kabinet.

Setelah Kabinet Syahrir III jatuh, pada 3 Juli 1947 dibentuk Kabinet Amir Syarifuddin. Dalam Kabinet Amir Syarifuddin ini, Kasimo diangkat sebagai menteri muda kemakmuran mewakili Partai Katholik Republik Indonesia, tetapi belum genap tiga minggu Kasimo menjabat sebagai menteri muda kemakmuran, Belanda melancarkan agresi militernya yang pertama 21 Juli 1947.

Pada agresi militer Belanda ini Presiden Soekarno beserta beberapa menteri dalam Kabinet Amir Syarifuddin termasuk Kasimo meninggalkan Yogyakarta menuju Desa Kandangan, lereng Gunung Wilis Jawa Timur. Hal ini disebabkan pada waktu itu Belanda datang dari arah barat menuju ke ibukota Republik Indonesia, tetapi kenyataannya Belanda tidak menyerbu Yogyakarta.

Agresi Militer Belanda I menimbulkan reaksi hebat dari dunia internasional. Pemerintah Hindia dan Australia mengajukan permintaan agar masalah Republik Indonesia segera dibicarakan dalam sidang Dewan Keamanan PBB. Pada 1 Agustus 1947 Dewan Keamanan PBB memerintahkan penghentian permusuhan kepada kedua belah pihak mulai 4 Agustus 1947. Setelah ada gencatan senjata tersebut Presiden Soekarno beserta beberapa menteri Kabinet Amir Syarifuddin kembali ke Yogyakarta.¹⁴

Sebagai akibat Persetujuan Renville, Kabinet Amir Syarifuddin jatuh, karena dianggap terlalu menguntungkan Belanda.

Persetujuan Renville tidak menjamin secara tegas kedudukan dan kelangsungan hidup Republik Indonesia. Posisi Republik Indonesia bertambah sulit, wilayah Republik Indonesia yang sudah sempit justru makin dikurangi, apa lagi dilancarkan blokade ekonomi yang dilakukan secara ketat oleh Belanda.

Pada 23 Januari 1948 Amir Syarifuddin menyerahkan kembali mandatnya kepada presiden. Selanjutnya Presiden Soekarno menunjuk Wakil Presiden Moh Hatta untuk membentuk kabinet baru. Dalam Kabinet Hatta ini, Kasimo diangkat sebagai menteri persediaan makanan rakyat. Pada masa pemerintahan Kabinet Hatta inilah Belanda melancarkan Agresi Militer II pada 19 Desember 1948. Agresi Militer Belanda II diawali dengan penerjunan pasukan payung di Pangkalan Udara Maguwo (sekarang Adi Sucipto) dan dengan gerak cepat berhasil menduduki ibukota Yogyakarta. Presiden Soekarno memutuskan untuk tetap tinggal di ibukota, meskipun ia tahu resikonya akan ditangkap oleh Belanda. Adapun alasannya ialah agar supaya presiden dan para pejabat tinggi negara mudah ditemui oleh Komisi Tiga Negara sehingga kegiatan diplomasi dapat berjalan terus. Sebagai akibat dari keputusan itu, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh Hatta beserta sejumlah menteri, Kepala Staf Angkatan Udara Komodor S. Suryadarma, dan lain-lain ditawan oleh Belanda dan diasingkan ke Bangka. Namun demikian kelangsungan hidup Pemerintah Republik Indonesia dapat dipelihara. Hal ini disebabkan sebelum tentara Belanda sampai ke istana, Presiden Soekarno masih sempat kirim radiogram berisi mandat kepada Menteri Kemakmuran Syafruddin Prawiranegara yang berada di Bukittinggi Sumatera untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI).^{1 5}

Pada waktu Belanda melancarkan Agresi Militer II 19 Desember 1948, Kasimo berada di Surakarta. Kasimo selama menjadi menteri tidak memboyong keluarganya ke Yogyakarta. Keluarga Kasimo tetap tinggal di Surakarta dan setiap hari Sabtu dan Minggu ia pulang ke Surakarta menengok keluarganya.

Pada 19 Desember 1948 (hari Minggu) itu Kasimo mengadakan pertemuan dengan para menteri yang kebetulan berada di Surakarta. Para menteri tersebut yaitu Menteri Dalam Negeri Dr. Sukiman Wiryosanjoyo, Menteri Kehakiman Mr. Susanto Tirtoprojo, Menteri Pemuda Supeno, dan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan Mayor Jenderal Suharjo. Pertemuan ini memutuskan untuk segera membentuk pemerintahan darurat. Sebagai ketua pemerintahan darurat adalah Dr. Sukiman Wiryosanjoyo dan Mr. Susanto Tirtoprojo sebagai wakil ketuanya. Menurut rencana mereka akan mengadakan pertemuan dengan Sri Susuhunan Paku Buwono XII dan KGPA. Mangkunegoro VIII pada hari Senin 20 Desember 1948, tetapi sebelum pertemuan dilaksanakan, Belanda sudah mendekati Surakarta. Mereka segera memutuskan untuk meninggalkan Surakarta pada hari itu juga untuk menghindari penangkapan Belanda. Di samping itu agar mereka dapat bergerak bebas serta melakukan tugas pemerintahan.

Pada 20 Desember 1948 pukul 18.00, rombongan para menteri itu meninggalkan Surakarta menuju ke arah timur untuk melakukan gerilya di daerah Gunung Lawu dan sekitarnya. Selama enam bulan lebih Kasimo beserta rombongannya bergerilya di daerah tersebut. Setiap kali mereka harus berpindah-pindah dari desa satu ke desa lain untuk menghindari penangkapan oleh Belanda.¹⁶

Dunia luar mengutuk Agresi Militer Belanda II terhadap Republik Indonesia, demikian juga Dewan Keamanan PBB mengeluarkan pernyataan agar Belanda segera menyelesaikan persengketaan dengan Indonesia pada meja perundingan dalam Konferensi Meja Bundar. Akhirnya pada 23 Agustus 1949 Konferensi Meja Bundar diselenggarakan di Den Haag Negeri Belanda dan hasil Konferensi Meja Bundar disetujui pada 21 November 1949. Salah satu hasil persetujuan yang disepakati dalam Konferensi Meja Bundar bahwa Indonesia menjadi negara serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS).

Selanjutnya pada 17 Desember 1949 Ir. Soekarno dilantik menjadi presiden RIS. Kemudian Presiden Soekarno menunjuk

Moh Hatta sebagai formatur kabinet. Dalam waktu singkat Moh Hatta berhasil membentuk Kabinet RIS yang pertama. Kabinet di bawah pimpinan Moh Hatta ini dilantik oleh Presiden Soekarno pada 20 Desember 1949. Pada 27 Desember 1949 Belanda mengakui Kedaulatan Republik Indonesia. Dengan demikian berakhirlah secara resmi Perang Kemerdekaan Indonesia.

Selama pemerintahan RIS, Kasimo tidak duduk sebagai menteri tetapi menjadi anggota DPR RIS sebagai wakil Partai Katholik. Di DPR RIS ini Kasimo terpilih menjadi Ketua Panitia Penyusunan Tata Tertib DPR RIS. Panitia ini bekerja selama kurang-lebih satu bulan dan bertugas untuk menyusun peraturan tata tertib bagi anggota parlemen.

Perlu diketahui bahwa bentuk negara serikat ini sebenarnya tidak sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, karena itu RIS tidak berumur lama hanya berumur kurang-lebih sembilan bulan. Pada 17 Agustus 1950 dengan resmi RIS dibubarkan dan dibentuk Negara Republik Indonesia yang berbentuk kesatuan.

Setelah kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar yang dipergunakan adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950). Undang-Undang ini sifatnya sementara, untuk kemudian akan dibentuk Undang-Undang Dasar yang tetap. Untuk membentuk undang-undang yang tetap ini dibentuk suatu badan yang disebut konstituante. Baik di dalam menyusun UUDS 1950 maupun di dalam Konstituante, Kasimo sangat giat menyumbangkan tenaga dan pikirannya.

Di dalam kabinet-kabinet Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kemudian terbentuk Partai Katholik selalu diikutsertakan, tetapi Kasimo selalu menunjuk orang lain sebagai menteri. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa di dalam Partai Katholik tidak hanya ada satu orang saja yang dapat menjadi menteri, melainkan ada juga tokoh-tokoh lain. Kasimo selama tidak menjabat sebagai menteri menjadi anggota DPR Sementara. Kemudian pada tahun 1950 Kasimo terpilih sebagai

ketua umum DPP Partai Katholik dalam kongres pertama Partai Katholik di Semarang. Jabatan sebagai ketua DPP Partai Katholik ini dipangkunya sampai tahun 1960. Pada tahun 1951 Kasimo diangkat sebagai kepala Jawatan Perkebunan Pusat, demikian pula setelah Konstituante terbentuk Kasimo dipercaya duduk sebagai anggota. Baru di dalam Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 - 25 Maret 1956) Kasimo kembali duduk sebagai menteri perekonomian. Pada tahun 1960 Kasimo diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS). Dalam DPAS ini ketua dirangkap oleh kepala negara. Jumlah anggotanya pun jauh lebih banyak, karena setiap parpol dan ormas mempunyai wakil di dalam Badan Penasihat tersebut, bahkan partai politik yang besar seperti Masyumi, NU, PNI, dan PKI mempunyai dua wakil.

Sementara itu, semasa Kasimo menjabat sebagai anggota DPAS, pada 30 September 1965 terjadi peristiwa berdarah yang kemudian dikenal dengan nama G 30 S/PKI. Untuk kedua kalinya dalam sejarah Indonesia merdeka, PKI mencoba merebut kekuasaan dengan kekerasan. PKI menculik dan membunuh delapan orang prajurit ABRI Pancasila di Jakarta dan dua orang prajurit ABRI Pancasila lainnya di Yogyakarta. G 30 S/PKI merebut kekuasaan negara dengan membentuk Dewan Revolusi yang diumumkan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara pada waktu itu. Pemberontakan G 30 S/PKI itu diawali dengan memfitnah golongan lain yang dianggap melawan, terutama pimpinan TNI AD.

Dengan adanya peristiwa tersebut, pada 10 Maret 1966 para pemimpin partai politik dipanggil Letnan Jenderal Soeharto di Kantor Kostrad. Kasimo juga datang mewakili Partai Katholik. Dalam pertemuan ini Letnan Jenderal Soeharto memberitahukan tentang akan dibubarkannya PKI. Keesokan harinya yaitu pada 11 Maret 1966 Presiden Soekarno menyerahkan 'Surat Perintah 11 Maret' kepada Letnan Jenderal Soeharto. Tidak lama kemudian PKI secara resmi dibubarkan dan dinyatakan sebagai partai terlarang.

Dengan terjadinya Pemberontakan G 30 S/PKI, lembaga-lembaga negara mengalami perubahan struktur, demikian pula dengan DPA. Selama dua tahun lebih seluruh kegiatan DPA boleh dikatakan terhenti sama sekali. Barulah pada tahun 1968 DPA digiatkan kembali berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1967 yang kemudian disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1978.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1967 ini, tugas DPA adalah memberi jawaban atas pertanyaan presiden serta mengajukan usul kepada kepala negara baik diminta maupun tidak. Pada 6 Februari 1968 DPA Orde Baru dilantik. Untuk angkatan pertama ini diangkat 17 orang. Kasimo yang sudah menjadi anggota DPA sejak tahun 1960, diangkat kembali menjadi anggota DPA Orde Baru. Jabatan sebagai anggota DPA ini dipegangnya terus sampai tahun 1973. Dalam DPA Orde Baru ini jabatan ketua tidak lagi dirangkap oleh kepala negara, melainkan dipilih oleh para anggota. Kecuali itu DPA bukan lagi lembaga perwakilan yang menampung partai politik. Susunan anggota meliputi unsur-unsur dari kehidupan masyarakat yang terdiri atas tokoh-tokoh politik, karya, daerah, dan nasional. Demikian juga pengangkatan para anggota lebih dititikberatkan pada kepribadian, pengalaman serta ahli, baik di bidang kenegaraan politik, kemasyarakatan maupun ke-karyaan.¹⁷

Bagi Kasimo, kegiatan politik memang tidak untuk mencari keuntungan pribadi. Baginya, kegiatan politik adalah suatu cara untuk mengabdikan rakyat, mengabdikan kepentingan umum. Tujuan terakhir dari seluruh perjuangan politik Kasimo hanya satu yaitu mengabdikan kepentingan umum. Kasimo percaya bahwa kegiatan politik merupakan suatu bentuk merasul, Melalui politik orang dapat berbuat banyak bagi kepentingan umum. Dalam hal ini Kasimo selalu berpegang teguh pada pepatah Latin, "*Salus populi suprema lex*", yang artinya kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi. Menurut Kasimo, pepatah latin itu berarti kepentingan rakyat harus didahulukan di atas segala-galanya.

Sebagai manusia, Kasimo boleh dikatakan sangat berhasil. Ia sangat dihormati terutama karena sifatnya yang jujur, tekun, sederhana, dan penuh pengabdian. Kasimo dapat bergaul dengan siapa saja dan sikapnya ramah, suka mengobrol. Kedudukannya sebagai sesepuh dan pengalamannya yang luas, menyebabkan Kasimo sering kali dimintai nasihat mengenai berbagai masalah, seperti mendirikan bank, memilih lapangan kerja yang cocok, pendidikan, dan lain-lain.

Pada awal tahun 1960an misalnya, Kasimo diminta untuk menjabat sebagai presiden direktur Bank Perkembangan Ekonomi yang berkedudukan di Jakarta. Ketika salah seorang temannya mendirikan PT. Asuransi Ramayana, Kasimo pun dimintai nasihat dan diminta untuk menjadi presiden direktur komisaris. Jabatan ini disandang sampai akhir hayatnya. Ketika pada tahun 1960 sekelompok kaum cendekiawan Katholik mendirikan yayasan dan Universitas Katholik Atmajaya, Kasimo diikutsertakan sebagai pendiri, bahkan diangkat sebagai pelindung Universitas Katholik Atmajaya, demikian juga ketika PK. Oyong dan Jakob Utomo akan mendirikan majalah *Intisari* pada tahun 1963 dan harian *Kompas* pada tahun 1965. Mereka pun datang pada Kasimo untuk minta nasihat dan petunjuk. Dalam tahun 1970 PT. Gramedia didirikan dan Kasimo diminta menjabat komisaris PT. Gramedia tersebut. Pada waktu Dr. AM. Kadarman Sy ingin mendirikan Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajemen (LPPM), kembali Kasimo diminta nasihatnya dan diminta menjadi pendiri lembaga tersebut bersama Dr. AM. Tambunan dan Prof. Dr. Bahder Johan

Kasimo dalam menghadapi hari tua dan sudah tidak aktif lagi di dalam masyarakat, melakukan apa saja yang masih dapat dilakukannya. Menjaga kesehatan, mengikuti warta berita lewat radio dan televisi, kadang kadang juga membaca majalah *Time* atau surat kabar *Kompas* serta *Sinar Harapan*. Meskipun keadaan fisiknya tidak mengizinkan, namun Kasimo masih sering diminta sumbangan pikirannya.

Pada Januari 1980 Kasimo menderita sakit dan dirawat di Rumah Sakit St. Carolus Jakarta. Menurut dokter yang me-

nanganinya, sakit yang diderita Kasimo adalah gangguan pada kelenjar prostaat. Pengobatan yang dijalannya terutama ditujukan untuk memudahkan buang air kecil serta mengurangi rasa sakit pada tulang-tulang.¹⁸ Dalam keadaan fisik yang demikian ini Kasimo *sumarah* kepada Tuhan Yang Mahaesa. Selagi masih dapat, ia mencurahkan tenaga untuk masyarakat.

4.2 II. Kasimo dan Pemikirannya

4.2.1 Awal Perkembangan Pemikiran IY. Kasimo

Di atas sudah dijelaskan, setelah Kasimo lulus Sekolah Klas Dua di Gading, kemudian melanjutkan studinya di *Kweekschool* Muntilan. Sekolah ini adalah sekolah Katholik dan merupakan sekolah swasta yang pertama di Indonesia yang diakui oleh pemerintah. Keadaan di Muntilan memang sangat berbeda bagi Kasimo. Kecuali itu kehidupan Kasimo di Muntilan ini paling menentukan. Agama Katholik yang baru dianutnya dan pendidikannya di *Kweekschool* memang membantu memperluas cakrawala hidupnya. Kecuali itu ada beberapa faktor lain yang berpengaruh besar terhadap perkembangan dan pembentukan kepribadiannya.

Salah satu faktor yang sangat penting yaitu pribadi Pastur Van Lith atau lebih akrab dengan sebutan Romo Van Lith. Pengaruh Romo Van Lith demikian meresap dalam jiwa Kasimo sehingga dapat dikatakan menjadi pedoman hidupnya sampai akhir hayatnya. Kasimo sangat terkesan akan pribadi Romo Van Lith. Kesan pertama ialah pribadi Romo Van Lith yang sangat menyelami jiwa orang Jawa. Apabila para *romo* (sebutan untuk pastur) yang datang dari Negeri Belanda terlalu sadar akan perintah Kristus, "**Pergilah dan ajarlah semua bangsa dan permandikanlah mereka atas nama Bapak, Putra dan Roh Kudus,**" dan ingin cepat-cepat mempermandikan orang, tidak demikianlah Romo Van Lith.

Romo Van Lith sangat sabar dan selalu berpegang pada prinsip bahwa apa yang beliau ajarkan harus benar-benar meresap ke dalam jiwa orang yang menerima pelajaran. Untuk dapat meresapi jiwa anak didiknya Romo Van Lith berusaha

keras untuk benar-benar menyelami jiwa orang Jawa. Ia mempelajari bahasa Jawa, bahasa Kawi, sejarah serta kebudayaan Jawa.

Kasimo juga sangat terkesan oleh kehalusan perangai Romo Van Lith yang sesuai sekali dengan sifat-sifat orang Jawa. Menghadapi anak-anak yang nakal, Romo Van Lith cukup melelehkan air mata. Mungkin karena Romo Van Lith menyelami jiwa Jawa yang lebih dapat menerima kritik yang disampaikan secara halus daripada dimaki-maki atau dibentak secara kasar. Banyak kawan-kawan Kasimo yang mengatakan bahwa mereka lebih baik dipukuli daripada melihat Romo Van Lith menangis. Banyak kata-kata Romo Van Lith yang masih diingat oleh Kasimo. Kata-kata Romo Van Lith yang sangat mengesankan hati Kasimo adalah, "*Ik Leef te midden der Javanen. Ik voel en denk met hun*", yang artinya, 'Saya hidup di tengah-tengah orang Jawa. Saya merasakan dan berpikir seperti mereka', dan "*De Javaan is een verschoppeling in zijn eigen land*", yang artinya, "Orang Jawa menjadi orang yang diperlakukan dengan hina di negerinya sendiri '.

Romo Van Lith sering mendapat sebutan "**Bapak orang Jawa**" dan "**Perintis misi Jawa**". Romo Van Lith sangat dihormati dan disayangi oleh siswa siswanya maupun bekas anak didiknya. Mereka sering menganggap beliau sebagai seorang rasul. Banyak di antara bekas siswanya yang kemudian memeluk sambil berjongkok jika mereka bertemu kembali dengan Romo Van Lith. Di luar lingkungan Katholik pun Romo Van Lith sangat dihormati dan disegani orang. Hidupnya yang sangat akrab dengan rakyat membuat Romo Van Lith diterima di semua lapisan masyarakat. Romo Van Lith diterima baik di antara para petani kecil maupun di kalangan bangsawan, bahkan kepercayaan orang kepadanya demikian besar sehingga dalam pemilihan anggota *Volksraad* tahun 1921, Romo Van Lith diusulkan sebagai calon anggota mewakili Sarekat Islam daerah Serang. Tidak hanya itu oleh Pemerintah Hindia Belanda Romo Van Lith pada tahun 1918 diangkat sebagai anggota komisi yang meninjau kembali dasar perundang-undangan Hindia

Belanda (*Commissie tot Herziening Van de Grondslagen der Staatsinrichting Van Nederlands Indie*).

Romo Van Lith datang di Indonesia pada tahun 1896. Setelah mempelajari bahasa Jawa, Romo Van Lith ditugaskan sebagai misionaris di Muntilan Magelang, Ambarawa dan Bedono. Romo Van Lith bercita-cita untuk mengembangkan misi melalui pendidikan dan pengajaran para remaja. Melalui *Kweekschool* di Muntilan serta sekolah-sekolah lain yang kemudian didirikannya, ia ingin membentuk watak dan mental anak-anak didiknya, sambil mencetak calon pemimpin yang cakap.

Kepada mereka diberikan pendidikan kristiani dan kelak jika mereka tersebar di seluruh Pulau Jawa, tinggal menanti tumbuh dan berkembangnya benih-benih yang disebarkannya. Adapun yang disebar dan ditanam adalah pekerjaan caritas yang dibutuhkan. Hal ini disebabkan orang-orang Jawa di negaranya sendiri hidup tertekan sebagai akibat dari sikap orang-orang Belanda dan Indo yang berlagak sebagai orang-orang berkuasa dan orang-orang kaya. Sekolah akan membuka jalan baginya untuk menyingkirkan tekanan itu.

Romo Van Lith menyadari perasaan bertindas yang dirasakan oleh orang-orang pribumi dan sangat memaklumi perasaan cinta kepada tanah air dari siswa-siswanya. Ia tidak mematikan perasaan itu namun menyalurkan dan membinanya sambil membuang sentimen yang negatif dari perasaan nasionalisme.

Romo Van Lith mengajarkan kepada siswa-siswanya untuk bekerja keras, hidup sederhana, mempunyai rasa kemanusiaan serta bersikap jujur dan berani dalam membela hak dan kepentingan rakyat kecil yang tertindas. Ia juga mengajarkan kepada anak didiknya agar mereka mempunyai sikap toleransi terhadap golongan lain yang bukan Katholik dengan "memberikan kepada yang bukan Kristen kebahagiaan dari iman kepercayaan dan permandian."¹⁹

Pada tahun 1922 Romo Van Lith menulis suatu artikel di majalah Belanda *Studien* dengan judul *De Politiek Van Nederlands ten Opzichte Van Nederlands Indie* (politik Negeri

Belanda terhadap Hindia Belanda). Dalam artikel ini Romo Van Lith tidak hanya memberikan pendapatnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan pembaruan ketatanegaraan di Hindia Belanda saja, melainkan juga pandangan mengenai perkembangan politik yang akan terjadi di negeri ini.

Dalam seruannya kepada orang-orang Indo -- Belanda misalnya, Romo Van Lith mengatakan, "Berlalulah sudah zaman penjajahan oleh bangsa kulit putih. Seorang kulit putih tidak akan bertahan untuk selama-lamanya menghadapi 100.000 orang Asia. Orang bermain dengan api jika dengan tinggi hati ingin menjajah orang Jawa, hanya dengan alasan karena ia seorang Jawa. Akuilah hak-hak golongan pribumi, jika kalian ingin agar hak-hakmu diakui. Di dalam gereja Kristus tidak ada orang Jahudi, orang Romawi, orang Junani, orang Belanda atau orang Jawa. Dan apa yang ada di dalam gereja sejak semula sudah merupakan hukum, kini harus dijadikan hukum pula di luar gereja. Orang Belanda, orang Indo, orang Jawa, mulai saat ini harus hidup rukun seperti saudara. Jika tidak maka dalam waktu dekat pasti akan terjadi perpecahan. Banyak orang di Negeri Belanda tidak melihat keadaan di Hindia Belanda seperti kenyataannya. Mereka mengira bahwa keadaan akan tetap berlangsung seperti sekarang, akan tetapi mereka salah. Apa yang berlangsung sekarang, tidak akan tetap demikian, yang lemah menjadi kuat dan yang kuat menjadi lemah. Apa yang sekarang berjalan akan berhenti dan apa yang sekarang tegak akan jatuh. Zaman baru dan dunia baru akan tiba dan siapa yang bijaksana akan mempersiapkan diri.

Mengenai kedudukan para misionaris Romo Van Lith dalam artikelnya mengatakan bahwa, "Semua orang kini tahu bahwa para misionaris ingin bertindak sebagai penengah, tetapi semua orang juga tahu bahwa jika akhirnya sampai terjadi perpecahan, para misionaris terpaksa harus mengadakan pilihan yaitu memihak pada golongan pribumi."

Artikel Romo Van Lith yang berjudul *De politeik Van Nederland ten opzichte Van Nederlands Indie* yang dimuat di majalah *Studien* ini sangat penting sekali artinya bagi Kasimo. Artikel tersebut memberikan pedoman kepada Kasimo dalam tahun-tahun pertama dari perjuangan politiknya, bahkan boleh dikatakan bahwa seluruh hidup Kasimo merupakan jawaban terhadap seruan Romo Van Lith tersebut.

Bagi Kasimo bagian yang terpenting dari artikel tersebut adalah ajakan kepada orang-orang Indonesia untuk berjuang bersama dia. Adapun ajakan Romo Van Lith tersebut adalah sebagai berikut, "Jika persetujuan kalian dapat memperkuat suara saya yang lemah ini maka saya yakin bahwa suara saya ini akan menggugah seluruh Negeri Belanda dan akan membawa apa yang kalian cita-citakan. Agar Pulau Jawa tumbuh dan menjadi Hindia Belanda dan seluruh Nusantara mengalami kembali masa jayanya, dan akhirnya dilahirkan kembali untuk menempati tempat terhormat di antara bangsa-bangsa lain."²⁰

Semangat dan ajaran Romo Van Lith ini merupakan faktor yang sangat menentukan dalam pembentukan watak dan kepribadian Kasimo. Sifat-sifat seperti kemanusiaan, kerakyatan, kesederhanaan, kejujuran dan keberanian serta toleransi terhadap golongan lain yang dimiliki oleh Kasimo sedikit banyak merupakan pencerminan dari ajaran yang diterimanya di Muntilan.

Di samping Romo Van Lith, di antara guru-gurunya di Muntilan, Romo H. Van Driessche Sy juga mengesankan Kasimo. Romo H. Van Driessche Sy menurut Kasimo agak kasar perangainya. Apabila mengajar cenderung ke arah dosa moral dan kadang-kadang menggunakan cambuk untuk menghukum anak, tetapi ia cukup menyelami jiwa Jawa juga.

Salah satu ajaran Romo Driessche Sy yang paling menarik bagi Kasimo yaitu tentang perintah keempat dari sepuluh perintah Tuhan. Menurut Romo Van Driessche Sy perintah Tuhan keempat yang berbunyi, "Hormatilah ayah ibumu",

hendaknya jangan diartikan secara sempit; yang meliputi ayah ibu di rumah saja. Ayah-ibu hendaknya diartikan sebagai "yang memberikan makan", sehingga arti perintah itu menjadi luas, dan meliputi juga hormat serta cinta kepada tanah air dan negara.

Faktor lain yang mempengaruhi cara hidup Kasimo adalah hidup di dalam asrama, baik kehidupan asrama itu sendiri maupun pergaulan dengan teman-teman seasrama, tidak kecil pengaruhnya terhadap Kasimo.

Di atas sudah dijelaskan bahwa Kasimo mempunyai hobi membaca. Untuk memenuhi hobi membacanya itu ia menyisihkan uang sakunya untuk berlangganan surat kabar dan majalah. Untuk urutan yang satu inilah Kasimo terkenal sangat galak. Ia seketika dapat berubah menjadi marah, jika surat kabar yang belum habis dibacanya dipinjam orang lain.

Pada waktu salah seorang gurunya di Bogor cuti ke Negeri Belanda, Kasimo minta dikirim buku-buku ilmu pengetahuan. Salah satu di antaranya yang sangat mengesankan yaitu buku karangan De Bruijn, berjudul *Sociologische Beginselen* (Prinsip-prinsip Sosiologi). Buku tersebut juga mengilhami sikap Kasimo, sebab di dalamnya dikatakan bahwa pemerintah yang terbaik sebaiknya berasal dari masyarakat itu sendiri. Hal ini disebabkan anggota masyarakat yang bersangkutan jauh lebih mengenal masyarakatnya sendiri daripada orang lain yang datang dari luar masyarakat itu sendiri.

Buku lain yang mempengaruhi kepribadian Kasimo adalah *De Katholieke Maatschappijleer* (Ajaran sosial katolik) karangan DR. Loievera. Dalam buku tersebut Dr. Liocera antara lain mengutip Ferrari di dalam bukunya IL. Popolo, di mana ia mengatakan bahwa setiap bangsa mempunyai hak untuk mencapai kemerdekaan dan persatuan. Buku tersebut memberikan landasan idiel kepada Kasimo untuk memperjuangkan kemajuan sosial ekonomi yang memang sudah lama menjadi minat dan perhatiannya.²¹

4.2.2 *Proses Perkembangan Pemikiran Ir. Kasimo*

Kasimo dilahirkan dalam zaman di mana rakyat mulai sadar dan bangkit melawan penjajah Belanda. Pada awal abad ke-20 itu berbagai organisasi pergerakan nasional didirikan. Mula-mula masih bersikap hati-hati dan dengan tujuan terselubung yaitu meningkatkan martabat rakyat, tetapi kemudian makin berani dan terang-terangan tujuan perjuangannya yaitu mencapai Indonesia merdeka.

Pada 20 Mei 1908 para mahasiswa Sekolah Dokter Jawa (Stovia) di Jakarta mendirikan suatu organisasi bernama Budi Utomo. Para mahasiswa pendiri Budi Utomo tersebut antara lain Sutomo, Suraji, Gunawan Mangunkusumo. Budi Utomo adalah organisasi modern yang pertama kali didirikan oleh bangsa Indonesia, jadi dapat dianggap sebagai organisasi pelopor, kemudian pada tahun 1911 golongan Islam mendirikan Sarekat Dagang Islam. Atas saran H. Oemar Said Tjokroaminoto, pada tahun 1912 Sarekat Dagang Islam diganti namanya menjadi Sarekat Islam. Selanjutnya pada tahun itu juga tiga serangkai yaitu Dr. EFE. Douwes Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo dan RM. Suwardi Suryaningrat mendirikan *Indischce Party*.

Pada tahun 1915 berdiri pula organisasi kepemudaan yang diberi nama Tri Koro Dharmo di Jakarta. Pendiriannya antara lain R. Satiman Wiryosanjoyo, Kadarman, dan Sunardi. Tri Koro Dharmo yang berarti tiga tujuan mulia (sakti, budi, dan bakti) bertujuan menimbulkan pertalian antara murid-murid bumiputera pada sekolah menengah dan perguruan kejuruan. menambah pengetahuan umum bagi para anggota dan membangkitkan serta mempertajam peranan buat segala bahasa dan budaya Indonesia. Dengan ini hendak dicapai tujuan untuk mencapai Jawa Raya dengan jalan memperkokoh rasa persatuan antara pemuda Jawa, Sunda, Madura, Bali dan Lombok. Untuk menghindari perasaan tidak puas dari sementara anggota yang dapat melemahkan organisasi, dalam kongresnya di Solo tahun 1918, Tri Koro Dharmo diubah menjadi *Jong Java*.

Sejalan dengan munculnya *Jong Java* pemuda-pemuda daerah lain juga membentuk organisasi pemuda seperti *Jong*

Sumatranen Bond, *Pasundan*, *Jong Minahasa*, *Jong Ambon*, *Jong Celebes*, *Jong Batak*, dan lain-lain. Pada dasarnya organisasi itu semua masih bersifat kedaerahan, tetapi semuanya mempunyai cita-cita ke arah kemajuan Indonesia, khususnya memajukan budaya dan daerah masing-masing.²²

Pada waktu Kasimo sekolah di *Kweekschool* Muntilan, iklim pergerakan nasional yang melanda kota-kota besar di Indonesia itu juga sudah mempengaruhi para siswa *Kweekschool* Muntilan. Banyak di antara bekas siswa *Kweekschool* Muntilan yang menjadi anggota Budi Utomo, kecuali itu juga banyak yang masuk menjadi anggota *Jong Java* serta organisasi-organisasi sekolah. Kasimo sendiri menjadi anggota *Jong Java*.

Kasimo kecuali aktif menjadi anggota *Jong Java*, juga menjadi anggota *Ceres* yaitu organisasi siswa-siswa MLS Bogor. Dalam organisasi *Ceres* ini Kasimo pernah menjadi ketuanya yaitu pada tahun 1920. Setiap satu tahun sekali *Ceres* dan *Renatus* (perkumpulan siswa-siswa Sekolah Kedokteran Hewan di Bogor) menyelenggarakan pesta bersama. Pada waktu Kasimo menjadi ketua *Ceres*, mengadakan pesta tahunan pada pesta ini merupakan pesta yang paling meriah. *Ceres* dan *Renatus* pada waktu itu mampu menyewa sebuah gedung pertemuan milik Belanda. Kecuali itu mereka juga berhasil mengundang para siswa *Stovia* dan *Rechtschool* dari Jakarta.

Kasimo selama tinggal di Bogor kecuali memperoleh pengalaman berorganisasi juga mendapat kesempatan untuk memperluas lingkungan pergaulan. Apabila di Muntilan lingkungan teman-temannya kebanyakan terdiri atas para pemuda katolik Jawa, di Bogor Kasimo berkenalan dengan para pemuda yang berasal dari seluruh Indonesia yang memeluk berbagai agama dan kepercayaan. Untuk pertama kalinya Kasimo berkenalan dengan agama-agama lain kecuali Islam dan Katolik yang telah dikenalnya. Di samping itu juga untuk pertama kalinya bagi Kasimo berkenalan dengan pemuda Sunda, Madura, Minahasa, Ambon, Indo, Arab, dan lain-lain. Di antara teman-temannya yang kemudian menjadi pemimpin nasional antara lain Mr. Susanto Tirtoprojo, Mr. Wiryono Projodikoro, dan Prof. Dr. Mr. Supomo.

Kasimo sebagai seorang Jawa yang beragama Katholik mempunyai keinginan untuk membentuk suatu partai Katholik, agar orang-orang Katholik Jawa dapat menyampaikan aspirasinya kepada Pemerintah Hindia Belanda. Untuk itu pada tahun 1922 Kasimo bersama FS. Haryadi dan RM. Yakob Sujadi membentuk sebuah panitia persiapan untuk mendirikan partai Katholik. Kasimo setiap kali mengadakan pertemuan dengan orang-orang Jawa di Yogyakarta dan sekitarnya selalu dimanfaatkan untuk mematangkan gagasan mendirikan partai Katholik, namun tanggapan masyarakat Katholik Jawa tidak mengembirakan. Mereka beranggapan tidak usah mendirikan partai Katholik, sebab sudah ada *Indische Katholieke Partij* (IKP). Apabila orang-orang Katholik Jawa ingin mendirikan partai politik, lebih baik menggabungkan diri dengan IKP. Demikianlah tanggapan masyarakat Katholik Jawa berhubung akan didirikannya partai Katholik.

Kasimo dan kawan-kawan menganggap bahwa IKP merupakan partai Katholiknya orang Belanda yang berada di Indonesia. Orang-orang Belanda yang berada di Indonesia ini meskipun beragama Katholik yang sama, namun mempunyai aspirasi serta alam pikiran yang jauh berbeda, namun demi memperoleh izin dari hirarki gereja, Kasimo dan kawan-kawan menggunakan taktik dengan membiarkan partai yang baru ini menjadi bagian dari IKP. Jika sebelum tahun 1918 bernama *Katholieke Vereeniging Voor Politieke Actie*, partai Katholik yang baru ini secara resmi bernama *Katholieke Vereeniging Voor Politiek Actie Afedeling Katholieke Javanen* (Perkumpulan Katholik Untuk Aksi Politik Bagian orang-orang Jawa). Sebagai organisasi yang beravilasi dengan IKP, partai yang didirikan oleh Kasimo dan kawan-kawan ini dengan mudah memperoleh persetujuan, baik hirarki gereja maupun dari IKP sendiri. Namun demikian ada masalah yang harus dihadapi Kasimo dan kawan-kawan yaitu bagaimana memperoleh pengakuan dari pemerintah Hindia Belanda. Pengakuan sebagai badan hukum bagi suatu organisasi pada waktu itu sangat penting artinya.

Sejak semula Kasimo dan kawan-kawan memisahkan diri dari IKP, sebab mereka ingin menunjukkan bahwa perjuangan golongan Katholik Jawa yang dicanangkan adalah suatu perjuangan dalam rangka emansipasi bangsa, yang bertujuan mencapai Indonesia merdeka, tetapi suasana zaman pada waktu itu adalah penjajahan. Tidak mungkin mencantumkan tujuan itu sebagai tujuan partai. Dalam hal ini Kasimo dan kawan-kawan menggunakan siasat. Tujuan partai dicantumkan secara terselubung dan hanya dirumuskan sebagai "ikut serta berusaha membangun dan memajukan negara". Dengan tujuan seperti itu, pemerintah Hindia Belanda pasti mengakui, karena itu dengan cepat partai yang baru itu memperoleh pengakuan dari pemerintah Hindia Belanda.

Di dalam lembaran negara, nama resmi yang tercantum adalah *Katholieke Vereeniging Voor Politieke Actie Afdeling Katholieke Javanen*, tetapi di antara orang-orang Jawa partai ini dikenal dengan nama Pakempalan Politik Katholik Djawi (PPKD). Organisasi ini secara resmi didirikan pada bulan Agustus 1923 di Yogyakarta. Pengurusnya terdiri atas tiga orang, yaitu FS. Haryadi sebagai ketua, IJ. Kasimo sebagai sekretaris, dan RM. Yakob Sujadi sebagai bendahara. Satu tahun kemudian yaitu pada tahun 1924 Kasimo diangkat sebagai ketuanya. Pedoman pokok PPKD yaitu (a) aksi PPKD terletak pada lapangan politik yaitu politik yang berdasarkan azas-azas Katholik, (b) aksi ini bersifat pada permulaan nasional Jawa, kemudian Nasional Indonesia, (c) haluan PPKD harus evolusioner artinya menurut jalan yang teratur, tetapi dengan tempo yang cepat.

Perlu diketahui bahwa sebenarnya keberadaan partai politik khususnya untuk golongan Katholik Jawa ini sudah lama dirasakan sebagai suatu kebutuhan oleh para bekas siswa *Kweekschool* Muntilan. Bukan saja karena waktu itu golongan lain di dalam masyarakat sudah menentukan sikap dasar mereka, tetapi juga orang-orang yang dididik dan dibesarkan oleh misi, mereka merasa mempunyai kewajiban untuk ikut mengembangkan misi. Mereka sadar bahwa untuk berhasilnya usaha misi, syarat terpenting yang harus dipenuhi adalah adanya

pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang menjamin kebebasan fundamental seperti kebebasan beragama, kebebasan menerima pendidikan kebebasan pelayanan di bidang sosial, kesehatan, dan lain-lain.

Sebenarnya yang mendorong Kasimo terjun dalam dunia politik adalah kesadarannya tentang perintah keempat dari Sepuluh Perintah Tuhan dalam arti yang luas. "Hormati ayah-ibumu" tidak hanya berarti hormat dan cinta kepada orang tua saja melainkan juga cinta dan hormat kepada nusa dan bangsa. Hal ini mengundang kewajiban antara lain kewajiban untuk bekerja bagi kesejahteraan dan keluhuran tanah air. Kewajiban untuk berjuang bagi tercapainya kehormatan dan keagungan tanah air. Semuanya itu mempunyai arti membebaskan tanah air dari belenggu penjajahan. Hal inilah yang mendorong Kasimo terjun dalam dunia politik dalam rangka keinginannya untuk ikut serta menyumbangkan tenaga membebaskan rakyat dari penindasan Belanda.

Sementara itu di Hindia Belanda (Indonesia) terjadi perkembangan baru dalam bidang politik. Untuk menjamin agar mayoritas di dalam Dewan Perwakilan Rakyat (*Volksraad*) tetap berada di tangan Belanda, Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan baru mengenai pemilihan anggota *Voksraad*. Menurut peraturan tersebut para pemilih dibagi menjadi tiga golongan, yaitu golongan Belanda, pribumi, dan timur asing. Apabila sebelumnya golongan penduduk Belanda dapat memilih seorang pribumi atau timur asing, sekarang tiap golongan penduduk hanya boleh memilih wakil dari golongannya sendiri. Dengan peraturan tersebut pemerintah kolonial ingin menjaga agar golongan Belanda jangan sampai kehilangan mayoritas melalui politik tersebut. Sistem federasi di dalam lingkungan IKP dihapuskan, IKP berdiri sendiri sebagai partai politik dengan cabang-cabangnya, demikian pula PPKD yang pada waktu itu namanya sudah diganti menjadi Perkumpulan Politik Katholik di Djawa berdiri sendiri sebagai partai politik. Dengan demikian 22 Februari 1925 tercapailah cita-cita Kasimo dan kawan-kawan untuk memiliki sebuah Partai Katholik bagi golongan Katholik Jawa. Pada tahun 1930

PPKD diubah namanya menjadi Persatuan Politik Katholik Indonesia (PPKI)..²³

Pada bulan Juli 1931 Kasimo diangkat menjadi anggota *Volksraad*. Keanggotaan *Volksraad* terdiri atas wakil-wakil golongan masyarakat yang jumlahnya sejak tahun 1927 diperbanyak dari 48 menjadi 60 orang. Dari jumlah ini, sejak tahun 1931 golongan pribumi diwakili oleh 30 orang sedangkan sisanya terdiri atas wakil-wakil golongan Belanda dan Timur Asing. Para anggota *Volksraad* sebagian terbesar dipilih secara tidak langsung melalui dewan perwakilan kotapraja, kabupaten, dan provinsi. Sebagian lainnya diangkat oleh gubernur jenderal.

Untuk masa sidang tahun 1931-1935, ada lima orang pribumi yang diangkat oleh gubernur jenderal. Mereka ini adalah Kasimo dari golongan Katholik, Wiwoho dari golongan Islam, Dr. Apituley dari *Moluks Politiek Verbond* (Perhimpunan Politik Maluku). Tuanku Mahmud dari Kesultanan Aceh, dan Dr. Arifin. Kasimo adalah orang Indonesia kedua yang mewakili golongan Katholik di dalam *Volksraad*. Sebelumnya, golongan Katholik di dalam *Volksraad* diwakili RM. Yakob Sujadi. Perlu diketahui bahwa sampai tahun 1924 golongan Katholik di dalam *Volksraad* selalu diwakili oleh orang-orang Belanda dari IKP. Baru pada tahun 1924 setelah PPKD didirikan, golongan Katholik pribumi mempunyai wakil di dalam *Volksraad*.

Volksraad ini membahas segala permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Hindia Belanda pada saat itu. Mulai dari masalah anggaran belanja, pendidikan dan agama sampai kepada masalah tenaga kerja, nasib petani kecil dan kemerdekaan bangsa, tetapi bagi Kasimo yang dianggap paling penting adalah sidang *Volksraad* yang membahas anggaran pendapatan dan belanja negara yang diselenggarakan dua kali satu tahun yaitu bulan Juni dan Desember.

Menurut Kasimo, keberadaan *Voksraad* adalah untuk mempersatukan pergerakan nasional Indonesia. Dengan mengumpulkan para pemimpin Indonesia dari berbagai daerah dan menghadapkan mereka kepada masalah-masalah bersama

terutama hubungan mereka dengan Belanda. *Voksraad* membantu mempersatukan dan mengintegrasikan pergerakan nasional di Indonesia, tetapi ada juga kelompok yang mengatakan bahwa keberadaan *Voksraad* justru memecah belah pergerakan nasional Indonesia menjadi kelompok non-koperasi dan koperasi.

Kelompok non-koperasi merupakan kelompok yang radikal bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia dengan kekuatan sendiri. Mereka menolak bekerja sama dengan kekuatan kolonial dan menganggap dewan perwakilan (*Voklsraad*) tidak ada manfaatnya. Sebaliknya kelompok koperasi merupakan kelompok moderat yang ingin mencapai kemerdekaan nasional melalui evolusi yaitu dengan jalan mengadakan perombakan-perombakan di bidang ketatanegaraan, politik, ekonomi dan sosial melalui cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum. Kasimo termasuk dalam kelompok pemimpin yang moderat. Sifat Kasimo yang moderat ini disebabkan pengaruh Romo Van Lith. Bekas gurunya ini mengajarkan kepada Kasimo tentang "cinta-kasih dan persaudaraan antara semua bangsa" dan berpendapat bahwa "perang itu adalah sapu dendam". Di samping itu, keadaan memang memaksanya untuk bersikap moderat. Kasimo memang tidak dapat berbuat lain kecuali menganut politik kerja sama dengan pemerintah. PPKI didirikan dengan restu hirarki gereja sehingga mau tidak mau harus mengikuti garis kebijaksanaan hirarki gereja, yang pada saat itu masih terdiri atas orang-orang Belanda dan bekerja sama dengan pemerintah kolonial.

Kasimo sebagai pemimpin PPKI mempunyai tugas yang cukup berat. Di satu pihak dia harus menjaga agar kebijaksanaan yang dilakukannya tidak bertentangan dengan garis kebijaksanaan hirarki gereja, tetapi di lain pihak ia harus menarik kepercayaan rakyat serta para pemimpin golongan-golongan lain yang bukan Katholik. Hal ini disebabkan pada masa itu di dalam masyarakat Indonesia masih banyak yang beranggapan bahwa agama Kristen adalah agama orang Eropa, agama orang Belanda yang menjajah Indonesia, karena itu orang Indonesia yang beragama Kristen, jiwa dan haknya sama dengan orang

Belanda. Mereka bukan orang Indonesia sejati. Kasimo ingin memperbaiki anggapan yang salah ini. Kasimo beserta kawan-kawannya mendirikan PPKI untuk membuktikan bahwa orang Kristen Indonesia adalah orang Indonesia sejati. Orang Indonesia yang berjiwa nasionalis dan yang dalam bidang kenegaraan mempunyai juga cita-cita yang sama seperti golongan lainnya.

Kasimo sebagai pemimpin partai kecil milik golongan minoritas yang mau tak mau harus bersifat moderat. Menurut Kasimo, cara terbaik untuk menarik kepercayaan golongan lain adalah ikut serta duduk di dalam dewan-dewan perwakilan rakyat yang ada, karena itu sebagian besar dari kegiatan partai lalu diserahkan untuk memperoleh kursi-kursi di dalam dewan perwakilan. Wakil-wakil PPKI duduk di dalam beberapa dewan kabupaten dan kotapraja. Kasimo sendiri duduk di dalam *Volksraad* selama masa sidang tahun 1931–1935, 1935–1939, dan 1939–1943.

Melalui dewan-dewan perwakilan itu wakil-wakil PPKI memperjuangkan kepentingan rakyat banyak. PPKI dalam memperjuangkan kepentingan rakyat banyak berdasarkan prinsip-prinsip Katholik dan sesuai dengan program kerja PPKI yang antara lain bertujuan memperjuangkan desentralisasi pemerintah, undang-undang sosial, peningkatan dan perluasan fasilitas pendidikan serta kesehatan rakyat.

Usaha lain yang dilakukan Kasimo untuk menarik golongan lain adalah bahwa baik di dalam *Volksraad* maupun dalam dewan-dewan perwakilan lainnya PPKI tidak duduk dalam satu fraksi dengan IKP. Dengan cara ini Kasimo ingin menunjukkan kepada para pemimpin dari golongan lain bahwa PPKI dan IKP meskipun sama-sama partai Katholik tetapi mempunyai pandangan dan pendapat yang sangat berbeda. Hal ini disebabkan IKP merupakan partainya orang-orang Katholik Belanda yang aspirasi dan alam pikirannya sangat berbeda dengan orang-orang Katholik Indonesia.²⁴

Pidato dan sambutan-sambutan Kasimo sebagai anggota *Volksraad* sejak semula sudah menunjukkan, "dengan jalan bagaimana pendiriannya dan di pihak mana ia berdiri". Pada

19 Juli 1932 Kasimo berpidato di *Volksraad* dan sangat mengemparkan sidang. Adapun pidatonya tersebut antara lain:

"Tuan ketua! dengan ini saya menyatakan bahwa suku-suku bangsa Indonesia yang berada di bawah kekuasaan Negeri Belanda, menurut kodratnya mempunyai hak serta kewajiban untuk membina eksistensinya sendiri sebagai bangsa, dan karenanya berhak memperjuangkan pengaturan negara sendiri sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan bangsa sesuai dengan kebutuhan nasional yaitu sesempurna mungkin. In berarti bahwa Negeri Belanda sebagai negara berbudaya yang terpanggil mempunyai kewajiban untuk ikut mengembangkan seluruh rakyat, dan khususnya sebagai negara penjajah, mempunyai kewajiban untuk membimbing dan merampungkan pendidikan rakyat, sehingga dengan demikian dapat dicapai kesejahteraan rakyat Indonesia, untuk kemudian dapat diberikan hak untuk mengatur dan akhirnya memerintah negara sendiri".

IKP menanggapi pidato Kasimo itu dengan sebuah manifesto politik yang dikeluarkan pada bulan September 1933. Dalam manifesto politik tersebut dikatakan bahwa kata-kata "memerintah negara sendiri" di dalam pernyataan Kasimo itu tidak sama dengan "kemerdekaan". Kata-kata tersebut sama sekali tidak dimaksudkan untuk membahas suatu bentuk pemerintahan tersebut, karena itu kebijaksanaan negara tidak perlu disesuaikan untuk tujuan "memerintah negara sendiri". Bentuk negara seperti apa nantinya ternyata akan paling sesuai bagi golongan pribumi untuk memerintah sendiri, menurut keyakinan IKP merupakan suatu pertanyaan yang tidak dapat dijawab pada waktu itu.

Perjuangan Kasimo di dalam *Volksraad* dalam tahun-tahun pertama memang ditujukan untuk meyakinkan para pemimpin golongan lain, bahwa golongan Katholik Indonesia adalah orang-orang nasionalis seperti golongan lain juga. Hal ini terutama dilakukan dengan jalan memperjuangkan kepentingan rakyat banyak khususnya dalam bidang pertanian dan pendidikan.

Di bidang pertanian, Kasimo selalu memperjuangkan agar setiap peraturan baru yang dikeluarkan tidak merugikan kepentingan para petani. Sebagai contoh pada tahun 1933 Pemerintah Hindia Belanda bermaksud mengeluarkan peraturan baru di bidang impor beras. Dengan adanya peraturan itu Kasimo mendesak agar diambil langkah-langkah yang melindungi harga beras dalam negeri, sehingga penghasilan para petani tidak dirugikan.

Pada waktu itu petani sering kali menjadi korban. Di daerah perkebunan tembakau misalnya, petani dilarang menanam kacang tanah karena penyakit tanaman ini dapat merusak tembakau. Apabila waktu menanam tanaman perkebunan tiba, petani harus segera mengosongkan tanahnya, meskipun tanamannya sendiri belum masa untuk dipanen, dengan demikian para petani kehilangan kemerdekaannya untuk mengolah tanahnya sendiri. Ditambah lagi harga sewa tanah pada saat itu sangat tidak adil. Kepentingan-kepentingan petani seperti inilah yang banyak diperjuangkan oleh Kasimo. Kecuali itu ia juga memperjuangkan peningkatan produksi hasil bumi rakyat yang dapat menambah penghasilan petani.

Di bidang pendidikan, Kasimo antara lain mengkritik sistem pendidikan yang berlaku pada saat itu. Tujuan pendidikan pada saat itu adalah untuk menghasilkan tenaga kerja pribumi bagi pemerintah dan perusahaan asing dengan upah rendah. Menurut Kasimo, sistem pendidikan seperti itu membuat orang terlalu menghargai jabatan pegawai negeri. Banyak anak golongan menengah misalnya yang telah menyelesaikan studinya, lebih suka bekerja pada pemerintah atau perusahaan Belanda dengan gaji lebih rendah daripada meneruskan usaha orang tuanya. Sistem pendidikan sekolah seharusnya lebih ditujukan untuk memberikan pendidikan pada para siswa, bukan untuk mempersiapkan mereka menjadi pegawai negeri atau perusahaan Belanda. Hal ini disebabkan pendidikan akan membantu perkembangan penduduk di bidang kebudayaan, sosial, dan ekonomi.

Sementara itu perkembangan politik di Indonesia semakin buruk. Sejak Gubernur Jenderal De Jonge memerintah di Hindia Belanda (Indonesia) organisasi pergerakan yang menganut azas non-koperasi mendapat tekanan dari pemerintah. Perasaan tidak puas dari masyarakat makin menghebat. Keinginan untuk merdeka makin menyala-nyala. Keinginan rakyat tersebut disampaikan para wakil mereka di dalam *Volksraad* dalam bentuk Petisi Sutarjo yang diajukan pada 15 Juli 1936. Usul Sutarjo Kartohadikusumo itu antara lain agar diadakan suatu musyawarah antara wakil-wakil Indonesia dengan utusan Kerajaan Belanda yang akan menetapkan masa depan Indonesia dengan harapan dalam jangka 10 tahun Indonesia sudah dapat berdiri sendiri meskipun tetap dalam lingkungan Kerajaan Belanda. Petisi Sutarjo ini ditandatangani oleh enam orang, yaitu Sutarjo Kartohadikusumo, Dr. Sam Ratulangi, Datuk Tumenggung, Alatas, Ko Kwat Tiong, dan Kasimo.

Kasimo ikut menandatangani Petisi Sutarjo karena dua hal, yaitu.

- (a) alasan prinsipil; Kasimo mengemukakan bahwa Petisi Sutarjo sangat sejalan dengan pernyataan yang diucapkan dalam sidang *Volksraad* 19 Juli 1932, karena itu sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Katholik tentang kenegaraan dan sosial.
- (b) alasan ekonomi; Kasimo menyatakan bahwa kerja sama ekonomi antara Hindia Belanda dan Negeri Belanda tidak akan memberikan keuntungan yang seimbang bagi kedua belah pihak, jika tidak diadakan perubahan di bidang susunan ketatanegaraan seperti yang diusulkan oleh Petisi Sutarjo; hal ini disebabkan kerja sama antara dua belah pihak yang tidak seimbang hanya akan menguntungkan pihak yang kuat dan merugikan pihak yang lemah saja.²⁵

Untuk mendukung Petisi Sutarjo dibentuk Sentral Komite Petisi Sutarjo yang dipimpin oleh Mr. Sartono, Kasimo juga duduk menjadi anggota dari Panitia tersebut. Dua tahun setelah diajukan, tanpa melalui perdebatan di parlemen Belanda, Petisi

Sutarjo ditolak oleh Pemerintah Belanda pada 16 November 1938, dengan alasan bangsa Indonesia belum matang untuk memikul tanggung jawab memerintah sendiri. Dengan demikian bangsa Indonesia telah dinilai belum mampu untuk berdiri sendiri apa lagi untuk mengurus suatu negara yang merdeka.

Kekecewaan atas penolakan tersebut mendorong terbentuknya suatu federasi pada 21 Mei 1939 yang diberi nama Gabungan Politik Indonesia (GAPI). Adapun organisasi politik yang tergabung di dalamnya yaitu Parindra, Gerindo, PSII, PII, Persatuan Minahasa, Pasundan, dan PPKI. GAPI menuntut kepada Pemerintah Belanda agar supaya di Indonesia terbentuk parlemen yang sebenarnya, bukan parlemen sandiwara seperti *Volksraad*. Tuntutan Indonesia berparlemen ini ternyata dalam Kongres Rakyat Indonesia diterima oleh organisasi-organisasi lain di luar GAPI. Adapun tujuan diadakan kongres Rakyat Indonesia adalah untuk lebih memperkuat persatuan bangsa dalam menghadapi kolonialisme imperialisme Belanda. Kongres Rakyat Indonesia ini berhasil mengeluarkan keputusan antara lain (a) disetujui untuk melancarkan tuntutan Indonesia berparlemen dan (b) disetujui bendera merah putih sebagai bendera persatuan dan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan.²⁶

Kerja sama serta kegiatan-kegiatan bersama di dalam GAPI kemudian lebih mendekatkan serta memperluas hubungan dengan para pemimpin nasional lainnya, Kasimo baik sekali hubungannya dengan Moh. Husni Thamrin dan Mr. Amir Syarifuddin.

Selama pendudukan Jepang, kegiatan semua partai politik terhenti, demikian pula dengan PPKI meskipun secara resmi PPKI tidak pernah dibubarkan. Kasimo sendiri selama masa pendudukan Jepang perhatiannya ditujukan untuk memajukan pertanian rakyat.

Setelah memiliki wewenang kekuasaan yang cukup besar Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia (KNIP) mengajukan usul kepada pemerintah. Usul tersebut adalah agar rakyat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mendirikan partai

politik dengan restriksi bahwa partai-partai politik itu memperkuat perjuangan kita dalam mempertahankan kemerdekaan dan menjamin keamanan masyarakat.

Usul Badan Pekerja KNIP tersebut ternyata disetujui oleh pemerintah, karena dinilai segala aliran atau paham yang ada dalam masyarakat dapat dipimpin ke jalan yang teratur. Perseetujuan pemerintah tentang pembentukan partai-partai politik ini dituangkan dalam "Maklumat Pemerintah" 3 November 1945 yang ditandatangani oleh wakil presiden.

Dengan adanya Maklumat Pemerintah tersebut di Negara Republik Indonesia berdiri partai-partai politik. Sebagian merupakan kelanjutan partai politik lama yang telah ada pada zaman penjajahan Belanda dan sebagian lagi merupakan partai politik yang baru didirikan. Partai-partai politik tadi di antaranya adalah Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi), Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Sosialis Indonesia (PSI), Partai Nasional Indonesia (PNI), dan lain-lain.

Dengan adanya maklumat pemerintah 3 November 1945, pada 15 November 1945 Kasimo mengundang para pemimpin PPKI yang ada di Surakarta untuk mengadakan rapat. Rapat tersebut memutuskan berdirinya kembali Persatuan Politik Katholik Indonesia (PPKI). Kecuali itu juga memutuskan untuk menyelenggarakan kongres partai pada 8 Desember 1945.

Kongres PPKI yang diselenggarakan di Surakarta pada 8 Desember 1945 memutuskan untuk mengganti nama Persatuan Politik Katholik Indonesia dengan Partai Katholik Republik Indonesia (PKRI). PKRI ini tetap berdasarkan azas Ketuhanan Yang Mahaesa serta azas azas Katholik. Adapun tujuan PKRI adalah untuk memajukan Republik Indonesia pada umumnya serta mempertahankan kedudukan dan kelangsungan hidupnya pada khususnya.

Kongres PPKI tersebut juga memutuskan untuk membentuk Angkatan Muda Katholik Republik Indonesia (AMKRI). Pembentukan AMKRI ini bertujuan antara lain untuk menampung golongan muda Katholik yang selama revolusi telah

membuktikan bahwa mereka sanggup berjuang dan berkorban bersama golongan lain Lebih dari itu AMKRI terutama didirikan sebagai jawaban kepada Pemerintah Republik Indonesia yang menyerukan agar rakyat mendirikan organisasi sebagai sarana perjuangan.

Di atas sudah dijelaskan bahwa pada bulan April 1947 Kasimo diangkat oleh Pemerintah Republik Indonesia menjadi anggota delegasi perundingan Republik Indonesia – Belanda. Ia menjadi anggota delegasi Republik Indonesia ini hanya tiga bulan. Secara resmi Kasimo memang tidak banyak berperan, tetapi secara diam-diam Kasimo berusaha memberikan sumbangan yaitu dengan mengadakan pertemuan rahasia dengan anggota delegasi Belanda Max Van Poll.

Pada saat itu sudah ada desas desus bahwa Belanda akan melancarkan agresi militer terhadap Republik Indonesia yang dianggapnya tidak menepati Persetujuan Linggajati. Kasimo berpendapat bahwa agresi militer hanya akan membawa banyak korban bagi kedua belah pihak Sebaliknya perselisihan antara Indonesia dan Belanda malahan akan dipertajam, karena itu agresi militer Belanda harus dicegah.

Untuk mencegah agar Belanda tidak melakukan agresinya, Kasimo akan mengadakan pertemuan rahasia dengan Max Van Poll, salah seorang anggota KVP yang mempunyai pengaruh sangat besar di Negeri Belanda. Agar bisa bertemu Max Van Poll, Kasimo mendatangi Pastur Doemen SY (provikaris = wakil uskup) yang berdomisili di Pastoran Katedral. Pastur Doemen SY menyanggupi permintaan Kasimo dan tidak lama kemudian memberitahukan bahwa Max Van Poll bersedia bertemu dengan Kasimo di bawah empat mata. Max Van Poll jugalah yang menentukan tempat pertemuannya.

Pertemuan Kasimo dengan Max Van Poll dilaksanakan di Hotel Daendels di Jalan Merdeka Timur. Dalam pertemuan tersebut Kasimo mengimbau kepada Max Van Poll agar berusaha sekuat tenaga mencegah dilancarkannya agresi militer terhadap Republik Indonesia tetapi Max Van Poll menanggapi permintaan Kasimo dengan sikap dingin, sehingga usahanya

untuk mencegah terjadinya agresi militer Belanda pun sia-sia. Agresi militer Belanda ini betul-betul dilaksanakan Belanda pada 21 Juli 1947.

Dalam usahanya untuk mengatasi kekurangan pangan dan sandang, Kasimo yang pada waktu itu menjabat sebagai menteri muda kemakmuran dalam Kabinet Amir Syarifuddin melahirkan "*Kasimo Plan*". *Kasimo Plan* adalah semacam rencana produksi tiga tahun (1948 -- 1950) yang sederhana, terutama ditujukan untuk menanggulangi keadaan darurat pada waktu itu. Hal ini disebabkan pada waktu itu hubungan dengan dunia luar putus sama sekali dan masalah pokok yang dihadapi adalah masalah pangan, karena itu pokok pemikiran dan perhatian dari *Kasimo Plan* adalah bagaimana swasembada dapat diwujudkan di bidang pangan.

Usaha swasembada pangan ini dilaksanakan melalui usaha intensifikasi dengan menggunakan bibit unggul maupun melalui usaha ekstensifikasi di daerah-daerah yang masih banyak lahan kosongnya. Kasimo menyarankan agar lahan-lahan kosong di Sumatera Timur seluas 281.271 hektar ditanami dengan jenis-jenis tanaman pangan. Untuk Pulau Jawa dilakukan usaha intensifikasi dengan menanam bibit padi unggul. Untuk itu di setiap desa harus diadakan kebun-kebun bibit untuk memberikan bibit yang baik bagi rakyat. Kasimo juga menyarankan penanaman jagung dan ketela guna menanggulangi masalah kekurangan pangan yang sangat mendesak pada waktu itu.

Produksi pangan harus ditingkatkan pula yaitu dengan meningkatkan produksi ternak. Hewan yang memegang peranan penting dalam produksi pangan harus dipelihara sebaik-baiknya. Untuk itu sensus hewan harus diadakan, demikian pula pengembangan peternakan harus diusahakan.

Kasimo Plan juga mencanangkan perbaikan di bidang, produksi sandang. Tetapi karena situasi pada waktu itu memang serba sulit, maka untuk tahap permulaan hanya ditentukan agar 10% dari kebutuhan sandang dapat dipenuhi sendiri. Adapun caranya antara lain ialah dengan menanam kapas, menenun, dan membatik. Jika ada daerah yang secara terbatas

ingin membangun industri, maka harus diutamakan dahulu industri sandang. Di samping itu industri alat-alat pertanian pun mendapat prioritas.²⁷

Karena Kasimo orang lapangan, maka meskipun sederhana, "*Kasimo Plan*" mengandung banyak petunjuk-petunjuk praktis dalam pelaksanaannya. *Kasimo Plan* dapat dilaksanakan meskipun hasilnya belum memuaskan dan yang jelas sudah dapat memenuhi kekurangan masalah sandang dan pangan rakyat.

Pada 7 sampai 12 Desember 1949 Kasimo memprakarsai penyelenggaraan Kongres Umat Katholik Seluruh Indonesia (KUKSI) di Yogyakarta. Salah satu keputusan penting dari KUKSI adalah peleburan dari semua Partai Katholik yang ada di Indonesia menjadi satu nama yakni "Partai Katholik". Organisasi-organisasi Katholik lainnya pun dipersatukan di dalam satu wadah di bawah satu bendera dan satu nama. Sejak itu terbentuklah Pemuda Katholik, Wanita Katholik, dan organisasi-organisasi Katholik lainnya. Keputusan pembentukan Partai Katholik dan organisasi Katholik lainnya dilakukan pada hari terakhir sidang yaitu pada 12 Desember 1949. Sejak itu pula di seluruh Indonesia hanya ada satu Partai Katholik. Sebetulnya memang terdapat kerja sama yang erat di antara partai-partai Katholik itu. Wakil-wakil golongan Katholik dalam Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) tidak hanya orang-orang PKRI melainkan juga orang-orang Katholik dari daerah lain seperti dari Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara, dan Lampung. Dengan berdirinya Partai Katholik, tercapailah cita-cita Kasimo untuk mendirikan Partai Katholik bagi seluruh Indonesia yang perjuangannya sejalan dengan perjuangan bangsa Indonesia.

Kecuali itu KUKSI juga memutuskan untuk mendukung perjuangan pemerintah agar Irian Barat dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia. Di dalam resolusi terakhir, kongres mengharapkan agar Ir. Soekarno diangkat menjadi presiden Republik Indonesia Serikat. Pada 4 Agustus 1950 diadakan Kongres I Partai Katholik di Semarang. Kongres I Partai Katholik ini tidak hanya meresmikan berdirinya Partai Katholik tetapi juga men-sahkan anggaran partai. Sebagai azas dan tujuan partai ditegas-

kan bahwa Partai Katholik berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa pada umumnya serta Pancasila pada khususnya dan bertindak menurut azas-azas Katholik. Adapun tujuannya adalah bekerja sekuat-kuatnya untuk mengembangkan kemajuan Republik Indonesia dan kesejahteraan rakyatnya. Dalam kongres tersebut Kasimo terpilih sebagai ketua umum Dewan Pimpinan Partai.²⁸

Sejak Lembaga Konstituante terbentuk, Kasimo duduk sebagai anggota mewakili Partai Katholik. Sebagai anggota Konstituante Kasimo sibuk mempersiapkan sidang Konstituante yang akan menyusun dan menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Pada 10 November 1956 Presiden Soekarno membuka sidang Konstituante. Ketika sidang membicarakan masalah dasar negara, terjadilah perdebatan-perdebatan. Partai-partai Islam dengan didukung oleh beberapa partai-partai kecil menuntut agar agama Islam dijadikan dasar Negara Republik Indonesia. Sebaliknya partai-partai non-Islam menghendaki Pancasila sebagai dasar negara. Jumlah golongan yang menghendaki Pancasila sebagai dasar negara lebih banyak jika dibandingkan golongan yang menghendaki agama Islam sebagai dasar negara. Mereka saling menghantam dan bersidang tanpa penyelesaian. Namun demikian baik golongan Islam maupun non-Islam tidak berhasil mencapai *quorum* dua pertiga seperti yang tercantum di dalam UUDS 1950, akibatnya sebagian besar anggota Konstituante tidak hadir dalam sidang. Para anggota beranggapan bahwa tidak ada artinya datang bersidang kalau hanya berdebat terus tanpa ada hasilnya.

Sementara itu pertentangan-pertentangan politik di dalam negeri makin memuncak. Berbagai organisasi dan gerakan-gerakan politik mulai bermunculan, antara lain Dewan Banteng, Dewan Gajah, Dewan Garuda, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera, Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) di Sulawesi, Darul Islam (DI) di Jawa Barat, Republik Maluku Selatan (RMS) di Maluku. Pada waktu itu persatuan dan kesatuan bangsa serta keselamatan negara kesatuan Republik Indonesia sangat terancam bahaya kehancuran. Tin-

dakan tokoh-tokoh politik makin jauh dari cita-cita perjuangan bangsa yang tercermin dalam UUD 1945. Dalam keadaan yang sangat mengkhawatirkan ini para politisi dalam Konstituante yang oleh rakyat sangat diharapkan menghasilkan Undang-Undang Dasar baru, tidak berhasil menjalankan tugasnya.

Untuk mengatasi keadaan pada 22 April 1959, di hadapan sidang Konstituante Presiden Soekarno menganjurkan supaya kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Untuk menentukan sikap terhadap anjuran Presiden Soekarno itu Konstituante mengadakan pemungutan suara tiga kali. Hasilnya lebih banyak suara setuju daripada yang menolak kembali UUD 1945, namun jumlah suara masih kurang untuk mencapai suatu keputusan, sehingga situasi tetap terkatung-katung. Akhirnya pada 2 Juni 1959 Konstituante mengadakan reses yang ternyata untuk selama-lamanya.

Kasimo sebagai wakil salah satu partai politik ingin mempertahankan sistem demokrasi Ia menyarankan agar sidang Konstituante membuka kesempatan untuk mengajukan amandemen pada Undang-Undang Dasar 1945. Kasimo menyarankan agar dalam penyusunan kembali alat-alat negara dari atas sampai ke bawah, diperhatikan faktor faktor rasa tanggung jawab, penempatan orang yang tepat, dan prestasi kerja. Golongan Islam juga menyarankan amandemen untuk menambahkan kata-kata, "**dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya**" pada Mukadimah UUD 1945. Akhirnya semua usul amandemen ditolak. Kasimo berjuang mati-matian untuk menyelamatkan Pancasila sebagai dasar negara. Bagi Kasimo, soal dasar negara merupakan soal mati-hidup. Hanya dengan Pancasila sebagai dasar negara, di Indonesia akan terjamin kebebasan beragama. Untuk menyelamatkan Pancasila sebagai dasar negara, bagi Partai Katholik tidak ada jalan lain kecuali menyarankan kepada Presiden Soekarno supaya dengan dekrit menetapkan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang tetap. Pengeluaran dekrit presiden memang dijamin oleh UUDS 1950 yaitu jika keadaan sangat memaksa.

Sementara itu golongan lain yang menyetujui Pancasila sebagai dasar negara sudah mulai bertindak. Pada 16 Juni 1959 Ketua Umum PNI Suwiryo mengirim surat kepada Presiden Soekarno yang isinya meminta kepada presiden untuk mendekritkan berlakunya kembali UUD 1945 dan membubarkan Konstituante.

Di samping itu TNI-AD juga mengambil langkah-langkah sendiri untuk mengamankan Pancasila. Menjelang kedatangan Presiden Soekarno dari luar negeri, kira-kira pukul 03.00, rumah Drs. Frans Seda didatangi oleh Rusli dari POM yang mengumpulkan tanda tangan dari partai-partai yang menyetujui dikeluarkannya dekrit presiden. Mereka kemudian menuju rumah Kasimo untuk minta tanda tangan persetujuan dari Partai Katholik. Kasimo menyetujui konsepsi TNI-AD dan tanpa ragu-ragu membubuhkan tanda tangannya pada daftar yang akan langsung diajukan kepada Presiden Soekarno se tibanya di tanah air.

Kegagalan merumuskan Undang-Undang Dasar baru dan ketidakmampuan menembus jalan buntu secara parlementer untuk kembali ke UUD 1945, mendorong presiden untuk menerima saran-saran tersebut di atas. Akhirnya Presiden Soekarno mengambil langkah-langkah inkonstitusional. Pada Minggu 5 Juli 1959 pukul 17.00, dalam suatu upacara resmi di Istana Merdeka, Presiden Soekarno mengumumkan Dekrit Presiden tentang pembubaran Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945. Dengan adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 diharapkan keadaan yang membahayakan keselamatan bangsa dan negara Republik Indonesia berangsur-angsur dapat diatasi.²⁹

Pada tahun 1959 Kasimo diangkat sebagai kepala Jawatan Perkebunan. Dengan diangkatnya Kasimo sebagai kepala Jawatan Perkebunan tersebut cita-citanya untuk memperbaiki kehidupan petani dapat dilaksanakan, yaitu untuk menghapuskan sistem sewa tanah. Kasimo sebagai kepala Jawatan Perkebunan harus memberikan perhatian kepada semua jenis perkebunan yang ada, tetapi karena pengalaman pribadinya di bidang perkebunan tebu, maka Kasimo memberikan perhatian khusus

pada bidang tersebut. Dalam masalah ini Kasimo banyak mengeluarkan peraturan-peraturan baru di bidang perkebunan tebu serta produksi gula. Di antaranya dikeluarkannya peraturan yang mengubah sistem sewa tanah menjadi sistem tebu rakyat. Sistem ini menganjurkan agar rakyat sendiri yang menanam tebu dan kemudian melalui koperasi menjual tebunya kepada pabrik gula berdasarkan suatu kontrak tahunan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Untuk mendorong pelaksanaannya Kasimo membentuk Yayasan Tebu Rakyat (Yatra).

Menurut Kasimo, sistem tebu rakyat sangat sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945, tetapi sebelum sistem tebu rakyat gagasan Kasimo disebarluaskan ke masyarakat, Kasimo diangkat menjadi Menteri Perekonomian di dalam Kabinet Burhanuddin Harahap (22 Agustus – 25 Maret 1956). Meskipun demikian usaha Kasimo tersebut sudah berhasil dilaksanakan di daerah Malang Selatan. Gagasan Kasimo tentang sistem tebu rakyat ini akhirnya dilaksanakan oleh pemerintah dengan nama Tebu Rakyat Intensifikasi (TR) yang ditandai ke luarnya Inpres Nomor 9 Tahun 1975. Atas dasar ini Kasimo kemudian mendapat sebutan "**Bapak Tebu Rakyat**".³⁰

Dalam pidatonya 21 Februari 1957 di Istana Negara, di muka para pemimpin partai politik dan masyarakat yang diikuti oleh jutaan rakyat Indonesia di luar istana. Presiden Soekarno menerangkan apa yang dimaksud dengan "konsepsi presiden". Konsepsi presiden pada pokoknya menganjurkan perubahan sistem pemerintahan yang berlaku pada waktu itu, untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi negara. Demokrasi parlementer harus diganti dengan demokrasi Indonesia yang berdasarkan azas gotong-royong. Untuk itu perlu dibentuk kabinet "gotong-royong" yaitu semua partai dan golongan yang mempunyai suara minimal di DPR harus diikutsertakan, termasuk PKI. Kabinet Gotong Royong ini disebut juga kabinet kaki empat sebab setiap kabinet yang dibentuk harus berintikan partai-partai politik yang ke luar dari pemilihan umum sebagai "empat besar", yaitu Masyumi, NU, PNI, dan PKI. Di samping itu juga disarankan untuk membentuk "Dewan Nasional" yang anggotanya terdiri atas wakil-

wakil golongan fungsional di masyarakat yang diangkat presiden dan diketuai oleh presiden sendiri. Adapun tugas Dewan Nasional ini adalah memberi nasihat kepada pemerintah baik diminta maupun tidak.

Sesudah penjelasan Presiden Soeharto itu, para pemimpin partai politik dan organisasi masyarakat diberi waktu satu minggu untuk menyatakan setuju atau tidak setuju dengan konsepsi itu. Pada 28 Oktober 1957 para pemimpin partai politik dan organisasi masyarakat menghadap presiden lagi untuk menyampaikan jawabannya. Dari sekian banyak partai hanya enam yang menyatakan persetujuannya terhadap "Konsepsi Presiden", yaitu PKI, Partai murba, PNI, PRN, Baperki, dan Persatuan Pegawai-pegawai Kepolisian Negara. Masyumi dan Partai Katholik menyatakan dengan tegas tidak setuju, sedangkan NU, PSII, Parkindo, IPKI, dan PSI menolaknya dengan kata-kata yang halus dan secara diplomasi.³¹

Kasimo menolak Konsepsi Presiden tersebut dengan alasan bahwa menurut pengalaman sejarah, keikutsertaan orang-orang komunis di dalam kabinet di negara-negara Eropa bagian timur, lama-kelamaan menyebabkan negara itu menjadi komunis, karena itu Kasimo menolak jika di dalam Kabinet dimasukkan unsur komunis. Bagi Kasimo, sikapnya terhadap PKI memang sudah tidak dapat ditawar-tawar lagi. Sebagai bekas anak didik Romo Van Lith, Kasimo mempunyai sikap toleransi yang cukup besar terhadap golongan lain yang bukan Katholik, kecuali terhadap komunis. Hal ini disebabkan di dalam negara komunis tidak akan ada kebebasan beragama, pada hal salah satu tujuan dari perjuangan politiknya adalah meneruskan cita-cita Romo Van Lith yaitu agar Negara Indonesia yang baru nanti memberikan kebebasan dan ruang lingkup kepada sektor agama. Tidak boleh anti agama tertentu untuk mengarahkan ke suatu agama tertentu pula.

Di kalangan politik, sikap Kasimo yang dengan tegas menolak Konsepsi Presiden menimbulkan banyak rasa kagum. Pemimpin sebuah partai golongan minoritas, partai kecil yang tidak mempunyai arti berani menambil resiko yang begitu

besar demi prinsip. Dengan demikian wibawa Partai Katholik di masyarakat akan naik.³²

Mengenai masalah Irian Barat, Kasimo berpendirian bahwa Irian Barat merupakan bagian dari wilayah Republik Indonesia. Kecuali itu rakyat Irian Barat pun mempunyai hak sepenuhnya untuk menikmati kemerdekaan, karena itu sudah sejak Kongres Umat Katholik seluruh Indonesia (KUKSI) yang pertama tahun 1949, Kasimo menganjurkan agar golongan Katholik mendukung perjuangan pemerintah untuk memasukkan Irian Barat dalam wilayah RI.

Perjuangan pemerintah sejauh ini nampak kurang berhasil. Pemerintah Belanda tetap ingin menguasai Irian Barat. Pemerintah Republik Indonesia pun mulai hilang kesabarannya. Pemerintah memutuskan untuk menempuh jalan lain. Aksi-aksi pembebasan Irian Barat dilancarkan di seluruh Nusantara. Semua perusahaan milik Belanda diambil alih oleh pemerintah. Suasana menjadi panas dan hubungan kedua negara menjadi tegang.

Kasimo sangat cemas dan sadar akan akibat yang akan menimpa rakyat jika terjadi peperangan antara Belanda dan Indonesia. Untuk itu Kasimo berusaha sekuat tenaga untuk mencegah terjadinya peperangan meskipun pada saat itu ia tidak duduk lagi di dalam pemerintahan. Kasimo berusaha membujuk KVP untuk mengubah pandangan Pemerintah Belanda tentang Irian Barat. KVP pada waktu itu merupakan partai politik terbesar di Negara Belanda dan menguasai sepertiga dari jumlah kursi di parlemen, karena itu pengaruhnya sangat besar dan sikapnya mengenai Irian Barat sangat menentukan.

Kasimo selaku ketua umum Partai Katholik kemudian menulis surat terbuka yang ditujukan kepada KVP. Di dalam surat terbuka itu Kasimo menjelaskan bahwa meskipun rakyat Indonesia dan rakyat Belanda berada di ambang peperangan, namun Partai Katholik Indonesia merasa berhak berbicara dengan KVP dan mengharap agar suaranya didengarkan oleh KVP.

Inilah sebagian isi surat Kasimo yang ditujukan kepada KVP. ". . . Sebab dalam segala hal yang dengan pedih memisahkan kita, masih ada sesuatu yang lebih berharga yang mengikat

kita. Kita adalah sama-sama anggota tubuh yang satu. Kita melihat bahwa suatu ideologi tanpa Tuhan seringkali masih dapat merupakan jembatan dalam pertentangan-pertentangan yang tajam. Tidakkah kita, umat Katholik merasa malu jika di antara kita tidak ada lagi tempat untuk bertukar pendapat? Pertimbangan-pertimbangan itulah yang memaksa kami berbicara betapa juga sulitnya keadaan.

Bahwa peristiwa minggu-minggu terakhir merupakan titik puncak politik yang bertahun-tahun dijalankan oleh Pemerintah Belanda, yaitu politik yang tidak mau tahu untuk merundingkan masalah Irian Barat. Politik itu sangat melukai perasaan nasional rakyat kami dan mempunyai akibat-akibat banyak, yang kami sesalkan dalam kehidupan bangsa kami.

Apa yang pada tahun ini terutama sekali menyakitkan hati kami adalah sikap partai kalian sendiri. Di Negeri Belanda kalian mempunyai kekuasaan politik yang besar. Kami di Indonesia hanya mewakili suatu golongan kecil saja dan tugas kami sudah terpenuhi dengan baik jika kami dapat mendengarkan dengan jelas suara golongan kecil ini. Kami tidak mempunyai kekuasaan politik yang riil. Kalian memilikinya, karena itu menurut pendapat kami, lebih besar lagi tanggung jawab kalian. Di dalam gelanggang politik kalian mewakili suara sepertiga penduduk Belanda. Di negara kalian, tidaklah mungkin pemerintah mengambil suatu keputusan politik yang penting tanpa mengikutsertakan kalian, karena itu, menurut pendapat kami, tidaklah kurang layak jika kami berpendirian bahwa kalian pun bertanggungjawab atas politik yang dijalankan oleh pemerintah Belanda terhadap Indonesia . . .”.

Surat terbuka itu diterima pengurus KVP pada pertengahan bulan Juni 1960. Setelah isinya disiarkan, kemudian timbul berbagai reaksi di kalangan umat Katholik Belanda. Prof. Mr. Romme, seorang tokoh Katholik yang menjadi ketua fraksi KVP, di dalam parlemen Belanda menuduh Partai Katholik Indonesia di bawah pimpinan Kasimo melakukan fitnahan dan politik pemerasan.

Surat terbuka Kasimo tersebut juga mengandung banyak reaksi yang memihak Indonesia. Berbagai surat kabar menulis agar suara Partai Katholik Indonesia seperti dicetuskan oleh Kasimo di dalam surat terbukanya, didengarkan dengan sungguh-sungguh. Kecuali itu agar KVP meninjau kembali kebijaksananya terhadap Irian Barat, bahkan ada yang menganjurkan agar masalah Irian Barat itu dijadikan masalah hati nurani bagi orang Katholik. Suara untuk mendengarkan pendapat Partai Katholik itu antara lain dari Prof. Duynstee dari Universitas Katholik Nijmegen.

Kasimo menanggapi tuduhan Prof. Mr. Romme dengan sebuah tanggapan tertulis. Dalam tanggapannya itu Kasimo membela dan mempertahankan pendirian Partai Katholik. Kasimo mengatakan bahwa Partai Katholik Indonesia merasa berterima kasih, sebab surat terbuka itu kemudian menjadi pusat perhatian kalangan Katholik Negeri Belanda, bahkan sudah sedemikian jauh sehingga ada yang berpendapat bahwa masalah Irian Barat harus menjadi masalah hati nurani. Apabila hal ini betul-betul dilaksanakan dengan kesungguhan hati, Kasimo percaya bahwa hasil akhirnya akan menggembirakan.³³

Sampai awal bulan Agustus 1960 masalah Irian Barat belum berhasil juga diselesaikan. Akhirnya pada 17 Agustus 1960 Pemerintah Republik Indonesia secara sepihak memutuskan hubungan diplomatik dengan Kerajaan Belanda.

Sidang Majelis Umum PBB pada tahun 1961 kembali memperdebatkan masalah Irian Barat. Sekretaris Jenderal PBB U Thant meminta kepada seorang diplomat Amerika Serikat Ellsworth Bunker untuk membantu dengan jalan mengajukan usul penyelesaian masalah Irian Barat kepada kedua belah pihak yang bersengketa. Pokok-pokok usul Bunker adalah agar Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Republik Indonesia dengan perantaraan PBB dalam jangka waktu dua tahun.

Pemerintah Republik Indonesia pada prinsipnya menyetujui usul itu dengan catatan jangka waktu diperpendek. Pemerintah Belanda membalas usul Bunker itu dengan menyatakan

akan melepaskan Irian Barat untuk ditempatkan di bawah perwalian PBB untuk kemudian membentuk "Negara Papua". Sikap Pemerintah Belanda yang demikian merupakan pukulan langsung terhadap kedaulatan Republik Indonesia, karena itu Pemerintah Republik Indonesia menganggap bahwa sudah cukup sabar terhadap Belanda selama sebelas tahun dalam persoalan Irian Barat dan sekarang sudah saatnya untuk menempuh cara yang drastis yaitu dengan menggunakan kekuatan fisik. Dalam rangka rencana itu, pada bulan Desember 1961 pemerintah mengirimkan misi ke luar negeri (Uni Soviet) untuk mencari bantuan senjata dan perlengkapan perang. Misi tersebut dipimpin oleh Menteri Keamanan Nasional/KSAD Jenderal AH. Nasution.

Menghadapi persiapan Indonesia, pihak Belanda mengajukan protes kepada PBB dengan menuduh Indonesia melakukan agresi. Selanjutnya Belanda memperkuat angkatan perangnya di Irian Barat, baik personal maupun materialnya, bahkan kapal induk Karel Doorman dikirim ke Irian Barat untuk menggetarkan hati kita. Untuk lebih meningkatkan perjuangan, Dewan Pertahanan Nasional merumuskan Tri Komando Rakyat (Tri-kora) yang diucapkan Presiden Soekarno pada 19 Desember 1961 di Yogyakarta. Adapun bunyi Tri Komando Rakyat itu sebagai berikut :

- (1) Gagalakan pembentukan "Negara Papua" bikinan Belanda kolonial
- (2) Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat
- (3) Bersiaplah untuk mobilisasi umum

Akhirnya dengan perjuangan yang gigih, pada 15 Agustus 1962 ditandatangani perjanjian New York yang berdasarkan pada prinsip "Bunker Plant". Dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut, sengketa antara Indonesia - Belanda berakhir. Irian Barat diserahkan kepada PBB yang kemudian membentuk *United Nations Temporary Executive Authority* (UNTEA) untuk mengurus pemerintahan sementara. Pada 1 Mei 1963 Irian Barat secara resmi menjadi bagian dari Republik Indonesia.³⁴ Dengan demikian utuhlah sudah wilayah nasional Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Pada tahun 1960 Partai Katholik mengadakan kongres di Yogyakarta. Dalam kongres Partai Katholik di Yogyakarta ini Kasimo terpilih lagi sebagai ketua umum DPP Partai Katholik, tetapi Kasimo yang telah menjabat sebagai ketua umum selama 36 tahun, merasa bahwa waktunya memang benar-benar telah tiba baginya untuk mengundurkan diri. Setelah beberapa bulan menduduki jabatan tersebut, Kasimo mengundurkan diri sebagai ketua umum DPP Partai Katholik dan menyerahkan tugas tersebut kepada wakilnya yaitu Drs. Frans Seda. Meskipun demikian Kasimo masih tetap aktif dalam DPP Partai Katholik sebagai wakil ketua umum. Sementara itu menjelang akhir tahun 1960an, nampak adanya keresahan di kalangan masyarakat. Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pemerintah memang menguntungkan rakyat, tetapi kebijaksanaan yang diambil alih oleh pemerintah seperti kebijaksanaan tentang Bimas Gotong royong, penanaman modal asing, transfer devisa, serta kebijaksanaan impor, memberikan peluang besar untuk melakukan penyelewengan. Rakyat yang mula-mula mempunyai harapan besar, mulai merasa kecewa melihat penyalahgunaan wewenang serta korupsi yang merajalela. Gerakan-gerakan anti korupsi seperti "Mahasiswa Menggugat" dan "Angkatan Pelajar Indonesia 70" dicetuskan oleh para mahasiswa dan pelajar.

Dengan adanya keresahan masyarakat itu, pemerintah segera mengambil tindakan tegas. Pemerintah selalu menekankan bahwa akan dilakukan pemberantasan korupsi secara fundamental. Untuk itu pada 17 Desember 1967 dibentuk Tim Pemberantasan Korupsi (TPK). Untuk membuktikan kesungguhan pemerintah, sidang kabinet 31 Januari 1970 memutuskan pembentukan "Komisi Empat".

Di dalam Komisi Empat ini Kasimo diangkat sebagai salah satu anggotanya, sedangkan anggota lainnya adalah Wilopo, H. Anwar Cokroaminoto, dan Prof. Ir. Yohannes. Adapun ketuanya adalah Wilopo, dan Moh. Hatta sebagai penasihatnya. Komisi Empat bertugas meneliti dan menilai kebijaksanaan serta hasil-hasil pemberantasan korupsi yang selama ini telah dilaksanakan oleh pemerintah. Di samping itu Komisi Empat juga

harus memberikan pertimbangan dan saran-saran mengenai kebijaksanaan yang masih perlu diambil untuk memberantas korupsi secara fundamental.

Pembentukan Komisi Empat pada umumnya disambut dengan gembira oleh masyarakat. Hal ini disebabkan para anggota komisi tersebut terkenal sebagai tokoh-tokoh yang jujur dan mempunyai integritas. Namun demikian ada juga orang-orang yang meragukan bahwa Komisi Empat itu akan betul-betul mampu memberantas korupsi yang makin merajalela.

Menurut Komisi Empat penyebab berkembangnya korupsi ada tiga hal, yaitu :

- (1) Karena terdorong untuk memenuhi kebutuhan hidup, sebagai akibat pendapatan yang tidak mencukupi
- (2) Karena penyalahgunaan kesempatan untuk memperkaya diri
- (3) Karena penyalahgunaan kekuasaan untuk memperkaya diri.

Untuk mengatasi sebab yang pertama, Komisi Empat mengusulkan dua cara yaitu melalui kenaikan gaji pegawai negeri atau melalui rasionalisasi, tetapi karena kenaikan gaji pegawai negeri akan mengakibatkan tekanan yang hebat pada Anggaran Belanja Negara, maka Komisi Empat menyarankan agar dilaksanakan rasionalisasi atau penyaluran tenaga kerja ke lain bidang yang sesuai dengan keahliannya. Hal ini disebabkan di Indonesia di samping kelebihan tenaga kerja yang tidak diperlukan juga kekurangan tenaga kerja yang ahli, karena itu Komisi Empat menyarankan agar melalui pendidikan dan latihan, tenaga kerja yang kelebihan tersebut dapat disalurkan ke bidang-bidang yang masih kekurangan.

Mengenai tindak korupsi yang disebabkan oleh penyalahgunaan kesempatan serta kekuasaan, Komisi Empat mengusulkan mengambil tindakan secara tegas. Adapun caranya dengan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku tindak korupsi, membuat peraturan yang tegas, serta melakukan pengawasan secara ketat. Untuk itu Komisi Empat mengusulkan agar penegak hukum bertindak tegas dan supaya TPK diperkuat dengan

tenaga-tenaga pokok yang kuat dalam arti berani berpikir dan bertindak objektif berdasarkan keahlian dan pengalaman tanpa pandang bulu. Komisi Empat tetap berpegang pada hukum, tetapi mengingat kecerdikan dan kelicikan koruptor untuk menghilangkan barang-barang bukti, Komisi Empat berpendapat bahwa penegak hukum sudah boleh bertindak berdasarkan petunjuk-petunjuk yang cukup. Meskipun demikian, Komisi Empat juga mengingatkan agar penahanan dan pemeriksaan yang sewenang-wenang dapat dihindari.

Penyelewengan yang terjadi di PN. Pertamina misalnya menurut Komisi Empat karena PN. Pertamina tidak berpegang teguh pada Pasal 33 UUD 1945. Menurut Pasal 33 ayat 2 UUD 1945. **"Kekayaan alam yang terkandung dalam bumi dan air Indonesia dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"**. Dipandang dari segi pengolahan hal ini berarti (1) mencegah pemborosan, (2) penghasilan sebesar-besarnya, jadi keharusan pengolahan menjadi barang industri, (3) penjualan dengan harga setinggi-tingginya, (4) tidak mengobral tetapi menunggu harus yang baik, (5) penggunaan keuntungan untuk dana pembangunan dan (6) pencadangan sebagai kekayaan alam untuk generasi yang akan datang.

Komisi Empat juga menunjukkan beberapa penyelewengan yang dilakukan oleh PN. Pertamina. Di antara kelalaian PN. Pertamina yang utama adalah kelemahannya dalam mengadakan budgeted control. Anggaran perusahaan lebih menyerupai daftar penerimaan dan pengeluaran, tidak merupakan suatu anggaran perusahaan seperti yang dimaksud oleh UU No. 19 Tahun 1960. Penyelewengan yang besar lainnya adalah kelalaian PN. Pertamina untuk membayar pajak, kelalaian untuk menyetorkan dana pembangunan sebesar 50% dari keuntungan bersih kas negara, penyimpangan likuiditas perusahaan pada beberapa bank asing, pembentukan anak-anak perusahaan dalam lingkungan PN. Pertamina, dan lain-lain.^{3 5}

Mengenai Badan Urusan Logistik (BULOG), Komisi Empat menanyakan mengenai biaya yang demikian besar yang disediakan bagi lembaga itu. Adapun yang menjadi permasalahannya

adalah (a) apakah stabilitas harga beras yang dicapai merupakan jasa dari Bulog saja atau tidak? dan (b) apakah pembiayaan yang dikeluarkan Bulog itu benar-benar memadai dengan tujuan yang dicapai.

Setelah mengadakan penelitian, Komisi Empat berkesimpulan bahwa tinggi-rendahnya harga beras ditentukan oleh berbagai faktor, seperti jumlah produksi beras/pangan dalam negeri, kelancaran angkutan, keadaan pasaran beras, persediaan devisa oleh pemerintah untuk impor beras dan lain-lain. Dengan demikian jelas bahwa Bulog bukan merupakan satu-satunya instansi yang menentukan stabilitasi harga beras, karena itu perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi yang baik antara badan tersebut dengan instansi-instansi lain.

Menurut Komisi Empat di antara Bulog dan instansi-instansi yang bersangkutan ternyata tidak ada koordinasi dan sinkronisasi yang baik. Sebaliknya karena luasnya bidang pekerjaan Bulog dan banyaknya uang beredar, terdapat banyak tindakan negatif yang sangat merugikan negara. Kesimpangsiuran yang terjadi karena kurangnya koordinasi, telah menimbulkan beberapa penyelewengan dan hal-hal yang kurang sehat. Sebagai contoh jabatan rangkap, administrasi yang tidak teratur, hutang-hutang yang tidak terurus, serta kegagalan di gudang mengennai susut-simpan dan lain-lain.

Untuk mencegah terjadinya penyelewengan tersebut Komisi Empat mengusulkan (a) agar diadakan pengawasan yang lebih ketat serta tindakan yang tegas terhadap penyelewengan, (b) agar jabatan rangkap ditiadakan, dan (c) agar tugas Bulog dipersempit sehingga struktur organisasinya dapat disederhanakan.

Mengenai masalah pengusahaan hutan, Komisi Empat menganggap perlu diadakan perubahan syarat-syarat pemberian hak pengusahaan hutan. Menurut Komisi Empat pengusahaan hutan harus sungguh-sungguh menjamin pencegahan penghancuran hutan, dibangunnya industri perkayuan, penggunaan kayu-kayu sisa secara efisien dan harga tinggi bagi kayu dan industri kayu yang diekspor. Hal-hal tersebut belum tercermin dalam kontrak-kontrak pengusahaan hutan.

Komisi Empat berpendapat bahwa undang-undang dan peraturan yang mengatur perusahaan hutan masih simpang-siur sehingga sering kali menimbulkan pertentangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagai contoh, Undang-undang No. 1 Tahun 1967 dan Undang-undang No. 5 Tahun 1967 menyimpulkan bahwa hak pengusahaan hutan merupakan proyek pemerintah pusat, tetapi Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 yang masih berlaku memberi wewenang kepada pemerintah daerah untuk memberi izin eksploitasi hutan. Juga memberi wewenang untuk memungut pajak hutan dan pajak hasil hutan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1967, pemerintah daerah juga diberi hak untuk memungut *licence fee* dan *royalties*.

Pada waktu itu Komisi Empat juga sudah mensinyalir adanya praktek-praktek negatif yang dilakukan dalam eksploitasi hutan konsesi, hal mana sangat merugikan negara. Sebagai contoh, pengusaha nasional yang telah memperoleh hak pengusahaan hutan, tidak mengeksploitasinya sendiri melainkan menjual hak tersebut kepada broker atau kontraktor luar negeri dengan harga US \$ 5 per meter kubik. Broker-broker tersebut kemudian mengontrakkannya kepada kontraktor asing dengan mengambil keuntungan yang cukup besar. Kecilnya penghasilan pengusaha nasional jika dibandingkan dengan penghasilan broker asing itu telah mendorong pengusaha nasional yang mendapat konsesi hutan untuk tidak membayar *royalties*, *ado*, dan *licence fee*, akibatnya negara dirugikan.

Penyelewengan lain yang dilakukan oleh perusahaan hutan adalah mengubah batas-batas konsesi dan mengeksploitasi hutan-hutan di wilayah lain yang lebih mudah atau lebih kaya yang sudah dikonsensikan kepada pihak lain. Sebagai contoh adalah masalah Yayasan Maju Kerja yang pada waktu itu menghebohkan.

Untuk mengatasi hal-hal tersebut di atas diusulkan kepada pemerintah agar diadakan pengamatan yang tajam dan diambil tindakan tegas terhadap kasus-kasus salah urus. Kontrak-kontrak konsesi hendaknya diperketat syarat-syaratnya sehingga

menjamin diadakannya pengolahan kayu, penanaman kembali hutan, terjaminnya kelestarian hutan serta penghasilan negara yang tinggi, demikian juga PN. Perhutani perlu dikoreksi.

Kecuali itu Komisi Empat juga memberikan pendapatnya mengenai asisten pribadi. Memang wajar jika presiden mempunyai asisten pribadi, namun Komisi Empat berpendapat bahwa proses *diction making* harus dilakukan dengan menteri, demikian pula dengan pelaksanaan dari keputusan-keputusan tersebut secara rinci. Karena itu jika hal ini tetap berada di tangan menteri dan departemennya, kepentingan negara akan lebih terjamin.

Penyelewengan-penyelewengan yang disinyalir oleh Komisi Empat memang kemudian terbukti kenyataannya. Andaikata saran-saran yang disampaikan oleh komisi itu betul-betul dilaksanakan, maka penyelewengan yang lain kemungkinan besar akan dapat dicegah. Kasimo sebagai anggota Komisi Empat banyak memberikan sumbangan pemikiran terutama yang menyangkut masalah PN. Pertamina, Bulog, dan Kehutanan.

Pada 5 Juli 1966 MPRS mengeluarkan Ketetapan No. XXII/MPRS/1966 yang isinya, **"Pemerintah bersama-sama DPR segera membuat Undang-undang yang mengatur kepartaian, keormasan, dan kekayaan menuju penyederhanaan"** namun proses penyederhanaan itu berlangsung lambat sekali. Dalam pemilihan umum 3 Juli 1971, masih ada sembilan partai politik dan satu golongan karya. Sembilan partai politik itu adalah Partai Katholik, Partai Sarekat Islam Indonesia, Partai Nadhatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Partai Kristen Indonesia, Murba, Partai Nasional Indonesia, Partai Islam Persatuan Tarbiyah Indonesia, dan Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia. Sehubungan hal tersebut, pada 9 Oktober 1971 Presiden Soeharto menyarankan kepada partai-partai agar mereka mengadakan pengelompokan, bahkan Menteri Dalam Negeri Amir Mahmud menganjurkan agar partai-partai politik mengadakan fusi. Pokoknya dalam pemilihan umum yang akan datang harus ada tiga bendera saja, yaitu dua bendera partai dan satu golongan karya. Akhirnya anjuran dari pemerintah itu dilaksanakan juga

oleh sembilan partai politik. Pada 5 Januari 1973, dengan niat beribadah, partai-partai Islam yang terdiri atas Nadhatul Ulama, Partai Serikat Islam Indonesia, Partai Islam Persatuan Tarbiyah Indonesia, dan Partai Muslimin Indonesia berfusi menjadi satu dengan nama Partai Persatuan Pembangunan.

Setelah empat partai Islam mengadakan fusi menjadi Partai Persatuan Pembangunan, pada 10 Januari 1973 partai politik non-Islam yaitu Partai Katholik, Partai Kristen Indonesia, Murba, Partai Nasional Indonesia, dan Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia meleburkan/memfusikan diri menjadi satu wadah kegiatan politik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan nama Partai Demokrasi Indonesia. Sejak itu di Indonesia hanya ada dua partai politik dan satu golongan karya yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Pancasila, dan Golongan Karya.

Turut serta meleburnya Partai Katholik ke dalam Partai Demokrasi Indonesia membuat Kasimo sangat sedih. Bagi Kasimo, Partai Katholik merupakan sarana untuk memperjuangkan kepentingan golongan Katholik maupun sarana bagi golongan Katholik untuk berjuang bagi kepentingan nasional. Namun demikian Kasimo adalah seorang yang berjiwa besar. Seorang yang selalu berpendirian bahwa kepentingan umum didahulukan di atas segala-galanya. Kasimo menyadari bahwa keadaan pada waktu itu sudah jauh berubah dibandingkan dengan zaman 50 tahun sebelumnya. Ia juga merasa yakin bahwa dengan dasar semangat kerukunan di antara golongan-golongan, orang Katholik mampu memperjuangkan kepentingan nasional tanpa saluran partai tersendiri. Hanya disayangkan bahwa pengelompokan partai-partai itu masih didasarkan pada ideologi. Apabila tujuan penyederhanaan partai adalah untuk mengurangi jumlah partai, mengapa tidak konsekuen dibuat dua kelompok saja. Jika memang ingin maju tinggalkanlah pengelompokan yang berbau ideologi. Sebaliknya dalam konstelasi di mana masih dianggap perlu adanya partai Islam secara terpisah, partai yang berdasarkan agama lain pun masih diperlukan termasuk Partai Katholik.

Meskipun agak kecewa dengan perumusan pengelompokan partai itu, Kasimo dengan hati lapang menerima integrasi Partai Katholik ke dalam Partai Demokrasi Indonesia. Sehari setelah Partai Katholik masuk ke dalam Partai Demokrasi Indonesia, Kasimo dengan diantar Drs. Frans Seda menghadap Presiden Soeharto. Dalam pertemuan itu Kasimo antara lain menyatakan kesetiaannya kepada pemerintah sekaligus memberitahukan mengenai rencana Partai Katholik untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-50. Sebagai sumbangan yang terakhir Partai Katholik akan mengadakan seminar studi perbandingan mengenai pelaksanaan sistem demokrasi di negara-negara Asia.

Kasimo yakin bahwa konsensus yang dicapai di antara kelima yang masuk Partai Demokrasi Indonesia akan dapat ditepati. Kasimo memandang masih banyak peluang bagi Partai Katholik untuk mewujudkan cita-citanya. Di dalam Partai Demokrasi Indonesia, Partai Katholik tetap akan memperjuangkan kesejahteraan rakyat sebagai hukum tertinggi (*Salus populi suprema lex*). Demikian juga Partai Katholik akan tetap memperjuangkan Trilogi Perjuangan yaitu demokrasi, pembaharuan, dan pembangunan.³⁷

Kasimo sebagai seorang politikus secara keseluruhan boleh dikatakan berhasil. Cita-cita Kasimo untuk menjadikan golongan Katholik Indonesia sebagai warga negara penuh telah tercapai. Orang Katholik sekarang tidak lagi dianggap sebagai "barisan kaum sana" seperti halnya 50 tahun yang lalu. Orang Katholik tidak lagi dituduh dan dicurigai sebagai antek Belanda, melainkan sebagai warga negara penuh yang mempunyai kedudukan, hak serta kewajiban yang sama seperti warga negara lainnya.

Kasimo sebagai politikus sampai meninggalnya berhasil mempertahankan citranya sebagai seorang politikus yang prinsipial. Kasimo belum pernah menjadi seorang politikus oportunis. Ia selalu bersemboyan, "Teguh pada prinsip, luwes dalam tindak-tanduk".

4.3 Pengaruh dan Tantangan

Secara keseluruhan hidup Kasimo memang berhasil, tetapi keberhasilannya itu merupakan keberhasilan yang penuh pengorbanan baik dirinya sendiri maupun bagi keluarganya. Kasimo merupakan orang yang selalu konsekuen dan betul-betul melaksanakan semboyan *Solus populi suprema lex*. Harus banyak melupakan diri sendiri, melupakan keluarganya.

Kasimo sejak berkeluarga sering meninggalkan keluarganya. Hal ini disebabkan ia disibukkan oleh rapat-rapat partai, sidang-sidang Volksraad dan lain-lain, demikian pula setelah Indonesia merdeka. Kasimo tetap sibuk dan meninggalkan keluarganya, bahkan dalam masa-masa sulit pada saat mana keluarganya sangat membutuhkannya, Kasimo harus meninggalkan mereka, baik selama agresi militer Belanda I maupun pada masa agresi militer Belanda II.

Karena kesibukannya, maka Kasimo menyerahkan pendidikan anak-anaknya kepada istrinya serta para guru di sekolah. Kasimo boleh dikatakan tidak pernah mengajak anak-anaknya berjalan-jalan. Ia keluar rumah dengan istrinya apabila ada undangan perkawinan atau undangan lain yang mengharuskan datang sekalian. Meskipun jauh dengan anak-anak, tetapi sebenarnya Kasimo sangat mencintai keluarganya. Hanya saja Kasimo tidak pernah memperlihatkan perasaannya itu.

Kasimo mendirikan Partai Katholik pada masa pemerintahan Hindia Belanda untuk membuktikan bahwa orang Katholik Indonesia adalah orang Katholik Sejati. Orang Indonesia yang berjiwa nasionalis dan yang dalam bidang kenegaraan mempunyai juga keinginan dan cita-cita yang sama seperti golongan-golongan yang lain. Namun demikian usaha Kasimo tersebut mendapat tantangan yang cukup hebat baik itu di masyarakat maupun di dalam *Volksraad*.

Dalam sidang *Volksraad* 3 Agustus 1933, Kasimo terlibat perdebatan sengit dengan R. Panji Suroso yang menuduh bahwa Kasimo dan golongan Katholik Indonesia bukan orang-orang nasionalis, sebab arah nasionalisme mereka tidak mengikuti naluri nasionalis yang wajar melainkan ditentukan oleh Vikaris Apostolik, yang bukan orang Indonesia. Kasimo kemudian menjawabnya dengan nada emosi bahwa jika R. Panji Suroso merasa mempunyai hak untuk menuduhnya bukan nasionalis sejati. Kasimo juga berhak untuk menuduh R. Panji Suroso bukan nasionalis sejati oleh karena arah nasionalisme R. Panji Suroso tidak mengikuti naluri nasionalis yang wajar, melainkan ditentukan oleh para pemimpin sosialis dari *Nederland Verbond Vak Vereenigingen* (NVV) yang artinya Gabungan Serikat Sekerja Negeri Belanda.

Kasimo mengatakan bahwa kata-kata Panji Suroso itu disebabkan ia kurang mengetahui mengenai kegiatan golongan Katholik pribadi khususnya di negara-negara yang tidak berada di bawah pemerintahan nasional juga karena kurang tahu apa yang terjadi di Philipina, Irlandia, dan Belgia. Pada waktu itu R. Panji Suroso sedang membahas masalah Kerstenings Politiek yang mempersoalkan pengiriman zending dan misi ke Pulau Bali. Menurut R. Panji Suroso, pengiriman zending dan misi ke Pulau Bali akan menyebabkan perpecahan. Sebagai bukti kebenaran ucapannya, ia menunjukkan bahwa di bidang politik golongan Kristen berdiri terlepas dari penduduk lainnya.³⁸

Perjuangan Kasimo di dalam *Volksraad* pada tahun-tahun pertama memang ditunjukkan untuk meyakinkan para pemimpin golongan lain bahwa golongan Katholik Indonesia adalah orang-orang nasionalis sejati. Ternyata cita-cita Kasimo untuk menjadikan golongan Katholik Indonesia sebagai orang Indonesia sejati dapat tercapai. Orang Katholik Indonesia tidak lagi dianggap sebagai barisan kaum sana.

Dalam mencapai cita-cita, Kasimo sering mengalami percobaan dan tantangan. Pada akhir tahun 1950an Kasimo sempat bentrok dengan kelompok HJ. Sumarto dan Joko Tirtono dari komisariat Yogyakarta yang pada waktu itu mengancam akan

mendirikan Partai Katholik Merdeka, tetapi Kasimo tetap menolak. Tantangan yang terberat adalah ketika Kasimo menentang Konsepsi Presiden pada bulan Februari 1957. Sebagai akibat dari sikap Kasimo tersebut, di dalam Kabinet Karya di bawah pimpinan Perdana Menteri Ir. Juanda (9 April 1957 – 10 Juli 1959) Partai Katholik tidak diikutsertakan. Partai Katholik pada waktu itu dianggap sebagai partai yang bersikap oposisi terhadap kebijaksanaan presiden dan pemerintah.

Di antara orang-orang Katholik sendiri, tidak semuanya setuju dengan sikap Kasimo, bahkan di dalam hirarki gereja banyak orang yang tidak setuju. Salah satu di antaranya adalah Uskup Agung Mgr. Albertus Sugiyopranoto SY. Beliau berpendapat bahwa kebijaksanaan yang ditempuh Partai Katholik tidak tepat. Hal ini disebabkan di Indonesia tidak dikenal oposisi loyal seperti di negara-negara barat. Di Indonesia oposisi dipandang berbahaya bagi negara, karena itu lebih baik bekerja sama dan memerangi komunisme dan musuh-musuh gereja lainnya dari dalam pemerintahan. Cara ini akan lebih berhasil.

Di kalangan Partai Katholik banyak juga yang mengkritik kebijaksanaan Kasimo yang menolak konsepsi presiden. Mereka yang mengkritik itu antara lain Joko Tritono dan Hj. Sumarto dari komisariat Yogyakarta. Di dalam kongres Partai Katholik diselenggarakan pada tahun 1958 di Surakarta kebijaksanaan Kasimo tersebut mendapat serangan dari kanan-kiri. Selama tiga hari tiga malam kongres Partai Katholik digunakan untuk menilai kebijaksanaan DPP Partai Katholik di bawah kepemimpinan Kasimo.

Belum pernah kepemimpinan Kasimo diserang habis-habisan seperti dalam kongres di Surakarta ini. Pada waktu itu kebijaksanaan Kasimo dikaitkan juga dengan sikapnya yang tidak mau menggunakan jabatan menteri atau jabatan lainnya untuk mencari kedudukan dan fasilitas-fasilitas seperti lazimnya dilakukan oleh partai politik lainnya, bahkan pada waktu itu di kalangan generasi muda terdapat pendapat bahwa dengan Partai Katholik mereka akan tetap menjadi orang miskin dan tidak mempunyai apa-apa.³⁹

Meskipun mendapat kritikan yang pedas, tetapi Kasimo tetap pada pendiriannya. Dalam hal-hal yang menyangkut soal prinsip, Kasimo selalu teguh, tidak mudah tergoyahkan.

CATATAN

1. Y. Adisubroto, *IJ. Kasimo Hidup dan Perjuangannya*, Jakarta. PT. Gramedia, 1980, halaman 3.
2. *Ibid*, halaman 7.
3. Marwati Djoened Poesponegoro Nugroho Notokusanto (edt). *Sejarah Nasional Indonesia V*, Jakarta: Proyek IDSN, 1982/1983, halaman 146.
4. Y. Adisubroto, *Op. Cit*, halaman 10.
5. *Ibid*, halaman 14-15.
6. *Ibid*, halaman 19 20.
7. *Ibid*, halaman 21.
8. *Ibid*, halaman 29 dan 31.
9. Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notokusanto (edt), *Sejarah Nasional VI*. Jakarta: Proyek IDSN, 1982/1983 halaman 5 dan 19. Lihat juga A.H. Nasution *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia I*. Bandung: Disjarah dan Angkasa 1977, halaman 104-105.
10. Y. Adisubroto, *Op. Cit*, halaman 45 46.
11. Marwati Djoened Poesponegoro Nugroho Notokusanto (edt), *Sejarah Nasional Indonesia VI*, *Op. Cit*, halaman 90 dan 94.
12. *Ibid*, halaman 114 dan 121.
13. Y. Adisubroto, *Op. Cit*, halaman 54.
14. *Ibid*, halaman 57.

15. TB.Simatupang, *Laporan Dari Banaran*, Jakarta: Sinar Harapan, 1980, halaman 15.
16. Y. Adisubroto, *Op. Cit*, halaman 63.
17. *Ibid*, halaman 94-95.
18. *Ibid*, halaman 108 dan 111
19. *Ibid*, halaman 12 13.
20. *Ibid*, halaman 24 dan 26.
21. *Ibid*, halaman 17.
22. AK. Pringgodigdo *Sedjarah Pergerakan Rakjat Indonesia*, Djakarta. Dian Rakjat 1960, halaman 35.
23. Y. Adisubroto, *Op. Cit*, halaman 22 23 dan 27.
24. *Ibid*, halaman 33-36.
25. *Ibid*, halaman 38-39.
26. AK. Pringgodigdo, *Op. Cit*, halaman 155-156.
27. Y. Adisubroto, *Op. Cit*, halaman 58.
28. *Ibid*, halaman 71.
29. *Ibid*, halaman 74-75.
30. *Ibid*, halaman 78.
31. Ali Sastroamidjojo, *Tonggak-Tonggak Di Perjalananku*. Jakarta. PT. Kinta, 1974, halaman 372-373.
32. Y. Adisubroto, *Op. Cit*, halaman 84.
33. *Ibid*, halaman 89-90.
34. Marwati Djoened Poesponegoro Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia VI*, *Op. Cit*, halaman 313-314.
35. Y. Adisubroto, *Op. Cit*, halaman 96-98. Lihat juga Deliar Noer, *Mohammad Hatta Biografi Politik*. Jakarta LP3ES, 1990, halaman 683.
36. Y. Adisubroto, *Op. Cit*, halaman 99.
37. *Ibid*, halaman 103-104.
38. *Ibid*, halaman 38.
39. *Ibid*, halaman 86.

BAB V PENUTUP

Mohammad Hatta, HOS. Tjokroaminoto, dan IJ. Kasimo adalah tokoh-tokoh pemikir paham kebangsaan yang tidak asing lagi bagi bangsa Indonesia. Mohammad Hatta dan Soekarno adalah proklamator dan sangat populer sebagai dwitunggal pada masa revolusi.

Pribadi dan pemikiran-pemikiran Mohammad Hatta terbentuk di lingkungan keluarga yang sangat taat pada agama Islam dan anti penjajah. Selanjutnya melalui proses pendidikannya baik di Indonesia maupun di luar negeri (Belanda), melalui bacaan-bacaannya, dan "semangat zaman" akhirnya semua itu makin memperkokoh pribadi dan pemikiran-pemikiran Moh Hatta. Pendirian, sikap dan pemikiran-pemikiran Hatta yang tegas, teguh, dan bebas, tercermin dalam perjuangannya baik selama masa pergerakan, masa merebut kemerdekaan maupun masa mengisi kemerdekaan. Tepatlah apa yang dikatakan oleh George Mc. T. Kohen¹ mengenai Hatta sebagai berikut:

- (a) Pendirian Hatta mengenai ketepatan dan kebebasan intelektual serta penolakannya berbicara secara doktriner dan klise.
- (2) Hatta selalu memegang teguh dan tidak mudah melepaskan prinsip-prinsip yang dianutnya. Dia tidak pernah melepaskan keyakinannya bahwa Indonesia harus mempertahankan politik luar negeri yang bebas dan memihak – boleh memihak mengenai masalah tertentu pada waktu tertentu.

tetapi tidak dengan mengorbankan kemerdekaannya dan kebebasannya menentukan pilihan untuk jangka panjang bagi kepentingan negara mana pun, atas dasar apa pun, baik dasar ekonomi maupun dasar lain.

- (3) Pendirian Hatta yang kokoh mengenai pemerintahan yang benar-benar demokratis sangat terkenal dan selalu konsisten.
- (4) Pendirian Hatta yang tegas dinyatakan bahwa sentralisme pemerintahan Indonesia tidak cocok karena luasnya wilayah dan variasi kedaerahan yang sangat heterogen. Untuk mencapai persatuan yang murni berdasar keserasian sosial dan politik, perlu diadakan otonomi daerah yang lebih besar.
- (5) Hatta sangat yakin akan pandangan dan pemikirannya tentang koperasi pedesaan akan berhasil apabila diurus oleh tenaga yang terlatih dan diberi bantuan dana permulaan yang cukup. Selanjutnya dikatakan bahwa koperasi sebagai sarana untuk meringankan beban para petani dan membantu mempertahankan tanah mereka. Dia yakin bahwa koperasi adalah sarana yang paling baik untuk menjamin tercapainya keadilan sosial yang lebih besar bagi mayoritas pedesaan yang menjadi sasaran eksploitasi, atau dalam kata-kata Hatta sendiri "jembatan ke arah demokrasi ekonomi".
- (6) Pandangan dan pemikiran Hatta tentang sosio-ekonomis Islam dalam masyarakat Indonesia dinyatakan dengan jelas dan tegas bahwa yang paling cocok untuk Indonesia adalah sistem ekonomi campuran dengan sektor sosialis yang besar, sektor koperasi yang luas – terutama pada tingkat pedesaan – dan lingkungan kapitalis yang terbatas sehingga usaha kecil dapat terus hidup berdampingan dengan sektor-sektor yang lebih besar. Selanjutnya "kelas menengah kapitalis sebelum masyarakat yang pada dasarnya sosialis dapat dimantapkan, ataupun untuk memperoleh tenaga administratif yang diperlukan untuk menjalankan aparat masyarakat sosialis". Yang dicita-citakan Hatta sistem ekonomi

campuran yang sangat sosialis atas dasar landasan politik yang demokratis.

Berbeda dengan Moh Hatta, maka HOS. Tjokroaminoto dilahirkan di tengah keluarga priyayi ningrat dan alim, serta di daerah yang sering dilanda kekacauan akibat ulah dan tingkah polah para "warok". Situasi yang demikian itu ternyata mempunyai pengaruh pula terhadap pribadi dan pemikiran-pemikiran HOS. Tjokroaminoto. Proses pembentukan pribadi dan pemikiran HOS. Tjokroaminoto ini makin berkembang dan mantap setelah ia terjun di tengah-tengah kancah perjuangan dan pergerakan nasional.

Lontaran pemikiran dan pendapat-pendapat HOS. Tjokroaminoto sangat luas meliputi bidang politik, ekonomi, dan kebudayaan serta agama Islam.² Pokok-pokok pendapat dan lontaran pemikiran HOS. Tjokroaminoto antara lain adalah:

- (1) Mengenai tanah *erfpacht*, HOS. Tjokroaminoto sangat menentang bentuk persewaan tanah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Sikap dan pemikiran-pemikiran HOS. Tjokroaminoto tentang masalah ini telah diuraikan terdahulu. Ia secara tegas mengatakan bahwa *erfpacht* adalah persoalan politik yang perlu mendapat perhatian dari kaum politisi dan menyangkut persoalan kemajuan ekonomi bangsa dan negara.
- (2) Pendapat dan pemikiran-pemikiran HOS. Tjokroaminoto tentang Islam dan sosialisme dapat dikaji dalam buku-bukunya antara lain *Islam dan Sosialisme*, *Tarich Islam*, *Program Azas dan Program Tandhingan Partai Sarekat Islam Indonesia*, dan *Reglement Umum Bagi Ummat Islam*. Tentang Islam dan sosialisme telah diuraikan terdahulu.
- (3) HOS. Tjokroaminoto adalah seorang nasionalis yang perjuangan politiknya dilandasi dengan ajaran-ajaran agama Islam yang kuat. Melalui pidato-pidatonya yang berapi-api, ia melontarkan kritik-kritik tajam terhadap Pemerintah Kolonial Belanda, akibatnya ia sering keluar-masuk penjara.
- (4) Pandangan dan pemikiran-pemikirannya di bidang kebudayaan dikemukakan di depan Kongres PSII XIX pada

tahun 1933 di Jakarta dengan judul *Cultur dan Adat Islam*. Tentang hal ini ia berpendapat bahwa kesetiaan dalam mempertahankan kebudayaan/kultur sesuatu bangsa sangat penting artinya untuk kelangsungan hidup bangsa.³ Selanjutnya dikatakan bahwa:

- (a) Tidak ada satu kultur pun yang dapat hidup terus sejalan dengan perubahan zaman jika kultur itu bertentangan dengan hukum-hukum kehidupan dan kemajuan serta bertentangan dengan akal manusia yang memeluknya.
- (b) Tidak ada satu kultur yang bisa hidup terus atau mengalami tiap-tiap zaman yang akan datang kalau kultur itu tidak bekerja atau dikerjakan untuk pemeliharaannya dan penyiarannya.
- (c) Tidak ada satu kultur yang bisa hidup terus atau mengalami tiap zaman yang akan datang di dalam suatu kalangan di mana ia tidak mempunyai daya upaya yang cakap untuk menyatakan atau mempertunjukkan dirinya.
- (d) Agar supaya bisa hidup terus atau mengalami tiap-tiap zaman yang akan datang, tiap-tiap kultur harus mempertunjukkan dirinya dalam rupa, upacara atau simbol (tanda pengenalan) yang nyata-nyata.⁴

Berbeda dengan Moh Hatta dan HOS. Tjokroaminoto, maka IJ. Kasimo dilahirkan di tengah-tengah keluarga Jawa asli yang tinggal di dalam benteng Kraton Kasultanan Yogyakarta. Sejak kecil ia telah dididik dan akrab dengan budaya Jawa. Masa sekolahnya akrab dan dimantapkan dalam suasana agama Katholik. Situasi dan kondisi yang demikian itu ternyata mampu membentuk pribadi dan pemikiran-pemikiran IJ. Kasimo sebagai manusia Jawa penganut agama Katholik yang taat dan sekaligus sebagai nasionalis yang gigih. Kesemuanya itu terlihat dari aktivitas dan perjuangannya selama masa pergerakan nasional masa merebut kemerdekaan dan masa mengisi kemerdekaan. Pemikiran-pemikiran kebangsaan IJ.

Kasimo yang sangat menonjol nampak baik pada masa ia memimpin Partai Katholik Indonesia yang cukup lama dijabatnya, maupun pada saat ia menjabat sebagai menteri yang menelorkan konsep terkenal dengan "Kasimo Plan".

CATATAN

1. George Mc. T. Kahin, *Muhammad Hatta Sebagai Pemikir Bebas* dalam *Bung Hatta Pribadinya dalam Kenangan*, Penyunting Meutia Farida Swasono, Penerbit Sinar Harapan dan Universitas Indonesia, Jakarta 1980. Cetakan I, halaman 455-459.
2. Anhar Gonggong, *HOS. Tjokroaminoto*, Depdikbud, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek IDSN, Jakarta 1985 halaman 70.
3. *Ibid*, halaman 98.
4. *Ibid*, halaman 104.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Subroto, Y, *IJ. Kasimo Hidup dan Perjuangannya*. PT. Gramedia. Jakarta. 1980.
- Ahmad Soebardjo Djajadisurjo, *Kesadaran Nasional*, Penerbit Gunung Agung, Jakarta, 1978.
- Amelz, *HOS. Tjokroaminoto Hidup dan Perjuangannya*, Jilid I, Bulan Bintang, Jakarta, 1952.
- , *HOS Tjokroaminoto Hidup dan Perjuangannya*, Jilid II, Bulan Bintang, Jakarta, tanpa tahun.
- Anderson, B, *Some Aspects of Indonesia Politics Under the Japanes Occupation*, Ithaca Cornell University Press, 1961.
- Anhar Gongong. *HOS. Tjokroaminoto*, Proyek Biografi Pahlawan Nasional, Depdikbud, Jakarta, 1975.
- Ali Sastroamidjojo, *Tonggak-Tonggak di Perjalananku*, PT. Kinta. Jakarta, 1974.
- Brian May, *The Indonesian Tragedy*, London: Routledge and Kegan Paul, 1978.
- Cindi Adam, *Sukarno Penyambung Lidah Rakyat*.
- Deliar Noer, *The Modern Muslim Movement in Indonesia, 1900-1942*, edem 2 Kualalumpur, Oxford University Press, 1978.
- , *Mohammad Hatta Biografi Politik*, LP3ES, Jakarta, 1990.

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, 1988.
- Elizabeth, E. Graves, *The Minangkabau Response to Dutch*, Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project, 1981.
- George, S. Manahole, *The Japanese Occupation of Indonesia, Perlende to Independence*, disertasi Ph.D. Cornell University, 1967.
- Harsono Tjokroaminoto, *Menelusuri Jejak Ayahku*, nomor 2, Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 1983.
- Hatta, Mohammad, *PNI Mendapat Pertjobaan*, dalam Persatuan Indonesia, 10 April 1930.
- , *Daulat Rakyat*, 10 Juli 1933.
- , *Organisasi Kita*, dalam Kumpulan Pidato.
- , *Indonesia Free*, dalam Portrait of a Patriot.
- , *Post and Future*, Pidato Gelar Doktor Honoris Causa dari UGM, 27 November 1956, Ithaca Cornell Modern Indonesia Project. 1960.
- , *Menuju Negara Hukum*, Yayasan Idayu, Jakarta, 1975.
- , *Bung Hatta Menjawab*, Gunung Agung, Jakarta, 1978.
- , *Memoir*, Tintamas, Jakarta, 1978.
- , *Pengertian Pancasila*, Yayasan Idayu, Jakarta, 1981.
- Herbert Feith, *The decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, Ithaca: Cornell University Press, 1962.
- Julinar Idrus Koestomo, *Bung Hatta, "Pembimbing Rakyat dan Keluarga Kami"*, dalam Meutia F. Edy Swasono (edt) *Bung Hatta: Pribadinya dalam Keuangan*, Sinar Harapan dan UI, Jakarta. 1980.
- Kohin, George, Mc.T. *Nationalism and Revolution in Indonesia*, Ithaca: Cornell University Press, 1952.
- , *Mohammad Hatta sebagai Pemikir Bebas*, dalam Meutia F. Edy Swasono (edt) *Bung Hatta Pribadinya dalam Keuangan Sinar Harapan dan Universitas Indonesia*, Cetakan I, Jakarta. 1980.

- Legge, John, D., Soekarno Sebuah Biografi Politik, Sinar Harapan, Cetakan I, Jakarta, 1985.
- Marwati Djoened Poesponegoro Nugroho Notosusanto (edt) *Sejarah Nasional Indonesia V*, Proyek IDSN, Depdikbud, Jakarta, 1982/1983.
- , *Sejarah Nasional Indonesia VI*, Proyek IDSN Depdikbud, Jakarta, 1982/1983.
- Nasution, AH, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia I*, Sisjarah AD, dan Angkasa, Bandung, 1977.
- Pringgodigdo, AK, *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 1960.
- Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru*, Sejarah Pergerakan Nasional Dari Kolonialisme sampai Nasionalisme, jilid 2, PT. Gramedia, Jakarta, 1992.
- Simatupang, TB, *Laporan dari Banaran*, Sinar Harapan, Jakarta, 1980.
- Suratmin, *Raden Mas Suryopranoto*, Proyek IDSN, Depdikbud, Jakarta, 1981/1982.
- Suratmin, *Dr. Sutomo*, Proyek IDSN, Depdikbud, Jakarta, 1982/1983.

